Pemerintah Provinsi
Jawa Barat

disdukcapil Jabar

Profil Perkembangan Kependudukan

Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Barat

Tim Penyusun

Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Pengarah

Gubernur Jawa Barat

Pembina

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat

Ketua

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Wakil Ketua

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Sekretaris

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Anggota

Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait, Instansi Vertikal Terkait dan Pakar/Tenaga Alhi

Sambutan Gubernur

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sampurasun,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan ***Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024*** dapat terselesaikan dengan baik.

Sebagaimana diketahui, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyajikan data kependudukan berskala provinsi. Data tersebut diolah dan disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah, berdasarkan data yang dihimpun melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Penyusunan *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024* ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, dunia usaha, lembaga penelitian, maupun masyarakat umum, akan ketersediaan data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah atas upaya dan kerja kerasnya dalam menyusun dan menerbitkan buku ini.

Saya memahami bahwa dalam proses pengumpulan dan penyusunan data kependudukan, terdapat kemungkinan perbedaan angka akibat perbedaan konsep, metodologi, serta teknik pengumpulan data yang digunakan. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, data kependudukan yang telah

dikonsolidasikan secara nasional dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui sistem SIAK adalah data yang sah dan wajib digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, serta pencegahan kriminalitas.

Data kependudukan memegang peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jawa Barat. Ketersediaan data yang valid dan mutakhir menjadi landasan utama dalam merancang kebijakan publik yang responsif, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta memperkuat upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu, pengelolaan data kependudukan harus terus ditingkatkan kualitas dan ketepatannya melalui sinergi antarlembaga yang berkelanjutan.

Saya yakin bahwa data statistik kependudukan yang disajikan dalam buku profil ini telah melalui proses verifikasi yang ketat dan dapat dimanfaatkan secara luas oleh para pengguna data. Di masa mendatang, saya berharap kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan instansi terkait dapat terus diperkuat, sehingga kualitas data yang disajikan semakin informatif, akurat, dan faktual.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan ***Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024*** ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin melalui inovasi dan kolaborasi.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandung, Juni 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
GUBERNUR JAWA BARAT,

DEDI MULYADI

Kata Pengantar Kepala Dinas

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, ***Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024*** dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan buku ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Profil perkembangan kependudukan ini disusun dengan menyajikan data statistik kependudukan yang bersumber dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024, yang berasal dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Data yang disediakan oleh SIAK telah dikonsolidasikan secara nasional dan telah melalui proses pembersihan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sehingga dapat dipastikan keabsahan dan keandalannya.

Publikasi ***Profil Perkembangan Kependudukan*** ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh instansi/lembaga pengguna untuk berbagai keperluan, antara lain pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, pencegahan kriminalitas, serta untuk keperluan strategis lainnya. Data kependudukan yang valid, akurat, dan terkini sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*), merancang program pembangunan yang tepat sasaran, serta dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di tingkat daerah. Pengelolaan data kependudukan yang optimal juga menjadi pondasi dalam

meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya visi Jawa Barat saat ini, yaitu *"Jawa Barat Istimewa: Lembur Diurus, Kota Ditata"*.

Kami menyadari bahwa penyusunan *Buku Profil* ini masih belum sempurna, mengingat adanya keterbatasan sumber daya dan kendala teknis yang dihadapi dalam proses pengumpulan dan pengolahan data. Oleh karena itu, kami membuka diri terhadap segala saran, masukan, dan kritik yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan penerbitan buku profil di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan dan penerbitan ***Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024*** ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh pihak yang membutuhkan. Aamiin yaa Rabbal 'Aalamiin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandung, Juni 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,

dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM.
Pembina Utama Madya

Daftar Isi

Tim Penyusun i
Sambutan Gubernur ii
Kata Pengantar Kepala Dinas iv
Daftar Isi vi
Daftar Tabel x
Daftar Gambar xii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Penyusunan 1
1.2. Tujuan 2
1.3. Ruang Lingkup 2
1.4. Pengertian Umum 3
BAB 2 GAMBARAN UMUM DAERAH 8
2.1. Letak Geografis Daerah 8
2.2. Kondisi Demografis Daerah 10
2.3. Gambaran Ekonomi Daerah 11
2.3.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha 12
2.3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024 (c-to-c) 12
2.3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Triwulan IV-2024 Terhadap Triwulan IV-2023 (y-on-y) 13
2.3.1.3. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Triwulan IV-2024 Terhadap Triwulan III-2024 (q-to-q) 14
2.3.2. PDRB Menurut Pengeluaran 15
2.3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024 (c-to-c) 15
2.3.2.2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2024 Terhadap Triwulan IV-2023 (y-on-y) 15
2.3.2.3. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2024 Terhadap Triwulan III-2024 (q-to-q) 16
2.4. Potensi Daerah 17
BAB 3 SUMBER DATA 20
3.1. Registrasi 20
3.2. Non Registrasi 20
3.3. Data Dari Lintas Sektor 20
BAB 4 PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN 21

4.1. Kuantitas Penduduk 21
4.1.1. Jumlah Dan Sebaran Penduduk 21
4.1.1.1. Jumlah Dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Kelamin 21
4.1.1.2. Kepadatan Penduduk 24
4.1.1.3. Laju Pertumbuhan Penduduk 27
4.1.2. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi 28
4.1.2.1. Jumlah Dan Proporsi Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin 28
4.1.2.1.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 28
4.1.2.1.2. Penduduk Usia Median 29
4.1.2.1.3. Rasio Jenis Kelamin 31
4.1.2.1.4. Piramida Penduduk 35
4.1.2.1.5. Rasio Ketergantungan 37
4.1.2.2. Jumlah Dan Proporsi Penduduk Menurut Status Kawin 39
4.1.2.2.1. Angka Perkawinan Kasar 43
4.1.2.2.2. Angka Perkawinan Umum 44
4.1.2.2.3. Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur 46
4.1.2.2.4. Rata-Rata Umur Kawin Pertama (SMAM) 47
4.1.2.2.5. Angka Perceraian Kasar 49
4.1.2.2.6. Angka Perceraian Umum 50
4.1.2.3. Keluarga 52
4.1.2.3.1. Jumlah Keluarga Dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga 52
4.1.2.3.2. Hubungan Dengan Kepala Keluarga 53
4.1.2.3.3. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur 54
4.1.2.3.4. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin 55
4.1.2.3.5. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin 57
4.1.2.3.6. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan 58
4.1.2.3.7. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Pekerjaan 59
4.1.2.4. Penduduk Menurut Karakteristik Sosial 60
4.1.2.4.1. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan 60
4.1.2.4.2. Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan 62
4.1.2.4.3. Jumlah Penduduk Menurut Agama 63
4.1.2.4.4. Jumlah Penduduk Menurut Kecacatan 64
4.1.2.5. Kelahiran 65

4.1.2.5.1. Jumlah Kelahiran 65
4.1.2.5.2. Angka Kelahiran Kasar 66
4.1.2.6. Kematian 68
4.1.2.6.1. Jumlah Kematian 68
4.1.2.6.2. Angka Kematian Kasar 69
4.2. Kualitas Penduduk 71
4.2.1. Kesehatan 71
4.2.1.1. Kelahiran 72
4.2.1.1.1. Angka Kelahiran Menurut Umur 72
4.2.1.1.2. Angka Kelahiran Total 73
4.2.1.1.3. Rasio Anak Perempuan 74
4.2.1.2. Kematian 76
4.2.1.2.1. Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/ IMR/ AKB) 77
4.2.1.2.2. Angka Kematian Neonatal (Kematian Bayi Baru Lahir/NNDR) 78
4.2.1.2.3. Angka Kematian Post Neonatal (Angka Kematian Lepas Baru Lahir/PNNDR) 80
4.2.1.2.4. Angka Kematian Anak 81
4.2.1.2.5. Angka Kematian Balita 83
4.2.1.2.6. Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate/AKI) 85
4.2.2. Pendidikan 86
4.2.2.1. Angka Melek Huruf 86
4.2.2.2. Angka Partisipasi Kasar 88
4.2.2.3. Angka Partisipasi Murni 93
4.2.2.4. Angka Penduduk Putus Sekolah 99
4.2.3. Ekonomi 103
4.2.3.1. Proporsi Dan Jumlah Tenaga Kerja Dan Angkatan Kerja 103
4.2.3.1.1. Jumlah Dan Proporsi Tenaga Kerja 103
4.2.3.1.2. Jumlah Dan Proporsi Penduduk Bekerja Dan Menganggur 106
4.2.3.2. Angka Partisipasi Angkatan Kerja 109
4.2.3.3. Jumlah Dan Proporsi Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan 110
4.2.4. Sosial 112
4.2.4.1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 112
4.2.4.2. Proporsi Penduduk Penyandang Cacat 115
4.2.4.3. Proporsi Penduduk Miskin Penerima Askeskin 116

4.3. Mobilitas Penduduk 119
4.3.1. Mobilitas Permanen 119
4.3.1.1. Migrasi Masuk 120
4.3.1.2. Migrasi Keluar 121
4.3.1.3. Migrasi Neto 123
4.3.1.4. Migrasi Bruto 124
4.3.2. Mobilitas Non Permanen 126
4.3.3. Urbanisasi 127
4.3.3.1. Persentase Penduduk Kota 128
4.3.3.2. Rasio Kota Dan Desa 129
BAB 5 KEPEMILIKAN DOKUMEN 131
5.1. Kepemilikan Kartu Keluarga 131
5.2. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk 133
5.3. Kepemilikan Akta 134
5.3.1. Akta Kelahiran 135
5.3.2. Akta Perkawinan 136
5.3.3. Akta Perceraian 138
5.3.4. Akta Kematian 139
5.3.5. Akta Pengakuan Anak 141
5.4. Kepemilikan Surat Keterangan Orang Terlantar 143
BAB 6 KESIMPULAN 152

Daftar Tabel

Tabel 2-1 Laju Pertumbuhan Penduduk dari Tahun 2015-2024 10
Tabel 4-1 Jumlah dan Proporsi Penduduk berdasarkan Kabupate/.Kota dan Jenis Kelamin .. 22
Tabel 4-2 Proporsi Penduduk Kabupaten/Kota Penyangga Ibu Kota 23
Tabel 4-3 Proporsi Penduduk Kabupaten/Kota Bandung Raya 24
Tabel 4-4 Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kabupaten/Kota 25
Tabel 4-5 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2015-2024 28
Tabel 4-6 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 29
Tabel 4-7 Jumlah Penduduk dan Usia Median di Kabupaten/Kota 29
Tabel 4-8 Rasio Jenis Kelamin berdasarkan Kabupaten/Kota 31
Tabel 4-9 Rasio Jenis Kelamin berdasarkan Kelompok Umur 33
Tabel 4-10 Rasio Ketergantungan berdasarkan Kabupaten/Kota 37
Tabel 4-11 Jumlah Penduduk berdasarkan Status Kawin 40
Tabel 4-12 Jumlah Penduduk berdasarkan Status Kawin dan Kelompok Umur 40
Tabel 4-13 Jumlah Penduduk berdasarkan Status Perkawinan Belum Kawin dan Kawin 41
Tabel 4-14 Jumlah Penduduk berdasarkan Status Perkawinan Cerai Hidup dan Cerai Mati .. 42
Tabel 4-15 Angka Perkawinan Kasar berdasarkan Kabupaten/Kota 43
Tabel 4-16 Angka Perkawinan Umum berdasarkan Kabupaten/Kota 44
Tabel 4-17 Angka Perkawinan menurut Kelompok Umur 46
Tabel 4-18 Rata-Rata Umur Kawin Pertama berdasarkan Kabupaten/Kota 47
Tabel 4-19 Angka Perceraian Kasar berdasarkan Kabupaten/Kota 49
Tabel 4-20 Angka Perceraian Umum berdasarkan Kabupaten/Kota 50
Tabel 4-21 Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga berdasarkan Kabupaten/Kota 52
Tabel 4-22 Hubungan Dengan Kepala Keluarga 53
Tabel 4-23 Kepala Keluarga berdasarkan Kelompok Umur 54
Tabel 4-24 Kepala Keluarga berdasarkan Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin 56
Tabel 4-25 Kepala Keluarga berdasarkan Status Perkawinan 57
Tabel 4-26 Kepala Keluarga berdasarkan Pendidikan 58
Tabel 4-27 Kepala Keluarga berdasarkan Kelompok Pekerjaan 59
Tabel 4-28 Jumlah Penduduk menurut Pendidikan 60
Tabel 4-29 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 62
Tabel 4-30 Jumlah Penduduk menurut Agama 63
Tabel 4-31 Jumlah Penduduk menurut Kecacatan 64
Tabel 4-32 Jumlah Kelahiran berdasarkan Kabupaten/Kota 65
Tabel 4-33 Angka Kelahiran Kasar (CBR) berdasarkan Kabupaten/Kota 67
Tabel 4-34 Jumlah Kematian berdasarkan Kabupaten/Kota 68
Tabel 4-35 Angka Kematian Kasar berdasarkan Kabupaten/Kota 70
Tabel 4-36 Angka Kelahiran Menurut Umur 72
Tabel 4-37 Angka Kelahiran Total 73
Tabel 4-38 Rasio Anak dan Perempuan berdasarkan Kabupaten/Kota 74
Tabel 4-39 Data Kematian dalam Indikator Kesehatan 76
Tabel 4-40 Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/ IMR/ AKB) 77
Tabel 4-41 Angka Kematian Neonatal (Kematian Bayi Baru Lahir/NNDR) 79

Tabel 4-42 Angka Kematian Post Neonatal (Angka Kematian Lepas Baru Lahir/PNNDR)..... 80
Tabel 4-43 Angka Kematian Anak..... 82
Tabel 4-44 Angka Kematian Balita..... 83
Tabel 4-45 Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate/ AKI)..... 85
Tabel 4-46 Angka Melek Huruf..... 87
Tabel 4-47 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar..... 88
Tabel 4-48 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama..... 89
Tabel 4-49 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah (SMA, SMK, dan pendidikan lainnya yang setara)..... 91
Tabel 4-50 Angka Partisipasi Kasar di Provinsi Jawa Barat..... 92
Tabel 4-51 Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar..... 94
Tabel 4-52 Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama..... 95
Tabel 4-53 Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah (SMA, SMK, dan pendidikan lainnya yang setara)..... 96
Tabel 4-54 Angka Partisipasi Murni di Provinsi Jawa Barat..... 97
Tabel 4-55 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Pekerjaan..... 103
Tabel 4-56 Proporsi Tenaga Kerja..... 104
Tabel 4-57 Proporsi Angkatan Kerja..... 106
Tabel 4-58 Proporsi Bukan Angkatan Kerja..... 108
Tabel 4-59 Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)..... 109
Tabel 4-60 Jumlah dan Proporsi Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan..... 111
Tabel 4-61 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)..... 113
Tabel 4-62 Proporsi Penduduk Penyandang Cacat..... 115
Tabel 4-63 Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Provinsi Jawa Barat..... 117
Tabel 4-64 Migrasi Masuk..... 120
Tabel 4-65 Migrasi Keluar..... 121
Tabel 4-66 Migrasi Neto..... 123
Tabel 4-67 Migrasi Bruto..... 125
Tabel 4-68 Persentase Penduduk Kota..... 128
Tabel 4-69 Rasio Kota dan Desa..... 129
Tabel 5-1 Kepemilikan Kartu Keluarga..... 131
Tabel 5-2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk..... 133
Tabel 5-3 Akta Kelahiran..... 135
Tabel 5-4 Akta Perkawinan..... 136
Tabel 5-5 Akta Perceraian..... 138
Tabel 5-6 Akta Kematian..... 139
Tabel 5-7 Perbedaan Pengesahan, Pengangkatan dan Pengakuan Anak..... 141
Tabel 5-8 Data Pengesahan, Pengangkatan dan Pengakuan Anak..... 141
Tabel 5-9 Data Existing Anak Asuh di SATPEL GRA Balita..... 143
Tabel 5-10 Data Anak yang sedang melakukan masa percobaan pengasuhan dengan Calon Orang Tua Angkat di SATPEL GRA Balita..... 145
Tabel 5-11 Data Anak yang sudah diadopsi di SATPEL GRA Balita..... 149

Daftar Gambar

Gambar 2-1 Peta Provinsi Jawa Barat....8
Gambar 2-2 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat 11
Gambar 2-3 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c/persen)....13
Gambar 2-4 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y/persen)....13
Gambar 2-5 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q/persen)....14
Gambar 2-6 Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (c-to-c/persen)....15
Gambar 2-7 Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y/persen)....16
Gambar 2-8 Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (q-to-q/persen)....17
Gambar 4-1 Kabupaten/Kota dengan Kepadatan Penduduk Tertinggi....26
Gambar 4-2 Kabupaten/Kota dengan Kepadatan Penduduk Terendah....26
Gambar 4-3 Usia Median Penduduk Kabupaten/Kota....31
Gambar 4-4 Rasio Jenis Kelamin....33
Gambar 4-5 Rasio Jenis Kelamin berdasarkan Kelompok Umur....34
Gambar 4-6 Piramida Penduduk Provinsi Jawa Barat....36
Gambar 4-7 Rasio Ketergantungan Kabupaten/Kota....39

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan

Salah satu isu strategis dari pembangunan suatu wilayah adalah isu kependudukan. Isu kependudukan bersifat lintas sektor, bukan saja berkaitan dengan kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk saja, isu kependudukan juga berhubungan dengan pengintegrasian berbagai aspek kedalam perencanaan pembangunan dan pencapaian pembangunan kependudukan itu sendiri. Upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan, sebagai wujud dinamika penduduk dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar kedepan pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas dan kualitas penduduk serta pengarahan mobilitas penduduk dan penataan persebarannya yang didukung oleh upaya-upaya perlindungan dan pemberdayaan penduduk dan peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang wawasan kependudukan bahkan sejak usia dini.

Dengan demikian data kependudukan memegang peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan publik, pengalokasian anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, pencegahan kriminal dan evaluasi hasil-hasil pembangunan, baik bagi Pemerintah maupun pihak lain termasuk dunia usaha. Oleh karena itu ketersediaan data perkembangan kependudukan sampai pada data by name by address menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program-program kependudukan. Untuk itu pengembangan sistem informasi kependudukan yang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk tujuan intervensi yang berbeda-beda merupakan kebutuhan utama untuk segera diaplikasikan, sehingga makin lengkap dan akurat data kependudukan yang tersedia, maka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akan semakin mudah dan tepat sasaran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik menyangkut masalah kependudukan, masalah potensi sumber daya daerah maupun informasi tentang kewilayahan lainnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi kependudukan dan keluarga. Data dan informasi tersebut wajib digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan dan pembangunan (Pasal 49).

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

(SIAK) dan tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan (Pasal 83). Pentingnya penyajian data perkembangan kependudukan tersebut kemudian diperkuat dalam pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa "Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan seperti pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal". Hal tersebut yang mendasari pentingnya penyajian data perkembangan kependudukan dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Untuk memenuhi kebutuhan informasi mengenai data kependudukan ini perlu disusun Profil Perkembangan Kependudukan yang disajikan secara berkelanjutan. Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan dibuat untuk memberikan gambaran kondisi kependudukan di Daerah, serta prospek kependudukan di masa yang akan datang. Di sisi lain penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini merupakan wujud pemanfaatan data kependudukan yang tersebar diberbagai instansi.

Data dan informasi kependudukan yang diperlukan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan mengacu kepada hasil registrasi penduduk yang bersumber dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yang merupakan salah satu subtansi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Elemen data hasil registrasi kependudukan yang dipergunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan meliputi data yang berhubungan dengan kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk dan kepemilikan dokumen kependudukan.

1.2. Tujuan

Menyajikan Profil Perkembangan Kependudukan skala Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 sebagai salah satu informasi yang digunakan sebagai perencanaan pembangunan khususnya bagi stakeholder di Provinsi Jawa Barat, dan umumnya bagi seluruh pihak yang memerlukan data terkait dengan perkembangan kependudukan di Jawa Barat dalam bentuk ikhtisar meliputi kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk.

1.3. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup pembahasan dalam Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah:

1. Kuantitas penduduk, meliputi komposisi dan persebaran penduduk;
2. Kualitas penduduk meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial;
3. Mobilitas penduduk meliputi mobilitas permanen, mobilitas non permanen dan urbanisasi; dan
4. Kepemilikan dokumen kependudukan.

1.4. Pengertian Umum

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat;
3. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hal lainnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
4. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
5. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
6. Data Kependudukan adalah data perorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
7. Data Konsolidasi Bersih (DKB) adalah data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia setiap semester, yang bersumber dari data kependudukan Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan atau dibersihkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
8. Proporsi penduduk adalah jumlah dan informasi penduduk menurut pengelompokan tertentu seperti umur dan jenis kelamin;
9. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan (Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013);
10. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
11. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);

12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
13. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan atau nama lainnya (Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013);
14. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
15. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal (Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1992);
16. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak (UU No 52 Tahun 2009);
17. Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010);
18. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006);
19. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
20. Kematian atau mortalitas menurut World Health Organization (WHO) adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup (Badan Pusat Statistik);
21. Rasio Jenis Kelamin adalah suatu angka yang menunjukan perbandingan jenis kelamin antara banyaknya penduduk laki-laki dan penduduk perempuan disuatu daerah pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita;
22. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas

(keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja);

23. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009);
24. Mobilitas Penduduk Permanen (migrasi) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional);
25. Mobilitas Penduduk Non Permanen (circucaltion/sirkuler) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk tidak menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif. Mobilitas penduduk non permanen dibagi menjadi dua yaitu ulang-alik melaju (commuting) dan menginap/mondok;
26. Penduduk Musiman merupakan salah satu jenis mobilitas penduduk non permanen yang bekerja tidak pada daerah domisilinya dan menetap dalam kurun waktu lebih dari satu hari tetapi kurang dari satu tahun dan dilakukan secara berulang;
27. Mobilitas Penduduk Ulang Alik atau nglaju (commuting) adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari yang sama;
28. Migrasi Kembali (return migration) adalah banyaknya penduduk yang pada waktu pendataan bertempat tinggal didaerah yang sama dengan tempat lahir dan pernah bertempat tinggal didaerah yang berbeda;
29. Migrasi Semasa Hidup (life time migration) adalah bentuk migrasi di mana pada waktu diadakan pendataan tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat kelahirannya;
30. Migrasi risen (recent migration) adalah bentuk migrasi melewati batas wilayah administrasi (Desa/Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi) dimana pada waktu diadakan pendataan bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu;
31. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi;
32. Urbanisasi adalah suatu proses bertambahnya konsentrasi penduduk diperkotaan dan atau proses perubahan suatu daerah perdesaan menjadi perkiraan, baik secara fisik maupun ukuran-ukuran spasial dan/atau bertambahnya fasilitas perkotaan, serta lembaga-lembaga sosial, maupun perilaku masyarakatnya;
33. Penduduk Usia Kerja (Produktif) adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun;
34. Penduduk Yang Termasuk Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15-64 Tahun) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari kerja atau mempersiapkan suatu usaha;

35. Angka Partisipasi Angkatan Kerja adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja;
36. Pengangguran adalah orang yang termasuk angkatan kerja, namun pada saat pendataan/ survey atau sensus tidak berkerja dan sedang mencari kerja;
37. Angka Pengangguran adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja;
38. Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun kebawah dan penduduk berusia 64 tahun keatas;
39. Lahir Hidup adalah suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya didalam kandungan, dimana si bayi menunjukan tanda- tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusar atau gerakan otot. Banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya;
40. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan;
41. Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR) adalah banyaknya kelahiran hidup pada tahun tertentu tiap 1000 penduduk;
42. Angka Kelahiran Umum (General Fertility Rate/GFR) banyaknya kelahiran setiap 1000 Wanita yang berusia 15- 49 tahun dalam satu tahun;
43. Angka Kematian Bayi Baru Lahir adalah banyaknya kematian baru lahir, usia kurang dari satu bulan (0-28) hari pada suatu periode per 1000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
44. Angka Kematian Bayi Lepas Baru Lahir adalah banyaknya kematian bayi lepas baru lahir (usia 1-11 bulan) pada suatu periode per 1000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
45. Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/IMR) adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun (9-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
46. Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate/MMR) adalah banyaknya kematian ibu pada waktu hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan per 100.000 kelahiran hidup, tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya;
47. Pengeluaran Untuk Makanan adalah proporsi pengeluaran yang dipergunakan untuk mengkonsumsi makanan dibandingkan dengan total pengeluaran (makanan dan bukan makanan);
48. Angka Partisipasi Kasar /APK adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu;
49. Angka Partisipasi Murni/APM adalah persentase jumlah peserta didik Sekolah Dasar usia 7-12 tahun, jumlah peserta didik Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama usia 13-15 tahun, jumlah peserta didik Sekolah Lanjutan Tingkat Atas usia 16-18 tahun dan jumlah peserta didik Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta usia 19-24

tahun dibagi jumah penduduk kelompok usia dari masing-masing jenjang pendidikan;

50. Pemanfaatan Data Kependudukan adalah pemanfaatan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang merupakan satu- satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan seperti: pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

BAB 2

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Letak Geografis Daerah

Secara geografis Provinsi Jawa Barat terletak di antara 5050`–7050` Lintang Selatan dan 104048`–108048` Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah yang terdiri atas: Secara geografis terletak pada 106° 22’ 13” Bujur Timur-108° 50’ 1,4” Bujur Timur, dan 5° 54’ 49,58” Lintang Selatan–7° 49’ 15,52” Lintang Selatan, dengan batas wilayahnya meliputi:

1. Sebelah Utara: berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta;
2. Sebelah Timur: berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah;
3. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Samudera Indonesia; dan
4. Sebelah Barat: berbatasan dengan Provinsi Banten.

Gambar 2-1 Peta Provinsi Jawa Barat

Kondisi morfologi wilayah Provinsi Jawa Barat sangat beragam. Di wilayah sebelah Utara terdiri dari dataran rendah dan pesisir pantai yang relatif landai. Wilayah Tengah didominasi oleh dataran tinggi yang bergunung dan berbukit yang membujur dari Barat hingga ke Timur Pulau Jawa. Titik tertingginya adalah Gunung Ciremai, yang berada di sebelah Barat Daya Kota Cirebon. Sedangkan untuk wilayah Selatan, didominasi oleh daerah berbukit-bukit dengan pesisir pantai yang memiliki kontur terjal. Wilayah Jawa Barat terletak pada jalur Circum Pacific dan Mediteran, sehingga sebagian besar wilayahnya termasuk daerah labil yang ditandai dengan masih banyaknya gunung berapi aktif sehingga memiliki resiko gempa bumi. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tahun 2021, iklim daerah Jawa Barat termasuk tropis dengan suhu udara rata-rata antara 16°C-34°C dan curah

hujan yang beragam. Curah hujan di Jawa Barat menurut data BMKG berada pada rentang curah hujan 1.000 - 4.000 mm per tahun. Rata-rata hujan setiap bulan menunjukkan perbedaan yang jelas antara periode musim kemarau dengan curah hujan kurang dari 150 mm, dan periode musim hujan dengan curah hujan lebih dari 150 mm.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi dan Pulau Tahun 2022 Secara administrasi pemerintahan, wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi dalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten dan 9 kota, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Pangandaran serta Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar, serta terdiri dari 627 Kecamatan, 645 Kelurahan dan 5.312 Desa. Masyarakat Provinsi Jawa Barat terdiri dari sebagian besar Suku Sunda sehingga dalam kehidupan sehari-hari penduduk dalam berkomunikasi memakai Bahasa Sunda dengan berbagai macam dialek daerah dan Bahasa Indonesia. Sebagian kecil penduduk memakai Bahasa Jawa Cirebonan dan Jawa Dermayon sebagai bahasa sehari-hari, terutama pada Kabupaten/Kota seperti Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon.

Provinsi Jawa Barat memiliki karakteristik topografi wilayah pegunungan curam di selatan, wilayah lereng bukit yang landai di tengah, wilayah dataran luas di utara, dan wilayah aliran sungai. Wilayah pegunungan curam (9,5 persen) terletak di bagian selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut, dan wilayah lereng bukit yang landai (36,48 persen) terletak di bagian tengah dengan ketinggian 10-1.500 mdpl, serta wilayah daratan landai (54,02 persen) terletak di bagian utara dengan ketinggian 0-10 mdpl.

Kondisi topografi Pesisir Utara Jawa Barat yang terdiri atas dataran pantai dan rawa alluvial pantai dengan kemiringan lereng 0–5 persen, merupakan daerah yang bertopografi landai, perairan dangkal, memiliki substrat lumpur, berpasir dan berawa, pola arus yang dipengaruhi arus Laut Jawa, serta bervegetasi mangrove dan terumbu karang. Adapun, kondisi topografi wilayah Pantai Selatan Jawa Barat merupakan pegunungan dan perbukitan terjal, perairan dalam dengan banyak batu karang dan pantai berpasir, pola arus laut yang kuat yang dipengaruhi keberadaan Samudera Indonesia.

Aktivitas geologi di wilayah Provinsi Jawa Barat menghasilkan beberapa zona fisiografi yang satu sama lain dapat dibedakan berdasarkan morfologi, petrologi, dan struktur geologinya. Van Bemmelen (1949), membagi daerah Jawa Barat ke dalam 4 (empat) besar zona fisiografi, masing-masing dari utara ke selatan adalah Zona Dataran Pantai Jakarta, Zona Bogor, Zona Bandung, dan Zona Pegunungan Selatan.

Di Provinsi Jawa Barat terdapat banyak pola kelurusan bentang alam yang diduga merupakan hasil proses pensesaran. Jalur sesar tersebut umumnya berarah barat-timur, utara-selatan, timur laut-barat daya, dan barat laut-tenggara. Secara regional, struktur sesar

berarah timurlaut-baratdaya dikelompokkan sebagai Pola Meratus, sesar berarah utara-selatan dikelompokkan sebagai Pola Sunda, dan sesar berarah barat-timur dikelompokkan sebagai Pola Jawa. Struktur sesar dengan arah barat-timur umumnya berjenis sesar naik, sedangkan struktur sesar dengan arah lainnya berupa sesar mendatar. Sesar normal umum terjadi dengan arah bervariasi.

Dari sekian banyak struktur sesar yang berkembang di Provinsi Jawa Barat, ada 3 (tiga) struktur regional yang memegang peranan penting, yaitu Sesar Cimandiri, Sesar Baribis, dan Sesar Lembang. Ketiga sesar tersebut untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh van Bemmelen (1949) dan diduga ketiganya masih aktif hingga sekarang.

Kondisi morfologi wilayah Provinsi Jawa Barat sangat beragam, di wilayah sebelah utara terdiri dari dataran rendah dan pesisir pantai yang relatif landai. Wilayah tengah didominasi oleh dataran tinggi yang bergunung dan berbukit yang membujur dari barat hingga timur Pulau Jawa. Titik tertingginya adalah Gunung Ciremai, yang berada di sebelah barat daya Kota Cirebon, sedangkan untuk wilayah selatan didominasi oleh daerah berbukit-bukit dengan pesisir pantai yang memiliki kontur terjal. Wilayah Jawa Barat terletak pada jalur Circum Pacific dan Mediteran, sehingga sebagian besar wilayahnya termasuk daerah labil yang ditandai dengan masih banyaknya gunung berapi aktif sehingga memiliki resiko gempa bumi.

2.2. Kondisi Demografis Daerah

Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia. Pada Tahun 2023 jumlah penduduk Jawa Barat tercatat sebanyak **49.899.992** jiwa. Dari jumlah tersebut penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah **25.268.145** jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah **24.631.847** jiwa. Pada Tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah penduduk Jawa barat menjadi **51.316.378** jiwa terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah **25.997.794** jiwa **(50,66 %)** dan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah **25.318.584** jiwa **(49.34 %)**. Adapun perkembangan penduduk dalam 10 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2-1 Laju Pertumbuhan Penduduk dari Tahun 2015-2024

NO	TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LPP
1	2015	21.976.271	21.219.417	43.195.688	-
2	2016	22.275.690	21.464.469	43.740.159	1,26
3	2017	22.590.755	21.771.384	44.362.139	1,34
4	2018	22.915.986	22.245.339	45.161.325	1,49
5	2019	23.223.993	22.555.604	45.779.597	1,46
6	2020	23.893.514	23.249.109	47.142.623	1,76
7	2021	24.423.410	23.796.684	48.220.094	1,85
8	2022	24.987.540	24.352.130	49.339.670	1,92
9	2023	25.268.145	24.631.847	49.899.992	1,82
10	2024	25.997.794	25.318.584	51.316.378	1,93

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan pada Tabel 2-1 jumlah penduduk Jawa Barat dalam kurun waktu sepuluh tahun terus mengalami peningkatan baik dianalisis berdasarkan jenis kelamin atau pun berdasarkan jumlah total keseluruhan penduduk Jawa Barat. Adapun laju peningkatan jumlah penduduk Jawa Barat dalam selama sembilan tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

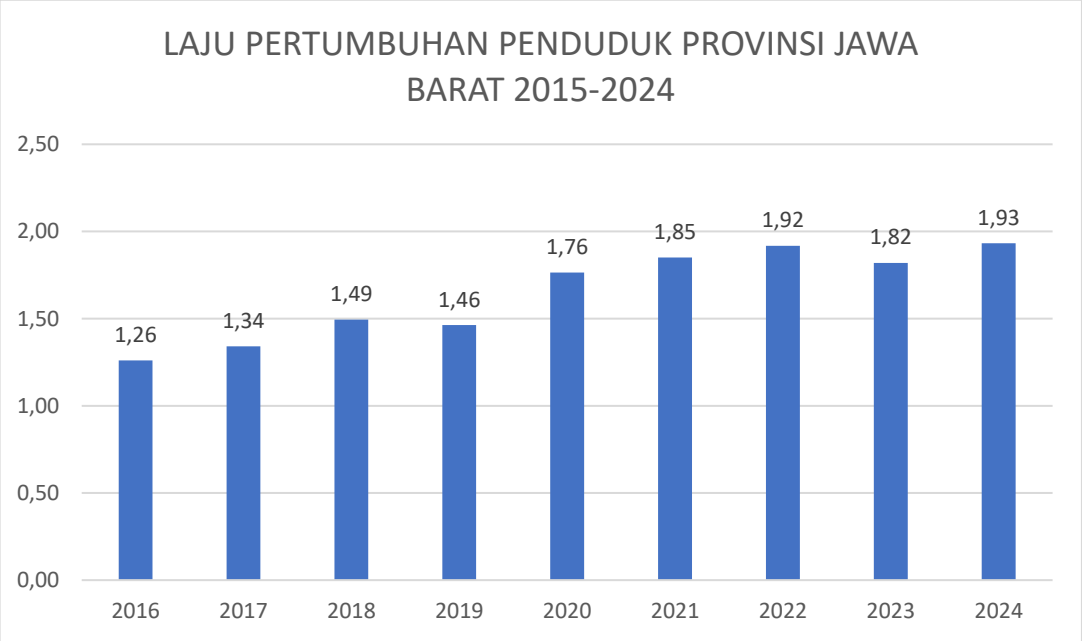

Gambar 2-2 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat

Gambar 2.2 menunjukkan tren kenaikan jumlah penduduk selama sembilan tahun terakhir. Dilihat berdasarkan grafik di atas persentase laju penduduk pada Tahun 2024 sebesar 1,93%. Peningkatan penduduk harus ditangani dengan baik dan komprehensif, pemerintah melalui Dinas/Instansi terkait perlu melakukan upaya pengendalian jumlah penduduk secara terpadu dan berkesinambungan serta diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Selain itu pertambahan jumlah penduduk, akan menimbulkan permasalahan baru bagi Pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan hidup penduduknya. Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain: fasilitas perumahan, pendidikan, lapangan pekerjaan, sarana sosial, kesehatan dan sebagainya. Keadaan sosial budaya Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan terlihat sebagai masyarakat yang ramah, memiliki toleransi yang tinggi dan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, diliputi semangat gotong royong yang tinggi serta masih mempertahankan adat istiadat yang ada.

2.3. Gambaran Ekonomi Daerah

Berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 13/02/Th. XXVII, 5 Februari 2025 tentang Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Triwulan IV- 2024, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. berikut adalah Gambaran Umum tentang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat :

1. Perekonomian Jawa Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan IV-2024 mencapai Rp 724,69 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 448,06 triliun.
2. Ekonomi Jawa Barat triwulan IV-2024 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 2,05 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Perusahaan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 23,53 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 41,08 persen.
3. Ekonomi Jawa Barat triwulan IV-2024 terhadap triwulan IV-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,99 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,33 persen.
4. Ekonomi Jawa Barat tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,95 persen melambat dibanding capaian tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 5,00 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,34 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan sebesar 12,09 persen.
5. Sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2024 dari sisi lapangan usaha disumbang oleh Industri Pengolahan dengan andil sebesar 1,51 persen. Adapun dari sisi pengeluaran, sumbangan terbesar berasal dari Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3,00 persen.

2.3.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha

2.3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024 (c-to-c)

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat sepanjang tahun 2024 menunjukkan kinerja yang positif. Menguatnya ekonomi Jawa Barat didorong oleh pertumbuhan positif pada sebagian besar sektor ekonomi. Ekonomi Jawa Barat tahun 2024 dapat tumbuh baik sebesar 4,95 persen (c-to-c), hal ini menunjukkan roda perekonomian kembali bergerak hampir merata pada beberapa sektor ekonomi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,34 persen seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dengan momen libur Natal dan Tahun Baru. Diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,73 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 8,20 persen; dan Jasa lainnya sebesar 7,93 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebagai salah satu lapangan usaha yang memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 3,52 persen dan 4,85 persen.

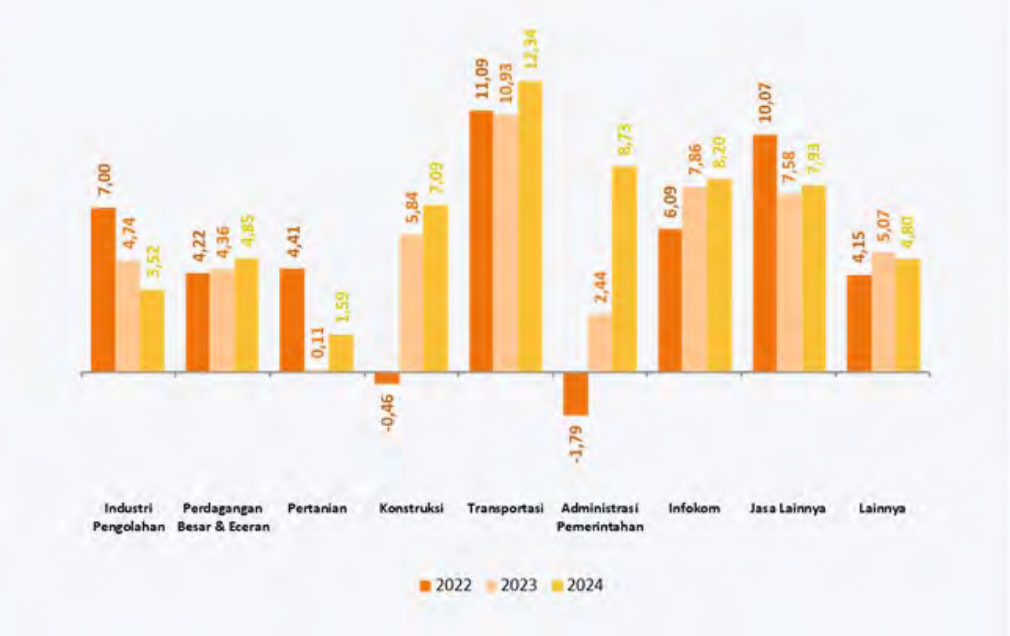

Gambar 2-3 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c/persen)

2.3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Triwulan IV-2024 Terhadap Triwulan IV- 2023 (y-on-y)

Ekonomi Jawa Barat triwulan IV-2024 dibanding triwulan IV-2023 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen. Pertumbuhan ekonomi didorong oleh beberapa lapangan usaha dominan yang menunjukkan kinerja baik pada triwulan tersebut, seperti Industri Pengolahan tumbuh 2,33 persen; Perdagangan tumbuh 6,54 persen dan Pertanian sebesar 18,99 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Jasa Perusahaan sebesar 11,21 persen; Transportasi dan Pergudangan tumbuh 9,23 persen; Jasa lainnya sebesar 8,40 persen; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 6,94 persen.

Gambar 2-4 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y/persen)

2.3.1.3. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Triwulan IV-2024 Terhadap Triwulan III-2024 (q-to-q)

Perekonomian Jawa Barat semakin baik dengan peningkatan mobilitas masyarakat pada triwulan IV-2024. Ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 2,05 persen dibandingkan triwulan III- 2024. Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha, kecuali di beberapa kategori yaitu Jasa Keuangan dan Asuransi yang turun sebesar -7,09 persen; Industri Pengolahan sebesar -0,96 persen; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar -0,64 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah Jasa Perusahaan sebesar 23,53 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 17,18 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,20 persen dan Jasa Lainnya sebesar 10,67 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebagai salah satu lapangan usaha dominan mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar -0,96 persen dan 4,53 persen.

Struktur PDRB Jawa Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2024 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 41,39 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,46 persen; Konstruksi sebesar 8,45 persen; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 8,42 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Jawa Barat mencapai 72,71 persen.

Gambar 2-5 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q/persen)

2.3.2. PDRB Menurut Pengeluaran

2.3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024 (c-to-c)

Sepanjang tahun 2024 perekonomian Jawa Barat mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,95 persen. Pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan seluruh komponen pengeluaran. Pada sisi pengeluaran, kinerja tertinggi ditunjukan oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 12,09 persen namun hal itu terkoreksi oleh Komponen Impor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 15,07 persen, sehingga ekspor neto tumbuh sebesar 2,15 persen. Komponen Pengeluaran dengan kinerja tertinggi selanjutnya adalah Komponen Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 7,89 persen; diikuti oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,96 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,01 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 1,39 persen.

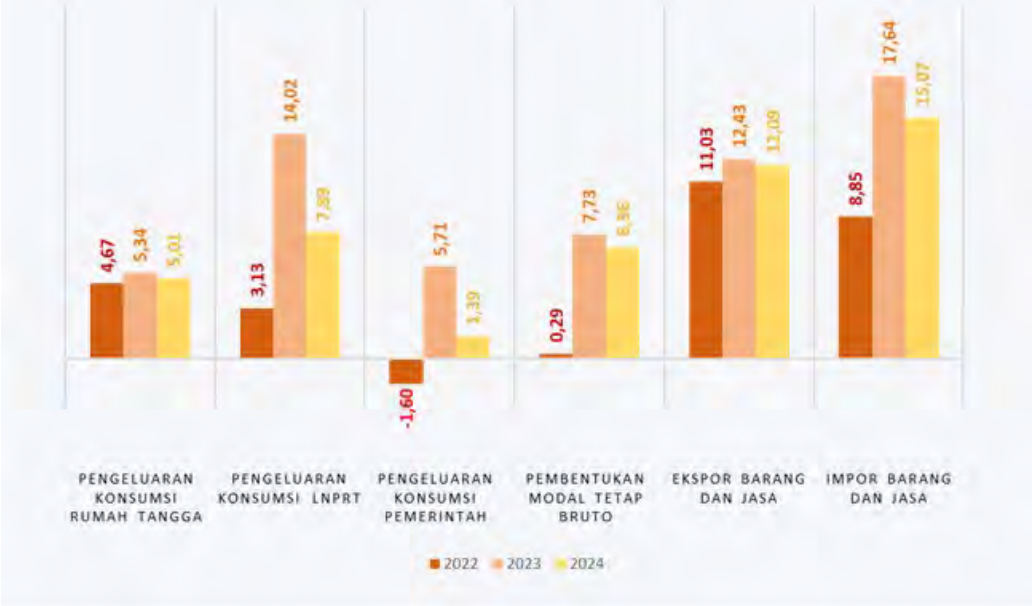

Gambar 2-6 Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (c-to-c/persen)

2.3.2.2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2024 Terhadap Triwulan IV-2023 (y-on-y)

Perekonomian Jawa Barat pada triwulan IV-2024 mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,02 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada triwulan IV-2023 (y-on-y). Pertumbuhan ini ditopang oleh pertumbuhan beberapa komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang mengalami pertumbuhan sebesar 6,33 persen, sementara Komponen Impor Barang dan Jasa juga tumbuh sebesar 5,18 persen, sehingga secara ekspor neto tumbuh sebesar 11,67 persen. Komponen dengan pertumbuhan tertinggi selanjutnya adalah Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh sebesar 5,35 persen; diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,05 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga

Nonprofit (PK-LNPRT) sebesar 4,06 persen. Sementara itu, kontraksi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 3,24 persen.

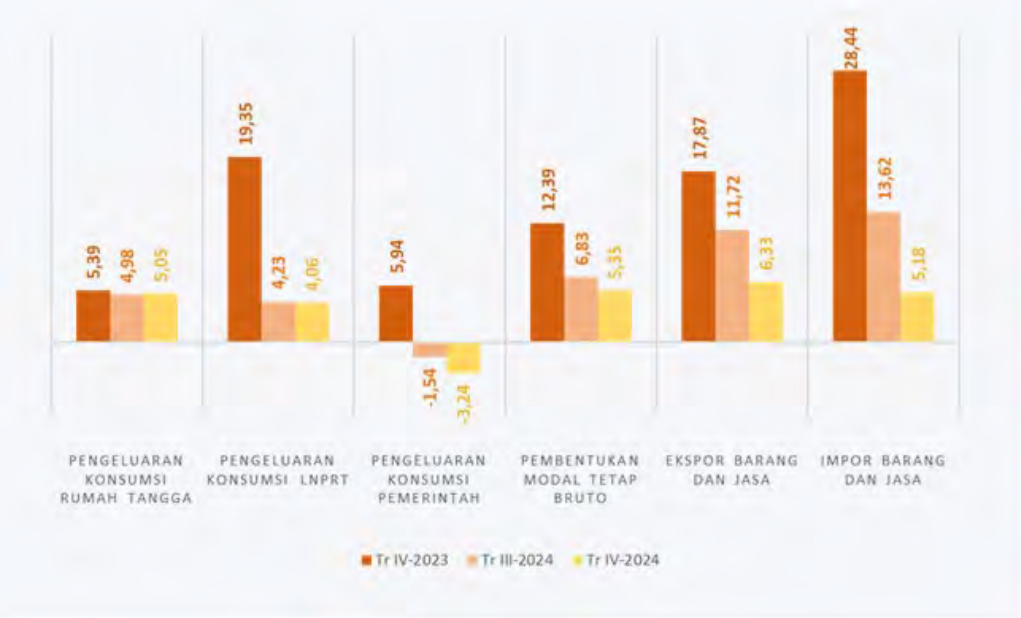

Gambar 2-7 Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y/persen)

2.3.2.3. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2024 Terhadap Triwulan III-2024 (q-to-q)

Perkonomian Jawa Barat triwulan IV-2024 dibanding triwulan III-2024 tumbuh sebesar 2,05 persen (q-to-q). Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh Komponen Pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 41,08 persen; diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 3,75 persen; lalu Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 3,06 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,85 persen; dan Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 0,47 persen. Sementara itu kontraksi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 3,84 persen, sehingga menyebabkan ekspor neto mengalami kontraksi cukup tinggi sebesar 19,09 persen.

Struktur PDRB Jawa Barat menurut pengeluaran triwulan IV-2024 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Jawa Barat masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Barat yaitu 66,04 persen; diikuti oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 59,12 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 25,00 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 6,33 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi lembaga Nonprofit (PK-LNPRT) sebesar 0,68 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 57,21 persen.

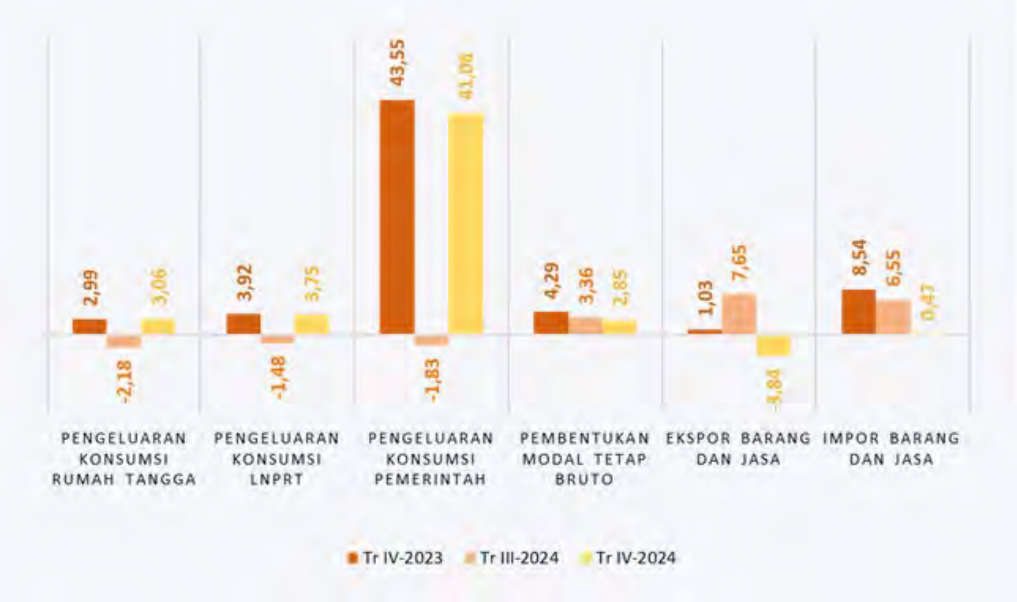

Gambar 2-8 Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (q-to-q/persen)

2.4. Potensi Daerah

Pertanian tetap menjadi sektor penting bagi perekonomian Jawa Barat, meskipun kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mengalami penurunan. Untuk meningkatkan produksi, berbagai upaya dilakukan, seperti intensifikasi melalui penggunaan teknologi pertanian, ekstensifikasi dengan perluasan lahan, diversifikasi komoditas pertanian, serta rehabilitasi lahan yang telah mengalami degradasi. Pada subsektor tanaman pangan, luas panen padi mencapai 1.475.362,09 hektar dengan total produksi sebesar 8.626.879,91 ton, menghasilkan beras sebanyak 4.981.868,86 ton. Selain padi, produksi hortikultura juga cukup signifikan, dengan produksi pisang mencapai 14.252.398,14 kwintal, serta tomat sebagai sayuran utama dengan hasil 2.600.519 kwintal. Dalam bidang biofarmaka, kapulaga dan jahe menjadi produk unggulan dengan produksi masing-masing mencapai 89.945.587 kg dan 48.774.309 kg.

Sektor perkebunan di Jawa Barat terbagi menjadi perkebunan rakyat, perkebunan negara, dan perkebunan swasta. Komoditas unggulan yang dihasilkan antara lain teh, kelapa, kelapa sawit, tebu, dan karet. Perkebunan kelapa dalam memiliki luas terbesar, yaitu 144.487 hektar, sementara jambu mete memiliki luas paling kecil, yaitu hanya 20 hektar. Dari segi produksi, kelapa deres menjadi komoditas utama dengan hasil produksi mencapai 102.455 ton.

Jawa Barat memiliki kawasan hutan yang luas, terdiri dari tiga jenis, yaitu hutan lindung seluas 230.122,22 hektar, kawasan suaka alam dan pelestarian alam seluas 172.179,78 hektar, serta hutan produksi yang mencapai 180.009,43 hektar. Produksi kayu bulat yang dihasilkan dari sektor kehutanan ini mencapai 65.823 meter kubik. Keberadaan kawasan hutan ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta mendukung berbagai kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam.

Sektor peternakan di Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan populasi ternak besar, kecil, dan unggas yang cukup tinggi. Sapi potong memiliki populasi sebanyak 366.389 ekor, sementara sapi perah mencapai 99.692 ekor. Produksi daging sapi tercatat sebesar 85.241.703 kg, sementara produksi ayam broiler mencapai 857.576.785 kg. Dengan produksi yang cukup besar ini, sektor peternakan menjadi salah satu penopang kebutuhan protein hewani bagi masyarakat Jawa Barat dan sekitarnya.

Sektor perikanan Jawa Barat terdiri dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap dari laut mencapai 265.709 ton, sementara produksi dari perairan darat mencapai 16.055 ton, sehingga total produksi perikanan tangkap mencapai 281.119 ton. Selain perikanan tangkap, sektor perikanan budidaya juga berkembang pesat, dengan berbagai jenis ikan air tawar yang banyak dibudidayakan di daerah-daerah dengan sumber air yang melimpah.

Dalam bidang energi dan pertambangan, konsumsi listrik di Jawa Barat terus meningkat. Jumlah pelanggan listrik mencapai 17.563.127 pelanggan dengan daya terpasang sebesar 33.690,11 MVA. Energi listrik yang terjual mencapai 61,64 GWh, menunjukkan tingginya kebutuhan listrik di berbagai sektor, termasuk industri, perkantoran, dan rumah tangga. Selain itu, sektor penyediaan air bersih juga berkembang, dengan 22 perusahaan air bersih yang melayani sekitar 2 juta pelanggan.

Industri manufaktur merupakan salah satu sektor unggulan di Jawa Barat, dengan jumlah industri besar dan sedang mencapai 8.714 perusahaan yang mempekerjakan sekitar 1.893.884 tenaga kerja. Total output industri besar dan sedang pada tahun 2022 mencapai Rp 3.697.139,65 miliar. Sementara itu, industri mikro dan kecil juga mengalami pertumbuhan, dengan jumlah perusahaan mencapai 641.639 unit dan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.579.015 orang. Dengan potensi industri yang besar, Jawa Barat menjadi salah satu pusat manufaktur utama di Indonesia.

Pariwisata di Jawa Barat terus berkembang dengan banyaknya fasilitas akomodasi yang tersedia. Hotel berbintang di wilayah ini berjumlah 620 dengan total kamar sebanyak 67.250 dan tempat tidur sebanyak 106.035. Selain itu, terdapat 2.505 akomodasi non-bintang dengan 45.899 kamar dan 68.858 tempat tidur. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang pada Desember 2024 mencapai 58,56%, sementara TPK hotel non-bintang sebesar 26,85%. Angka ini mencerminkan tingginya minat wisatawan terhadap destinasi wisata di Jawa Barat.

Sektor transportasi di Jawa Barat didukung oleh infrastruktur jalan yang memadai, dengan total panjang jalan mencapai 21.491,89 km. Dari total panjang jalan tersebut, sekitar 73,18% telah diaspal, dengan 70,81% dalam kondisi baik. Selain itu, populasi kendaraan bermotor di Jawa Barat terus meningkat, dengan sepeda motor sebagai moda transportasi paling dominan, mencapai 14.119.518 unit atau sekitar 82,79% dari total kendaraan. Mobil penumpang tercatat sebanyak 2.317.179 unit, sedangkan jumlah bus/microbus mencapai 28.511 unit dan angkutan kota/desa sebanyak 84.123 unit.

Secara keseluruhan, potensi Jawa Barat di berbagai sektor menunjukkan pertumbuhan yang positif dan beragam. Dari sektor pertanian hingga industri manufaktur, serta dari pariwisata hingga transportasi, Jawa Barat memiliki kekuatan ekonomi yang besar dan terus berkembang. Upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi di setiap sektor akan menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini.

BAB 3

SUMBER DATA

3.1. Registrasi

Registrasi kependudukan adalah proses pencatatan resmi oleh pemerintah terhadap peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, serta perubahan alamat. Data yang diperoleh melalui registrasi ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan publik, perencanaan pembangunan, serta layanan administratif lainnya. Di Indonesia, registrasi kependudukan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang bertanggung jawab dalam penerbitan dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran. Keakuratan dan keterbaruan data registrasi sangat penting untuk memastikan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah, seperti program bantuan sosial, pemilu, dan layanan kesehatan.

3.2. Non Registrasi

Non-registrasi dalam data kependudukan mengacu pada metode pengumpulan data yang tidak bergantung pada pencatatan administratif langsung dari individu. Pendekatan ini sering kali dilakukan melalui survei sampel, sensus penduduk, atau metode statistik lainnya yang bertujuan untuk melengkapi data registrasi kependudukan. Sensus penduduk, yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap 10 tahun sekali, adalah contoh utama dari metode non-registrasi. Meskipun tidak memberikan data individu secara real-time, pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih luas mengenai karakteristik demografi, sosial, dan ekonomi suatu wilayah. Data non-registrasi sering digunakan untuk menganalisis tren populasi, distribusi penduduk, serta kebutuhan pembangunan di berbagai sektor.

3.3. Data Dari Lintas Sektor

Data kependudukan tidak hanya dikumpulkan melalui sistem registrasi atau non-registrasi, tetapi juga dapat diperoleh dari berbagai sektor yang berhubungan dengan pelayanan publik. Data dari lintas sektor mencakup informasi yang diperoleh dari lembaga kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan sektor lainnya yang secara langsung atau tidak langsung mencatat informasi penduduk. Misalnya, data siswa yang terdaftar di sekolah dapat memberikan gambaran mengenai tingkat partisipasi pendidikan, sedangkan data pasien di fasilitas kesehatan membantu dalam pemantauan kondisi kesehatan masyarakat. Integrasi data dari berbagai sektor ini memungkinkan pemerintah untuk mengambil keputusan yang lebih akurat dalam perencanaan kebijakan, alokasi anggaran, serta peningkatan pelayanan publik yang berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

Dengan mengombinasikan ketiga metode ini—registrasi, non-registrasi, dan data lintas sektor pemerintah dapat menyusun basis data kependudukan yang lebih komprehensif dan akurat untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

BAB 4

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

4.1. Kuantitas Penduduk

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan, Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.

4.1.1. Jumlah Dan Sebaran Penduduk

Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia. Jumlah penduduk Jawa Barat pada Tahun 2024 tercatat sebanyak **51.316.378** jiwa, yang terbagi atas penduduk laki-laki sebanyak **25.997.794** jiwa (**50,66%**) dan perempuan sebanyak **25.318.584** jiwa (**49,34%**). Jumlah tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah **49.899.992** jiwa. Sehingga dalam satu tahun jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan sebanyak **1.416.386** jiwa atau naik sebesar **2,76%**.

Sebagai Provinsi dengan jumlah populasi terbesar se-Indonesia, tidak lantas menjadi keuntungan bagi Provinsi Jawa Barat, karena pada dasarnya persebaran penduduk di Jawa Barat merupakan satu permasalahan yang harus dihadapi. Persebaran penduduk tidak seimbang antara satu daerah dengan daerah lainnya. Populasi penduduk terpusat pada beberapa daerah sementara daerah lainnya persebaran dan kepadatannya lebih rendah. Daerah-daerah penyangga ibukota Jawa Barat dan daerah Bandung Raya merupakan daerah yang mempunyai sebaran dan kepadatan yang tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Kemudahan akses akan berbagai kebutuhan menjadikan daerah penyangga ibukota Jawa Barat dan daerah Bandung Raya banyak dikunjungi dan menjadi tempat tinggal favorit di Provinsi Jawa Barat.

Untuk melihat jumlah dan sebaran penduduk di Provinsi Jawa Barat ada baiknya dibahas sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sebaran penduduk dapat dilihat dari proporsi penduduk, kepadatan penduduk dalam suatu daerah, dan laju pertumbuhan penduduk. Data dibawah ini menjadi acuan dalam membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan di Provinsi Jawa Barat.

4.1.1.1. Jumlah Dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari proporsi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Proporsi penduduk berdasarkan jenis kelamin tersebut untuk melihat berapa banyak jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan. Tujuannya adalah untuk menyediakan berbagai sarana dan

pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah berdasarkan kebutuhan jenis kelamin dari penduduk yang ada.

Tabel 4-1 Jumlah dan Proporsi Penduduk berdasarkan Kabupate/.Kota dan Jenis Kelamin

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
3201	BOGOR	2.974.061	5,80	2.835.729	5,53	5.809.790	11,32
3202	SUKABUMI	1.458.705	2,84	1.410.238	2,75	2.868.943	5,59
3203	CIANJUR	1.350.395	2,63	1.288.430	2,51	2.638.825	5,14
3204	BANDUNG	1.953.971	3,81	1.885.750	3,67	3.839.721	7,48
3205	GARUT	1.458.601	2,84	1.393.276	2,72	2.851.877	5,56
3206	TASIKMALAYA	1.016.563	1,98	979.496	1,91	1.996.059	3,89
3207	CIAMIS	651.625	1,27	646.158	1,26	1.297.783	2,53
3208	KUNINGAN	629.774	1,23	610.225	1,19	1.239.999	2,42
3209	CIREBON	1.263.071	2,46	1.225.975	2,39	2.489.046	4,85
3210	MAJALENGKA	689.351	1,34	680.218	1,33	1.369.569	2,67
3211	SUMEDANG	619.513	1,21	607.147	1,18	1.226.660	2,39
3212	INDRAMAYU	997.493	1,94	982.587	1,91	1.980.080	3,86
3213	SUBANG	838.911	1,63	838.717	1,63	1.677.628	3,27
3214	PURWAKARTA	539.514	1,05	524.418	1,02	1.063.932	2,07
3215	KARAWANG	1.321.284	2,57	1.290.781	2,52	2.612.065	5,09
3216	BEKASI	1.711.222	3,33	1.676.379	3,27	3.387.601	6,60
3217	BANDUNG BARAT	974.016	1,90	937.645	1,83	1.911.661	3,73
3218	PANGANDARAN	224.519	0,44	222.753	0,43	447.272	0,87
3271	KOTA BOGOR	578.674	1,13	565.434	1,10	1.144.108	2,23
3272	KOTA SUKABUMI	186.135	0,36	183.961	0,36	370.096	0,72
3273	KOTA BANDUNG	1.298.551	2,53	1.293.212	2,52	2.591.763	5,05
3274	KOTA CIREBON	178.969	0,35	177.660	0,35	356.629	0,69
3275	KOTA BEKASI	1.285.093	2,50	1.287.116	2,51	2.572.209	5,01
3276	KOTA DEPOK	1.008.092	1,96	1.002.820	1,95	2.010.912	3,92
3277	KOTA CIMAHI	292.434	0,57	289.560	0,56	581.994	1,13
3278	KOTA TASIKMALAYA	391.746	0,76	379.093	0,74	770.839	1,50
3279	KOTA BANJAR	105.511	0,21	103.806	0,20	209.317	0,41
TOTAL		**25.997.794**	**50,66**	**25.318.584**	**49,34**	**51.316.378**	**100,00**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki di Provinsi Jawa Barat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan disebabkan karena:

(a) Banyaknya penduduk produktif yang berasal dari luar Provinsi Jawa Barat yang datang untuk bekerja. Hal ini dikarenakan Provinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan Ibu Kota sangat memungkinkan banyaknya lapangan kerja. Demikian juga dengan beberapa wilayah di Provinsi Jawa Barat yang menjadi pusat industri.

(b) Di Provinsi Jawa Barat juga terdapat beberapa perguruan tinggi ternama di Indonesia yang menjadi tujuan penduduk untuk melanjutkan pendidikannya

Kabupaten/Kota yang menjadi Penyangga Ibu Kota adalah Seluruh Daerah Kab. Bogor, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Sebagian Kab. Cianjur (Kec. Pacet, Kec. Cugenang, Kec. Sukaresmi, dan Kec. Cipanas), dengan jumlah penduduk sebanyak **15.386.385** jiwa (**29,98 %**) dari total seluruh penduduk. Adapun rincian berdasarkan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 4-2 berikut ini :

Tabel 4-2 Proporsi Penduduk Kabupaten/Kota Penyangga Ibu Kota

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
3201	BOGOR	2.974.061	5,80	2.835.729	5,53	5.809.790	11,32
3203*	CIANJUR*	238.493	0,46	223.272	0,44	461.765	0,90
3216	BEKASI	1.711.222	3,33	1.676.379	3,27	3.387.601	6,60
3271	KOTA BOGOR	578.674	1,13	565.434	1,10	1.144.108	2,23
3275	KOTA BEKASI	1.285.093	2,50	1.287.116	2,51	2.572.209	5,01
3276	KOTA DEPOK	1.008.092	1,96	1.002.820	1,95	2.010.912	3,92
TOTAL		**7.795.635**	**15,19**	**7.590.750**	**14,79**	**15.386.385**	**29,98**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024
Keterangan : Berdasarkan Perpres No.60 Tahun 2020, Kabupaten/Kota yang menjadi Penyangga Ibu Kota adalah Seluruh Daerah Kab. Bogor, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Sebagian Kab. Cianjur (Kec. Pacet, Kec. Cugenang, Kec. Sukaresmi, dan Kec. Cipanas)

Persebaran jumlah penduduk didaerah penyangga ibu kota pada dasarnya dipengaruhi sulitnya mencari tempat tinggal di Ibu Kota Negara. Banyak penduduk daerah penyangga ibu kota yang bekerja di Ibu Kota Negara. Sulit dan mahalnya tempat tinggal di Ibu Kota Negara menyebabkan banyak penduduk mencari tempat tinggal di daerah-daerah penyangga. Hal ini dikarenakan harga pasaran tempat tinggal didaerah penyangga lebih murah dan dapat menjangkau tempat kerja. Selain itu, daerah penyangga ibu kota saat ini sudah mempunyai fasilitas yang sangat memadai. Selain bertempat tinggal didaerah penyangga ibu kota pertambahan jumlah penduduk didaerah penyangga ibu kota juga dipengaruhi oleh semakin banyaknya industri yang berkembang didaerah penyangga ibukota dan sekitarnya.

Selain daerah penyangga ibukota, sebaran penduduk di Provinsi Jawa Barat berada di wilayah Bandung Raya sebanyak **18,15%** dari total penduduk atau **9.312.720** jiwa. Kabupaten/Kota yang menjadi Daerah Cekungan Bandung (Bandung Raya) adalah Seluruh Daerah Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Sebagian Kab. Sumedang (Kec. Tanjungsari, Kec. Sukasari, Kec. Pamulihan, Kec. Cimanggu, dan Kec. Jatinangor). Adapun rincian berdasarkan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 4-3 berikut ini :

Tabel 4-3 Proporsi Penduduk Kabupaten/Kota Bandung Raya

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
3204	BANDUNG	1.953.971	3,81	1.885.750	3,67	3.839.721	7,48
3211*	SUMEDANG*	196.448	0,38	191.133	0,37	387.581	0,76
3217	BANDUNG BARAT	974.016	1,90	937.645	1,83	1.911.661	3,73
3273	KOTA BANDUNG	1.298.551	2,53	1.293.212	2,52	2.591.763	5,05
3277	KOTA CIMAHI	292.434	0,57	289.560	0,56	581.994	1,13
TOTAL		**4.715.420**	**9,19**	**4.597.300**	**8,96**	**9.312.720**	**18,15**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024
Keterangan : Berdasarkan Perpres No. 45 Tahun 2018, Kabupaten/Kota yang menjadi Daerah Cekungan Bandung (Bandung Raya) adalah Seluruh Daerah Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Sebagian Kab. Sumedang (Kec. Tanjungsari, Kec. Sukasari, Kec. Pamulihan, Kec. Cimanggu, dan Kec. Jatinangor)

Wilayah Bandung Raya selain sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi, juga merupakan pusat perdagangan dan jasa, industri, serta pendidikan. Ketiga hal tersebut menjadi faktor yang mendorong tingginya jumlah penduduk diwilayah tersebut, dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Jawa Barat. Walaupun demikian, sebaran penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Barat, masih didominasi oleh wilayah Kabupaten/Kota penyangga Ibu Kota Jakarta.

Banyaknya jumlah penduduk di Bandung Raya juga dipengaruhi karena banyaknya lapangan pekerjaan yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk dari luar daerah. Selain itu juga di sekitar Bandung Raya banyak lembaga pendidikan yang terkenal di Indonesia. Kondisi ini menjadikan wilayah Bandung Raya menjadi tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan pendidikan. Selain itu jikapun lembaga pendidikan itu berada di luar daerah Bandung Raya, akan tetapi penduduk yang melanjutkan pendidikan dilembaga tersebut cenderung untuk memilih tinggal didaerah Bandung Raya. Hal ini dikarenakan mudahnya akses untuk memperoleh informasi serta sarana yang penunjang kelancaran pendidikannya. Selain itu juga dengan tinggal didaerah Bandung Raya lebih mudah untuk mencari hiburan, sehingga dapat menghilangkan tekanan akibat lamanya menuntut ilmu.

Sementara apabila dilihat dari jenis kelamin, penduduk di daerah Bandung Raya lebih banyak berjenis kelamin laki-laki. Hal ini semakin memperkuat bahwa daerah Bandung Raya merupakan daerah yang menarik bagi kaum pendatang untuk memperolah mata pencaharian serta pendidikan, khususnya pendidikan tinggi.

4.1.1.2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun karena perubahan jumlah penduduk di satu wilayah/area baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kerapatan jumlah penduduk dalam satu kesatuan ruang.

Pada Tabel di bawah memperlihatkan kepadatan penduduk Provinsi Jawa Barat bahwa dengan luas **37.044** Km2 dihuni oleh **51.316.378** jiwa atau per Km2 dihuni oleh **1.385** jiwa.

Tabel 4-4 Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kabupaten/Kota

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH (KM^2)	KEPADATAN (JIWA/KM^2)
		N	%		
32	**JAWA BARAT**	**51.316.378**	**100,00**	**37.044,86**	**1.385**
3201	BOGOR	5.809.790	11,32	2.991,78	1.942
3202	SUKABUMI	2.868.943	5,59	4.164,15	689
3203	CIANJUR	2.638.825	5,14	3.631,92	727
3204	BANDUNG	3.839.721	7,48	1.740,84	2.206
3205	GARUT	2.851.877	5,56	3.101,24	920
3206	TASIKMALAYA	1.996.059	3,89	2.705,86	738
3207	CIAMIS	1.297.783	2,53	1.595,94	813
3208	KUNINGAN	1.239.999	2,42	1.192,90	1.039
3209	CIREBON	2.489.046	4,85	1.076,76	2.312
3210	MAJALENGKA	1.369.569	2,67	1.330,17	1.030
3211	SUMEDANG	1.226.660	2,39	1.566,20	783
3212	INDRAMAYU	1.980.080	3,86	2.076,06	954
3213	SUBANG	1.677.628	3,27	2.165,55	775
3214	PURWAKARTA	1.063.932	2,07	993,09	1.071
3215	KARAWANG	2.612.065	5,09	1.913,71	1.365
3216	BEKASI	3.387.601	6,60	1.251,05	2.708
3217	BANDUNG BARAT	1.911.661	3,73	1.283,44	1.489
3218	PANGANDARAN	447.272	0,87	1.128,15	396
3271	KOTA BOGOR	1.144.108	2,23	111,37	10.273
3272	KOTA SUKABUMI	370.096	0,72	48,31	7.660
3273	KOTA BANDUNG	2.591.763	5,05	166,59	15.557
3274	KOTA CIREBON	356.629	0,69	39,47	9.036
3275	KOTA BEKASI	2.572.209	5,01	213,04	12.074
3276	KOTA DEPOK	2.010.912	3,92	199,91	10.059
3277	KOTA CIMAHI	581.994	1,13	42,43	13.716
3278	KOTA TASIKMALAYA	770.839	1,50	183,94	4.191
3279	KOTA BANJAR	209.317	0,41	131,01	1.598

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024
Keterangan : Luas Wilayah Berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022

Persebaran Penduduk di Jawa Barat apabila dilihat dari setiap Kabupaten/Kota, kepadatan penduduk didominasi oleh penduduk yang berdomisili diwilayah Kota. Kota Bandung merupakan wilayah terpadat dengan **15.557** jiwa/Km2, disusul Kota Cimahi, Kota Bekasi, Kota Bogor dan Kota Depok sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

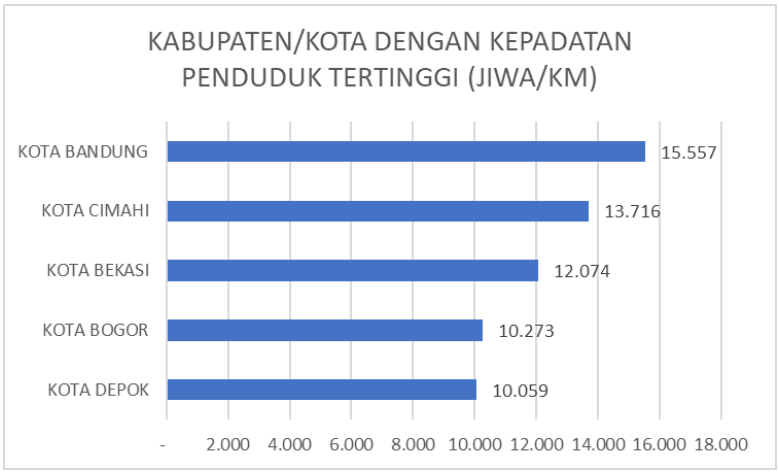

Gambar 4-1 Kabupaten/Kota dengan Kepadatan Penduduk Tertinggi

Sementara itu untuk beberapa daerah lainnya terjadi kebalikan dari daerah-daerah diatas karena memiliki kepadatan terendah yakni di Kabupaten Pangandaran yaitu sebanyak **396** Jiwa/Km2. Terendah berikutnya Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Subang seperti terlampir pada gambar berikut;

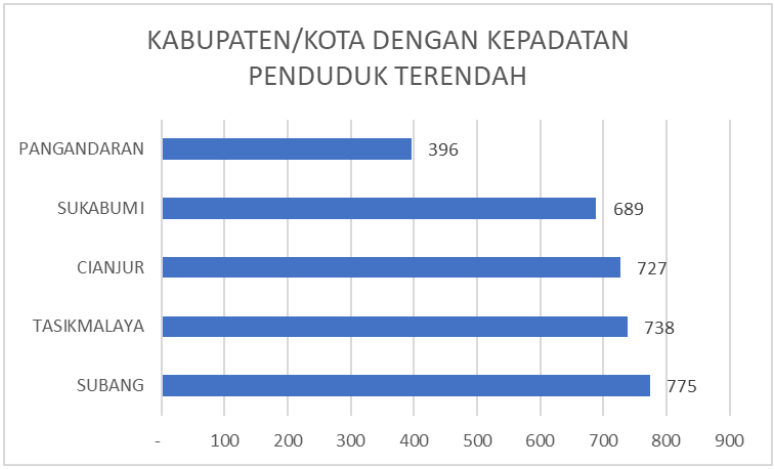

Gambar 4-2 Kabupaten/Kota dengan Kepadatan Penduduk Terendah

Ada banyak faktor yang menjadi penyebab tinggi-rendahnya kepadatan penduduk di suatu daerah faktor pertama adalah kelahiran, jika banyak kelahiran yang terjadi, maka semakin padat juga kondisi di suatu daerah. Faktor kedua adalah ekonomi. Sebagian besar daerah memiliki kondisi perekonomian yang lebih baik dari daerah yang lain. Hal ini ditentukan dari seberapa banyak tempat industri, peluang kerja dan jumlah pendapatannya. Faktor yang ketiga adalah kondisi alam dan letak geografis wilayah yang memiliki cuaca atau iklim yang mendukung untuk menjadi tempat tinggal atau tempat bekerja. Daerah dengan kondisi demikian, lebih diminati oleh penduduk. Letak geografis juga menentukan suatu tempat apakah tempat tersebut untuk dijadikan tempat tinggal atau tempat bekerja. Misalnya dekat jauhnya dengan sekolah, pusat pemerintah, pusat perbelanjaan dan infrastruktur jalan untuk akses keluar masuk daerah tersebut.

4.1.1.3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk disuatu wilayah. Dimana pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan perpindahan (migrasi). Secara terus menerus jumlah penduduk akan dipengaruhi oleh banyaknya bayi yang lahir (menambah jumlah penduduk), tetapi disisi lain akan dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua kelompok umur. Sementara itu, migrasi juga berperan dalam mempengaruhi jumlah penduduk, dimana penduduk imigran (pendatang) akan menambah dan emigran (penduduk yang keluar) akan mengurangi jumlah penduduk. Jadi, pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi (masuk/in migration dan keluar/out migration). Selisih antara fertilitas dan mortalitas disebut perubahan reproduktif (reproductive change) atau pertumbuhan alamiah (natural growth), sedangkan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar disebut migrasi netto (net migration).

LPP tentunya tidak terlepas dari membandingkan jumlah penduduk yang ada dalam suatu daerah dalam beberapa tahun. Laju pertumbuhan penduduk tentunya akan terlihat jika ada perbedaan jumlah penduduk antara tahun yang satu dibandingkan dengan tahun lainnya. Perbedaan tersebut dapat berupa penambahan atau pengurangan jumlah penduduk dalam satu daerah. Demikian juga dengan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat dengan melihat jumlah penduduk dalam beberapa tahun. Berikut adalah data jumlah penduduk Jawa Barat dalam 9 (delapan) tahun terakhir.

Penghitungan LPP menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$r = \left\{\left(\frac{Pt}{P0}\right)\left(\frac{1}{t}\right) - 1\right\} \times 100$$

Keterangan Rumus:

r : Laju Pertumbuhan Penduduk
t : Tahun Awal – Tahun Dasar
Pt : Penduduk Tahun 2024
P0 : Penduduk Tahun 2015

r = {(51.316.378 / 43.195.688)$^{(1/9)}$ -1} x 100 = 1.93

Angka LPP tersebut boleh jadi kurang mencerminkan angka sebenarnya, namun itulah fakta yang dapat disajikan berdasarkan data kependudukan yang tercatat dalam Database SIAK. Idealnya dilakukan kolabrasi metodologi yang dilakukan oleh BPS dan DUKCAPIL, sehingga dapat saling melengkapi. Sinergitas antara keduabelah pihak sangat perlu dilakukan, sehingga data yang lebih akurat dapat disajikan kepada pemangku kebijakan sebagai dasar pengambilan keputusan (decision making), utamanya dalam perencanaan pembangunan di Jawa Barat. Tabel 4-5 memperlihatkan jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat dalam sepuluh tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 4-5 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2015-2024

NO	TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LPP
1	2015	21.976.271	21.219.417	43.195.688	-
2	2016	22.275.690	21.464.469	43.740.159	1,26
3	2017	22.590.755	21.771.384	44.362.139	1,34
4	2018	22.915.986	22.245.339	45.161.325	1,49
5	2019	23.223.993	22.555.604	45.779.597	1,46
6	2020	23.893.514	23.249.109	47.142.623	1,76
7	2021	24.423.410	23.796.684	48.220.094	1,85
8	2022	24.987.540	24.352.130	49.339.670	1,92
9	2023	25.268.145	24.631.847	49.899.992	1,82
10	2024	25.997.794	25.318.584	51.316.378	1,93

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat mengalami pertambahan **8.120.690** jiwa dalam jangka waktu sepuluh tahun. Pertambahan penduduk yang cukup besar di Provinsi Jawa Barat ini memperlihatkan bahwa:

1. Provinsi Jawa Barat mempunyai daya tarik yang besar bagi para pendatang, diantaranya disebabkan oleh banyaknya daerah industri di Provinsi Jawa Barat, khususnya didaerah penyangga ibu kota.
2. Provinsi Jawa Barat juga menjadi daya tarik bagi para pendatang untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini terjadi karena di Provinsi Jawa Barat terdapat beberapa perguruan tinggi yang ternama di Indonesia.

4.1.2. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

4.1.2.1. Jumlah Dan Proporsi Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin

4.1.2.1.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk, disesuaikan dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing. Kebutuhan yang berkaitan dengan umur dan jenis kelamin mencakup kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan sebagainya. Dalam bidang kesehatan, setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya kelompok bayi dan balita, lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan. Bagi penduduk perempuan remaja misalnya, mempunyai kebutuhan untuk meningkatkan status kesehatan agar ketika memasuki usia perkawinan tidak terkena anemia. Sedangkan kelompok penduduk usia lanjut, membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih intensif. Tabel 4-6 memperlihatkan penduduk Provinsi Jawa Barat berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 4-6 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

NO	UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	00-04	1.867.112	3,64	1.749.491	3,41	3.616.603	7,05
2	05-09	2.301.777	4,49	2.155.349	4,20	4.457.126	8,69
3	10-14	2.325.464	4,53	2.178.283	4,24	4.503.747	8,78
4	15-19	1.948.890	3,80	1.865.543	3,64	3.814.433	7,43
5	20-24	2.212.282	4,31	2.101.396	4,09	4.313.678	8,41
6	25-29	2.110.659	4,11	1.979.701	3,86	4.090.360	7,97
7	30-34	1.986.416	3,87	1.905.533	3,71	3.891.949	7,58
8	35-39	1.850.657	3,61	1.798.953	3,51	3.649.610	7,11
9	40-44	1.983.318	3,86	2.000.766	3,90	3.984.084	7,76
10	45-49	1.782.629	3,47	1.834.964	3,58	3.617.593	7,05
11	50-54	1.607.051	3,13	1.621.116	3,16	3.228.167	6,29
12	55-59	1.310.989	2,55	1.330.905	2,59	2.641.894	5,15
13	60-64	1.014.421	1,98	1.033.719	2,01	2.048.140	3,99
14	65-69	719.091	1,40	723.149	1,41	1.442.240	2,81
15	70-74	498.745	0,97	482.535	0,94	981.280	1,91
16	> 75	478.293	0,93	557.181	1,09	1.035.474	2,02
TOTAL		**25.997.794**	**50,66**	**25.318.584**	**49,34**	**51.316.378**	**100,00**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Provinsi Jawa Barat paling banyak berada di kelompok umur 10-14 tahun yaitu sejumlah **4.503.747** jiwa dan kelompok umur dengan jumlah penduduk terkecil adalah kelompok umur 70-74 dengan jumlah **981.280** jiwa.

4.1.2.1.2. Penduduk Usia Median

Umur median adalah ukuran statistik dalam demografi yang menunjukkan usia yang membagi populasi menjadi dua bagian yang sama besar. Artinya, setengah dari jumlah penduduk memiliki usia di bawah umur median, sementara setengah lainnya memiliki usia di atasnya. Umur median sering digunakan untuk menggambarkan struktur usia suatu populasi dan menjadi indikator apakah suatu negara atau daerah memiliki populasi yang relatif muda, menengah, atau tua.

Sebagai contoh, jika suatu negara memiliki umur median 30 tahun, itu berarti 50% dari total penduduk berusia di bawah 30 tahun, dan 50% lainnya berusia di atas 30 tahun. Semakin tinggi umur median, semakin tua struktur penduduk suatu negara, yang dapat memengaruhi kebijakan ekonomi, tenaga kerja, dan sistem sosial.

Tabel 4-7 Jumlah Penduduk dan Usia Median di Kabupaten/Kota

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK		USIA MEDIAN
		N	%	
32	**JAWA BARAT**	**51.316.378**	**100,00**	**26,00**

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK		USIA MEDIAN
		N	%	
3201	BOGOR	5.809.790	11,32	21,90
3202	SUKABUMI	2.868.943	5,59	25,94
3203	CIANJUR	2.638.825	5,14	25,82
3204	BANDUNG	3.839.721	7,48	25,81
3205	GARUT	2.851.877	5,56	21,77
3206	TASIKMALAYA	1.996.059	3,89	26,32
3207	CIAMIS	1.297.783	2,53	26,57
3208	KUNINGAN	1.239.999	2,42	26,21
3209	CIREBON	2.489.046	4,85	26,16
3210	MAJALENGKA	1.369.569	2,67	26,34
3211	SUMEDANG	1.226.660	2,39	26,38
3212	INDRAMAYU	1.980.080	3,86	26,41
3213	SUBANG	1.677.628	3,27	26,51
3214	PURWAKARTA	1.063.932	2,07	25,82
3215	KARAWANG	2.612.065	5,09	25,96
3216	BEKASI	3.387.601	6,60	25,78
3217	BANDUNG BARAT	1.911.661	3,73	25,87
3218	PANGANDARAN	447.272	0,87	30,64
3271	KOTA BOGOR	1.144.108	2,23	25,94
3272	KOTA SUKABUMI	370.096	0,72	25,84
3273	KOTA BANDUNG	2.591.763	5,05	26,24
3274	KOTA CIREBON	356.629	0,69	25,95
3275	KOTA BEKASI	2.572.209	5,01	26,15
3276	KOTA DEPOK	2.010.912	3,92	26,07
3277	KOTA CIMAHI	581.994	1,13	26,13
3278	KOTA TASIKMALAYA	770.839	1,50	25,97
3279	KOTA BANJAR	209.317	0,41	26,22

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Data ini menyajikan jumlah penduduk dan usia median di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Usia median merupakan indikator penting dalam demografi yang menunjukkan usia tengah dari distribusi penduduk, di mana setengah populasi berada di bawah usia tersebut dan setengahnya lagi berada di atasnya.

Jawa Barat memiliki total penduduk sebanyak **51.316.378** jiwa, dengan usia median **26,00** tahun. Kabupaten dengan usia median terendah adalah Kabupaten Garut (**21,77** tahun), yang menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki populasi yang relatif lebih muda dibandingkan dengan wilayah lainnya. Sebaliknya, usia median tertinggi tercatat di Kabupaten Pangandaran (**30,64** tahun), yang menunjukkan proporsi penduduk usia lebih tua lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya.

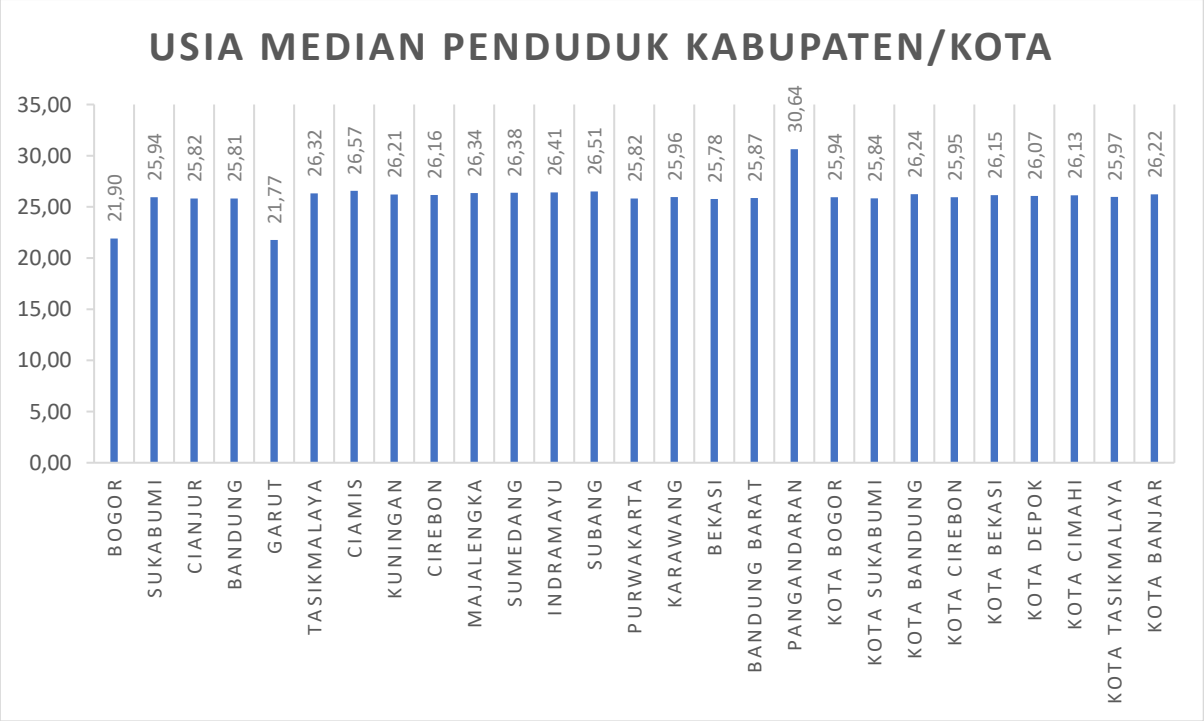

Gambar 4-3 Usia Median Penduduk Kabupaten/Kota

Secara keseluruhan, angka usia median di Jawa Barat menggambarkan bahwa populasi provinsi ini masih relatif muda, yang dapat menjadi peluang bagi pertumbuhan ekonomi dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif.

4.1.2.1.3. Rasio Jenis Kelamin

Rasio Jenis Kelamin (RJK) menggambarkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap setiap 100 orang penduduk perempuan. RJK berguna untuk melihat proporsi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan untuk berbagai perencanaan kegiatan seperti penyediaan rumah sakit bersalin, penyediaan ragam pendidikan dan lain sebagainya. RJK dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan penduduk berdasarkan jenis kelamin yang ada dalam suatu daerah. RJK pun dapat melihat perbandingan penduduk berdasarkan jenis kelamin. Dengan demikian suatu daerah dengan RJK yang berbeda akan mempunyai kebutuhan yang berbeda pula. Hal ini berkaitan dengan perbedaan kebutuhan antara penduduk laki-laki dengan perempuan. Dengan demikian berdasarkan RJK ini, maka penyediaan sarana tergantung kepada berapa banyak rasio jenis kelamin ini.

Tabel 4-8 Rasio Jenis Kelamin berdasarkan Kabupaten/Kota

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK			RASIO JENIS KELAMIN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
3201	BOGOR	2.974.061	2.835.729	5.809.790	105
3202	SUKABUMI	1.458.705	1.410.238	2.868.943	103
3203	CIANJUR	1.350.395	1.288.430	2.638.825	105
3204	BANDUNG	1.953.971	1.885.750	3.839.721	104
3205	GARUT	1.458.601	1.393.276	2.851.877	105

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK			RASIO JENIS KELAMIN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
3206	TASIKMALAYA	1.016.563	979.496	1.996.059	104
3207	CIAMIS	651.625	646.158	1.297.783	101
3208	KUNINGAN	629.774	610.225	1.239.999	103
3209	CIREBON	1.263.071	1.225.975	2.489.046	103
3210	MAJALENGKA	689.351	680.218	1.369.569	101
3211	SUMEDANG	619.513	607.147	1.226.660	102
3212	INDRAMAYU	997.493	982.587	1.980.080	102
3213	SUBANG	838.911	838.717	1.677.628	100
3214	PURWAKARTA	539.514	524.418	1.063.932	103
3215	KARAWANG	1.321.284	1.290.781	2.612.065	102
3216	BEKASI	1.711.222	1.676.379	3.387.601	102
3217	BANDUNG BARAT	974.016	937.645	1.911.661	104
3218	PANGANDARAN	224.519	222.753	447.272	101
3271	KOTA BOGOR	578.674	565.434	1.144.108	102
3272	KOTA SUKABUMI	186.135	183.961	370.096	101
3273	KOTA BANDUNG	1.298.551	1.293.212	2.591.763	100
3274	KOTA CIREBON	178.969	177.660	356.629	101
3275	KOTA BEKASI	1.285.093	1.287.116	2.572.209	100
3276	KOTA DEPOK	1.008.092	1.002.820	2.010.912	101
3277	KOTA CIMAHI	292.434	289.560	581.994	101
3278	KOTA TASIKMALAYA	391.746	379.093	770.839	103
3279	KOTA BANJAR	105.511	103.806	209.317	102
TOTAL		**25.997.794**	**25.318.584**	**51.316.378**	**103**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Tabel di atas menampilkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat serta rasio jenis kelamin (RJK), yang merupakan perbandingan jumlah laki-laki terhadap perempuan dalam suatu wilayah. Rasio jenis kelamin di Jawa Barat secara keseluruhan adalah **103**, yang berarti terdapat **103** laki-laki untuk setiap **100** perempuan. Kabupaten/kota dengan rasio tertinggi adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Garut (**105**), menunjukkan proporsi laki-laki yang lebih besar dibanding perempuan.

Kabupaten/kota dengan rasio terendah adalah Kota Bekasi, Kabupaten Subang dan Kota Bandung (**100**), yang berarti jumlah laki-laki dan perempuan hampir seimbang. Secara umum, rasio jenis kelamin yang tidak jauh dari angka **100** menandakan keseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan di Jawa Barat, yang dapat berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan pembangunan di daerah ini.

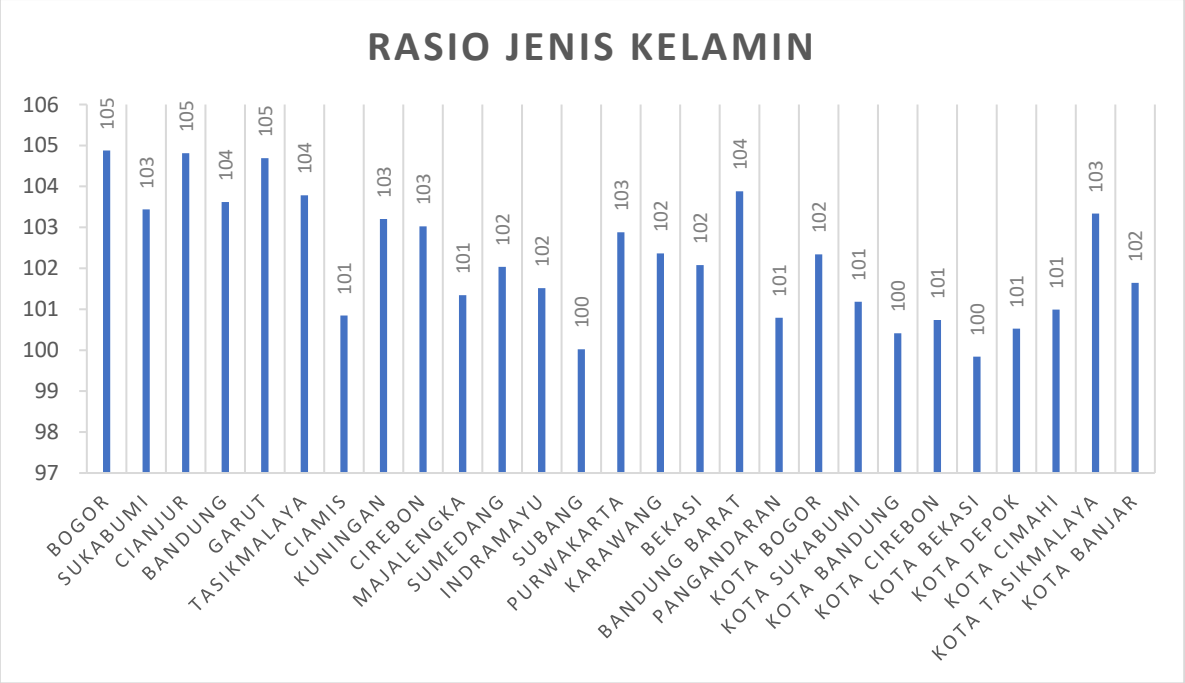

Gambar 4-4 Rasio Jenis Kelamin

Selain jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, ada juga jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin berdasarkan kelompok umur. Tabel 4-9 memperlihatkan Rasio Jenis Kelamin berdasarkan kelompok umur sebagai berikut:

Tabel 4-9 Rasio Jenis Kelamin berdasarkan Kelompok Umur

NO	UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH		RJK
		N	%	N	%	N	%	
1	00-04	1.867.112	3,64	1.749.491	3,41	3.616.603	7,05	107
2	05-09	2.301.777	4,49	2.155.349	4,20	4.457.126	8,69	107
3	10-14	2.325.464	4,53	2.178.283	4,24	4.503.747	8,78	107
4	15-19	1.948.890	3,80	1.865.543	3,64	3.814.433	7,43	104
5	20-24	2.212.282	4,31	2.101.396	4,09	4.313.678	8,41	105
6	25-29	2.110.659	4,11	1.979.701	3,86	4.090.360	7,97	107
7	30-34	1.986.416	3,87	1.905.533	3,71	3.891.949	7,58	104
8	35-39	1.850.657	3,61	1.798.953	3,51	3.649.610	7,11	103
9	40-44	1.983.318	3,86	2.000.766	3,90	3.984.084	7,76	99
10	45-49	1.782.629	3,47	1.834.964	3,58	3.617.593	7,05	97
11	50-54	1.607.051	3,13	1.621.116	3,16	3.228.167	6,29	99
12	55-59	1.310.989	2,55	1.330.905	2,59	2.641.894	5,15	99
13	60-64	1.014.421	1,98	1.033.719	2,01	2.048.140	3,99	98
14	65-69	719.091	1,40	723.149	1,41	1.442.240	2,81	99
15	70-74	498.745	0,97	482.535	0,94	981.280	1,91	103
16	> 75	478.293	0,93	557.181	1,09	1.035.474	2,02	86
TOTAL		**25.997.794**	**50,66**	**25.318.584**	**49,34**	**51.316.378**	**100,00**	**103**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan data dalam tabel di atas, distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa jumlah penduduk total mencapai **51.316.378** jiwa, dengan **25.997.794** laki-laki (**50,66%**) dan **25.318.584** perempuan (**49,34%**). Rasio jenis kelamin secara keseluruhan adalah **103**, yang berarti terdapat **103** laki-laki untuk setiap **100** perempuan. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, kelompok usia 10-14 tahun memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu **4.503.747** jiwa (**8,78%**), diikuti oleh kelompok 10-14 tahun dengan **4.503.747** jiwa (**8,78**%), serta kelompok 5-9 tahun sebanyak **4.457.126** jiwa (**8,69%**). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berada pada usia muda dan produktif.

Sebaliknya, kelompok usia 70-74 tahun memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu **981.280** jiwa (**1,91%**), dengan rasio jenis kelamin **103**, yang menunjukkan bahwa jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dibanding perempuan pada kelompok usia ini. Selain itu, rasio jenis kelamin tertinggi terdapat pada kelompok usia 5-9 tahun, 10-14 tahun, 0-4 tahun, dan kelompok usia 25-29 yaitu **107**, sedangkan rasio terendah terdapat pada kelompok usia ≥75 tahun, yaitu **86**. Hal ini mencerminkan tren umum di mana perempuan cenderung memiliki angka harapan hidup lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

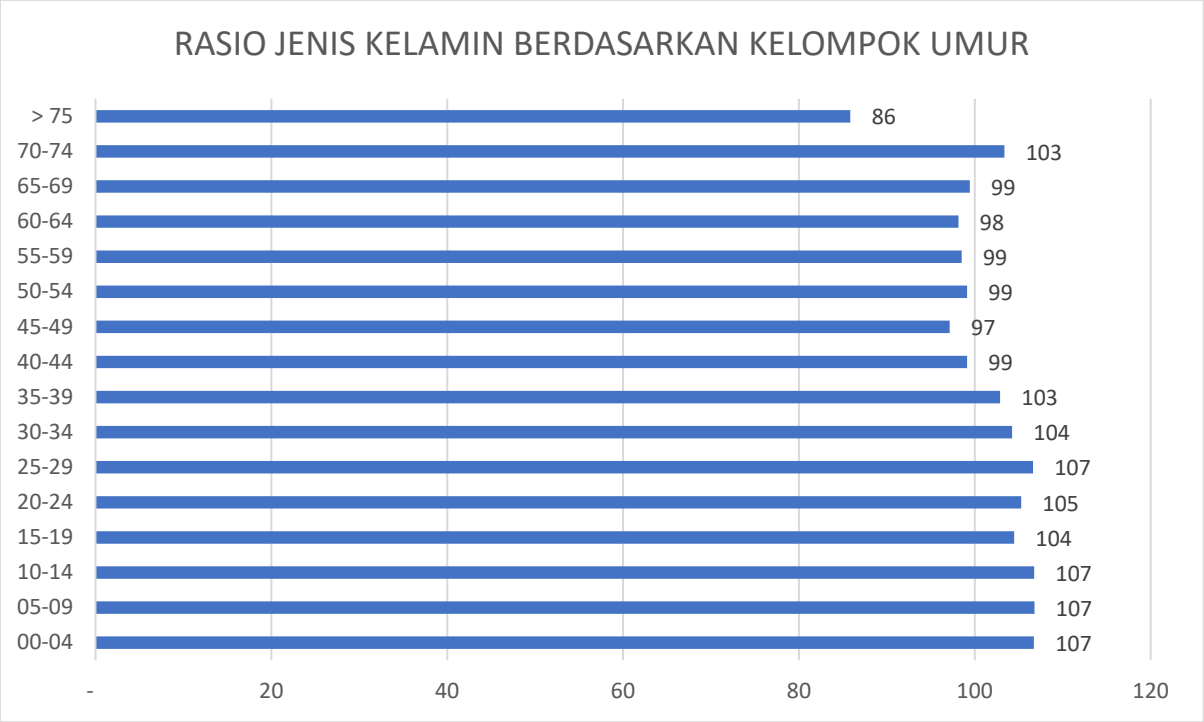

Gambar 4-5 Rasio Jenis Kelamin berdasarkan Kelompok Umur

Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran tentang struktur penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin, yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dalam perencanaan kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, serta layanan kesehatan di masa depan.

4.1.2.1.4. Piramida Penduduk

Piramida penduduk menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan dalam bentuk grafik. Sumbu horizontal (dasar piramida) menunjukkan jumlah penduduk (dalam hal ini diwakili dengan persentase jumlah penduduk), sumbu vertikal menunjukkan kelompok umur 5 tahunan. Dasar piramida dimulai dengan umur termuda hingga ke puncak kelompok umur tertua. Bagian kiri piramida adalah penduduk laki-laki dan bagian kanan untuk penduduk perempuan.

Provinsi Jawa Barat menunjukan struktur penduduk muda/expansive, dengan struktur penduduk muda lebih besar dibandingkan kelompok usia di atasnya. Pada piramida ini terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun yang terletak pada dasar piramida mulai mengecil. Ini berarti angka kelahiran mulai menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, walaupun dari segi jumlah absolute tidak kecil. Demikian juga dengan jumlah penduduk 5-9 tahun masih terlihat lebar, berarti lima tahun kedepan dibutuhkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang cukup untuk menampung penduduk kelompok ini.

Piramida penduduk Provinsi Jawa Barat juga dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan dalam jangka panjang. Dengan piramida yang menunjukkan lebih banyak di kelompok usia 0-4 tahun dan 5-9 tahun, maka dalam jangka 15 sampai 20 tahun Pemerintah harus mampu merencanakan lapangan pekerjaan bagi penduduk tersebut yang telah menjadi kelompok penduduk yang produktif. Piramida penduduk ini juga dapat digunakan untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilihan Umum. Dalam jangka waktu 10 sampai 15 tahun akan ada banyak pemilih pemula yang harus mendapatkan sosialisasi tentang demokrasi.

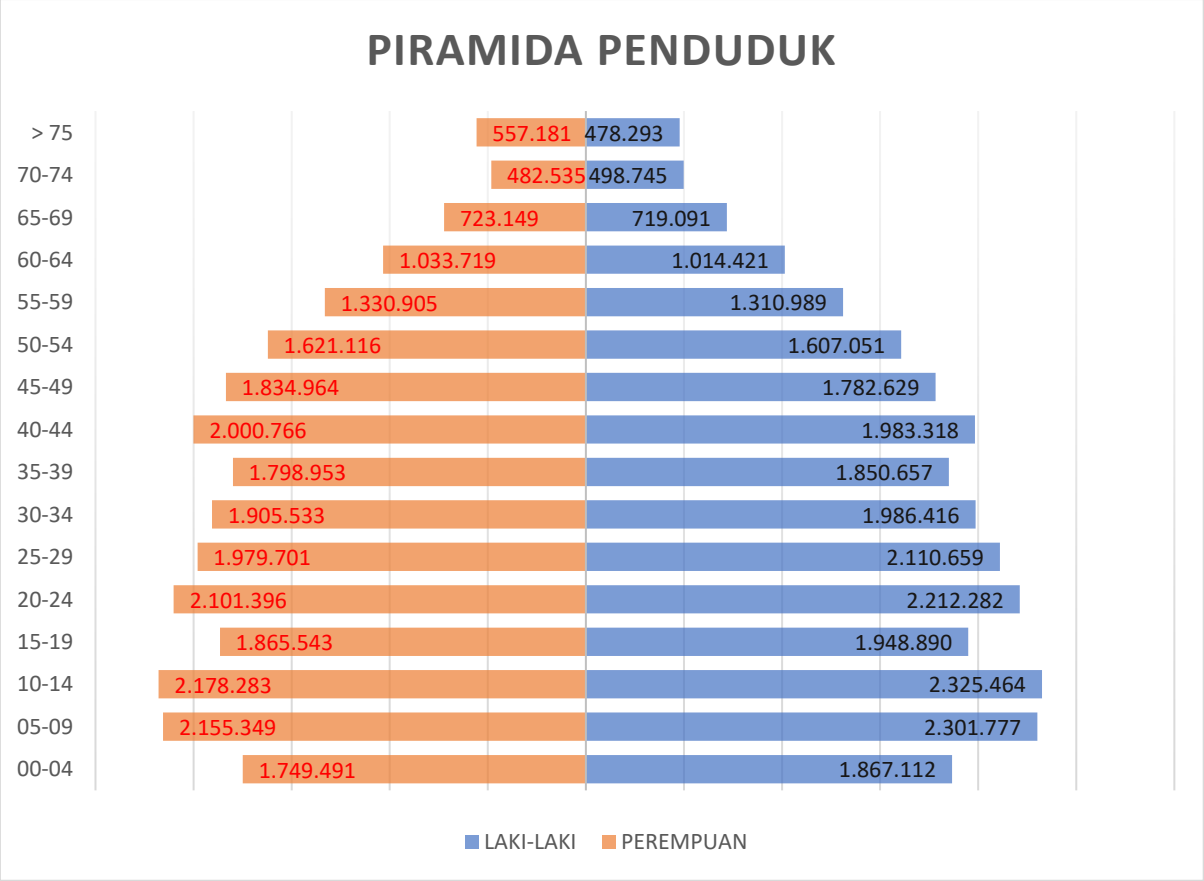

Gambar 4-6 Piramida Penduduk Provinsi Jawa Barat

Piramida ini memiliki bentuk yang mendekati piramida ekspansif, yang menunjukkan jumlah penduduk yang besar di kelompok usia muda dan produktif, serta semakin berkurang pada kelompok usia lanjut.

Piramida penduduk ini memiliki dasar yang cukup lebar, menunjukkan bahwa kelompok usia muda (0-14 tahun) memiliki jumlah yang besar. Kelompok usia 0-4 tahun mencatat sekitar **1.867.112** juta laki-laki dan **1.749.491** juta perempuan, sementara kelompok 5-9 tahun dan 10-14 tahun juga menunjukkan angka yang tinggi. Hal ini mengindikasikan tingkat kelahiran yang masih relatif tinggi. Pada kelompok usia produktif (15-64 tahun), jumlah penduduk tetap besar, mencerminkan potensi tenaga kerja yang tinggi. Kelompok usia 20-24 tahun dan 25-29 tahun memiliki jumlah yang cukup signifikan, dengan laki-laki dan perempuan yang hampir seimbang. Hal ini menjadi indikator adanya bonus demografi, di mana angkatan kerja yang besar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan baik. Namun, ketika memasuki usia lanjut (di atas 60 tahun), jumlah penduduk mulai mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada kelompok usia 60-64 tahun, terdapat sekitar **1.033.719** juta perempuan dan **1.014.421** juta laki-laki, sedangkan di kelompok usia >75 tahun, jumlahnya semakin kecil, dengan **557.181** ribu perempuan dan **478.293** ribu laki-laki. Fenomena ini mencerminkan angka harapan hidup yang lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki.

Piramida penduduk ini menunjukkan bahwa struktur demografi masih didominasi oleh kelompok usia muda dan produktif, yang menciptakan potensi bonus demografi jika dikelola dengan baik. Namun, penurunan jumlah penduduk pada kelompok usia lanjut juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan sosial. Dengan perencanaan yang tepat, struktur demografi ini dapat menjadi aset yang berharga bagi pembangunan ekonomi dan sosial di masa depan.

4.1.2.1.5. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukan keadaan ekonomi suatu negara, apakah negara tersebut tergolong kedalam negara maju atau negara yang sedang berkembang. Angka DR merupakan salah satu indikator demografi yang penting, semakin tinggi angka DR menunjukan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk pada usia produktif (usia 15 - 64 tahun) yaitu untuk membiayai kebutuhan hidup penduduk yang belum produktif/usia muda (usia 0 - 14 tahun) dan tidak produktif/usia tua lagi (usia 65 tahun keatas), sedang DR yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif secara ekonomi. Sebagaimana perhitungan proyeksi ahli demografi bahwa Indonesia akan menikmati bonus demografi pada Tahun 2020-2030, tidak terkecuali untuk Provinsi Jawa Barat.

Tabel 4-10 Rasio Ketergantungan berdasarkan Kabupaten/Kota

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	USIA MUDA (0-14 TAHUN)	USIA PRODUKTIF (15-64 TAHUN)	USIA TUA (>= 65 TAHUN)	RASIO KETERGANTUNGAN		
					MUDA	TUA	TOTAL
3201	BOGOR	1.510.175	4.015.371	284.244	37,61	7,08	44,69
3202	SUKABUMI	727.801	1.934.988	206.154	37,61	10,65	48,27
3203	CIANJUR	701.596	1.759.366	177.863	39,88	10,11	49,99
3204	BANDUNG	961.218	2.635.964	242.539	36,47	9,20	45,67
3205	GARUT	761.996	1.921.385	168.496	39,66	8,77	48,43
3206	TASIKMALAYA	453.827	1.336.549	205.683	33,96	15,39	49,34
3207	CIAMIS	273.629	871.278	152.876	31,41	17,55	48,95
3208	KUNINGAN	287.645	843.992	108.362	34,08	12,84	46,92
3209	CIREBON	603.244	1.724.868	160.934	34,97	9,33	44,30
3210	MAJALENGKA	312.508	941.749	115.312	33,18	12,24	45,43
3211	SUMEDANG	272.413	826.462	127.785	32,96	15,46	48,42
3212	INDRAMAYU	452.306	1.380.395	147.379	32,77	10,68	43,44
3213	SUBANG	372.911	1.155.274	149.443	32,28	12,94	45,21
3214	PURWAKARTA	273.507	726.469	63.956	37,65	8,80	46,45
3215	KARAWANG	659.212	1.810.263	142.590	36,42	7,88	44,29
3216	BEKASI	890.544	2.354.038	143.019	37,83	6,08	43,91
3217	BANDUNG BARAT	481.398	1.298.783	131.480	37,07	10,12	47,19
3218	PANGANDARAN	93.455	307.184	46.633	30,42	15,18	45,60
3271	KOTA BOGOR	281.139	795.568	67.401	35,34	8,47	43,81
3272	KOTA SUKABUMI	92.132	253.224	24.740	36,38	9,77	46,15

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	USIA MUDA (0-14 TAHUN)	USIA PRODUKTIF (15-64 TAHUN)	USIA TUA (>= 65 TAHUN)	RASIO KETERGANTUNGAN		
					MUDA	TUA	TOTAL
3273	KOTA BANDUNG	588.008	1.804.228	199.527	32,59	11,06	43,65
3274	KOTA CIREBON	85.900	247.123	23.606	34,76	9,55	44,31
3275	KOTA BEKASI	603.332	1.821.470	147.407	33,12	8,09	41,22
3276	KOTA DEPOK	474.027	1.428.286	108.599	33,19	7,60	40,79
3277	KOTA CIMAHI	131.688	412.420	37.886	31,93	9,19	41,12
3278	KOTA TASIKMALAYA	184.457	528.814	57.568	34,88	10,89	45,77
3279	KOTA BANJAR	47.408	144.397	17.512	32,83	12,13	44,96
TOTAL		**12.577.476**	**35.279.908**	**3.458.994**	**35,65**	**9,80**	**45,45**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Tabel tersebut memberikan gambaran tentang distribusi penduduk berdasarkan kelompok usia serta rasio ketergantungan di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Dari total populasi sekitar **51.316.378** jiwa, sebanyak **12.577.476** jiwa (**24,51%**) berada dalam kelompok usia muda (0-14 tahun), **35.279.908** jiwa (**68,75%**) berada dalam usia produktif (15-64 tahun), dan **3.458.994** jiwa (**6,74%**) tergolong dalam kelompok lansia (>=65 tahun). Dengan dominasi penduduk usia produktif yang cukup tinggi, Provinsi Jawa Barat memiliki potensi besar untuk memanfaatkan bonus demografi, yang dapat menjadi keuntungan jika disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan tenaga kerja, dan lapangan pekerjaan yang memadai.

Rasio ketergantungan, yang menunjukkan beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif, rata-rata mencapai **45,45**. Rincian dari rasio ini mencakup **35,65** untuk ketergantungan muda, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sekitar **36** anak, serta **9,80** untuk ketergantungan lansia, yang menunjukkan bahwa hampir **10** orang lansia bergantung pada setiap 100 orang usia produktif. Beberapa daerah memiliki rasio ketergantungan yang lebih tinggi dibanding rata-rata, seperti Kabupaten Cianjur (**49,99**), Kabupaten Tasikmalaya (**49,34**), dan Kabupaten Ciamis (**48,95**), yang mencerminkan tingginya jumlah penduduk yang belum atau tidak lagi berada dalam usia produktif. Sebaliknya, daerah seperti Kota Depok (**40,79**), Kota Cimahi (**41,12**) dan Kota Bekasi (**41,22**) memiliki rasio ketergantungan yang lebih rendah, menunjukkan dominasi kelompok usia produktif yang lebih besar serta potensi ekonomi yang lebih tinggi.

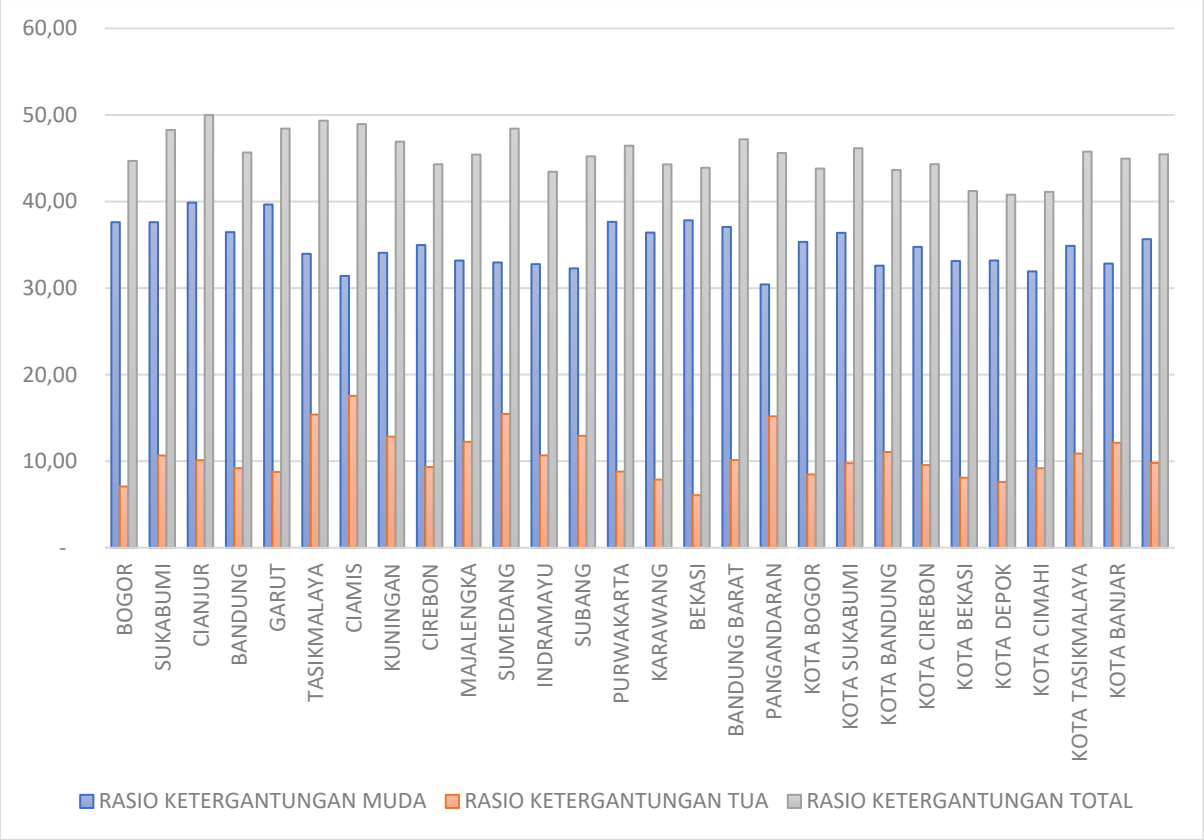

Gambar 4-7 Rasio Ketergantungan Kabupaten/Kota

Secara sosial dan ekonomi, wilayah ini menghadapi tantangan dalam pengelolaan beban ketergantungan, terutama dengan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia yang membutuhkan perhatian lebih dalam hal layanan kesehatan dan jaminan sosial. Sementara itu, daerah dengan rasio ketergantungan muda yang tinggi perlu berfokus pada pengembangan kualitas pendidikan dan penciptaan lapangan kerja agar generasi muda dapat terserap ke dalam pasar kerja secara optimal. Dengan kebijakan yang tepat, struktur demografi ini dapat menjadi kekuatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

4.1.2.2. Jumlah Dan Proporsi Penduduk Menurut Status Kawin

Informasi tentang perkawinan penduduk pada waktu tertentu berguna bagi para penentu kebijakan dan pelaksana program kependudukan. Terutama dalam hal pembangunan keluarga, kelahiran dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga. Dari informasi penduduk berstatus kawin, umur perkawinan pertama, dan lama kawin akan berguna untuk mengestimasi angka kelahiran yang akan terjadi. Umur perkawinan pertama misalnya, berkaitan dengan lamanya seseorang perempuan beresiko untuk hamil dan melahirkan. Perkawinan usia dini juga akan berakibat pada besarnya angka perceraian. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidaksiapan orang tua dalam pengasuhan anak, serta kurang matangnya tingkat emosional pasangan pada saat harus menjalankan tugas dan fungsinya dalam rumah tangga. Dalam hal ini, konsep perkawinan difokuskan pada kondisi dimana seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama secara sah (de jure) maupun

tanpa pengesahan perkawinan (de facto). Secara tidak langsung status perkawinan akan mempengaruhi tingkat kelahiran. Umumnya, suatu daerah dengan proporsi kawin yang tinggi, cenderung menaikkan angka kelahiran.

Tabel 4-11 Jumlah Penduduk berdasarkan Status Kawin

NO	STATUS KAWIN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	BELUM KAWIN	12.699.175	24,75	10.222.787	19,92	22.921.962	44,67
2	KAWIN	12.503.260	24,37	12.541.534	24,44	25.044.794	48,80
3	CERAI HIDUP	379.092	0,74	711.515	1,39	1.090.607	2,13
4	CERAI MATI	416.267	0,81	1.842.748	3,59	2.259.015	4,40
TOTAL		**25.997.794**	**50,66**	**25.318.584**	**49,34**	**51.316.378**	**100,00**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Tabel di atas menyajikan komposisi penduduk menurut status kawin pada penduduk Provinsi Jawa Barat. Tabel tersebut menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Jawa Barat didominasi oleh penduduk berstatus kawin yakni **48,80%**, diikuti dengan status belum kawin **44,67%**, cerai hidup **2,13%**, dan cerai mati **4,40%**. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, proporsi penduduk laki-laki yang berstatus kawin, cerai hidup dan cerai mati lebih rendah dibandingkan perempuan. Sementara, proporsi penduduk laki-laki berstatus belum kawin lebih tinggi dibandingkan perempuan, karena biasanya laki-laki masih meneruskan pendidikan atau baru mulai bekerja, sehingga menunda perkawinan. Begitu juga laki-laki yang dikonstruksikan sebagai tulang punggung keluarga yang harus membiayai kebutuhan keluarganya mempunyai keinginan mapan terlebih dahulu secara ekonomi sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Tabel 4-12 Jumlah Penduduk berdasarkan Status Kawin dan Kelompok Umur

NO	UMUR	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI	
		N	%	N	%	N	%	N	%
1	00-04	3.616.246	7,05	313	0,00	1	0,00	43	0,00
2	05-09	4.457.074	8,69	51	0,00	-	-	1	0,00
3	10-14	4.503.707	8,78	35	0,00	-	-	5	0,00
4	15-19	3.784.529	7,37	29.431	0,06	430	0,00	43	0,00
5	20-24	3.470.672	6,76	826.419	1,61	14.973	0,03	1.614	0,00
6	25-29	1.634.471	3,19	2.383.752	4,65	64.242	0,13	7.895	0,02
7	30-34	643.414	1,25	3.118.672	6,08	110.568	0,22	19.295	0,04
8	35-39	316.746	0,62	3.162.888	6,16	131.897	0,26	38.079	0,07
9	40-44	203.978	0,40	3.531.974	6,88	168.582	0,33	79.550	0,16
10	45-49	121.644	0,24	3.191.265	6,22	166.542	0,32	138.142	0,27
11	50-54	74.793	0,15	2.797.539	5,45	144.482	0,28	211.353	0,41
12	55-59	44.198	0,09	2.191.896	4,27	109.550	0,21	296.250	0,58
13	60-64	23.492	0,05	1.606.021	3,13	75.109	0,15	343.518	0,67
14	65-69	13.021	0,03	1.034.970	2,02	46.124	0,09	348.125	0,68

NO	UMUR	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI	
		N	%	N	%	N	%	N	%
15	70-74	7.161	0,01	640.038	1,25	28.419	0,06	305.662	0,60
16	> 75	6.816	0,01	529.530	1,03	29.688	0,06	469.440	0,91
TOTAL		**22.921.962**	**44,67**	**25.044.794**	**48,80**	**1.090.607**	**2,13**	**2.259.015**	**4,40**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Tabel diatas menunjukkan distribusi status perkawinan penduduk berdasarkan kelompok umur. Dari total penduduk yang tercatat, **44,67%** atau sekitar **22.921.962** orang berstatus belum kawin, dengan persentase tertinggi berada pada kelompok usia anak-anak dan remaja, terutama usia 0-14 tahun. Sementara itu, **48,80%** atau sekitar **25.044.794** orang telah menikah, dengan jumlah terbesar pada kelompok usia 25-39 tahun, di mana puncaknya terjadi pada kelompok umur 40-44 tahun dengan lebih dari **3.531.974** orang yang menikah.

Selain itu, data juga mencatat bahwa **2,13%** atau sekitar **1.090.607** orang berstatus cerai hidup, dengan proporsi tertinggi pada kelompok umur 40-54 tahun, menunjukkan bahwa perceraian lebih umum terjadi pada usia dewasa. Sementara itu, **4,40%** atau sekitar **2.259.015** orang berstatus cerai mati, dengan jumlah terbesar pada kelompok 60 tahun ke atas, mencerminkan dampak usia lanjut terhadap status perkawinan. Secara keseluruhan, distribusi status perkawinan ini menggambarkan pola sosial demografi penduduk, di mana mayoritas penduduk yang sudah menikah berada pada usia produktif, sedangkan kasus perceraian dan cerai mati meningkat seiring bertambahnya usia.

Tabel 4-13 Jumlah Penduduk berdasarkan Status Perkawinan Belum Kawin dan Kawin

NO	UMUR	BELUM KAWIN		KAWIN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	00-04	1.866.915	1.749.331	176	137
2	05-09	2.301.748	2.155.326	28	23
3	10-14	2.325.449	2.178.258	12	23
4	15-19	1.945.815	1.838.714	3.047	26.384
5	20-24	2.006.193	1.464.479	203.577	622.842
6	25-29	1.151.944	482.527	938.957	1.444.795
7	30-34	502.244	141.170	1.438.387	1.680.285
8	35-39	251.183	65.563	1.538.172	1.624.716
9	40-44	159.900	44.078	1.743.194	1.788.780
10	45-49	89.030	32.614	1.608.080	1.583.185
11	50-54	49.504	25.289	1.469.911	1.327.628
12	55-59	25.777	18.421	1.197.580	994.316
13	60-64	12.413	11.079	919.351	686.670
14	65-69	6.155	6.866	635.492	399.478
15	70-74	2.849	4.312	428.348	211.690
16	> 75	2.056	4.760	378.948	150.582
TOTAL		**12.699.175**	**10.222.787**	**12.503.260**	**12.541.534**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Tabel diatas menyajikan distribusi status perkawinan penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang belum kawin lebih banyak didominasi oleh laki-laki, dengan total **12.699.175** laki-laki dan **10.222.787** perempuan. Sebagian besar dari mereka berada pada kelompok usia 0-14 tahun, yang mencerminkan bahwa mayoritas anak-anak dan remaja masih berada dalam status ini. Sementara itu, penduduk yang telah menikah tercatat hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan, dengan total **12.503.260** laki-laki dan **12.541.534** perempuan. Puncak jumlah penduduk yang menikah terjadi pada kelompok usia 40-44 tahun, yang menandakan bahwa periode ini menjadi fase utama pernikahan bagi masyarakat.

Tabel 4-14 Jumlah Penduduk berdasarkan Status Perkawinan Cerai Hidup dan Cerai Mati

NO	UMUR	CERAI HIDUP		CERAI MATI	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	00-04	1	-	20	23
2	05-09	-	-	1	-
3	10-14	-	-	3	2
4	15-19	28	402	-	43
5	20-24	2.255	12.718	257	1.357
6	25-29	17.703	46.539	2.055	5.840
7	30-34	40.538	70.030	5.247	14.048
8	35-39	51.933	79.964	9.369	28.710
9	40-44	63.286	105.296	16.938	62.612
10	45-49	60.206	106.336	25.313	112.829
11	50-54	51.276	93.206	36.360	174.993
12	55-59	37.887	71.663	49.745	246.505
13	60-64	23.851	51.258	58.806	284.712
14	65-69	14.179	31.945	63.265	284.860
15	70-74	8.387	20.032	59.161	246.501
16	> 75	7.562	22.126	89.727	379.713
TOTAL		**379.092**	**711.515**	**416.267**	**1.842.748**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Dalam kategori cerai hidup, jumlah perempuan yang bercerai lebih tinggi dibanding laki-laki, yaitu **711.515** perempuan dan **379.092** laki-laki. Hal ini terlihat jelas pada kelompok usia 40 tahun ke atas, di mana angka perceraian mulai meningkat. Sementara itu, pada kategori cerai mati, jumlah perempuan yang kehilangan pasangan jauh lebih besar, mencapai **1.842.748** dibandingkan **416.267** laki-laki. Perbedaan ini menunjukkan bahwa perempuan lebih sering menjadi janda dibanding laki-laki menjadi duda, yang kemungkinan disebabkan oleh angka harapan hidup perempuan yang lebih tinggi. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa status perkawinan dipengaruhi oleh faktor usia dan jenis kelamin. Laki-laki cenderung menikah lebih lambat, sedangkan perempuan lebih banyak mengalami perceraian atau kehilangan pasangan di usia lanjut.

4.1.2.2.1. Angka Perkawinan Kasar

Angka Perkawinan Kasar menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun pada suatu tahun tertentu. Angka perkawinan kasar ini merupakan indikator perkawinan yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin, tetapi bagi daerahdaerah yang belum atau tidak ada pencatatan perkawinan dan jumlah penduduk menurut umur, maka indikator ini sangat berguna terutama dalam mengembangkan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian maupun program-program pelayanan keluarga.

Tabel 4-15 Angka Perkawinan Kasar berdasarkan Kabupaten/Kota

KODE WIL	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	JUMLAH PERKAWINAN	ANGKA PERKAWINAN KASAR
3201	BOGOR	5.664.537	50.138	8,85
3202	SUKABUMI	2.821.619	22.567	8,00
3203	CIANJUR	2.584.735	22.129	8,56
3204	BANDUNG	3.773.104	44.396	11,77
3205	GARUT	2.790.435	31.847	11,41
3206	TASIKMALAYA	1.973.411	20.463	10,37
3207	CIAMIS	1.293.235	13.662	10,56
3208	KUNINGAN	1.235.854	13.893	11,24
3209	CIREBON	2.452.563	29.381	11,98
3210	MAJALENGKA	1.364.891	16.723	12,25
3211	SUMEDANG	1.216.309	14.749	12,13
3212	INDRAMAYU	1.947.720	19.732	10,13
3213	SUBANG	1.649.618	15.046	9,12
3214	PURWAKARTA	1.052.093	10.426	9,91
3215	KARAWANG	2.572.553	23.967	9,32
3216	BEKASI	3.289.743	27.752	8,44
3217	BANDUNG BARAT	1.878.507	19.797	10,54
3218	PANGANDARAN	445.158	5.480	12,31
3271	KOTA BOGOR	1.137.018	11.213	9,86
3272	KOTA SUKABUMI	367.457	3.698	10,06
3273	KOTA BANDUNG	2.579.837	25.100	9,73
3274	KOTA CIREBON	354.679	4.033	11,37
3275	KOTA BEKASI	2.526.133	23.407	9,27
3276	KOTA DEPOK	1.967.831	19.224	9,77
3277	KOTA CIMAHI	579.906	6.101	10,52
3278	KOTA TASIKMALAYA	761.080	9.011	11,84
3279	KOTA BANJAR	209.182	2.659	12,71
TOTAL		**50.489.208**	**506.594**	**10,03**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Tabel di atas menyajikan data Angka Perkawinan Kasar di berbagai kabupaten dan kota. Secara keseluruhan, jumlah penduduk pertengahan tahun di Provinsi Jawa Barat yang tercatat mencapai **50.489.208** jiwa, dengan jumlah pernikahan sebanyak **506.594** kasus. Angka pernikahan kasar rata-rata berada di angka **10,03**, yang menunjukkan terdapat **±10** jumlah pernikahan per 1.000 penduduk dalam satu tahun.

Beberapa daerah dengan jumlah pernikahan tertinggi antara lain Kabupaten Bogor (**50.138** pernikahan), Kabupaten Bandung (**44.396** pernikahan), dan Kabupaten Garut (**31.847** pernikahan), yang mencerminkan tingginya jumlah penduduk serta dinamika sosial di wilayah tersebut. Di sisi lain, beberapa daerah dengan jumlah pernikahan lebih rendah antara lain Kota Banjar (**2.659** pernikahan), Kota Sukabumi (**3.698** pernikahan), dan Kota Cirebon (**4.033** pernikahan) yang kemungkinan disebabkan oleh jumlah penduduk yang relatif lebih sedikit dibanding wilayah lain.

Sementara itu, angka pernikahan kasar tertinggi tercatat di Kota Banjar (**12,71**), Kabupaten Pangandaran (**12,31**), dan Kabupaten Majengka (**12,25**), yang menunjukkan bahwa dalam setiap 1.000 penduduk di daerah tersebut melangsungkan **±12** pernikahan. Sedangkan angka pernikahan kasar terendah tercatat berada di Kabupaten Sukabumi (**8,00**), Kabupaten Bekasi (**8,44**), dan Kabupaten Cianjur (**8,56**), yang menunjukkan bahwa dalam setiap 1.000 penduduk di daerah tersebut melangsungkan **±8** pernikahan.

Secara umum, data ini mencerminkan variasi tingkat pernikahan di berbagai Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, yang dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, faktor budaya, serta kondisi sosial dan ekonomi di masing-masing wilayah.

4.1.2.2.2. Angka Perkawinan Umum

Angka Perkawinan Umum (AKU) menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas pada suatu tahun tertentu. Angka Perkawinan Umum lebih cermat dibandingkan dengan Angka Perkawinan Kasar karena dalam perhitungan ini hanya memasukkan penduduk yang berisiko kawin saja yaitu penduduk yang berumur 15 tahun ke atas sebagai faktor penyebut. Sementara penduduk berusia di bawah 15 tahun tidak diikutsertakan sebagai penyebut karena dianggap belum terpapar terhadap peristiwa perkawinan.

Tabel 4-16 Angka Perkawinan Umum berdasarkan Kabupaten/Kota

KODE WIL	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK USIA >15	JUMLAH PERKAWINAN	ANGKA PERKAWINAN UMUM
3201	BOGOR	4.299.615	50.138	12,12
3202	SUKABUMI	2.141.142	22.567	10,86
3203	CIANJUR	1.937.229	22.129	11,82
3204	BANDUNG	2.878.503	44.396	15,97
3205	GARUT	2.089.881	31.847	15,86
3206	TASIKMALAYA	1.542.232	20.463	13,59

KODE WIL	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK USIA >15	JUMLAH PERKAWINAN	ANGKA PERKAWINAN UMUM
3207	CIAMIS	1.024.154	13.662	13,52
3208	KUNINGAN	952.354	13.893	14,82
3209	CIREBON	1.885.802	29.381	16,04
3210	MAJALENGKA	1.057.061	16.723	16,04
3211	SUMEDANG	954.247	14.749	15,76
3212	INDRAMAYU	1.527.774	19.732	13,30
3213	SUBANG	1.304.717	15.046	11,89
3214	PURWAKARTA	790.425	10.426	13,51
3215	KARAWANG	1.952.853	23.967	12,62
3216	BEKASI	2.497.057	27.752	11,62
3217	BANDUNG BARAT	1.430.263	19.797	14,31
3218	PANGANDARAN	353.817	5.480	15,73
3271	KOTA BOGOR	862.969	11.213	13,24
3272	KOTA SUKABUMI	277.964	3.698	13,55
3273	KOTA BANDUNG	2.003.755	25.100	12,76
3274	KOTA CIREBON	270.729	4.033	15,17
3275	KOTA BEKASI	1.968.877	23.407	12,28
3276	KOTA DEPOK	1.536.885	19.224	12,98
3277	KOTA CIMAHI	450.306	6.101	13,75
3278	KOTA TASIKMALAYA	586.382	9.011	15,79
3279	KOTA BANJAR	161.909	2.659	16,62
TOTAL		**38.738.902**	**506.594**	**13,48**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Data yang ditampilkan pada tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk usia di atas 15 tahun, jumlah pernikahan, dan angka perkawinan umum di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Secara keseluruhan, jumlah penduduk usia di atas 15 tahun di Jawa Barat mencapai **38.738.902** jiwa, dengan jumlah pernikahan sebanyak **506.594**. Angka perkawinan umum di Jawa Barat rata-rata sebesar **13,48**, Angka tersebut menjelaskan bahwa dari 1.000 penduduk Provinsi Jawa Barat yang berusia diatas 15 tahun terdapat **±13** orang yang melakukan pernikahan. Kabupaten Bogor memiliki jumlah pernikahan tertinggi, yaitu **50.138** pernikahan, dengan angka perkawinan umum sebesar **12,12**, Kabupaten Bogor juga memiliki jumlah penduduk usia di atas 15 tahun paling besar yaitu **4.299.615** jiwa. Sementara itu, Kabupaten dengan angka perkawinan umum tertinggi adalah Kota Banjar, yaitu sebesar **16,62**, meskipun jumlah penduduk usia di atas 15 tahun di daerah ini relatif kecil, yaitu **161.909** jiwa.

Kabupaten dan kota lainnya menunjukkan variasi dalam angka perkawinan umum. Misalnya, Kabupaten Cirebon memiliki angka perkawinan umum sebesar **16,04** dengan jumlah pernikahan sebanyak **29.381**. Di sisi lain, Kota Depok memiliki angka perkawinan umum yang lebih rendah, yaitu **12,98** dengan jumlah pernikahan **19.224**. Kabupaten dengan angka perkawinan umum terendah adalah Kabupaten Sukabumi, yaitu sebesar **10,86**, dengan jumlah

pernikahan sebanyak **22.567**. Secara keseluruhan, angka perkawinan umum di Jawa Barat menunjukkan bahwa tingkat pernikahan bervariasi di setiap kabupaten/kota. Faktor-faktor seperti jumlah penduduk usia menikah, kondisi sosial ekonomi, serta budaya lokal kemungkinan besar mempengaruhi angka perkawinan di masing-masing daerah.

4.1.2.2.3. Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur

Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur atau angka perkawinan spesifik (age specific marriage rate) adalah angka yang menunjukkan berapa banyaknya penduduk pada suatu umur tertentu yang berstatus kawin untuk tiap-tiap 1.000 penduduk pada kelompok umur yang sama.Indikator ini berguna untuk perencanaan program-program yang berkaitan dengan peningkatan usia kawin pertama, mempertahankan anak-anak usia sekolah untuk tetap bersekolah dan mengembangkan pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja.

Tabel 4-17 Angka Perkawinan menurut Kelompok Umur

NO	UMUR	PENDUDUK STATUS KAWIN	PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	ANGKA PERKAWINAN
1	00-04	313	3.192.275	0,10
2	05-09	51	4.397.632	0,01
3	10-14	35	4.453.798	0,01
4	15-19	29.431	3.502.170	8,40
5	20-24	826.419	4.292.861	192,51
6	25-29	2.383.752	4.079.563	584,32
7	30-34	3.118.672	3.881.404	803,49
8	35-39	3.162.888	3.641.046	868,68
9	40-44	3.531.974	3.977.758	887,93
10	45-49	3.191.265	3.616.362	882,45
11	50-54	2.797.539	3.232.020	865,57
12	55-59	2.191.896	2.651.389	826,70
13	60-64	1.606.021	2.060.966	779,26
14	65-69	1.034.970	1.456.261	710,70
15	70-74	640.038	994.206	643,77
16	> 75	529.530	1.059.497	499,79
TOTAL		**25.044.794**	**50.489.208**	**496,04**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Tabel di atas memberikan gambaran tentang angka perkawinan di berbagai kelompok usia di Jawa Barat. Dari total **50.489.208** penduduk pertengahan tahun, sebanyak **25.044.794** di antaranya tercatat dalam status kawin. Angka perkawinan secara keseluruhan mencapai **496,04**, yang menunjukkan bahwa setiap 1000 penduduk Provinsi Jawa Barat terdapat **±496** orang yang melakukan pernikahan. Distribusi pernikahan menunjukkan tren yang signifikan pada usia 20-24 tahun, dengan **826.419** individu menikah. Jumlah ini meningkat drastis pada kelompok usia 25-29 tahun, yang mencatat **2.383.752** individu menikah. Kelompok usia 30-34 tahun juga mencatat angka yang tinggi, yaitu **3.118.672** individu, dan mencapai puncaknya

pada usia 40-44 tahun dengan **3.531.974** individu menikah. Setelah itu, jumlah pernikahan mulai mengalami penurunan seiring bertambahnya usia.

Angka perkawinan tertinggi tercatat pada kelompok usia 40-44 tahun dengan **887,93**, diikuti oleh kelompok usia 45-49 tahun dengan **882,45**, dan kelompok usia 35-39 tahun dengan **868,68**. Sementara itu, angka perkawinan pada kelompok usia muda, khususnya di bawah 20 tahun, yaitu hanya **8,40** untuk usia 15-19 tahun, mencerminkan rendahnya kejadian pernikahan dini. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa puncak pernikahan terjadi pada usia produktif, khususnya di rentang usia 35-49 tahun, sebelum menurun secara bertahap pada usia yang lebih tua. Hal ini mengindikasikan pola pernikahan yang umumnya terjadi setelah memasuki usia dewasa dan kondisi ekonomi yang lebih stabil.Rata-Rata Umur Kawin Pertama

4.1.2.2.4. Rata-Rata Umur Kawin Pertama (SMAM)

Rata-rata usia kawin pertama dari penduduk suatu daerah mencerminkan keadaan sosial ekonomi dari daerah tersebut. Perempuan dan laki-laki yang kawin muda biasanya tidak banyak mempunyai alternatif kegiatan lain sehingga mereka menikah pada usia muda dan meninggalkan bangku sekolah. Untuk memperoleh rata-rata usia kawin pertama yang lebih cermat, para demografer mengembangkan rata-rata usia kawin dari data tentang proporsi penduduk yang masih lajang menurut umur. Estimasi rata-rata usia kawin dengan cara ini disebut Singulate Mean Age at Marriage (SMAM).

Definisi Singulate Mean Age at Marriage (SMAM) adalah perkiraan (estimasi) ratarata umur kawin pertama berdasarkan jumlah penduduk yang tetap lajang (belum kawin). Kegunaan tersedianya indikator rata-rata umur kawin pertama dengan metode SMAM akan memudahkan para penentu kebijakan dan perencana pembangunan untuk mengembangkan program pemberdayaan orang muda agar meneruskan sekolah, dan bagi yang terpaksa putus sekolah diberikan pendidikan keterampilan agar tidak segera memasuki jenjang perkawinan. Program untuk pendewasaan usia perkawinan bagi perempuan juga dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

Tabel 4-18 Rata-Rata Umur Kawin Pertama berdasarkan Kabupaten/Kota

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	USIA RATA-RATA PERKAWINAN (TAHUN)	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
32	**JAWA BARAT**	**31**	**25**
3201	BOGOR	30	25
3202	SUKABUMI	29	24
3203	CIANJUR	29	24
3204	BANDUNG	28	24
3205	GARUT	28	24
3206	TASIKMALAYA	29	24
3207	CIAMIS	29	25

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	USIA RATA-RATA PERKAWINAN (TAHUN)	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
3208	KUNINGAN	30	25
3209	CIREBON	29	25
3210	MAJALENGKA	29	24
3211	SUMEDANG	28	24
3212	INDRAMAYU	29	25
3213	SUBANG	29	25
3214	PURWAKARTA	29	25
3215	KARAWANG	28	25
3216	BEKASI	29	26
3217	BANDUNG BARAT	28	24
3218	PANGANDARAN	29	24
3271	KOTA BOGOR	30	26
3272	KOTA SUKABUMI	29	26
3273	KOTA BANDUNG	30	26
3274	KOTA CIREBON	29	26
3275	KOTA BEKASI	30	28
3276	KOTA DEPOK	30	27
3277	KOTA CIMAHI	29	26
3278	KOTA TASIKMALAYA	29	25
3279	KOTA BANJAR	29	25

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Tabel di atas menunjukkan usia rata-rata perkawinan berdasarkan jenis kelamin di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Secara keseluruhan, usia rata-rata perkawinan di Jawa Barat adalah 31 tahun untuk laki-laki dan 25 tahun untuk perempuan. Data ini mencerminkan pola pernikahan yang cenderung lebih lambat bagi laki-laki dibandingkan perempuan. Jika dilihat berdasarkan wilayah, terdapat variasi usia rata-rata perkawinan di setiap kabupaten/kota. Beberapa daerah memiliki usia perkawinan laki-laki yang lebih tinggi, seperti Kabupaten Kuningan dengan rata-rata 30 tahun, serta Kota Bekasi dan Kota Depok juga mencapai 30 tahun. Sementara itu, di beberapa daerah seperti Kabupaten Bandung, Garut, dan Karawang, usia rata-rata perkawinan laki-laki lebih rendah, yaitu 28 tahun.

Untuk perempuan, usia rata-rata perkawinan sebagian besar berkisar antara 24 hingga 26 tahun. Beberapa daerah memiliki usia rata-rata perkawinan perempuan yang lebih tinggi, seperti Kota Sukabumi, Kota Cirebon, dan Kota Cimahi, yang mencatat usia rata-rata 26 hingga 27 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa di beberapa wilayah perkotaan, perempuan cenderung menikah pada usia yang sedikit lebih tua dibandingkan daerah lainnya. Secara umum, pola ini mencerminkan bahwa laki-laki cenderung menikah di usia yang lebih matang dibandingkan perempuan.

4.1.2.2.5. Angka Perceraian Kasar

Berakhirnya suatu perkawinan selain membawa implikasi demografi juga mempunyai implikasi sosiologi. Implikasi demografi adalah mempengaruhi fertilitas dalam arti mengurangi fertilitas, sedangkan implikasi sosiologi lebih kepada persepsi masyarakat tentang status cerai terutama bagi perempuan. Angka Perceraian Kasar menunjukkan jumlah perceraian per 1000 penduduk terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu.

Angka ini berguna untuk mengetahui gambaran sosiologis suatu daerah yang berkaitan dengan tingkat perceraian. Angka perceraian kasar ini merupakan indikator perceraian (cerai hidup) yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin, bagi daerahdaerah yang belum atau tidak ada pencatatan perkawinan dan perceraian serta jumlah penduduk menurut umur, maka indikator ini sangat berguna terutama dalam mengembangkan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian maupun program-program pelayanan keluarga.

Tabel 4-19 Angka Perceraian Kasar berdasarkan Kabupaten/Kota

KODE WIL	KABUPATEN /KOTA	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	JUMLAH PERCERAIAN	ANGKA PERCERAIAN KASAR
3201	BOGOR	5.664.537	9.866	1,74
3202	SUKABUMI	2.821.619	3.290	1,17
3203	CIANJUR	2.584.735	4.327	1,67
3204	BANDUNG	3.773.104	7.221	1,91
3205	GARUT	2.790.435	5.547	1,99
3206	TASIKMALAYA	1.973.411	3.187	1,61
3207	CIAMIS	1.293.235	3.106	2,40
3208	KUNINGAN	1.235.854	1.878	1,52
3209	CIREBON	2.452.563	3.915	1,60
3210	MAJALENGKA	1.364.891	3.205	2,35
3211	SUMEDANG	1.216.309	1.732	1,42
3212	INDRAMAYU	1.947.720	3.686	1,89
3213	SUBANG	1.649.618	2.165	1,31
3214	PURWAKARTA	1.052.093	1.291	1,23
3215	KARAWANG	2.572.553	3.965	1,54
3216	BEKASI	3.289.743	3.074	0,93
3217	BANDUNG BARAT	1.878.507	3.194	1,70
3218	PANGANDARAN	445.158	1.837	4,13
3271	KOTA BOGOR	1.137.018	3.324	2,92
3272	KOTA SUKABUMI	367.457	1.780	4,84
3273	KOTA BANDUNG	2.579.837	6.988	2,71
3274	KOTA CIREBON	354.679	615	1,73
3275	KOTA BEKASI	2.526.133	6.398	2,53
3276	KOTA DEPOK	1.967.831	4.405	2,24

KODE WIL	KABUPATEN /KOTA	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	JUMLAH PERCERAIAN	ANGKA PERCERAIAN KASAR
3277	KOTA CIMAHI	579.906	1.029	1,77
3278	KOTA TASIKMALAYA	761.080	3.081	4,05
3279	KOTA BANJAR	209.182	1.236	5,91
TOTAL		**50.489.208**	**95.342**	**1,89**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Tabel ini menyajikan data angka perceraian kasar di berbagai kabupaten/kota. Secara keseluruhan, jumlah penduduk pertengahan tahun tercatat **50.489.208** jiwa, dengan jumlah perceraian mencapai **95.342** kasus, menghasilkan angka perceraian kasar sebesar **1,89** per 1.000 penduduk. Dari data ini, terdapat variasi angka perceraian kasar antar kabupaten/kota. Kota Banjar memiliki angka perceraian kasar tertinggi, yaitu **5,91**, yang menunjukkan bahwa jumlah perceraian per 1.000 penduduk di daerah ini cukup tinggi dibandingkan wilayah lain. Selain itu, Kota Sukabumi (**4,84**), Kabupaten Pangandaran (**4,13**), dan Kota Tasikmalaya (**4,05**) juga memiliki angka perceraian kasar yang tinggi.

Sebaliknya, wilayah dengan angka perceraian kasar yang lebih rendah adalah Kabupaten Bekasi (**0,93**), Kabupaten Sukabumi (**1,17**), dan Kabupaten Purwakarta (**1,23**), yang menunjukkan tingkat perceraian yang lebih rendah dibandingkan daerah lain. Secara absolut, jumlah perceraian tertinggi terjadi di Kabupaten Kabupaten Bogor (**9.866** kasus), diikuti oleh Kabupaten Bandung (**7.221** kasus) dan Kota Bandung (**6.988** kasus). Hal ini dapat disebabkan oleh jumlah penduduk yang lebih besar di daerah tersebut. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa meskipun secara keseluruhan angka perceraian kasar berada pada angka **1,89**, terdapat variasi yang signifikan antar kabupaten/kota. Faktor-faktor seperti jumlah penduduk, kondisi sosial ekonomi, dan budaya di setiap daerah dapat berkontribusi terhadap perbedaan angka perceraian ini.

4.1.2.2.6. Angka Perceraian Umum

Angka Perceraian Umum menunjukkan penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (penduduk yang terkena resiko perceraian) pada suatu tahun tertentu.

Tabel 4-20 Angka Perceraian Umum berdasarkan Kabupaten/Kota

KODE WIL	KABUPATEN /KOTA	PENDUDUK USIA >15	JUMLAH PERCERAIAN	ANGKA PERCERAIAN UMUM
3201	BOGOR	4.299.615	9.866	2,29
3202	SUKABUMI	2.141.142	3.290	1,54
3203	CIANJUR	1.937.229	4.327	2,23
3204	BANDUNG	2.878.503	7.221	2,51
3205	GARUT	2.089.881	5.547	2,65
3206	TASIKMALAYA	1.542.232	3.187	2,07

KODE WIL	KABUPATEN /KOTA	PENDUDUK USIA >15	JUMLAH PERCERAIAN	ANGKA PERCERAIAN UMUM
3207	CIAMIS	1.024.154	3.106	3,03
3208	KUNINGAN	952.354	1.878	1,97
3209	CIREBON	1.885.802	3.915	2,08
3210	MAJALENGKA	1.057.061	3.205	3,03
3211	SUMEDANG	954.247	1.732	1,82
3212	INDRAMAYU	1.527.774	3.686	2,41
3213	SUBANG	1.304.717	2.165	1,66
3214	PURWAKARTA	790.425	1.291	1,63
3215	KARAWANG	1.952.853	3.965	2,03
3216	BEKASI	2.497.057	3.074	1,23
3217	BANDUNG BARAT	1.430.263	3.194	2,23
3218	PANGANDARAN	353.817	1.837	5,19
3271	KOTA BOGOR	862.969	3.324	3,85
3272	KOTA SUKABUMI	277.964	1.780	6,40
3273	KOTA BANDUNG	2.003.755	6.988	3,49
3274	KOTA CIREBON	270.729	615	2,27
3275	KOTA BEKASI	1.968.877	6.398	3,25
3276	KOTA DEPOK	1.536.885	4.405	2,87
3277	KOTA CIMAHI	450.306	1.029	2,29
3278	KOTA TASIKMALAYA	586.382	3.081	5,25
3279	KOTA BANJAR	161.909	1.236	7,63
TOTAL		**38.738.902**	**95.342**	**2,46**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Tabel ini menyajikan data mengenai angka perceraian umum di berbagai kabupaten/kota. Secara keseluruhan, terdapat **38.738.902** penduduk usia di atas 15 tahun dengan jumlah perceraian mencapai **95.342** kasus, menghasilkan angka perceraian umum sebesar **2,46** per 1.000 penduduk usia di atas 15 tahun. Wilayah dengan angka perceraian umum tertinggi adalah Kota Banjar (**7,63**), Kota Sukabumi (**6,40**), Kota Tasikmalaya (**5,25**), dan Kabupaten Pangandaran (**5,19**).

Sebaliknya, wilayah dengan angka perceraian umum terendah adalah Kabupaten Bekasi (**1,23**), Kabupaten Sukabumi (**1,54**), dan Kabupaten Purwakarta (**1,63**). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat perceraian di wilayah-wilayah ini lebih rendah dibandingkan daerah lain. Dari segi jumlah absolut perceraian, Kabupaten Bogor (**9.866** kasus), Kabupaten Bandung (**7.221** kasus), dan Kota Bandung (**6.988** kasus) mencatat angka perceraian tertinggi. Hal ini bisa disebabkan oleh jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang lebih besar di daerah tersebut. Secara keseluruhan, angka perceraian umum di setiap wilayah bervariasi, yang dapat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, serta kebijakan setempat terkait pernikahan dan perceraian.

4.1.2.3. Keluarga

Informasi tentang jumlah keluarga dan komposisi anggota keluarga, diperlukan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan pangan, pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Keluarga dapat dibagi menjadi 2 tipe yaitu:

1. Keluarga Inti (Nuclear family), yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak kandung, anak angkat maupun adopsi yang belum kawin, atau ayah dengan anak-anak yang belum kawin atau ibu dengan anak-anak yang belum kawin.
2. Keluarga luas (extended family), adalah keluarga ya ng terdiri dari ayah, ibu, anak-anak baik yang sudah kawin atau belum, cucu, orang tua, mertua maupun kerabat-kerabat lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga.

Informasi tentang jumlah keluarga disajikan dalam bentuk tabel per wilayah, di bawah ini beberapa indikator yang diperlukan untuk menggambarkan kondisi keluarga.

4.1.2.3.1. Jumlah Keluarga Dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga

Banyaknya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam satu keluarga, dimana diasumsikan semakin kecil jumlah anggota keluarga biasanya akan semakin baik tingkat kesejahteraannya. Rata-rata jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk melihat perubahan paradigma dari keluarga luas menjadi keluarga kecil.

Tabel 4-21 Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga berdasarkan Kabupaten/Kota

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	KEPALA KELUARGA		RAK
			N	%	
3201	BOGOR	5.809.790	1.824.418	31,40	3,18
3202	SUKABUMI	2.868.943	987.400	34,42	2,91
3203	CIANJUR	2.638.825	904.566	34,28	2,92
3204	BANDUNG	3.839.721	1.268.509	33,04	3,03
3205	GARUT	2.851.877	928.917	32,57	3,07
3206	TASIKMALAYA	1.996.059	733.199	36,73	2,72
3207	CIAMIS	1.297.783	470.464	36,25	2,76
3208	KUNINGAN	1.239.999	420.464	33,91	2,95
3209	CIREBON	2.489.046	847.667	34,06	2,94
3210	MAJALENGKA	1.369.569	493.483	36,03	2,78
3211	SUMEDANG	1.226.660	443.888	36,19	2,76
3212	INDRAMAYU	1.980.080	723.088	36,52	2,74
3213	SUBANG	1.677.628	635.995	37,91	2,64
3214	PURWAKARTA	1.063.932	357.313	33,58	2,98
3215	KARAWANG	2.612.065	899.614	34,44	2,90

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	KEPALA KELUARGA		RAK
			N	%	
3216	BEKASI	3.387.601	1.062.796	31,37	3,19
3217	BANDUNG BARAT	1.911.661	647.592	33,88	2,95
3218	PANGANDARAN	447.272	164.539	36,79	2,72
3271	KOTA BOGOR	1.144.108	366.192	32,01	3,12
3272	KOTA SUKABUMI	370.096	121.751	32,90	3,04
3273	KOTA BANDUNG	2.591.763	853.668	32,94	3,04
3274	KOTA CIREBON	356.629	117.801	33,03	3,03
3275	KOTA BEKASI	2.572.209	818.598	31,82	3,14
3276	KOTA DEPOK	2.010.912	640.624	31,86	3,14
3277	KOTA CIMAHI	581.994	191.524	32,91	3,04
3278	KOTA TASIKMALAYA	770.839	257.313	33,38	3,00
3279	KOTA BANJAR	209.317	74.039	35,37	2,83
TOTAL		**51.316.378**	**17.255.422**	**33,63**	**2,97**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Data di atas menunjukkan jumlah penduduk, kepala keluarga, dan rata-rata jumlah anggota keluarga di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Secara keseluruhan, jumlah penduduk tercatat sebanyak **51.316.378** jiwa dengan **17.255.422** kepala keluarga, menghasilkan rata-rata jumlah anggota keluarga sebesar **2,97** orang per keluarga yang artinya dalam 1 keluarga memiliki **±3** anggota keluarga. Beberapa wilayah memiliki rata-rata jumlah anggota keluarga yang lebih tinggi, seperti Kabupaten Bekasi (**3,19**), Kabupaten Bogor (**3,18**), dan Kota Bekasi (**3,14**). Sebaliknya, beberapa daerah memiliki rata-rata anggota keluarga lebih kecil, seperti Kabupaten Subang (**2,64**), Kabupaten Pangandaran (**2,72**), dan Kabupaten Tasikmalaya (**2,72**). Rata-rata jumlah anggota keluarga yang lebih besar di beberapa daerah dapat mencerminkan pola hidup komunal atau tingginya tingkat ketergantungan dalam rumah tangga. Sebaliknya, wilayah dengan angka lebih rendah bisa mengindikasikan dominasi rumah tangga inti atau jumlah anak yang lebih sedikit dalam satu keluarga.

4.1.2.3.2. Hubungan Dengan Kepala Keluarga

Hubungan dengan kepala keluarga digunakan untuk melihat banyaknya kepala keluarga menurut jenis kelamin, pola pengaturan tinggal bersama (living arrangement) dan pola pengasuhan anak dalam keluarga tersebut. Setiap anggota dalam keluarga mempunyai status hubungan dengan kepala keluarga seperti suami,istri, anak, menantu, cucu, keponakan, orang tua dan mertua, termasuk adanya orang lain yang tinggal bersama seperti pembantu rumah tangga.

Tabel 4-22 Hubungan Dengan Kepala Keluarga

NO	SHDK	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	KEPALA KELUARGA	13.684.061	26,67	3.571.361	6,96	17.255.422	33,63
2	SUAMI	407	0,00	-	-	407	0,00

NO	SHDK	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
3	ISTERI	-	0,00	11.529.039	22,47	11.529.039	22,47
4	ANAK	11.921.425	23,23	9.801.314	19,10	21.722.739	42,33
5	MENANTU	884	0,00	1.195	0,00	2.079	0,00
6	CUCU	146.608	0,29	110.734	0,22	257.342	0,50
7	ORANG TUA	9.603	0,02	71.660	0,14	81.263	0,16
8	MERTUA	5.125	0,01	32.620	0,06	37.745	0,07
9	FAMILI LAINNYA	195.198	0,38	157.030	0,31	352.228	0,69
10	PEMBANTU	275	0,00	913	0,00	1.188	0,00
11	LAINNYA	34.208	0,07	42.718	0,08	76.926	0,15
TOTAL		**25.997.794**	**50,66**	**25.318.584**	**49,34**	**51.316.378**	**100,00**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan data status hubungan dalam keluarga, dari total **51.316.378** penduduk, sebanyak **17.255.422** orang atau **33,63%** berperan sebagai kepala keluarga, dengan mayoritas diisi oleh laki-laki (**13.684.061** orang atau **26,67%**), sedangkan perempuan yang menjadi kepala keluarga berjumlah **3.571.361** orang atau **6,96%**. Kategori terbesar dalam struktur keluarga adalah anak, yang mencakup **42,33%** dari total populasi, terdiri dari **11.921.425** laki-laki (**23,23%**) dan **9.801.314** perempuan (**19,10%**). Sementara itu, peran istri di dalam keluarga mencakup **22,47%** dari total penduduk atau **11.529.039** orang, sementara jumlah suami yang tercatat hanya **407** orang, yang kemungkinan besar disebabkan oleh pencatatan dalam sistem data.

Selain itu, jumlah cucu yang tinggal dalam satu keluarga cukup besar, yaitu **257.342** orang (**0,50%**), dengan proporsi yang hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan orang tua yang tinggal dalam keluarga mencapai **81.263** orang (**0,16%**), dan mertua sebanyak **37.745** orang (**0,07%**). Ada juga kategori famili lainnya yang mencakup **352.228** orang (**0,69%**), serta status hubungan keluarga lainnya dan pekerja rumah tangga yang jumlahnya relatif kecil, yakni **76.926** orang (**0,15%**) dan **1.188** orang (**0,00%**). Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk dalam keluarga adalah anak-anak, sedangkan kepala keluarga didominasi oleh laki-laki. Jumlah anggota keluarga lainnya, seperti orang tua dan mertua, relatif kecil, menunjukkan bahwa pola keluarga inti lebih umum dibandingkan keluarga besar yang tinggal bersama.

4.1.2.3.3. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur

Informasi tentang kelompok umur dari Kepala Keluarga dan anggota keluarga penting diketahui terutama untuk melakukan analisis kondisi demografi keluarga serta perencanaan kebijakan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan lain-lain.

Tabel 4-23 Kepala Keluarga berdasarkan Kelompok Umur

NO	UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	00-04	83	0,00	59	0,00	142	0,00

NO	UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
2	05-09	167	0,00	148	0,00	315	0,00
3	10-14	372	0,00	351	0,00	723	0,00
4	15-19	14.122	0,08	14.592	0,08	28.714	0,17
5	20-24	283.103	1,64	80.255	0,47	363.358	2,11
6	25-29	1.051.494	6,09	137.104	0,79	1.188.598	6,89
7	30-34	1.552.092	8,99	175.796	1,02	1.727.888	10,01
8	35-39	1.647.216	9,55	202.893	1,18	1.850.109	10,72
9	40-44	1.861.295	10,79	283.283	1,64	2.144.578	12,43
10	45-49	1.720.471	9,97	337.581	1,96	2.058.052	11,93
11	50-54	1.576.309	9,14	381.622	2,21	1.957.931	11,35
12	55-59	1.296.216	7,51	420.610	2,44	1.716.826	9,95
13	60-64	1.006.525	5,83	422.618	2,45	1.429.143	8,28
14	65-69	713.213	4,13	380.672	2,21	1.093.885	6,34
15	70-74	493.702	2,86	307.399	1,78	801.101	4,64
16	> 75	467.681	2,71	426.378	2,47	894.059	5,18
TOTAL		**13.684.061**	**79,30**	**3.571.361**	**20,70**	**17.255.422**	**100,00**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan distribusi kepala keluarga berdasarkan kelompok umur, dari total **17.255.422** kepala keluarga, kelompok usia 40-44 tahun memiliki jumlah kepala keluarga yang lebih tinggi, mencapai **2.144.578** orang (**12,43%**), yang menjadi puncak distribusi kepala keluarga dalam data ini. Seiring bertambahnya usia, jumlah kepala keluarga cenderung menurun, meskipun tetap tinggi pada kelompok usia 45-49 tahun (**2.058.052** orang atau **11,93%**) dan 50-54 tahun (**1.957.931** orang atau **11,35%**). Setelah usia 60 tahun, jumlah kepala keluarga berkurang signifikan, dengan kelompok 60-64 tahun sebanyak **1.429.143** orang (**8,28%**), lalu turun menjadi **1.093.885** orang (**6,34%**) pada usia 65-69 tahun, **801.141** orang (**4,64%**) pada kelompok 70-74 tahun, dan terakhir menjadi **894.059** orang (**5,18%**) untuk kelompok usia di atas 75 tahun.

Dari segi gender, kepala keluarga masih didominasi oleh laki-laki, yaitu sebanyak **13.684.061** orang (**79,30%**), sedangkan perempuan sebagai kepala keluarga hanya **3.571.361** orang (**20,70%**). Data ini mencerminkan bahwa mayoritas kepala keluarga berada dalam usia produktif, dengan puncaknya pada usia 40-44 tahun, sedangkan kepala keluarga perempuan lebih banyak ditemukan pada kelompok usia lanjut, yang kemungkinan besar disebabkan oleh faktor usia harapan hidup yang lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki.

4.1.2.3.4. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

Masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa laki-laki adalah penanggung jawab ekonomi keluarga sekaligus sebagai kepala keluarga. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit perempuan yang menjadi kepala keluarga karena pasangan meninggal, cerai atau sebab-sebab yang lain. Karakteristik kepala keluarga menurut jenis kelamin dapat menunjukan seberapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga, bagaimana kecenderungannya di

masa depan dan bagaimana gambaran sosial ekonomi keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan. Penambahan persentase kepala keluarga perempuan tersebut dapat juga menggambarkan tingkat perceraian (baik cerai hidup maupun cerai mati) yang terjadi dan juga dapat menggambarkan salah satu tren gaya hidup modern.

Tabel 4-24 Kepala Keluarga berdasarkan Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin

KODE WIL	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KEPALA KELUARGA					
		LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH	%
3201	BOGOR	1.461.652	8,47	362.766	2,10	1.824.418	10,57
3202	SUKABUMI	776.685	4,50	210.715	1,22	987.400	5,72
3203	CIANJUR	713.013	4,13	191.553	1,11	904.566	5,24
3204	BANDUNG	1.030.761	5,97	237.748	1,38	1.268.509	7,35
3205	GARUT	743.109	4,31	185.808	1,08	928.917	5,38
3206	TASIKMALAYA	567.149	3,29	166.050	0,96	733.199	4,25
3207	CIAMIS	364.897	2,11	105.567	0,61	470.464	2,73
3208	KUNINGAN	333.892	1,93	86.572	0,50	420.464	2,44
3209	CIREBON	667.962	3,87	179.705	1,04	847.667	4,91
3210	MAJALENGKA	386.241	2,24	107.242	0,62	493.483	2,86
3211	SUMEDANG	352.865	2,04	91.023	0,53	443.888	2,57
3212	INDRAMAYU	551.837	3,20	171.251	0,99	723.088	4,19
3213	SUBANG	484.992	2,81	151.003	0,88	635.995	3,69
3214	PURWAKARTA	281.696	1,63	75.617	0,44	357.313	2,07
3215	KARAWANG	713.875	4,14	185.739	1,08	899.614	5,21
3216	BEKASI	882.863	5,12	179.933	1,04	1.062.796	6,16
3217	BANDUNG BARAT	521.909	3,02	125.683	0,73	647.592	3,75
3218	PANGANDARAN	129.612	0,75	34.927	0,20	164.539	0,95
3271	KOTA BOGOR	288.304	1,67	77.888	0,45	366.192	2,12
3272	KOTA SUKABUMI	92.872	0,54	28.879	0,17	121.751	0,71
3273	KOTA BANDUNG	671.319	3,89	182.349	1,06	853.668	4,95
3274	KOTA CIREBON	89.595	0,52	28.206	0,16	117.801	0,68
3275	KOTA BEKASI	653.115	3,78	165.483	0,96	818.598	4,74
3276	KOTA DEPOK	510.007	2,96	130.617	0,76	640.624	3,71
3277	KOTA CIMAHI	153.082	0,89	38.442	0,22	191.524	1,11
3278	KOTA TASIKMALAYA	203.429	1,18	53.884	0,31	257.313	1,49
3279	KOTA BANJAR	57.328	0,33	16.711	0,10	74.039	0,43
TOTAL		**13.684.061**	**79,30**	**3.571.361**	**20,70**	**17.255.422**	**100,00**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan data di atas jumlah kepala keluarga di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, total kepala keluarga di wilayah ini mencapai **17.255.422** orang, dengan dominasi laki-laki sebagai kepala keluarga sebanyak **13.684.061** orang (**79,30%**), sedangkan perempuan sebagai kepala keluarga tercatat sebanyak **3.571.361** orang (**20,70%**). Kabupaten dengan jumlah kepala keluarga tertinggi adalah Kabupaten Bogor, dengan total **1.824.418** kepala keluarga (10,57%), terdiri dari **1.461.652** laki-laki (**8,47%**) dan **362.766** perempuan

(**2,10%**). Kabupaten lain dengan jumlah kepala keluarga yang cukup besar adalah Kabupaten Bandung (**1.268.509** kepala keluarga atau **7,35%**) dan Kabupaten Bekasi (**1.062.796** kepala keluarga atau **6,16%**).

Di sisi lain, daerah dengan jumlah kepala keluarga paling sedikit adalah Kota Banjar, dengan **74.039** kepala keluarga (**0,43%**), diikuti oleh Kota Cirebon (**117.801** kepala keluarga atau **0,95%**) dan Kota Sukabumi (**121.751** kepala keluarga atau **0,71%**). Dari segi gender, meskipun laki-laki tetap menjadi mayoritas sebagai kepala keluarga, persentase kepala keluarga perempuan cukup signifikan. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas kepala keluarga masih dipegang oleh laki-laki, namun peran perempuan sebagai kepala keluarga juga tidak bisa diabaikan, terutama di daerah tertentu yang mungkin memiliki faktor sosial atau ekonomi yang mendorong lebih banyak perempuan untuk mengambil peran tersebut.

4.1.2.3.5. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin

Dalam konsep demografi kepala keluarga merupakan seseorang baik laki-laki maupun perempuan, berstatus menikah maupun tidak, yang mempunyai peran, fungsi dan tanggungjawab sebagai kepala keluarga baik secara ekonomi, sosial maupun psikologi. Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin dapat digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh lajang maupun mereka yang berstatus cerai baik hidup maupun mati.

Tabel 4-25 Kepala Keluarga berdasarkan Status Perkawinan

NO	STATUS KAWIN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	BELUM KAWIN	464.258	2,69	217.216	1,26	681.474	3,95
2	KAWIN	12.461.143	72,22	933.222	5,41	13.394.365	77,62
3	CERAI HIDUP	355.855	2,06	673.905	3,91	1.029.760	5,97
4	CERAI MATI	402.805	2,33	1.747.018	10,12	2.149.823	12,46
TOTAL		**13.684.061**	**79,30**	**3.571.361**	**20,70**	**17.255.422**	**100,00**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan data status perkawinan di atas, mayoritas penduduk yang menjadi kepala keluarga berada dalam status kawin, dengan jumlah **13.394.365** orang (**77,62%**). Dari jumlah tersebut, **12.461.143** orang (**72,22%**) adalah laki-laki, sementara **933.222** orang (**5,41%**) adalah perempuan. Sementara itu, kepala keluarga yang berstatus cerai hidup mencapai **1.029.760** orang **(5,97%**), dengan jumlah perempuan yang jauh lebih tinggi (**673.905** orang atau **3,91%**) dibandingkan laki-laki (**355.855** orang atau **2,06%**). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak berperan sebagai kepala keluarga setelah perceraian dibandingkan laki-laki.

Adapun kepala keluarga dengan status cerai mati mencapai **2.149.823** orang (**12,46%**), di mana mayoritasnya adalah perempuan sebanyak **1.747.018** orang (**10,12%**), sementara laki-laki yang berstatus cerai mati hanya **402.805** orang (**2,33%**). Data ini menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak bertahan sebagai kepala keluarga setelah kehilangan pasangan

hidupnya dibandingkan laki-laki. Di sisi lain, kepala keluarga yang belum kawin berjumlah **681.474** orang (**3,95%**), dengan **464.258** laki-laki (**2,69%**) dan **217.216** perempuan (**1,26%**).

Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa laki-laki masih mendominasi sebagai kepala keluarga dalam semua kategori status perkawinan. Namun, jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga cukup signifikan, terutama pada kelompok cerai hidup dan cerai mati, yang menunjukkan bahwa perempuan lebih sering menjadi kepala keluarga setelah peristiwa perpisahan atau kehilangan pasangan.

4.1.2.3.6. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia serta menunjukan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga. Untuk itu jenjang pendidikan yang dicapai oleh kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat gambaran kualitas sosial maupun ekonomi keluarga.

Tabel 4-26 Kepala Keluarga berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	TIDAK/BELUM SEKOLAH	248.313	1,44	171.131	0,99	419.444	2,43
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	177.369	1,03	109.129	0,63	286.498	1,66
3	TAMAT SD/SEDERAJAT	5.013.637	29,06	1.850.878	10,73	6.864.515	39,78
4	SMP/SEDERAJAT	2.392.668	13,87	527.238	3,06	2.919.906	16,92
5	SMA/SEDERAJAT	4.427.945	25,66	686.089	3,98	5.114.034	29,64
6	DIPLOMA I/II	62.877	0,36	18.977	0,11	81.854	0,47
7	AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA	277.110	1,61	58.082	0,34	335.192	1,94
8	DIPLOMA IV/STRATA I	974.592	5,65	136.802	0,79	1.111.394	6,44
9	STRATA II	99.477	0,58	11.772	0,07	111.249	0,64
10	STRATA III	10.073	0,06	1.263	0,01	11.336	0,07
TOTAL		**13.684.061**	**79,30**	**3.571.361**	**20,70**	**17.255.422**	**100,00**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan data tingkat pendidikan terakhir kepala keluarga, mayoritas memiliki latar belakang pendidikan tamat SD atau sederajat, dengan jumlah **6.864.515** orang (**39,78%**). Dari jumlah tersebut, **5.013.637** orang (**29,06%**) adalah laki-laki, sementara **1.850.878** orang (**10,73%**) adalah perempuan. Di tingkat pendidikan yang lebih tinggi, **2.919.906** orang (**16,92%**) tercatat memiliki pendidikan terakhir SMP atau sederajat, dan **5.114.034** orang (**29,64%**) memiliki SMA atau sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kepala keluarga memiliki pendidikan dasar hingga menengah.

Untuk tingkat pendidikan tinggi, jumlah kepala keluarga dengan pendidikan Diploma I/II sebanyak **81.854** orang (**0,47%**), sedangkan Diploma III/Sarjana Muda mencapai **335.192** orang (**1,94%**). Sementara itu, **1.111.394** orang (**6,44%**) memiliki pendidikan Diploma IV atau

Strata I, dengan mayoritasnya adalah laki-laki (**974.592** orang atau **5,65%**). Jumlah kepala keluarga dengan pendidikan Strata II (S2) sebanyak **111.249** orang (**0,64%**), sementara yang memiliki Strata III (S3) masih sangat sedikit, yaitu **11.336** orang (**0,07%**). Selain itu, masih terdapat **419.444** orang (**2,43%**) yang tidak atau belum bersekolah, serta **286.498** orang (**1,66%**) yang belum tamat SD.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa mayoritas kepala keluarga memiliki pendidikan maksimal pada tingkat menengah, dengan jumlah yang semakin berkurang pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Laki-laki mendominasi hampir di semua kategori pendidikan, sementara perempuan memiliki proporsi yang lebih rendah, terutama di tingkat pendidikan tinggi.

4.1.2.3.7. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Pekerjaan

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota serta seberapa besar sumbangan mereka terhadap pot ekonomi keluarga. Oleh sebab itu informsi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

Tabel 4-27 Kepala Keluarga berdasarkan Kelompok Pekerjaan

NO	KELOMPOK PERKERJAAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	177.773	1,03	118.024	0,68	295.797	1,71
2	APARATUR/PEJABAT NEGARA	474.721	2,75	49.440	0,29	524.161	3,04
3	TENAGA PENGAJAR	111.916	0,65	24.768	0,14	136.684	0,79
4	WIRASWASTA	11.234.708	65,11	472.808	2,74	11.707.516	67,85
5	PERTANIAN/PETERNAKAN	1.287.917	7,46	129.655	0,75	1.417.572	8,22
6	NELAYAN	64.984	0,38	195	0,00	65.179	0,38
7	AGAMA DAN KEPERCAYAAN	14.933	0,09	622	0,00	15.555	0,09
8	PELAJAR/MAHASISWA	100.504	0,58	62.884	0,36	163.388	0,95
9	TENAGA KESEHATAN	20.563	0,12	6.951	0,04	27.514	0,16
10	PENSIUNAN	188.957	1,10	53.946	0,31	242.903	1,41
11	LAINNYA	7.085	0,04	2.652.068	15,37	2.659.153	15,41
TOTAL		**13.684.061**	**79,30**	**3.571.361**	**20,70**	**17.255.422**	**100,00**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan data di atas kelompok pekerjaan kepala keluarga, mayoritas bekerja di sektor wirausaha, dengan jumlah **11.707.516** orang (**67,84%**). Dari jumlah tersebut, **11.234.708** orang (**65,11%**) adalah laki-laki, sementara **472.808** orang (**2,74%**) adalah perempuan. Kelompok pekerjaan terbesar kedua adalah di sektor pertanian/peternakan, dengan **1.417.572** orang (**8,21%**), terdiri dari **1.287.917** laki-laki (**7,46%**) dan **129.655** perempuan (**0,75%**). Sektor ini masih cukup mendominasi, meskipun jauh di bawah sektor wirausaha. Selanjutnya, **524.161** orang (**3,04%**) bekerja sebagai aparatur/pejabat negara,

dengan jumlah laki-laki sebanyak **474.721** orang (**2,75%**) dan perempuan **49.440** orang (**0,29%**).

Di bidang tenaga pengajar, terdapat **136.684** orang (**0,79%**), yang terdiri dari **111.916** laki-laki (**0,65%**) dan **24.768** perempuan (**0,14%**). Sektor nelayan memiliki **65.179** kepala keluarga (**0,378%**), dengan dominasi laki-laki sebesar **64.984** orang (**0,38%**) dibanding perempuan yang hanya **195** orang (**0,00%**). Sementara itu, tenaga kesehatan mencatat **27.514** kepala keluarga (**0,16%**), yang terdiri dari **20.563** laki-laki (**0,12%**) dan **6.951** perempuan (**0,04%**). Kategori pensiunan mencakup **242.903** kepala keluarga (**1,41%**), dengan mayoritas **188.957** laki-laki (**1,10%**) dan **53.946** perempuan (**0,31%**). Kategori pelajar/mahasiswa memiliki jumlah **163.388** kepala keluarga (**0,95%**), dengan **100.504** laki-laki (**0,58%**) dan **62.884** perempuan (**0,36%**).

Kelompok yang bekerja di sektor agama dan kepercayaan hanya **15.555** kepala keluarga (**0,09%**), dengan **14.933** laki-laki (**0,09%**) dan **622** perempuan (**0,00%**). Di kategori belum/tidak bekerja, terdapat **295.797** kepala keluarga (**1,71%**), dengan **177.773** laki-laki (**1,03%**) dan **118.024** perempuan (**0,68%**). Sementara itu, kategori lainnya mencatat **2.659.153** kepala keluarga (**15,41%**), dengan jumlah perempuan yang lebih tinggi (**2.652.068** orang atau **15,37%**) dibanding laki-laki (**7.085** orang atau **0,04%**).Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa mayoritas kepala keluarga bekerja di sektor wirausaha dan pertanian/peternakan, sementara perempuan lebih banyak ditemukan dalam kategori lainnya atau sebagai tenaga pengajar dan kesehatan.

4.1.2.4. Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

Penduduk suatu wilayah memiliki beragam karakteristik sosial yang dapat dikaji dari berbagai aspek, seperti tingkat pendidikan, agama yang dianut, serta kondisi kesehatan atau kecacatan. Pemahaman terhadap karakteristik sosial ini penting untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan.

4.1.2.4.1. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan suatu wilayah. Pendidikan tidak hanya berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga dalam membuka peluang ekonomi dan sosial bagi individu serta masyarakat. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan menunjukkan sebaran masyarakat berdasarkan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh, mulai dari tidak sekolah, pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi.

Tabel 4-28 Jumlah Penduduk menurut Pendidikan

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	TIDAK/BELUM SEKOLAH	5.572.113	10,86	5.288.848	10,31	10.860.961	21,16
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	2.568.248	5,00	2.391.034	4,66	4.959.282	9,66

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
3	TAMAT SD/SEDERAJAT	6.298.467	12,27	6.964.716	13,57	13.263.183	25,85
4	SMP/SEDERAJAT	3.824.458	7,45	3.902.691	7,61	7.727.149	15,06
5	SMA/SEDERAJAT	6.151.870	11,99	5.132.562	10,00	11.284.432	21,99
6	DIPLOMA I/II	68.954	0,13	92.792	0,18	161.746	0,32
7	AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA	305.513	0,60	391.212	0,76	696.725	1,36
8	DIPLOMA IV/STRATA I	1.093.909	2,13	1.082.359	2,11	2.176.268	4,24
9	STRATA II	103.928	0,20	67.363	0,13	171.291	0,33
10	STRATA III	10.334	0,02	5.007	0,01	15.341	0,03
TOTAL		**25.997.794**	**50,66**	**25.318.584**	**49,34**	**51.316.378**	**100,00**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan data jumlah penduduk menurut pendidikan terakhir di atas, sebanyak **10.860.961** orang (**21,16%**) tidak atau belum pernah mengenyam pendidikan formal, terdiri dari **5.572.113** laki-laki (**10,86%**) dan **5.288.848** perempuan (**10,31%**). Sementara itu, **4.959.282** orang (**9,66%**) belum menyelesaikan pendidikan dasar, dengan proporsi laki-laki sebanyak **2.568.248** orang (**5,00%**) dan perempuan sebanyak **2.391.034** orang (**4,66%**). Kelompok penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan dasar (SD/sederajat) berjumlah **13.263.183** orang (**25,85%**), dengan laki-laki sebanyak **6.298.467** orang (**12,27%**) dan perempuan **6.964.716** orang (**13,57%**). Sementara itu, **7.727.149** orang (**15,06%**) telah menamatkan pendidikan menengah pertama (SMP/sederajat), dengan jumlah laki-laki **3.824.458** orang (**7,45%**) dan perempuan **3.902.691** orang (**7,61%**). Pada tingkat pendidikan menengah atas (SMA/sederajat), terdapat **11.284.432** orang (**21,99%**), terdiri dari **6.151.870** laki-laki (**11,99%**) dan **5.132.562** perempuan (**10,00%**).

Di tingkat pendidikan tinggi, lulusan Diploma I/II berjumlah **161.746** orang (**0,32%**), terdiri dari **68.954** laki-laki (**0,13%**) dan **92.792** perempuan (**0,18%**). Untuk lulusan Diploma III (Akademi/Sarjana Muda), terdapat **696.725** orang (**1,36%**), dengan jumlah perempuan lebih tinggi (**391.212** orang atau **0,76%**) dibanding laki-laki (**305.513** orang atau **0,60%**). Lulusan Strata I/Diploma IV mencapai **2.176.268** orang (**4,24%**), terdiri dari **1.093.909** laki-laki (**2,13%**) dan **1.082.359** perempuan (**2,11%**). Sedangkan pada jenjang Strata II (S2), terdapat **171.291** orang (**0,33%**), dengan **103.928** laki-laki (**0,20%**) dan **67.363** perempuan (**0,13%**). Sementara itu, lulusan Strata III (S3) masih sangat terbatas, yaitu **15.341** orang (**0,03%**), dengan **10.334** laki-laki (**0,02%**) dan **5.007** perempuan (**0,01%**).

Secara keseluruhan, mayoritas penduduk memiliki pendidikan hingga tingkat dasar dan menengah, dengan jumlah lulusan pendidikan tinggi yang masih relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi masih perlu ditingkatkan agar lebih banyak penduduk yang memiliki keterampilan dan kompetensi lebih baik dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Selain itu, distribusi pendidikan antara laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa akses pendidikan bagi kedua gender sudah cukup merata, meskipun masih ada kesenjangan kecil pada tingkat pendidikan tinggi.

4.1.2.4.2. Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Selain jumlah penduduk berdasarkan pendidikan yang sedang ditempuh, pendidikan tertinggi yang ditamatkan juga menjadi faktor penting dalam analisis sosial. Data ini menunjukkan tingkat pendidikan terakhir yang telah diselesaikan oleh penduduk, yang dapat menjadi cerminan dari kualitas tenaga kerja, tingkat literasi, serta kesiapan masyarakat dalam menghadapi tantangan global. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan, semakin besar pula potensi peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.

Tabel 4-29 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	TIDAK/BELUM SEKOLAH	5.572.113	10,86	5.288.848	10,31	10.860.961	21,16
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	2.568.248	5,00	2.391.034	4,66	4.959.282	9,66
BELUM SELESAI PENDIDIKAN		**8.140.361**	**15,86**	**7.679.882**	**14,97**	**15.820.243**	**30,83**
1	TAMAT SD/SEDERAJAT	6.298.467	12,27	6.964.716	13,57	13.263.183	25,85
2	SMP/SEDERAJAT	3.824.458	7,45	3.902.691	7,61	7.727.149	15,06
3	SMA/SEDERAJAT	6.151.870	11,99	5.132.562	10,00	11.284.432	21,99
4	DIPLOMA I/II	68.954	0,13	92.792	0,18	161.746	0,32
5	AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA	305.513	0,60	391.212	0,76	696.725	1,36
6	DIPLOMA IV/STRATA I	1.093.909	2,13	1.082.359	2,11	2.176.268	4,24
7	STRATA II	103.928	0,20	67.363	0,13	171.291	0,33
8	STRATA III	10.334	0,02	5.007	0,01	15.341	0,03
TELAH SELESAI PENDIDIKAN		**17.857.433**	**34,80**	**17.638.702**	**34,37**	**35.496.135**	**69,17**
TOTAL JUMLAH PENDUDUK		**25.997.794**	**50,66**	**25.318.584**	**49,34**	**51.316.378**	**100,00**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak **15.820.243** orang (**30,83%**) termasuk dalam kategori belum selesai pendidikan, yang mencakup penduduk yang tidak atau belum sekolah (**10.860.961** orang atau **21,16%**) serta mereka yang belum tamat SD (**4.959.282** orang atau **9,66%**). Sementara itu, sebanyak **35.496.135** orang (**69,17%**) telah menyelesaikan pendidikan pada berbagai jenjang. Mayoritas penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan terakhirnya berada pada tingkat **SD/sederajat**, dengan jumlah **13.263.183** orang (**25,85%),** terdiri dari **6.298.467** laki-laki (**12,27%**) dan **6.964.716** perempuan (**13,57%**). Di tingkat **SMP/sederajat**, terdapat **7.727.149** orang (**15,06%**), sedangkan lulusan **SMA/sederajat** mencapai **11.284.432** orang (**21,99%**).

Pada jenjang pendidikan tinggi, lulusan Diploma I/II tercatat sebanyak **161.746** orang (**0,32%**), sementara lulusan Diploma III (Akademi/Sarjana Muda) berjumlah **696.725** orang (**1,36%**). Untuk lulusan Diploma IV/Strata I (S1), terdapat **2.176.268** orang (**4,24%**), dengan distribusi hampir merata antara laki-laki (**1.093.909** orang atau **2,13%**) dan perempuan (**1.082.359** orang atau **2,11%**). Di tingkat pascasarjana, lulusan Strata II (S2) mencapai **171.291** orang (**0,33%**) dan lulusan Strata III (S3) sebanyak **15.341** orang (**0,03%**).

Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan lebih besar dibandingkan mereka yang belum menyelesaikannya, yang menunjukkan adanya kemajuan dalam akses pendidikan. Namun, masih terdapat lebih dari **30% penduduk yang belum menyelesaikan pendidikan**, terutama pada tingkat dasar, yang memerlukan perhatian lebih dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan akses bagi seluruh masyarakat.

4.1.2.4.3. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Agama merupakan bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat yang memengaruhi berbagai aspek, termasuk norma, budaya, dan perilaku sosial. Jumlah penduduk menurut agama menunjukkan sebaran masyarakat berdasarkan keyakinan yang dianut. Data ini dapat digunakan untuk memahami pluralitas sosial, menjaga kerukunan antarumat beragama, serta merancang kebijakan yang mendukung kehidupan beragama yang harmonis dan toleran.

Tabel 4-30 Jumlah Penduduk menurut Agama

NO	AGAMA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	ISLAM	25.330.348	49,36	24.633.231	48,00	49.963.579	97,36
2	KRISTEN	448.840	0,87	460.642	0,90	909.482	1,77
3	KATHOLIK	151.604	0,30	158.871	0,31	310.475	0,61
4	HINDU	9.201	0,02	8.473	0,02	17.674	0,03
5	BUDHA	49.742	0,10	49.729	0,10	99.471	0,19
6	KHONGHUCU	6.321	0,01	6.097	0,01	12.418	0,02
7	KEPERCAYAAN	1.738	0,00	1.541	0,00	3.279	0,01
TOTAL		**25.997.794**	**50,66**	**25.318.584**	**49,34**	**51.316.378**	**100,00**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan data di atas, Mayoritas penduduk menganut agama **Islam**, dengan jumlah **49.963.579** orang (**97,36%**), terdiri dari **25.330.348** laki-laki (**49,36%**) dan **24.633.231** perempuan (**48,00%**). Selain Islam, terdapat **909.482** orang (**1,77%**) yang menganut agama **Kristen**, terdiri dari **448.840** laki-laki (**0,87%**) dan **460.642** perempuan (**0,90%**). Penganut **Katolik** berjumlah **310.475** orang (**0,61%**), dengan komposisi **151.604** laki-laki (**0,30%**) dan **158.871** perempuan (**0,31%**). Agama **Hindu** dianut oleh **17.674** orang (**0,03%**), dengan distribusi **9.201** laki-laki (**0,02%**) dan **8.473** perempuan (**0,02%**). Sementara itu, penganut agama **Budha** tercatat sebanyak **99.471** orang (**0,19%**), terdiri dari **49.742** laki-laki (**0,10%**) dan **49.729** perempuan (**0,10%**). Untuk agama **Khonghucu**, jumlah pemeluknya adalah **12.418** orang (**0,02%**), dengan **6.321** laki-laki (**0,01%**) dan **6.097** perempuan (**0,01%**). Selain itu, terdapat **3.279** orang (**0,01%**) yang menganut **kepercayaan lain**, dengan **1.738** laki-laki (**0,00%**) dan **1.541** perempuan (**0,00%**).

Dari data ini, terlihat bahwa agama Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh hampir seluruh penduduk. Sementara itu, penganut agama Kristen, Katolik, Hindu,

Budha, Khonghucu, dan kepercayaan lain memiliki jumlah yang lebih kecil. Dengan komposisi yang beragam ini, toleransi dan keharmonisan antarumat beragama menjadi aspek penting dalam menjaga stabilitas sosial dan budaya di masyarakat.

4.1.2.4.4. Jumlah Penduduk Menurut Kecacatan

Jumlah penduduk menurut kecacatan menggambarkan sebaran masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau sensorik. Data ini penting dalam perencanaan kebijakan inklusif, seperti aksesibilitas fasilitas umum, kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, serta program-program kesejahteraan sosial yang memastikan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan memahami jumlah serta jenis kecacatan yang dimiliki penduduk, pemerintah dan lembaga terkait dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan mendukung bagi penyandang disabilitas.

Tabel 4-31 Jumlah Penduduk menurut Kecacatan

NO	DISABILITAS	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	FISIK	9.289	12,75	7.603	10,44	16.892	23,19
2	FISIK DAN MENTAL	3.176	4,36	2.781	3,82	5.957	8,18
3	NETRA/BUTA	5.439	7,47	4.675	6,42	10.114	13,88
4	MENTAL/JIWA	16.079	22,07	9.253	12,70	25.332	34,77
5	RUNGU/WICARA	1.351	1,85	1.059	1,45	2.410	3,31
6	LAINNYA	6.841	9,39	5.308	7,29	12.149	16,68
TOTAL		**42.175**	**57,89**	**30.679**	**42,11**	**72.854**	**100,00**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah total penduduk penyandang disabilitas tercatat sebanyak **72.854** orang. Dari jumlah tersebut, **42.175** orang (**57,89%**) adalah laki-laki, sementara **30.679** orang (**42,11%**) adalah perempuan. Jenis disabilitas yang paling banyak dialami adalah disabilitas mental/jiwa, dengan jumlah **25.332** orang (**34,77%**), terdiri dari **16.079** laki-laki (**22,07%**) dan **9.253** perempuan (**12,70%**). Disabilitas fisik merupakan kategori terbesar kedua, dengan **16.892** orang (**23,19%**), yang mencakup **9.289** laki-laki (**12,75%**) dan **7.603** perempuan (**10,44%**). Penyandang disabilitas netra/buta tercatat sebanyak **10.114** orang (**13,88%**), dengan **5.439** laki-laki (**7,47%**) dan **4.675** perempuan (**6,42%**). Sementara itu, disabilitas fisik dan mental secara bersamaan dialami oleh **5.957** orang (**8,18%**), terdiri dari **3.176** laki-laki (**4,36%**) dan **2.781** perempuan (**3,82%**). Jumlah penyandang disabilitas rungu/wicara mencapai **2.410** orang (**3,31%**), dengan distribusi **1.351** laki-laki (**1,85%**) dan **1.059** perempuan (**1,45%**). Selain itu, kategori disabilitas lainnya mencatatkan **12.149** orang (**16,68%**), terdiri dari **6.841** laki-laki (**9,39%**) dan **5.308** perempuan (**7,29%**).

Dari data ini, terlihat bahwa laki-laki memiliki jumlah penyandang disabilitas yang lebih tinggi dibandingkan perempuan di semua kategori. Dengan jumlah penyandang disabilitas yang cukup signifikan, diperlukan perhatian lebih dalam penyediaan aksesibilitas, layanan

kesehatan, serta peluang pendidikan dan pekerjaan yang inklusif agar mereka dapat berpartisipasi secara optimal dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

4.1.2.5. Kelahiran

Kelahiran merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Banyaknya kelahiran membawa konsekuensi pada pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi, dari pemenuhan gizi, perawatan kesehatan ibu dan anak, dan pada gilirannya membutuhkan fasilitas pendidikan termasuk pemenuhan kesempatan kerja. Tingkat kelahiran di masa lalu akan mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah kelahiran di masa kini, sehingga pengetahuan tentang fertilitas beserta indikator-indikatornya, termasuk Keluarga Berencana sangat berguna bagi para penentu kebijakan maupun perencana dalam menyusun program-program pembangunan sosial terutama terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan ibu, anak dan pembangunan keluarga.

4.1.2.5.1. Jumlah Kelahiran

Jumlah kelahiran didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran hidup yang terjadi dalam periode tertentu di suatu wilayah. Di Provinsi Jawa Barat, data jumlah kelahiran menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan, khususnya dalam penyediaan layanan kesehatan ibu dan anak, pendidikan, serta infrastruktur pendukung. Dengan populasi yang besar, angka kelahiran di Jawa Barat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan penduduk, sehingga pemantauan yang cermat diperlukan untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan sumber daya. Selain itu, informasi ini juga digunakan dalam perhitungan berbagai indikator fertilitas yang membantu pemerintah dalam merancang kebijakan kependudukan dan program keluarga berencana. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, edukasi mengenai kesehatan reproduksi, serta program imunisasi menjadi langkah strategis dalam menjaga kualitas kelahiran dan menekan angka kematian ibu dan bayi, sehingga pembangunan di sektor kesehatan dan sosial dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Tabel 4-32 Jumlah Kelahiran berdasarkan Kabupaten/Kota

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KELAHIRAN	
		N	%
3201	BOGOR	51.041	10,87
3202	SUKABUMI	24.135	5,14
3203	CIANJUR	25.376	5,40
3204	BANDUNG	38.082	8,11
3205	GARUT	27.878	5,94
3206	TASIKMALAYA	18.693	3,98
3207	CIAMIS	10.602	2,26
3208	KUNINGAN	13.183	2,81
3209	CIREBON	24.864	5,30
3210	MAJALENGKA	14.136	3,01

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KELAHIRAN	
		N	%
3211	SUMEDANG	11.311	2,41
3212	INDRAMAYU	13.652	2,91
3213	SUBANG	12.933	2,75
3214	PURWAKARTA	9.945	2,12
3215	KARAWANG	22.219	4,73
3216	BEKASI	29.205	6,22
3217	BANDUNG BARAT	20.264	4,32
3218	PANGANDARAN	3.748	0,80
3271	KOTA BOGOR	12.063	2,57
3272	KOTA SUKABUMI	3.819	0,81
3273	KOTA BANDUNG	22.451	4,78
3274	KOTA CIREBON	3.504	0,75
3275	KOTA BEKASI	21.949	4,67
3276	KOTA DEPOK	18.719	3,99
3277	KOTA CIMAHI	5.044	1,07
3278	KOTA TASIKMALAYA	8.379	1,78
3279	KOTA BANJAR	2.315	0,49
TOTAL		**469.510**	**100,00**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Jumlah kelahiran di Provinsi Jawa Barat selama periode tahun 2024 mencapai **469.510** kelahiran, dengan distribusi yang bervariasi di setiap kabupaten dan kota. Kabupaten Bogor mencatat jumlah kelahiran tertinggi, yaitu **51.041** kelahiran, diikuti oleh Kabupaten Bandung sebanyak **38.082** kelahiran, dan Kabupaten Bekasi dengan **29.205** kelahiran. Beberapa daerah lain dengan jumlah kelahiran yang cukup tinggi meliputi Kabupaten Garut (**27.878** kelahiran), Kabupaten Cianjur (**25.376** kelahiran), serta Kabupaten Cirebon (**24.864** kelahiran).

Di sisi lain, beberapa wilayah dengan jumlah kelahiran yang lebih rendah di antaranya adalah Kota Banjar (**2.315** kelahiran), Kota Cirebon (**3.504** kelahiran), dan Kabupaten Pangandaran (**3.748** kelahiran). Variasi jumlah kelahiran di setiap daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jumlah penduduk, tingkat urbanisasi, serta akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak. Data ini menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan program keluarga berencana untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat di masa depan.

4.1.2.5.2. Angka Kelahiran Kasar

Angka kelahiran kasar (Crude Birth Rate/CBR) merupakan indikator demografi yang menunjukkan jumlah kelahiran hidup per 1.000 penduduk dalam suatu wilayah pada tahun tertentu. CBR memberikan gambaran umum tentang tingkat kelahiran di suatu daerah, meskipun masih bersifat kasar karena tidak memperhitungkan kelompok penduduk yang berisiko melahirkan, seperti laki-laki, anak-anak, dan lansia. Meskipun begitu, angka kelahiran kasar tetap menjadi salah satu ukuran penting dalam analisis kependudukan dan perencanaan

pembangunan. Dengan mengetahui tingkat kelahiran di suatu daerah, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat terkait kesehatan ibu dan anak, pendidikan, serta program keluarga berencana. Perubahan angka kelahiran kasar juga dapat mencerminkan perkembangan sosial dan ekonomi suatu daerah, termasuk peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, perubahan pola keluarga, dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4-33 Angka Kelahiran Kasar (CBR) berdasarkan Kabupaten/Kota

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK TENGAH SEMESTER	ANGKA KELAHIRAN	
			N	CBR
3201	BOGOR	5.664.537	51.041	9,01
3202	SUKABUMI	2.821.619	24.135	8,55
3203	CIANJUR	2.584.735	25.376	9,82
3204	BANDUNG	3.773.104	38.082	10,09
3205	GARUT	2.790.435	27.878	9,99
3206	TASIKMALAYA	1.973.411	18.693	9,47
3207	CIAMIS	1.293.235	10.602	8,20
3208	KUNINGAN	1.235.854	13.183	10,67
3209	CIREBON	2.452.563	24.864	10,14
3210	MAJALENGKA	1.364.891	14.136	10,36
3211	SUMEDANG	1.216.309	11.311	9,30
3212	INDRAMAYU	1.947.720	13.652	7,01
3213	SUBANG	1.649.618	12.933	7,84
3214	PURWAKARTA	1.052.093	9.945	9,45
3215	KARAWANG	2.572.553	22.219	8,64
3216	BEKASI	3.289.743	29.205	8,88
3217	BANDUNG BARAT	1.878.507	20.264	10,79
3218	PANGANDARAN	445.158	3.748	8,42
3271	KOTA BOGOR	1.137.018	12.063	10,61
3272	KOTA SUKABUMI	367.457	3.819	10,39
3273	KOTA BANDUNG	2.579.837	22.451	8,70
3274	KOTA CIREBON	354.679	3.504	9,88
3275	KOTA BEKASI	2.526.133	21.949	8,69
3276	KOTA DEPOK	1.967.831	18.719	9,51
3277	KOTA CIMAHI	579.906	5.044	8,70
3278	KOTA TASIKMALAYA	761.080	8.379	11,01
3279	KOTA BANJAR	209.182	2.315	11,07
TOTAL		**50.489.208**	**469.510**	**9,30**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Angka kelahiran kasar (Crude Birth Rate/CBR) di Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan tercatat sebesar **9,30** kelahiran per 1.000 penduduk. Dari data yang tersedia, kabupaten/kota dengan angka kelahiran kasar tertinggi adalah Kota Banjar, dengan CBR sebesar **11,07**, diikuti oleh Kota Tasikmalaya (**11,01**) dan Kabupaten Bandung Barat (**10,79**). Sementara itu, daerah dengan angka kelahiran kasar terendah adalah Kabupaten Indramayu

(**7,01**) dan Kabupaten Subang (**7,84**). Distribusi angka kelahiran kasar ini menunjukkan adanya variasi tingkat kelahiran di berbagai daerah, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat kesejahteraan, serta akses terhadap layanan kesehatan dan program keluarga berencana. Kabupaten dan kota dengan angka kelahiran kasar yang tinggi umumnya memiliki populasi yang lebih muda dan tingkat fertilitas yang masih relatif tinggi, sementara daerah dengan angka lebih rendah cenderung mengalami perubahan demografi yang mengarah pada penurunan tingkat kelahiran.

4.1.2.6. Kematian

Kematian atau mortalitas merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk dan struktur demografi suatu wilayah. Tingkat kematian yang tinggi dapat menjadi indikator rendahnya kualitas kesehatan masyarakat, sedangkan tingkat kematian yang rendah mencerminkan keberhasilan layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial di suatu daerah. Oleh karena itu, pemantauan angka kematian sangat penting untuk mengevaluasi kebijakan kesehatan, seperti akses terhadap fasilitas medis, program imunisasi, serta pencegahan dan penanganan penyakit menular maupun tidak menular. Angka kematian biasanya dinyatakan dalam bentuk "rate" yang mengukur jumlah kematian dalam periode tertentu per jumlah penduduk di wilayah tersebut. Ukuran ini memberikan gambaran tentang risiko kematian di suatu daerah serta membantu pemerintah dalam perencanaan kebijakan kesehatan dan sosial yang lebih efektif. Dengan data yang akurat, langkah-langkah strategis dapat diambil untuk meningkatkan harapan hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4.1.2.6.1. Jumlah Kematian

Jumlah kematian menunjukkan banyaknya kasus kematian yang terjadi di suatu daerah pada tahun tertentu. Informasi ini sangat penting dalam memantau kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Data jumlah kematian digunakan sebagai dasar perhitungan berbagai indikator mortalitas, seperti Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate), Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate), dan Angka Harapan Hidup. Selain itu, informasi ini membantu dalam evaluasi kesehatan masyarakat, perencanaan kebijakan, serta pemantauan keberhasilan program kesehatan. Dengan memahami pola kematian, pemerintah dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tabel 4-34 Jumlah Kematian berdasarkan Kabupaten/Kota

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEMATIAN	
		N	%
3201	BOGOR	30.080	10,03
3202	SUKABUMI	8.506	2,84
3203	CIANJUR	12.057	4,02
3204	BANDUNG	15.911	5,30
3205	GARUT	9.666	3,22

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEMATIAN	
		N	%
3206	TASIKMALAYA	7.258	2,42
3207	CIAMIS	7.049	2,35
3208	KUNINGAN	11.756	3,92
3209	CIREBON	11.362	3,79
3210	MAJALENGKA	13.931	4,64
3211	SUMEDANG	17.260	5,75
3212	INDRAMAYU	3.617	1,21
3213	SUBANG	8.153	2,72
3214	PURWAKARTA	5.797	1,93
3215	KARAWANG	36.473	12,16
3216	BEKASI	11.660	3,89
3217	BANDUNG BARAT	6.418	2,14
3218	PANGANDARAN	3.032	1,01
3271	KOTA BOGOR	8.742	2,91
3272	KOTA SUKABUMI	3.787	1,26
3273	KOTA BANDUNG	20.646	6,88
3274	KOTA CIREBON	3.146	1,05
3275	KOTA BEKASI	18.518	6,17
3276	KOTA DEPOK	13.962	4,65
3277	KOTA CIMAHI	4.258	1,42
3278	KOTA TASIKMALAYA	5.099	1,70
3279	KOTA BANJAR	1.880	0,63
TOTAL		**300.024**	**100,00**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Jumlah kematian di Provinsi Jawa Barat selama periode tertentu mencapai **300.024** jiwa. Kabupaten dengan jumlah kematian tertinggi adalah Karawang dengan **36.473** jiwa, diikuti oleh Kabupaten Bogor dengan **30.080** jiwa dan Kota Bandung dengan **20.646** jiwa. Sementara itu, daerah dengan jumlah kematian terendah adalah Kota Banjar dengan **1.880** jiwa, diikuti oleh Kabupaten Pangandaran dengan **3.032** jiwa. Data ini mencerminkan variasi tingkat kematian di berbagai daerah di Jawa Barat, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jumlah penduduk, kualitas layanan kesehatan, tingkat kesejahteraan, serta faktor lingkungan dan sosial. Informasi ini penting untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan kesehatan serta peningkatan layanan medis guna menekan angka kematian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4.1.2.6.2. Angka Kematian Kasar

Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate) merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kematian yang terjadi dalam satu tahun per 1.000 penduduk. Sebagai ukuran sederhana, angka ini memberikan gambaran umum tentang tingkat kematian di suatu wilayah tanpa mempertimbangkan faktor usia dan jenis kelamin. Meskipun begitu, indikator ini tetap

bermanfaat untuk analisis awal dalam menilai kondisi kesehatan masyarakat serta memantau tren kematian dari waktu ke waktu.

Tabel 4-35 Angka Kematian Kasar berdasarkan Kabupaten/Kota

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK TENGAH SEMESTER	ANGKA KEMATIAN	
			N	CDR
3201	BOGOR	5.664.537	30.080	5,31
3202	SUKABUMI	2.821.619	8.506	3,01
3203	CIANJUR	2.584.735	12.057	4,66
3204	BANDUNG	3.773.104	15.911	4,22
3205	GARUT	2.790.435	9.666	3,46
3206	TASIKMALAYA	1.973.411	7.258	3,68
3207	CIAMIS	1.293.235	7.049	5,45
3208	KUNINGAN	1.235.854	11.756	9,51
3209	CIREBON	2.452.563	11.362	4,63
3210	MAJALENGKA	1.364.891	13.931	10,21
3211	SUMEDANG	1.216.309	17.260	14,19
3212	INDRAMAYU	1.947.720	3.617	1,86
3213	SUBANG	1.649.618	8.153	4,94
3214	PURWAKARTA	1.052.093	5.797	5,51
3215	KARAWANG	2.572.553	36.473	14,18
3216	BEKASI	3.289.743	11.660	3,54
3217	BANDUNG BARAT	1.878.507	6.418	3,42
3218	PANGANDARAN	445.158	3.032	6,81
3271	KOTA BOGOR	1.137.018	8.742	7,69
3272	KOTA SUKABUMI	367.457	3.787	10,31
3273	KOTA BANDUNG	2.579.837	20.646	8,00
3274	KOTA CIREBON	354.679	3.146	8,87
3275	KOTA BEKASI	2.526.133	18.518	7,33
3276	KOTA DEPOK	1.967.831	13.962	7,10
3277	KOTA CIMAHI	579.906	4.258	7,34
3278	KOTA TASIKMALAYA	761.080	5.099	6,70
3279	KOTA BANJAR	209.182	1.880	8,99
TOTAL		**50.489.208**	**300.024**	**5,94**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa jumlah total penduduk pertengahan tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat yang tercakup mencapai **50.489.208** jiwa, dengan total kematian sebanyak **300.024** jiwa. Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate/CDR) rata-rata di Provinsi Jawa Barat adalah **5,94** per 1.000 penduduk. Beberapa daerah memiliki Angka Kematian Kasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan Angka Kematian Kasar rata-rata Provinsi Jawa Barat, seperti Kabupaten Sumedang dengan Angka Kematian Kasar sebesar **14,19**, Kabupaten Karawang dengan **14,18**, serta Kota Sukabumi dengan **10,31**. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kematian di wilayah-wilayah tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

Sebaliknya, beberapa daerah memiliki Angka Kematian Kasar yang lebih rendah, seperti Kabupaten Indramayu (**1,86**), Kabupaten Sukabumi (**3,01**), dan Kabupaten Bandung Barat (**3,42**), yang menunjukkan angka kematian lebih rendah dibandingkan daerah lainnya.

Data ini dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kematian di masing-masing daerah, seperti kondisi kesehatan, akses layanan medis, serta faktor lingkungan dan sosial. Dengan memahami pola kematian ini, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan menekan angka kematian di Kabupaten/Kota yang memiliki Angka Kematian Kasar tinggi.

4.2. Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Kualitas penduduk tidak hanya mencakup aspek jumlah dan pertumbuhan penduduk, tetapi juga kondisi kesehatan, tingkat pendidikan, serta kesejahteraan ekonomi dan sosial. Penduduk yang berkualitas memiliki tingkat kesehatan yang baik, akses terhadap pendidikan yang memadai, serta keterampilan yang mendukung daya saing di dunia kerja. Oleh karena itu, peningkatan kualitas penduduk menjadi prioritas dalam pembangunan, terutama melalui program kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Salah satu aspek penting dalam mengukur kualitas penduduk adalah kesehatan. Dengan kondisi kesehatan yang baik, masyarakat dapat menjalankan aktivitas produktif yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Selain itu, kualitas penduduk juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan serta penerapan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.

4.2.1. Kesehatan

Kesehatan merupakan indikator utama dalam menilai kualitas penduduk. Kondisi kesehatan masyarakat mencerminkan tingkat kesejahteraan dan keberhasilan layanan kesehatan di suatu daerah. Faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan meliputi akses terhadap fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis, pola hidup masyarakat, serta kondisi lingkungan.

Peningkatan kualitas kesehatan dapat dicapai melalui berbagai program, seperti imunisasi, perbaikan gizi, pengendalian penyakit menular, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, edukasi mengenai pola hidup sehat dan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan sistem kesehatan yang baik, diharapkan angka kematian dapat ditekan, angka harapan hidup meningkat, serta kualitas penduduk secara keseluruhan dapat terus berkembang.

4.2.1.1. Kelahiran

Kelahiran merupakan salah satu indikator penting dalam menilai dinamika kependudukan di suatu wilayah. Tingkat kelahiran yang tinggi atau rendah dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk dan berimplikasi pada berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Oleh karena itu, pemantauan angka kelahiran menjadi hal yang penting untuk perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

4.2.1.1.1. Angka Kelahiran Menurut Umur

Angka Kelahiran Menurut Umur (Age-Specific Fertility Rate/ASFR) merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelahiran per 1.000 perempuan usia produktif (15-49 tahun) dalam kelompok umur tertentu. Indikator ini penting karena tingkat kelahiran bervariasi pada setiap kelompok umur, misalnya angka kelahiran pada perempuan usia 20-24 tahun berbeda dengan perempuan usia 35-39 tahun.

ASFR memperhitungkan perbedaan kemampuan melahirkan pada setiap kelompok umur, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai pola kesuburan suatu wilayah. Informasi ini sangat berguna dalam perencanaan dan peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta dalam perumusan kebijakan program keluarga berencana (KB). Selain itu, ASFR juga menjadi indikator penting dalam pengembangan proyeksi penduduk, terutama dalam menghitung jumlah bayi usia 0-1 tahun di masa mendatang. Dengan memahami pola kelahiran berdasarkan umur, pemerintah dan pemangku kebijakan dapat mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mengelola pertumbuhan penduduk secara lebih efektif.

Tabel 4-36 Angka Kelahiran Menurut Umur

NO	UMUR	JUMLAH PEREMPUAN	JUMLAH KELAHIRAN	ASFR
1	15-19	11.255	4.050	359,84
2	20-24	437.365	77.900	178,11
3	25-29	1.502.781	131.792	87,70
4	30-34	2.097.512	101.119	48,21
5	35-39	1.990.819	55.303	27,78
6	40-44	1.830.328	20.721	11,32
7	45-49	1.160.444	1.905	1,64

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan data tabel di atas, Angka Kelahiran Menurut Umur (Age-Specific Fertility Rate/ASFR), terlihat bahwa tingkat kelahiran bervariasi di setiap kelompok umur perempuan usia produktif (15-49 tahun). Kelompok usia 15-19 tahun memiliki ASFR tertinggi, yaitu **359,84** kelahiran per 1.000 perempuan, meskipun jumlah perempuan dalam kelompok ini relatif sedikit (**11.255** orang). Hal ini menunjukkan bahwa kelahiran pada usia remaja masih cukup tinggi dan memerlukan perhatian khusus dalam upaya peningkatan kesadaran akan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.

Kemudian, pada kelompok usia 20-24 tahun, dengan jumlah kelahiran **77.900** bayi dan ASFR sebesar **178,11**. Setelah itu, angka kelahiran terus menurun, di mana kelompok usia 25-29 tahun memiliki ASFR **87,70**, dan kelompok usia 30-34 tahun memiliki ASFR **48,21**. Penurunan angka kelahiran semakin terlihat pada usia 35-39 tahun (ASFR **27,78**), 40-44 tahun (ASFR **11,32**), dan mencapai angka terendah pada kelompok 45-49 tahun dengan ASFR **1,64**. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan melahirkan menurun seiring bertambahnya usia.

Data ini sangat penting dalam perencanaan kebijakan kesehatan ibu dan anak serta program keluarga berencana (KB). Dengan memahami pola kelahiran ini, pemerintah dapat mengambil langkah strategis dalam meningkatkan layanan kesehatan reproduksi, menekan angka kehamilan remaja, serta mendorong perencanaan keluarga yang lebih baik demi kesejahteraan ibu dan anak.

4.2.1.1.2. Angka Kelahiran Total

Angka Fertilitas Total (TFR) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (usia 15-49 tahun) dengan asumsi pola fertilitas yang ada tetap berlangsung. Indikator ini menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan dinamika pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. TFR memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan, terutama dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk, peningkatan layanan kesehatan reproduksi, serta perbaikan pelayanan bagi ibu dan anak. TFR yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan penduduk yang cepat, sehingga menambah beban pada sumber daya dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Sebaliknya, TFR yang terlalu rendah dapat berkontribusi pada penurunan jumlah penduduk usia produktif di masa depan, yang berpotensi menimbulkan tantangan dalam struktur ketenagakerjaan dan ekonomi.

Dengan memahami angka fertilitas total, pemerintah dan para pemangku kebijakan dapat menyusun strategi yang lebih efektif dalam mengelola kependudukan, seperti program keluarga berencana (KB), peningkatan akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak, serta edukasi tentang kesehatan reproduksi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan demografi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tabel 4-37 Angka Kelahiran Total

NO	UMUR	JUMLAH PEREMPUAN	JUMLAH KELAHIRAN	ASFR	TFR
1	15-19	11.255	4.050	359,8401	1,7992
2	20-24	437.365	77.900	178,1121	0,8906
3	25-29	1.502.781	131.792	87,6987	0,4385
4	30-34	2.097.512	101.119	48,2090	0,2410
5	35-39	1.990.819	55.303	27,7790	0,1389
6	40-44	1.830.328	20.721	11,3209	0,0566
7	45-49	1.160.444	1.905	1,6416	0,0082
ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TFR) JAWA BARAT					**3,5730**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan data yang ditampilkan, angka fertilitas total (TFR) di Provinsi Jawa Barat adalah **3,5730**. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata seorang perempuan di Jawa Barat akan melahirkan sekitar **3,57** anak selama masa reproduksinya (usia 15-49 tahun), dengan asumsi pola fertilitas saat ini tetap berlangsung. Dari distribusi TFR berdasarkan kelompok umur, terlihat bahwa kelompok usia 15-19 tahun memiliki TFR tertinggi, yaitu **1,7992**. Hal ini menunjukkan bahwa kehamilan pada remaja masih cukup tinggi dan memerlukan perhatian khusus dalam upaya pengendalian fertilitas serta peningkatan kesadaran akan kesehatan reproduksi. Kelompok usia 20-24 tahun memiliki TFR **0,8906**, yang menunjukkan bahwa mayoritas perempuan mulai memiliki anak di rentang usia ini. Setelah itu, angka fertilitas cenderung menurun pada kelompok umur berikutnya, dengan TFR **0,4385** pada usia 25-29 tahun, **0,2410** pada usia 30-34 tahun, kemudian pada usia 35-39 memiliki TFR **0,1389** dan terus menurun hingga usia 40-44 dan 45-49 tahun yang masing-masing hanya memiliki TFR **0,0566** dan **0,0082**.

TFR yang masih relatif tinggi di Jawa Barat menandakan perlunya penguatan program kependudukan, seperti peningkatan akses terhadap layanan keluarga berencana (KB) dan edukasi tentang kesehatan reproduksi. Pengendalian fertilitas yang lebih efektif dapat membantu menyeimbangkan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Selain itu, kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup perempuan, termasuk akses terhadap pendidikan dan lapangan kerja, juga dapat berkontribusi dalam menurunkan angka fertilitas ke tingkat yang lebih ideal.

4.2.1.1.3. Rasio Anak Perempuan

Rasio anak dan perempuan merupakan perbandingan antara jumlah anak di bawah lima tahun dengan jumlah perempuan usia 15-49 tahun di suatu wilayah pada waktu tertentu. Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat fertilitas di suatu daerah, terutama ketika data kelahiran atau data registrasi tidak tersedia. Semakin tinggi rasio anak dan perempuan, semakin tinggi pula tingkat fertilitas di wilayah tersebut, yang menunjukkan bahwa lebih banyak perempuan usia reproduktif memiliki anak dalam lima tahun terakhir. Sebaliknya, rasio yang lebih rendah dapat mengindikasikan tingkat kelahiran yang menurun atau keberhasilan program keluarga berencana (KB).

Informasi ini sangat berguna bagi para perencana kebijakan dalam mengevaluasi tren pertumbuhan penduduk serta merancang strategi yang lebih efektif dalam pengendalian fertilitas dan peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak. Dengan memahami rasio ini, pemerintah dapat mengoptimalkan program kependudukan dan kesehatan reproduksi guna menciptakan keseimbangan pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan.

Tabel 4-38 Rasio Anak dan Perempuan berdasarkan Kabupaten/Kota

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	PEREMPUAN USIA 15-49 TAHUN	ANAK USIA 0-4 TAHUN	RASIO ANAK DAN PEREMPUAN (CWR)
3201	BOGOR	1.565.524	430.238	27,48

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	PEREMPUAN USIA 15-49 TAHUN	ANAK USIA 0-4 TAHUN	RASIO ANAK DAN PEREMPUAN (CWR)
3202	SUKABUMI	735.788	210.029	28,54
3203	CIANJUR	665.258	200.168	30,09
3204	BANDUNG	1.013.310	277.060	27,34
3205	GARUT	738.539	220.308	29,83
3206	TASIKMALAYA	480.761	135.192	28,12
3207	CIAMIS	309.287	80.416	26,00
3208	KUNINGAN	309.662	86.009	27,78
3209	CIREBON	665.105	181.370	27,27
3210	MAJALENGKA	353.023	93.747	26,56
3211	SUMEDANG	301.077	79.883	26,53
3212	INDRAMAYU	524.010	121.943	23,27
3213	SUBANG	431.661	103.375	23,95
3214	PURWAKARTA	281.310	79.124	28,13
3215	KARAWANG	706.126	186.859	26,46
3216	BEKASI	948.338	247.992	26,15
3217	BANDUNG BARAT	495.757	143.320	28,91
3218	PANGANDARAN	109.615	28.011	25,55
3271	KOTA BOGOR	306.227	82.194	26,84
3272	KOTA SUKABUMI	97.776	27.212	27,83
3273	KOTA BANDUNG	682.279	165.708	24,29
3274	KOTA CIREBON	94.697	25.442	26,87
3275	KOTA BEKASI	709.581	169.682	23,91
3276	KOTA DEPOK	552.355	133.147	24,11
3277	KOTA CIMAHI	156.236	37.295	23,87
3278	KOTA TASIKMALAYA	200.206	56.073	28,01
3279	KOTA BANJAR	53.348	14.806	27,75
TOTAL		**13.486.856**	**3.616.603**	**26,82**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan data di atas, rasio anak dan perempuan (Child-Woman Ratio/CWR) di Provinsi Jawa Barat adalah **26,82**. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat sekitar **±26-27** anak usia 0-4 tahun untuk setiap 100 perempuan usia 15-49 tahun di wilayah tersebut. Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, nilai CWR bervariasi. Kabupaten Cianjur memiliki rasio tertinggi dengan **30,09**, yang menunjukkan tingkat fertilitas relatif tinggi dibandingkan daerah lainnya. Kabupaten Garut juga memiliki rasio yang cukup tinggi, yaitu **29,83**. Sementara itu, daerah dengan rasio terendah adalah Kabupaten Indramayu dengan **23,27**, yang mengindikasikan tingkat kelahiran yang lebih rendah atau keberhasilan program keluarga berencana di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, rasio anak dan perempuan ini mencerminkan pola fertilitas di masing-masing Kabupaten/Kota. Daerah dengan rasio lebih tinggi cenderung memiliki angka kelahiran yang masih tinggi, sedangkan daerah dengan rasio lebih rendah kemungkinan telah

mengalami transisi demografi dengan tingkat kelahiran yang lebih terkendali. Informasi ini sangat penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan kependudukan, termasuk peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta evaluasi efektivitas program keluarga berencana (KB). Dengan memahami rasio anak dan perempuan, perencanaan pembangunan daerah dapat lebih optimal dalam menyesuaikan kebutuhan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4.2.1.2. Kematian

Tinggi rendahnya tingkat kematian (mortalitas) penduduk di suatu daerah akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan cerminan dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk di daerah tersebut. Sehingga indikator kematian penting dalam merencanakan berbagai kebijakan di bidang kesehatan maupun untuk mengevaluasi program kegiatan pembangunan yang telah dilakukan. Tingkat kematian dipengaruhi oleh: faktor sosial ekonomi, pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, umur, jenis kelamin dll. Kematian juga dapat dilihat dari penyebab kematian, seperti akibat penyakit menular atau penyakit degeneratif, kecelakaan maupun penyebab yang lain.

Kematian dewasa umumnya disebabkan karena penyakit menular, penyakit degeneratif, kecelakaan atau gaya hidup yang beresiko terhadap kematian. Kematian bayi dan balita umumnya disebabkan oleh penyakit sistim pernapasan bagian atas (ISPA) dan diare, yang merupakan penyakit karena infeksi kuman. Faktor gizi buruk juga menyebabkan anak-anak rentan terhadap penyakit menular, sehingga mudah terinfeksi dan menyebabkan tingginya kematian bayi dan balita di suatu daerah.

Tabel 4-39 Data Kematian dalam Indikator Kesehatan

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	BAYI	NEONATAL	POST NEONATAL	ANAK	BALITA	IBU
3201	BOGOR	824	722	102	856	32	105
3202	SUKABUMI	250	226	24	258	8	31
3203	CIANJUR	125	114	11	126	1	33
3204	BANDUNG	463	407	56	472	9	44
3205	GARUT	357	330	27	360	3	50
3206	TASIKMALAYA	264	236	28	270	6	40
3207	CIAMIS	163	138	25	172	9	22
3208	KUNINGAN	126	105	21	136	10	13
3209	CIREBON	299	272	27	308	9	44
3210	MAJALENGKA	142	115	27	152	10	20
3211	SUMEDANG	187	150	37	202	15	21
3212	INDRAMAYU	146	135	11	147	1	18
3213	SUBANG	102	91	11	103	1	21
3214	PURWAKARTA	160	146	14	165	5	21
3215	KARAWANG	236	230	6	236	-	42
3216	BEKASI	306	254	52	320	14	46

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	BAYI	NEONATAL	POST NEONATAL	ANAK	BALITA	IBU
3217	BANDUNG BARAT	181	169	12	182	1	33
3218	PANGANDARAN	32	30	2	33	1	5
3271	KOTA BOGOR	114	103	11	125	11	15
3272	KOTA SUKABUMI	59	48	11	59	-	3
3273	KOTA BANDUNG	244	200	44	252	8	27
3274	KOTA CIREBON	55	47	8	56	1	5
3275	KOTA BEKASI	209	189	20	213	4	24
3276	KOTA DEPOK	227	185	42	246	19	28
3277	KOTA CIMAHI	79	75	4	81	2	7
3278	KOTA TASIKMALAYA	91	64	27	107	16	16
3279	KOTA BANJAR	43	28	15	56	13	3
TOTAL		**5.484**	**4.809**	**675**	**5.693**	**209**	**737**

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi jawa Barat Tahun 2024

4.2.1.2.1. Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/ IMR/ AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun, atau didefinisikan sebagai jumlah kematian bayi berusia di bawah 1 tahun pada 1000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neonatal, adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan pengaruh lingkungan luar Angka Kelahiran Bayi/IMR digunakan sebagai indikator yang menggambarkan kemajuan pembangunan yang dapat menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Tabel 4-40 Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/ IMR/ AKB)

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KELAHIRAN		KEMATIAN BAYI		ANGKA KEMATIAN BAYI
		N	%	N	%	
3201	BOGOR	51.041	10,87	824	15,03	16,14
3202	SUKABUMI	24.135	5,14	250	4,56	10,36
3203	CIANJUR	25.376	5,40	125	2,28	4,93
3204	BANDUNG	38.082	8,11	463	8,44	12,16
3205	GARUT	27.878	5,94	357	6,51	12,81
3206	TASIKMALAYA	18.693	3,98	264	4,81	14,12
3207	CIAMIS	10.602	2,26	163	2,97	15,37

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KELAHIRAN		KEMATIAN BAYI		ANGKA KEMATIAN BAYI
		N	%	N	%	
3208	KUNINGAN	13.183	2,81	126	2,30	9,56
3209	CIREBON	24.864	5,30	299	5,45	12,03
3210	MAJALENGKA	14.136	3,01	142	2,59	10,05
3211	SUMEDANG	11.311	2,41	187	3,41	16,53
3212	INDRAMAYU	13.652	2,91	146	2,66	10,69
3213	SUBANG	12.933	2,75	102	1,86	7,89
3214	PURWAKARTA	9.945	2,12	160	2,92	16,09
3215	KARAWANG	22.219	4,73	236	4,30	10,62
3216	BEKASI	29.205	6,22	306	5,58	10,48
3217	BANDUNG BARAT	20.264	4,32	181	3,30	8,93
3218	PANGANDARAN	3.748	0,80	32	0,58	8,54
3271	KOTA BOGOR	12.063	2,57	114	2,08	9,45
3272	KOTA SUKABUMI	3.819	0,81	59	1,08	15,45
3273	KOTA BANDUNG	22.451	4,78	244	4,45	10,87
3274	KOTA CIREBON	3.504	0,75	55	1,00	15,70
3275	KOTA BEKASI	21.949	4,67	209	3,81	9,52
3276	KOTA DEPOK	18.719	3,99	227	4,14	12,13
3277	KOTA CIMAHI	5.044	1,07	79	1,44	15,66
3278	KOTA TASIKMALAYA	8.379	1,78	91	1,66	10,86
3279	KOTA BANJAR	2.315	0,49	43	0,78	18,57
TOTAL		**469.510**	**100,00**	**5.484**	**100,00**	**11,68**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024 & Dinas Kesehatan Provinsi jawa Barat Tahun 2024

Angka kematian bayi merupakan indikator penting dalam menilai kualitas kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah kelahiran di berbagai kabupaten/kota bervariasi, begitu pula dengan jumlah kematian bayi. Secara keseluruhan, terdapat **469.510** kelahiran dengan jumlah kematian bayi mencapai **5.484**, menghasilkan angka kematian bayi rata-rata sebesar **11,68** per 1.000 kelahiran hidup.

Beberapa wilayah memiliki angka kematian bayi yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata, seperti Kota Banjar dengan **18,57** dan Kabupaten Sumedang dengan **16,53**. Sementara itu, beberapa daerah memiliki angka yang lebih rendah, seperti Kabupaten Cianjur (**4,93**) dan Kabupaten Subang(**7,89**). Perbedaan ini mencerminkan variasi dalam akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan bayi di berbagai daerah. Upaya peningkatan layanan kesehatan, termasuk akses yang lebih baik terhadap fasilitas persalinan yang aman serta perawatan neonatal, menjadi faktor krusial dalam menekan angka kematian bayi.

4.2.1.2.2. Angka Kematian Neonatal (Kematian Bayi Baru Lahir/NNDR)

Kematian neonatal atau kematian endogen adalah kematian yang terjadi sebelum bayi mencapai usia satu bulan atau 28 hari. Angka ini biasanya dinyatakan dalam jumlah kematian per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun tertentu. Sebagian besar kasus kematian neonatal

disebabkan oleh faktor-faktor yang sudah ada sejak lahir atau selama masa kehamilan. Beberapa penyebab utama meliputi kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, komplikasi saat persalinan, serta infeksi yang terjadi dalam periode awal kehidupan bayi. Selain itu, faktor kesehatan ibu selama kehamilan, seperti kekurangan gizi, hipertensi, atau penyakit infeksi, juga dapat meningkatkan risiko kematian neonatal.

Tingginya angka kematian neonatal mencerminkan kondisi kesehatan ibu dan kualitas layanan kesehatan di suatu daerah. Oleh karena itu, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan ibu dan bayi, termasuk pemeriksaan kehamilan yang rutin, perawatan neonatal yang optimal, serta edukasi gizi bagi ibu hamil, menjadi langkah penting dalam menekan angka kematian neonatal dan meningkatkan kesejahteraan bayi yang baru lahir.

Tabel 4-41 Angka Kematian Neonatal (Kematian Bayi Baru Lahir/NNDR)

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KELAHIRAN		KEMATIAN NEONATAL		ANGKA KEMATIAN NEONATAL
		N	%	N	%	
3201	BOGOR	51.041	10,87	722	15,01	14,15
3202	SUKABUMI	24.135	5,14	226	4,70	9,36
3203	CIANJUR	25.376	5,40	114	2,37	4,49
3204	BANDUNG	38.082	8,11	407	8,46	10,69
3205	GARUT	27.878	5,94	330	6,86	11,84
3206	TASIKMALAYA	18.693	3,98	236	4,91	12,63
3207	CIAMIS	10.602	2,26	138	2,87	13,02
3208	KUNINGAN	13.183	2,81	105	2,18	7,96
3209	CIREBON	24.864	5,30	272	5,66	10,94
3210	MAJALENGKA	14.136	3,01	115	2,39	8,14
3211	SUMEDANG	11.311	2,41	150	3,12	13,26
3212	INDRAMAYU	13.652	2,91	135	2,81	9,89
3213	SUBANG	12.933	2,75	91	1,89	7,04
3214	PURWAKARTA	9.945	2,12	146	3,04	14,68
3215	KARAWANG	22.219	4,73	230	4,78	10,35
3216	BEKASI	29.205	6,22	254	5,28	8,70
3217	BANDUNG BARAT	20.264	4,32	169	3,51	8,34
3218	PANGANDARAN	3.748	0,80	30	0,62	8,00
3271	KOTA BOGOR	12.063	2,57	103	2,14	8,54
3272	KOTA SUKABUMI	3.819	0,81	48	1,00	12,57
3273	KOTA BANDUNG	22.451	4,78	200	4,16	8,91
3274	KOTA CIREBON	3.504	0,75	47	0,98	13,41
3275	KOTA BEKASI	21.949	4,67	189	3,93	8,61
3276	KOTA DEPOK	18.719	3,99	185	3,85	9,88
3277	KOTA CIMAHI	5.044	1,07	75	1,56	14,87
3278	KOTA TASIKMALAYA	8.379	1,78	64	1,33	7,64
3279	KOTA BANJAR	2.315	0,49	28	0,58	12,10
TOTAL		**469.510**	**100,00**	**4.809**	**100,00**	**10,24**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024 & Dinas Kesehatan Provinsi jawa Barat Tahun 2024

Berdasarkan data di atas, jumlah kelahiran di berbagai kabupaten/kota mencapai **469.510** kelahiran, dengan total kematian neonatal sebanyak **4.809** kasus. Hal ini menghasilkan angka kematian neonatal rata-rata sebesar **10,24** per 1.000 kelahiran hidup. Beberapa daerah memiliki angka kematian neonatal yang lebih tinggi dari rata-rata, seperti Kota Cimahi dengan **14,87** dan Kabupaten Purwakarta dengan **14,68**. Sementara itu, Kabupaten Cianjur (**4,49**) dan Kabupaten Subang (**7,04**) menunjukkan angka yang lebih rendah. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh faktor seperti akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, ketersediaan tenaga medis terlatih, serta faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi kesehatan ibu dan bayi. Untuk menekan angka kematian neonatal, diperlukan upaya peningkatan kualitas perawatan prenatal dan neonatal, termasuk pemantauan kesehatan ibu hamil, akses persalinan yang aman, serta perawatan intensif bagi bayi baru lahir yang berisiko tinggi.

4.2.1.2.3. Angka Kematian Post Neonatal (Angka Kematian Lepas Baru Lahir/PNNDR)

Kematian post neonatal adalah kematian yang terjadi pada bayi berusia satu bulan hingga kurang dari satu tahun. Angka ini dinyatakan dalam jumlah kematian per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun tertentu. Penyebab utama kematian post neonatal umumnya berbeda dari kematian neonatal. Jika kematian neonatal lebih banyak disebabkan oleh faktor bawaan sejak lahir, maka kematian post neonatal lebih sering dikaitkan dengan faktor lingkungan dan kondisi kesehatan setelah bayi lahir. Penyakit infeksi seperti pneumonia, diare, sepsis, serta kekurangan gizi menjadi faktor dominan yang berkontribusi terhadap angka kematian post neonatal. Selain itu, faktor sosial-ekonomi, akses terhadap layanan kesehatan, kebersihan lingkungan, serta pemberian ASI eksklusif juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kelangsungan hidup bayi dalam periode ini.

Upaya pencegahan kematian post neonatal dapat dilakukan dengan meningkatkan cakupan imunisasi, memperbaiki sanitasi dan kebersihan lingkungan, memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pola asuh bayi yang sehat, serta memastikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, terutama bagi bayi yang lahir dalam kondisi rentan.

Tabel 4-42 Angka Kematian Post Neonatal (Angka Kematian Lepas Baru Lahir/PNNDR)

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KELAHIRAN		KEMATIAN POST NEONATAL		ANGKA KEMATIAN POST NEONATAL
		N	%	N	%	
3201	BOGOR	51.041	10,87	102	15,11	2,00
3202	SUKABUMI	24.135	5,14	24	3,56	0,99
3203	CIANJUR	25.376	5,40	11	1,63	0,43
3204	BANDUNG	38.082	8,11	56	8,30	1,47
3205	GARUT	27.878	5,94	27	4,00	0,97
3206	TASIKMALAYA	18.693	3,98	28	4,15	1,50

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KELAHIRAN		KEMATIAN POST NEONATAL		ANGKA KEMATIAN POST NEONATAL
		N	%	N	%	
3207	CIAMIS	10.602	2,26	25	3,70	2,36
3208	KUNINGAN	13.183	2,81	21	3,11	1,59
3209	CIREBON	24.864	5,30	27	4,00	1,09
3210	MAJALENGKA	14.136	3,01	27	4,00	1,91
3211	SUMEDANG	11.311	2,41	37	5,48	3,27
3212	INDRAMAYU	13.652	2,91	11	1,63	0,81
3213	SUBANG	12.933	2,75	11	1,63	0,85
3214	PURWAKARTA	9.945	2,12	14	2,07	1,41
3215	KARAWANG	22.219	4,73	6	0,89	0,27
3216	BEKASI	29.205	6,22	52	7,70	1,78
3217	BANDUNG BARAT	20.264	4,32	12	1,78	0,59
3218	PANGANDARAN	3.748	0,80	2	0,30	0,53
3271	KOTA BOGOR	12.063	2,57	11	1,63	0,91
3272	KOTA SUKABUMI	3.819	0,81	11	1,63	2,88
3273	KOTA BANDUNG	22.451	4,78	44	6,52	1,96
3274	KOTA CIREBON	3.504	0,75	8	1,19	2,28
3275	KOTA BEKASI	21.949	4,67	20	2,96	0,91
3276	KOTA DEPOK	18.719	3,99	42	6,22	2,24
3277	KOTA CIMAHI	5.044	1,07	4	0,59	0,79
3278	KOTA TASIKMALAYA	8.379	1,78	27	4,00	3,22
3279	KOTA BANJAR	2.315	0,49	15	2,22	6,48
TOTAL		**469.510**	**100,00**	**675**	**100,00**	**1,44**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024 & Dinas Kesehatan Provinsi jawa Barat Tahun 2024

Berdasarkan data di atas, jumlah kelahiran mencapai **469.510**, dengan total kematian post-neonatal sebanyak **675** kasus. Hal ini menghasilkan angka kematian post-neonatal rata-rata sebesar **1,44** per 1.000 kelahiran hidup. Beberapa daerah memiliki angka kematian post-neonatal yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata, seperti Kota Banjar dengan **6,48** dan Kabupaten Sumedang dengan **3,27**. Sebaliknya, beberapa daerah menunjukkan angka yang lebih rendah, seperti Kabupaten Karawang (**0,27**) dan Kabupaten Cianjur (**0,43**). Faktor-faktor seperti kondisi sosial-ekonomi, kualitas sanitasi, gizi bayi, serta akses terhadap imunisasi dan perawatan kesehatan berperan dalam menentukan angka kematian post-neonatal. Oleh karena itu, peningkatan edukasi kesehatan ibu, program imunisasi yang optimal, serta pemenuhan kebutuhan gizi bayi sangat penting untuk menekan angka kematian pada fase ini.

4.2.1.2.4. Angka Kematian Anak

Angka Kematian Anak merujuk pada jumlah kematian anak berusia 1 hingga menjelang 5 tahun dalam suatu periode tertentu. Angka ini menjadi indikator penting dalam menilai kualitas kesehatan lingkungan serta efektivitas layanan kesehatan yang tersedia bagi anak-anak. Tingkat kematian anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kecukupan gizi, pola

asuh, akses terhadap layanan kesehatan, serta kondisi sanitasi dan kebersihan lingkungan. Anak-anak yang mengalami kekurangan gizi lebih rentan terhadap penyakit menular seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare, dan campak, yang sering menjadi penyebab utama kematian pada kelompok usia ini. Selain itu, kecelakaan di dalam atau sekitar rumah, seperti tersedak, tenggelam, atau luka akibat benda tajam, juga dapat meningkatkan risiko kematian anak.

Untuk menekan angka kematian anak, diperlukan berbagai upaya, termasuk peningkatan cakupan imunisasi, penyediaan asupan gizi yang cukup, perbaikan sanitasi lingkungan, serta edukasi bagi orang tua mengenai pola asuh dan pencegahan kecelakaan pada anak. Akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan juga menjadi faktor krusial dalam menurunkan angka kematian anak dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Tabel 4-43 Angka Kematian Anak

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	ANAK USIA 1 - 4 TAHUN		KEMATIAN ANAK		ANGKA KEMATIAN ANAK
		N	%	N	%	
3201	BOGOR	271.516	12,00	856	15,04	3,15
3202	SUKABUMI	133.082	5,88	258	4,53	1,94
3203	CIANJUR	125.556	5,55	126	2,21	1,00
3204	BANDUNG	172.247	7,61	472	8,29	2,74
3205	GARUT	137.908	6,10	360	6,32	2,61
3206	TASIKMALAYA	84.597	3,74	270	4,74	3,19
3207	CIAMIS	50.717	2,24	172	3,02	3,39
3208	KUNINGAN	52.940	2,34	136	2,39	2,57
3209	CIREBON	114.023	5,04	308	5,41	2,70
3210	MAJALENGKA	57.870	2,56	152	2,67	2,63
3211	SUMEDANG	49.359	2,18	202	3,55	4,09
3212	INDRAMAYU	77.133	3,41	147	2,58	1,91
3213	SUBANG	64.891	2,87	103	1,81	1,59
3214	PURWAKARTA	49.651	2,19	165	2,90	3,32
3215	KARAWANG	117.487	5,19	236	4,15	2,01
3216	BEKASI	156.137	6,90	320	5,62	2,05
3217	BANDUNG BARAT	89.084	3,94	182	3,20	2,04
3218	PANGANDARAN	17.617	0,78	33	0,58	1,87
3271	KOTA BOGOR	50.724	2,24	125	2,20	2,46
3272	KOTA SUKABUMI	16.847	0,74	59	1,04	3,50
3273	KOTA BANDUNG	102.514	4,53	252	4,43	2,46
3274	KOTA CIREBON	15.948	0,70	56	0,98	3,51
3275	KOTA BEKASI	105.660	4,67	213	3,74	2,02
3276	KOTA DEPOK	82.005	3,62	246	4,32	3,00
3277	KOTA CIMAHI	23.113	1,02	81	1,42	3,50
3278	KOTA TASIKMALAYA	34.784	1,54	107	1,88	3,08
3279	KOTA BANJAR	9.115	0,40	56	0,98	6,14

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	ANAK USIA 1 - 4 TAHUN		KEMATIAN ANAK		ANGKA KEMATIAN ANAK
		N	%	N	%	
TOTAL		**2.262.525**	**100,00**	**5.693**	**100,00**	**2,52**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024 & Dinas Kesehatan Provinsi jawa Barat Tahun 2024

Berdasarkan data di atas, jumlah anak usia 1-4 tahun di berbagai kabupaten/kota mencapai **2.262.525** anak, dengan total kematian sebanyak **5.693** kasus. Hal ini menghasilkan angka kematian anak rata-rata sebesar **2,52** per 1.000 anak usia 1-4 tahun. Beberapa daerah memiliki angka kematian anak yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata, seperti Kota Banjar dengan **6,14** dan Kabupaten Sumedang dengan **4,09**. Sementara itu, beberapa wilayah memiliki angka yang lebih rendah, seperti Kabupaten Cianjur (**1,00**) dan Kabupaten Subang (**1,59**). Faktor-faktor seperti akses terhadap layanan kesehatan, status gizi, kebersihan lingkungan, serta ketersediaan imunisasi berperan penting dalam menekan angka kematian anak. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan anak, edukasi bagi orang tua, serta perbaikan kondisi lingkungan menjadi langkah strategis dalam mengurangi angka kematian anak usia dini.

4.2.1.2.5. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (Under-Five Mortality Rate) adalah indikator yang menggambarkan jumlah kematian anak berusia 0 hingga 4 tahun per 1.000 anak pada kelompok umur yang sama dalam satu tahun tertentu. Indikator ini menjadi ukuran penting dalam menilai tingkat kesehatan masyarakat, akses terhadap layanan kesehatan, serta kondisi sosial dan ekonomi di suatu wilayah.

Tingkat kematian balita dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kecukupan gizi, pola asuh, ketersediaan layanan kesehatan, serta sanitasi dan kebersihan lingkungan. Penyakit menular seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare, campak, dan malaria menjadi penyebab utama kematian pada balita, terutama di daerah dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan. Selain itu, gizi buruk dan kondisi lingkungan yang tidak higienis juga berkontribusi terhadap tingginya angka kematian balita. Upaya untuk menurunkan angka kematian balita mencakup peningkatan cakupan imunisasi, penyediaan layanan kesehatan yang lebih baik, edukasi bagi orang tua mengenai perawatan anak, serta perbaikan kualitas gizi dan sanitasi. Dengan intervensi yang tepat, angka kematian balita dapat ditekan, sehingga meningkatkan kualitas hidup anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 4-44 Angka Kematian Balita

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	ANAK USIA 0 - 4 TAHUN		KEMATIAN BALITA		ANGKA KEMATIAN BALITA
		N	%	N	%	
3201	BOGOR	430.238	11,90	32	15,31	0,074
3202	SUKABUMI	210.029	5,81	8	3,83	0,038
3203	CIANJUR	200.168	5,53	1	0,48	0,005

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	ANAK USIA 0 - 4 TAHUN		KEMATIAN BALITA		ANGKA KEMATIAN BALITA
		N	%	N	%	
3204	BANDUNG	277.060	7,66	9	4,31	0,032
3205	GARUT	220.308	6,09	3	1,44	0,014
3206	TASIKMALAYA	135.192	3,74	6	2,87	0,044
3207	CIAMIS	80.416	2,22	9	4,31	0,112
3208	KUNINGAN	86.009	2,38	10	4,78	0,116
3209	CIREBON	181.370	5,01	9	4,31	0,050
3210	MAJALENGKA	93.747	2,59	10	4,78	0,107
3211	SUMEDANG	79.883	2,21	15	7,18	0,188
3212	INDRAMAYU	121.943	3,37	1	0,48	0,008
3213	SUBANG	103.375	2,86	1	0,48	0,010
3214	PURWAKARTA	79.124	2,19	5	2,39	0,063
3215	KARAWANG	186.859	5,17	-	-	-
3216	BEKASI	247.992	6,86	14	6,70	0,056
3217	BANDUNG BARAT	143.320	3,96	1	0,48	0,007
3218	PANGANDARAN	28.011	0,77	1	0,48	0,036
3271	KOTA BOGOR	82.194	2,27	11	5,26	0,134
3272	KOTA SUKABUMI	27.212	0,75	-	-	-
3273	KOTA BANDUNG	165.708	4,58	8	3,83	0,048
3274	KOTA CIREBON	25.442	0,70	1	0,48	0,039
3275	KOTA BEKASI	169.682	4,69	4	1,91	0,024
3276	KOTA DEPOK	133.147	3,68	19	9,09	0,143
3277	KOTA CIMAHI	37.295	1,03	2	0,96	0,054
3278	KOTA TASIKMALAYA	56.073	1,55	16	7,66	0,285
3279	KOTA BANJAR	14.806	0,41	13	6,22	0,878
TOTAL		**3.616.603**	**100,00**	**209**	**100,00**	**0,058**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024 &Dinas Kesehatan Provinsi jawa Barat Tahun 2024

Berdasarkan data di atas, jumlah total anak usia 0-4 tahun di berbagai kabupaten/kota mencapai **3.616.603** anak, dengan total kematian balita sebanyak **209** kasus. Hal ini menghasilkan angka kematian balita rata-rata sebesar **0,058** per 1.000 balita. Meskipun angka kematian balita relatif rendah dibandingkan dengan kelompok usia lainnya, terdapat variasi antarwilayah. Kota Banjar memiliki angka kematian balita tertinggi sebesar **0,878**, diikuti oleh Kota Tasikmalaya (**0,285**) dan Kabupaten Sumedang (**0,188**). Sementara itu, beberapa wilayah seperti Cianjur, Indramayu, dan Subang mencatat angka yang sangat kecil atau tidak ada kematian balita yang terlaporkan. Data yang kosong dalam tabel dapat menunjukkan bahwa tidak ada kasus kematian balita yang tercatat atau data belum tersedia. Untuk terus menekan angka kematian balita, diperlukan peningkatan akses layanan kesehatan, pemberian imunisasi lengkap, edukasi gizi bagi ibu, serta penguatan kebijakan kesehatan anak di tingkat daerah.

4.2.1.2.6. Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate/AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian perempuan yang terjadi selama masa kehamilan, persalinan, atau dalam 42 hari setelah melahirkan, per 1.000 kelahiran hidup. Kematian ini disebabkan oleh faktor yang berkaitan langsung dengan kehamilan dan persalinan, seperti komplikasi kehamilan, perdarahan, infeksi, preeklampsia, eklampsia, serta komplikasi akibat penanganan medis yang kurang optimal. Tingginya angka kematian ibu mencerminkan kualitas layanan kesehatan maternal dan akses terhadap fasilitas medis yang memadai. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah kondisi sosial-ekonomi, tingkat pendidikan ibu, serta keterlambatan dalam mengenali bahaya kehamilan, mencapai fasilitas kesehatan, dan mendapatkan penanganan yang tepat.

Upaya untuk menurunkan angka kematian ibu mencakup peningkatan akses terhadap layanan kesehatan maternal, pemeriksaan kehamilan yang rutin, persalinan yang didampingi tenaga medis profesional, serta peningkatan edukasi tentang kehamilan sehat bagi ibu dan keluarga. Selain itu, sistem rujukan yang cepat dan efektif dalam menangani komplikasi kehamilan sangat penting untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi. Dengan perbaikan layanan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan kesadaran masyarakat, angka kematian ibu dapat ditekan, sehingga mendukung kesehatan reproduksi yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan keluarga serta generasi mendatang.

Tabel 4-45 Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate/ AKI)

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KELAHIRAN		KEMATIAN IBU		ANGKA KEMATIAN IBU
		N	%	N	%	
3201	BOGOR	51.041	10,87	105	14,25	2,06
3202	SUKABUMI	24.135	5,14	31	4,21	1,28
3203	CIANJUR	25.376	5,40	33	4,48	1,30
3204	BANDUNG	38.082	8,11	44	5,97	1,16
3205	GARUT	27.878	5,94	50	6,78	1,79
3206	TASIKMALAYA	18.693	3,98	40	5,43	2,14
3207	CIAMIS	10.602	2,26	22	2,99	2,08
3208	KUNINGAN	13.183	2,81	13	1,76	0,99
3209	CIREBON	24.864	5,30	44	5,97	1,77
3210	MAJALENGKA	14.136	3,01	20	2,71	1,41
3211	SUMEDANG	11.311	2,41	21	2,85	1,86
3212	INDRAMAYU	13.652	2,91	18	2,44	1,32
3213	SUBANG	12.933	2,75	21	2,85	1,62
3214	PURWAKARTA	9.945	2,12	21	2,85	2,11
3215	KARAWANG	22.219	4,73	42	5,70	1,89
3216	BEKASI	29.205	6,22	46	6,24	1,58
3217	BANDUNG BARAT	20.264	4,32	33	4,48	1,63
3218	PANGANDARAN	3.748	0,80	5	0,68	1,33
3271	KOTA BOGOR	12.063	2,57	15	2,04	1,24

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KELAHIRAN		KEMATIAN IBU		ANGKA KEMATIAN IBU
		N	%	N	%	
3272	KOTA SUKABUMI	3.819	0,81	3	0,41	0,79
3273	KOTA BANDUNG	22.451	4,78	27	3,66	1,20
3274	KOTA CIREBON	3.504	0,75	5	0,68	1,43
3275	KOTA BEKASI	21.949	4,67	24	3,26	1,09
3276	KOTA DEPOK	18.719	3,99	28	3,80	1,50
3277	KOTA CIMAHI	5.044	1,07	7	0,95	1,39
3278	KOTA TASIKMALAYA	8.379	1,78	16	2,17	1,91
3279	KOTA BANJAR	2.315	0,49	3	0,41	1,30
TOTAL		**469.510**	**100,00**	**737**	**100,00**	**1,57**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024 &Dinas Kesehatan Provinsi jawa Barat Tahun 2024

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah total kelahiran di berbagai kabupaten/kota mencapai **469.510** kelahiran, dengan total kematian ibu sebanyak **737** kasus. Hal ini menghasilkan angka kematian ibu rata-rata sebesar **1,57** per 1.000 kelahiran hidup. Kabupaten Tasikmalaya mencatat angka kematian ibu tertinggi dengan **2,14**, diikuti oleh Kabupaten Purwakarta (**2,11**) dan Kabupaten Ciamis (**2,08**). Beberapa wilayah dengan angka kematian ibu yang lebih rendah mencakup Kota Sukabumi (**0,79**) dan Kabupaten Kuningan (**0,99**). Tingginya angka kematian ibu di beberapa wilayah menunjukkan perlunya peningkatan akses layanan kesehatan bagi ibu hamil, termasuk pemeriksaan kehamilan yang rutin, peningkatan kualitas tenaga medis, serta fasilitas persalinan yang lebih baik. Selain itu, edukasi tentang kehamilan sehat dan persalinan yang aman sangat penting untuk menekan angka kematian ibu di masa mendatang.

4.2.2. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pembangunan sosial serta ekonomi. Indikator pendidikan digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pendidikan penduduk di suatu wilayah. Beberapa indikator yang digunakan untuk menilai perkembangan pendidikan di Jawa Barat meliputi angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan angka penduduk putus sekolah.

4.2.2.1. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) menyajikan persentase atau proporsi penduduk berusia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf Latin dibandingkan dengan jumlah penduduk keseluruhan pada satu tahun tertentu. Indikator ini mencerminkan mutu dan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah dalam menyerap informasi pendidikan. Semakin tinggi nilai AMH, semakin tinggi pula mutu sumber daya manusia di wilayah tersebut. Indikator AMH memiliki beberapa kegunaan, antara lain:

1. Mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan yang masih memiliki penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.
2. Menunjukkan kemampuan penduduk dalam menyerap informasi dari berbagai media.
3. Menggambarkan kemampuan komunikasi lisan dan tertulis, yang mencerminkan potensi perkembangan intelektual serta kontribusi terhadap pembangunan daerah.

AMH disajikan dalam bentuk terpilah, yaitu dihitung berdasarkan penduduk laki-laki dan perempuan, untuk melihat perbedaan tingkat literasi berdasarkan gender.

Tabel 4-46 Angka Melek Huruf

NO	KELOMPOK USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	PERKOTAAN	PERDESAAN	JUMLAH
1	15-24	99,99	99,95	99,98	99,94	99,97
2	15-29	99,98	99,96	99,97	99,95	99,97
3	15+	98,99	98,13	98,74	97,86	98,57
4	60+	93,80	89,02	91,94	89,62	91,36

Sumber : Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2025 - BPS Provinsi Jawa Barat

Angka Melek Huruf (AMH) di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2024 menunjukkan tingkat literasi yang tinggi di berbagai kelompok usia. Kelompok usia 15-24 tahun memiliki tingkat melek huruf hampir sempurna, dengan **99,99%** untuk laki-laki dan **99,95%** untuk perempuan. Sementara itu, Untuk Kelompok Usia 15-29 tahun memiliki Tingkat melek huruf yang hamper sempurna juga, dengan **99,98%** untuk laki-laki dan **99,96%** untuk Perempuan. Hal ini mencerminkan keberhasilan program pendidikan dasar dan menengah dalam memastikan anak-anak dan remaja dapat membaca dan menulis dengan baik.

Pada kelompok usia 15+, angka melek huruf sedikit menurun dengan persentase **98,99%** untuk laki-laki dan **98,13%** untuk perempuan. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh faktor pendidikan di generasi yang lebih tua, yang mungkin memiliki akses lebih terbatas terhadap pendidikan formal pada masa mudanya. Sementara itu, kelompok usia 60 tahun ke atas menunjukkan angka melek huruf yang lebih rendah dibandingkan kelompok usia lainnya, yaitu **93,80%** untuk laki-laki dan **89,02%** untuk perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa lansia, terutama perempuan, memiliki tantangan lebih besar dalam akses terhadap pendidikan di masa lalu.

Dari segi wilayah, penduduk perkotaan memiliki tingkat melek huruf yang lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Di wilayah perkotaan, AMH mencapai **91,94%** untuk lansia, sementara di perdesaan hanya **89,62%**. Secara keseluruhan, angka melek huruf Provinsi Jawa Barat berada pada tingkat yang sangat baik, yakni **99,97%** untuk kelompok usia muda dan **98,57%** untuk usia 15+, namun tetap perlu perhatian lebih pada kelompok lansia dan penduduk di wilayah perdesaan agar kesenjangan literasi semakin berkurang.

4.2.2.2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan proporsi jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu, tanpa memperhitungkan usia sekolah yang seharusnya, dibandingkan dengan jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APK yang tinggi menunjukkan bahwa akses pendidikan di suatu wilayah cukup baik, meskipun masih terdapat peserta didik yang bersekolah di luar kelompok usia idealnya.

Berdasarkan data yang telah diolah, APK untuk jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA—termasuk madrasah dan sederajat—menggambarkan proporsi peserta didik yang terdaftar dalam sistem pendidikan formal. Meskipun angka ini mencakup peserta didik di luar kelompok usia ideal, tingginya APK menandakan bahwa semakin banyak penduduk yang mendapatkan kesempatan untuk bersekolah, sehingga akses pendidikan di wilayah ini tergolong baik.

Sumber data ini berasal dari jumlah siswa yang dihimpun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pusat Data dan Teknologi Informasi, sementara jumlah penduduk kelompok usia sekolah diperoleh dari hasil konsolidasi bersih database SIAK Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2024. Data ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan ke depan. Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan tetap menjadi fokus utama agar setiap anak, tanpa terkecuali, dapat menikmati haknya untuk belajar dan berkembang. Dengan langkah strategis yang tepat, diharapkan pendidikan di Jawa Barat semakin inklusif dan berdaya saing.

Tabel 4-47 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK USIA 7-12 TAHUN		JUMLAH SISWA SEKOLAH DASAR		ANGKA PARTISIPASI KASAR
		N	%	N	%	
3201	BOGOR	646.740	12,04	701.856	13,09	108,52
3202	SUKABUMI	311.317	5,79	302.036	5,64	97,02
3203	CIANJUR	304.869	5,67	298.305	5,57	97,85
3204	BANDUNG	408.591	7,60	408.652	7,62	100,01
3205	GARUT	324.504	6,04	318.203	5,94	98,06
3206	TASIKMALAYA	188.724	3,51	181.564	3,39	96,21
3207	CIAMIS	114.139	2,12	111.025	2,07	97,27
3208	KUNINGAN	119.491	2,22	113.845	2,12	95,27
3209	CIREBON	254.814	4,74	241.470	4,51	94,76
3210	MAJALENGKA	132.171	2,46	125.636	2,34	95,06
3211	SUMEDANG	114.694	2,13	113.315	2,11	98,80
3212	INDRAMAYU	202.541	3,77	195.084	3,64	96,32
3213	SUBANG	162.886	3,03	157.844	2,94	96,90
3214	PURWAKARTA	116.859	2,17	115.718	2,16	99,02
3215	KARAWANG	285.818	5,32	284.294	5,30	99,47
3216	BEKASI	384.479	7,16	417.407	7,79	108,56
3217	BANDUNG BARAT	201.736	3,75	195.464	3,65	96,89

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK USIA 7-12 TAHUN		JUMLAH SISWA SEKOLAH DASAR		ANGKA PARTISIPASI KASAR
		N	%	N	%	
3218	PANGANDARAN	38.757	0,72	37.414	0,70	96,53
3271	KOTA BOGOR	118.809	2,21	118.482	2,21	99,72
3272	KOTA SUKABUMI	38.939	0,72	39.209	0,73	100,69
3273	KOTA BANDUNG	251.849	4,69	225.076	4,20	89,37
3274	KOTA CIREBON	35.787	0,67	39.243	0,73	109,66
3275	KOTA BEKASI	259.083	4,82	263.388	4,91	101,66
3276	KOTA DEPOK	204.104	3,80	210.933	3,94	103,35
3277	KOTA CIMAHI	56.083	1,04	52.426	0,98	93,48
3278	KOTA TASIKMALAYA	76.156	1,42	73.944	1,38	97,10
3279	KOTA BANJAR	19.333	0,36	18.094	0,34	93,59
TOTAL		**5.373.273**	**100,00**	**5.359.927**	**100,00**	**99,75**

Sumber : Diolah. Jumlah Siswa - APK/APM PAUD, SD, SMP, DAN SM Tahun 2024/2025 (termasuk Madrasah dan sederajat) Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Pusat Data Dan Teknologi Informasi
Jumlah Penduduk Kelompok Usia Sekolah - Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan data Pada Tabel Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar, jumlah penduduk usia sekolah dasar (7-12 tahun) tercatat sebanyak **5.373.273** jiwa, sementara jumlah siswa yang terdaftar mencapai **5.359.927** siswa. Hal ini menghasilkan APK sebesar **99,75%**, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar telah mengakses pendidikan formal. Beberapa daerah bahkan mencatat APK di atas 100%, seperti Kota Cirebon (**109,66%**), Kabuipaten Bekasi (**108,56%**), dan Kabupaten Bogor (**108,52%**), yang mengindikasikan adanya faktor tambahan seperti siswa dari luar daerah atau siswa yang belum lulus meskipun telah melewati usia sekolah dasar.

Di sisi lain, beberapa daerah masih memiliki APK yang lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi. Kota Bandung mencatat APK terendah, yaitu **89,37%**, diikuti oleh Kota Cimahi (**93,48%**) dan Kota Banjar **(93,59%**), yang menunjukkan adanya tantangan dalam menjangkau seluruh anak usia sekolah dasar.

Tabel 4-48 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK USIA 13-15 TAHUN		JUMLAH SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA		ANGKA PARTISIPASI KASAR
		N	%	N	%	
3201	BOGOR	317.453	11,97	346.527	13,32	109,16
3202	SUKABUMI	150.204	5,67	137.753	5,29	91,71
3203	CIANJUR	141.999	5,36	150.463	5,78	105,96
3204	BANDUNG	208.704	7,87	191.845	7,37	91,92
3205	GARUT	161.256	6,08	163.653	6,29	101,49
3206	TASIKMALAYA	98.709	3,72	101.938	3,92	103,27
3207	CIAMIS	60.970	2,30	62.589	2,41	102,66
3208	KUNINGAN	61.884	2,33	65.463	2,52	105,78

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK USIA 13-15 TAHUN		JUMLAH SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA		ANGKA PARTISIPASI KASAR
		N	%	N	%	
3209	CIREBON	118.263	4,46	122.856	4,72	103,88
3210	MAJALENGKA	65.232	2,46	62.944	2,42	96,49
3211	SUMEDANG	59.149	2,23	60.273	2,32	101,90
3212	INDRAMAYU	93.397	3,52	87.152	3,35	93,31
3213	SUBANG	79.493	3,00	79.131	3,04	99,54
3214	PURWAKARTA	55.795	2,10	56.290	2,16	100,89
3215	KARAWANG	132.443	5,00	118.051	4,54	89,13
3216	BEKASI	189.457	7,15	168.072	6,46	88,71
3217	BANDUNG BARAT	99.866	3,77	93.880	3,61	94,01
3218	PANGANDARAN	20.519	0,77	19.444	0,75	94,76
3271	KOTA BOGOR	59.304	2,24	60.322	2,32	101,72
3272	KOTA SUKABUMI	19.119	0,72	21.366	0,82	111,75
3273	KOTA BANDUNG	128.741	4,86	116.584	4,48	90,56
3274	KOTA CIREBON	18.419	0,69	22.806	0,88	123,82
3275	KOTA BEKASI	128.549	4,85	116.891	4,49	90,93
3276	KOTA DEPOK	103.889	3,92	97.339	3,74	93,70
3277	KOTA CIMAHI	29.224	1,10	26.909	1,03	92,08
3278	KOTA TASIKMALAYA	39.273	1,48	40.370	1,55	102,79
3279	KOTA BANJAR	10.043	0,38	10.871	0,42	108,24
TOTAL		**2.651.354**	**100,00**	**2.601.782**	**100,00**	**98,13**

Sumber : Diolah. Jumlah Siswa - APK/APM PAUD, SD, SMP, DAN SM Tahun 2024/2025 (termasuk Madrasah dan sederajat) Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Pusat Data Dan Teknologi Informasi
Jumlah Penduduk Kelompok Usia Sekolah - Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan data pada Tabel Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama (SMP), jumlah penduduk usia sekolah menengah pertama mencapai **2.651.354** jiwa, sementara jumlah siswa yang terdaftar di jenjang ini sebanyak **2.601.782** siswa. Dengan demikian, APK yang tercatat sebesar **98,13%**, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah menengah pertama telah mengakses pendidikan. Beberapa daerah memiliki APK yang cukup tinggi, seperti Kota Cirebon (**123,82%**), Kota Sukabumi (**111,75%**), dan Kabupaten Bogor (**109,16%**), yang mengindikasikan jumlah siswa lebih banyak dibandingkan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut, kemungkinan karena siswa yang bersekolah di luar rentang usia standar atau berasal dari daerah lain.

Kemudian terdapat beberapa daerah dengan APK di bawah rata-rata provinsi, seperti Kabupaten Bekasi (**88,17%**), Kabupaten Karawang (**89,13%**), dan Kota Bandung (**90,56%**), yang menunjukkan adanya tantangan dalam menjangkau seluruh anak usia SMP untuk bersekolah.

Tabel 4-49 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah (SMA, SMK, dan pendidikan lainnya yang setara)

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK USIA 16-18 TAHUN		JUMLAH SISWA SEKOLAH MENENGAH		ANGKA PARTISIPASI KASAR
		N	%	N	%	
3201	BOGOR	253.299	11,71	283.834	11,90	112,05
3202	SUKABUMI	105.215	4,87	109.331	4,58	103,91
3203	CIANJUR	94.946	4,39	137.571	5,77	144,89
3204	BANDUNG	173.690	8,03	158.731	6,66	91,39
3205	GARUT	121.524	5,62	162.572	6,82	133,78
3206	TASIKMALAYA	75.191	3,48	91.509	3,84	121,70
3207	CIAMIS	54.428	2,52	55.052	2,31	101,15
3208	KUNINGAN	55.752	2,58	65.235	2,74	117,01
3209	CIREBON	94.824	4,38	104.074	4,36	109,75
3210	MAJALENGKA	55.396	2,56	60.700	2,55	109,57
3211	SUMEDANG	51.056	2,36	55.473	2,33	108,65
3212	INDRAMAYU	73.724	3,41	81.707	3,43	110,83
3213	SUBANG	56.856	2,63	71.318	2,99	125,44
3214	PURWAKARTA	47.183	2,18	47.631	2,00	100,95
3215	KARAWANG	107.877	4,99	110.390	4,63	102,33
3216	BEKASI	151.785	7,02	148.710	6,24	97,97
3217	BANDUNG BARAT	82.163	3,80	75.810	3,18	92,27
3218	PANGANDARAN	20.210	0,93	19.139	0,80	94,70
3271	KOTA BOGOR	52.334	2,42	66.476	2,79	127,02
3272	KOTA SUKABUMI	18.426	0,85	25.930	1,09	140,73
3273	KOTA BANDUNG	114.519	5,30	133.908	5,62	116,93
3274	KOTA CIREBON	18.169	0,84	27.136	1,14	149,35
3275	KOTA BEKASI	115.899	5,36	120.879	5,07	104,30
3276	KOTA DEPOK	93.452	4,32	84.518	3,54	90,44
3277	KOTA CIMAHI	27.859	1,29	31.246	1,31	112,16
3278	KOTA TASIKMALAYA	37.168	1,72	41.289	1,73	111,09
3279	KOTA BANJAR	9.708	0,45	14.390	0,60	148,23
TOTAL		**2.162.653**	**100,00**	**2.384.559**	**100,00**	**110,26**

Sumber : Diolah. Jumlah Siswa - APK/APM PAUD, SD, SMP, DAN SM Tahun 2024/2025 (termasuk Madrasah dan sederajat) Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Pusat Data Dan Teknologi Informasi
Jumlah Penduduk Kelompok Usia Sekolah - Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan data pada Tabel Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah, jumlah penduduk usia sekolah menengah mencapai **2.162.653** jiwa, sedangkan jumlah siswa yang terdaftar di jenjang ini sebanyak **2.384.559** siswa. Dengan demikian, APK Jawa Barat untuk jenjang sekolah menengah, yang mencakup Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta pendidikan lain yang setara, mencapai **110,26%**. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat jumlah siswa yang lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia sekolah menengah di beberapa wilayah, kemungkinan disebabkan oleh keberadaan siswa

yang belum lulus dalam usia yang seharusnya atau siswa dari luar daerah yang menempuh pendidikan di wilayah tersebut.

Beberapa daerah dengan APK tinggi antara lain Kota Cirebon (**149,35%**), Kota Banjar (**148,23**), dan Kabupaten Cianjur (**144,89%**), yang mencerminkan tingginya partisipasi pendidikan di wilayah tersebut. Sebaliknya, terdapat beberapa daerah dengan APK yang lebih rendah, seperti Kota Depok (**90,44%**), Kabupaten Bandung (**91,39%**), dan Kabupaten Bandung Barat (**92,27%**), yang menandakan masih adanya tantangan dalam meningkatkan akses pendidikan menengah bagi seluruh penduduk usia sekolah.

Tabel 4-50 Angka Partisipasi Kasar di Provinsi Jawa Barat

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH SISWA	ANGKA PARTISIPASI KASAR
1	SD/MI SEDERAJAT	5.373.273	5.359.927	99,75
2	SMP/MTs SEDERAJAT	2.651.354	2.601.782	98,13
3	SMA/SMK/MA SEDERAJAT	2.162.653	2.384.559	110,26
TOTAL		**10.187.280**	**10.346.268**	**101,56**

Sumber : Diolah. Jumlah Siswa - APK/APM PAUD, SD, SMP, DAN SM Tahun 2024/2025 (termasuk Madrasah dan sederajat) Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Pusat Data Dan Teknologi Informasi
Jumlah Penduduk Kelompok Usia Sekolah - Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan data Angka Partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Jawa Barat untuk Tahun 2024, tercatat jumlah total penduduk usia sekolah dari jenjang SD hingga SMA/SMK/MA sederajat mencapai **10.187.280** jiwa, dengan jumlah siswa yang terdaftar sebanyak **10.346.268** siswa. Hal ini menghasilkan APK rata-rata di seluruh jenjang pendidikan sebesar **101,56%**, yang menunjukkan bahwa jumlah siswa yang bersekolah sedikit lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk usia sekolah. Rincian APK di setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

1. SD/MI sederajat memiliki APK sebesar **99,75%**, dengan jumlah siswa **5.359.927** dari total penduduk usia SD sebanyak **5.373.273** jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar telah mengenyam pendidikan pada jenjang ini.
2. SMP/MTs sederajat memiliki APK sebesar **98,13%**, dengan **2.601.782** siswa dari total **2.651.354** jiwa penduduk usia SMP. Meskipun relatif tinggi, angka ini mengindikasikan masih adanya sebagian kecil anak usia SMP yang belum terdaftar di sekolah.
3. SMA/SMK/MA sederajat memiliki APK tertinggi, yaitu **110,26%**, dengan jumlah siswa **2.384.559** dari total **2.162.653** jiwa penduduk usia sekolah menengah. APK yang melebihi 100% ini menunjukkan adanya siswa yang berusia lebih tua atau berasal dari luar daerah yang turut mengakses pendidikan di Jawa Barat.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan di Jawa Barat cukup tinggi, dengan kecenderungan meningkat pada jenjang pendidikan menengah. Namun, upaya peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan tetap diperlukan.

Untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Jawa Barat, berbagai strategi dapat diterapkan guna memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Salah satu langkah utama adalah meningkatkan akses ke pendidikan dengan membangun lebih banyak sekolah di daerah terpencil, menyediakan layanan transportasi sekolah gratis atau bersubsidi, serta memperbaiki infrastruktur sekolah agar lebih layak dan menarik bagi siswa. Selain itu, keterjangkauan pendidikan juga perlu diperhatikan melalui pemberian beasiswa dan bantuan finansial bagi siswa dari keluarga kurang mampu, program sekolah gratis atau dengan biaya rendah, serta penyediaan makanan bergizi di sekolah untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.

Di sisi lain, peningkatan kualitas pendidikan sangat penting agar siswa lebih termotivasi untuk bersekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan berkala bagi guru, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, serta memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran, terutama bagi daerah yang sulit dijangkau. Selain itu, kampanye dan sosialisasi pendidikan kepada masyarakat juga perlu digencarkan, baik melalui edukasi langsung kepada orang tua, program yang melibatkan tokoh masyarakat dan media sosial, maupun pendekatan *door-to-door* untuk mendata dan mengajak anak-anak yang tidak bersekolah kembali belajar.

Sebagai alternatif bagi anak yang sudah putus sekolah, program pendidikan nonformal seperti Kejar Paket A, B, dan C harus lebih diperluas. Selain itu, pendidikan vokasi melalui sekolah kejuruan (SMK) dan pelatihan keterampilan dapat menjadi pilihan menarik bagi siswa yang lebih tertarik pada dunia kerja daripada pendidikan akademik. Pendidikan jarak jauh atau kelas daring juga bisa menjadi solusi bagi mereka yang kesulitan mengakses sekolah secara fisik. Dengan menerapkan berbagai strategi ini, diharapkan APK di Jawa Barat dapat meningkat secara signifikan, sehingga semakin banyak anak yang mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.

4.2.2.3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur persentase peserta didik yang bersekolah pada jenjang pendidikan sesuai dengan usia idealnya. APM yang tinggi menunjukkan bahwa sistem pendidikan di suatu daerah berjalan dengan efektif dan sesuai dengan jenjang usia yang seharusnya. Perbedaan antara APK dan APM sering kali disebabkan oleh keterlambatan masuk sekolah atau peserta didik yang mengulang kelas.

Sumber data ini berasal dari data yang telah diolah, dengan jumlah siswa yang dihimpun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pusat Data dan Teknologi Informasi. Sementara itu, jumlah penduduk kelompok usia sekolah diperoleh dari hasil konsolidasi bersih database SIAK Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2024. Data ini menjadi dasar dalam menganalisis efektivitas pendidikan serta merumuskan kebijakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

Tabel 4-51 Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK USIA 7-12 TAHUN		JUMLAH SISWA USIA 7-12 TAHUN		ANGKA PARTISIPASI MURNI
		N	%	N	%	
3201	BOGOR	646.740	12,04	646.253	12,87	99,92
3202	SUKABUMI	311.317	5,79	283.281	5,64	90,99
3203	CIANJUR	304.869	5,67	278.907	5,55	91,48
3204	BANDUNG	408.591	7,60	381.970	7,60	93,48
3205	GARUT	324.504	6,04	298.701	5,95	92,05
3206	TASIKMALAYA	188.724	3,51	173.637	3,46	92,01
3207	CIAMIS	114.139	2,12	105.460	2,10	92,40
3208	KUNINGAN	119.491	2,22	107.116	2,13	89,64
3209	CIREBON	254.814	4,74	221.892	4,42	87,08
3210	MAJALENGKA	132.171	2,46	119.604	2,38	90,49
3211	SUMEDANG	114.694	2,13	106.626	2,12	92,97
3212	INDRAMAYU	202.541	3,77	181.144	3,61	89,44
3213	SUBANG	162.886	3,03	148.806	2,96	91,36
3214	PURWAKARTA	116.859	2,17	108.692	2,16	93,01
3215	KARAWANG	285.818	5,32	267.622	5,33	93,63
3216	BEKASI	384.479	7,16	391.747	7,80	101,89
3217	BANDUNG BARAT	201.736	3,75	184.348	3,67	91,38
3218	PANGANDARAN	38.757	0,72	35.421	0,71	91,39
3271	KOTA BOGOR	118.809	2,21	110.354	2,20	92,88
3272	KOTA SUKABUMI	38.939	0,72	36.308	0,72	93,24
3273	KOTA BANDUNG	251.849	4,69	214.614	4,27	85,22
3274	KOTA CIREBON	35.787	0,67	35.313	0,70	98,68
3275	KOTA BEKASI	259.083	4,82	248.470	4,95	95,90
3276	KOTA DEPOK	204.104	3,80	199.783	3,98	97,88
3277	KOTA CIMAHI	56.083	1,04	50.007	1,00	89,17
3278	KOTA TASIKMALAYA	76.156	1,42	70.015	1,39	91,94
3279	KOTA BANJAR	19.333	0,36	16.903	0,34	87,43
TOTAL		**5.373.273**	**100,00**	**5.022.994**	**100,00**	**93,48**

Sumber : Diolah. Jumlah Siswa - APK/APM PAUD, SD, SMP, DAN SM Tahun 2024/2025 (termasuk Madrasah dan sederajat) Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Pusat Data Dan Teknologi Informasi
Jumlah Penduduk Kelompok Usia Sekolah - Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan data Tabel Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar, rata-rata APM di tingkat sekolah dasar mencapai **93,48%**. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia sekolah dasar sudah bersekolah sesuai dengan kelompok usia yang seharusnya. Namun, masih terdapat beberapa daerah dengan APM di bawah rata-rata, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam memastikan seluruh anak usia sekolah dasar mendapatkan akses pendidikan yang optimal.

Beberapa wilayah dengan APM tinggi antara lain Kabupaten Bekasi (**101,89%**), Kabupaten Bogor (**99,92%**), dan Kota Cirebon (**98,68%**), yang menunjukkan tingkat keikutsertaan pendidikan dasar yang cukup baik. Sebaliknya, beberapa daerah seperti Kota Bandung (**85,22%**), Kabupaten Cianjur (**87,08%**) dan Kota Banjar (**87,43%**) masih memiliki tantangan dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah dasar.

Tabel 4-52 Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK USIA 13-15 TAHUN		JUMLAH SISWA USIA 13-15 TAHUN		ANGKA PARTISIPASI MURNI
		N	%	N	%	
3201	BOGOR	317.453	11,97	269.915	12,84	85,03
3202	SUKABUMI	150.204	5,67	115.359	5,49	76,80
3203	CIANJUR	141.999	5,36	114.701	5,46	80,78
3204	BANDUNG	208.704	7,87	155.262	7,39	74,39
3205	GARUT	161.256	6,08	130.587	6,21	80,98
3206	TASIKMALAYA	98.709	3,72	88.719	4,22	89,88
3207	CIAMIS	60.970	2,30	52.856	2,52	86,69
3208	KUNINGAN	61.884	2,33	53.140	2,53	85,87
3209	CIREBON	118.263	4,46	91.884	4,37	77,69
3210	MAJALENGKA	65.232	2,46	52.689	2,51	80,77
3211	SUMEDANG	59.149	2,23	49.838	2,37	84,26
3212	INDRAMAYU	93.397	3,52	66.099	3,15	70,77
3213	SUBANG	79.493	3,00	63.848	3,04	80,32
3214	PURWAKARTA	55.795	2,10	46.928	2,23	84,11
3215	KARAWANG	132.443	5,00	95.332	4,54	71,98
3216	BEKASI	189.457	7,15	139.455	6,64	73,61
3217	BANDUNG BARAT	99.866	3,77	77.320	3,68	77,42
3218	PANGANDARAN	20.519	0,77	16.377	0,78	79,81
3271	KOTA BOGOR	59.304	2,24	47.555	2,26	80,19
3272	KOTA SUKABUMI	19.119	0,72	17.305	0,82	90,51
3273	KOTA BANDUNG	128.741	4,86	98.104	4,67	76,20
3274	KOTA CIREBON	18.419	0,69	17.259	0,82	93,70
3275	KOTA BEKASI	128.549	4,85	93.840	4,47	73,00
3276	KOTA DEPOK	103.889	3,92	79.841	3,80	76,85
3277	KOTA CIMAHI	29.224	1,10	23.565	1,12	80,64
3278	KOTA TASIKMALAYA	39.273	1,48	34.593	1,65	88,08
3279	KOTA BANJAR	10.043	0,38	9.103	0,43	90,64
TOTAL		**2.651.354**	**100,00**	**2.101.474**	**100,00**	**79,26**

Sumber : Diolah. Jumlah Siswa - APK/APM PAUD, SD, SMP, DAN SM Tahun 2024/2025 (termasuk Madrasah dan sederajat) Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Pusat Data Dan Teknologi Informasi
Jumlah Penduduk Kelompok Usia Sekolah - Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan data Tabel Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama, tercatat bahwa rata-rata APM tingkat SMP di Jawa Barat mencapai **79,26%**. Angka ini

menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar **20,74%** anak usia SMP yang belum bersekolah sesuai dengan kelompok usianya.

Beberapa daerah dengan APM tertinggi antara lain Kota Cirebon (**93,70%**), Kota Banjar (**90,64%**), dan Kota Sukabumi (**90,51%**), yang menandakan tingkat keikutsertaan pendidikan menengah pertama yang cukup baik. Sebaliknya, terdapat beberapa daerah dengan APM rendah, seperti Kabupaten Indramayu (**70,77%**), Kabupaten Karawang (**71,98%**) dan Kota Bekasi (**73,00%**), yang menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam memastikan akses pendidikan bagi anak-anak usia SMP.

Tabel 4-53 Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah (SMA, SMK, dan pendidikan lainnya yang setara)

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK USIA 16-18 TAHUN		JUMLAH SISWA USIA 16-18 TAHUN		ANGKA PARTISIPASI MURNI
		N	%	N	%	
3201	BOGOR	253.299	11,71	207.763	11,68	82,02
3202	SUKABUMI	105.215	4,87	84.937	4,78	80,73
3203	CIANJUR	94.946	4,39	90.253	5,08	95,06
3204	BANDUNG	173.690	8,03	117.947	6,63	67,91
3205	GARUT	121.524	5,62	111.377	6,26	91,65
3206	TASIKMALAYA	75.191	3,48	73.983	4,16	98,39
3207	CIAMIS	54.428	2,52	41.707	2,35	76,63
3208	KUNINGAN	55.752	2,58	49.035	2,76	87,95
3209	CIREBON	94.824	4,38	73.448	4,13	77,46
3210	MAJALENGKA	55.396	2,56	46.861	2,64	84,59
3211	SUMEDANG	51.056	2,36	41.345	2,33	80,98
3212	INDRAMAYU	73.724	3,41	58.396	3,28	79,21
3213	SUBANG	56.856	2,63	52.749	2,97	92,78
3214	PURWAKARTA	47.183	2,18	37.059	2,08	78,54
3215	KARAWANG	107.877	4,99	82.489	4,64	76,47
3216	BEKASI	151.785	7,02	114.655	6,45	75,54
3217	BANDUNG BARAT	82.163	3,80	58.324	3,28	70,99
3218	PANGANDARAN	20.210	0,93	14.740	0,83	72,93
3271	KOTA BOGOR	52.334	2,42	49.085	2,76	93,79
3272	KOTA SUKABUMI	18.426	0,85	19.269	1,08	104,58
3273	KOTA BANDUNG	114.519	5,30	105.076	5,91	91,75
3274	KOTA CIREBON	18.169	0,84	19.796	1,11	108,95
3275	KOTA BEKASI	115.899	5,36	92.590	5,21	79,89
3276	KOTA DEPOK	93.452	4,32	65.008	3,66	69,56
3277	KOTA CIMAHI	27.859	1,29	25.369	1,43	91,06
3278	KOTA TASIKMALAYA	37.168	1,72	33.429	1,88	89,94
3279	KOTA BANJAR	9.708	0,45	11.452	0,64	117,96
TOTAL		**2.162.653**	**100,00**	**1.778.142**	**100,00**	**82,22**

Sumber : Diolah. Jumlah Siswa - APK/APM PAUD, SD, SMP, DAN SM Tahun 2024/2025 (termasuk Madrasah dan sederajat) Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Pusat Data Dan Teknologi Informasi
Jumlah Penduduk Kelompok Usia Sekolah - Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan data Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah, tingkat partisipasi pendidikan menengah, yang mencakup Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan pendidikan lain yang setara, mencapai **82,22%**. Ini menunjukkan bahwa masih ada sekitar **17,78%** remaja usia sekolah menengah yang belum bersekolah sesuai kelompok usianya.

Beberapa daerah dengan APM tertinggi antara lain Kota Banjar (**117,96%**), Kota Cirebon (**108,95%**), dan Kota Sukabumi (**104,58%**), yang menunjukkan tingkat keikutsertaan pendidikan yang sangat baik, bahkan melebihi 100%, kemungkinan karena adanya siswa dari luar daerah. Sebaliknya, daerah dengan APM yang lebih rendah seperti Kabupaten Bandung (**67,91%**), Kota Depok (**69,56%**), dan Kabupaten Bandung Barat (**70,99%**), perlu mendapatkan perhatian khusus dalam meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan menengah.

Tabel 4-54 Angka Partisipasi Murni di Provinsi Jawa Barat

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH SISWA	ANGKA PARTISIPASI MURNI
1	SD/MI SEDERAJAT	5.373.273	5.022.994	93,48
2	SMP/MTs SEDERAJAT	2.651.354	2.101.474	79,26
3	SMA/SMK/MA SEDERAJAT	2.162.653	1.778.142	82,22
TOTAL		**10.187.280**	**8.902.610**	**87,39**

Sumber : Diolah. Jumlah Siswa - APK/APM PAUD, SD, SMP, DAN SM Tahun 2024/2025 (termasuk Madrasah dan sederajat) Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Pusat Data Dan Teknologi Informasi
Jumlah Penduduk Kelompok Usia Sekolah - Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan data Tabel Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Jawa Barat, tingkat partisipasi pendidikan di berbagai jenjang menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) sederajat, APM mencapai **93,48%**, menunjukkan bahwa mayoritas anak usia sekolah dasar telah mendapatkan akses pendidikan yang sesuai. Namun, pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) sederajat, APM mengalami penurunan menjadi **79,26%**, yang mengindikasikan bahwa sekitar **20,74%** anak usia sekolah menengah pertama belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem pendidikan. Tantangan yang dihadapi pada jenjang ini mencakup faktor ekonomi, aksesibilitas sekolah, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan menengah pertama.

Sementara itu, pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA) sederajat, APM sedikit meningkat dibandingkan SMP/MTs, yaitu **82,22%**. Walaupun mengalami peningkatan, angka ini masih menunjukkan bahwa terdapat sekitar **17,78%** remaja usia sekolah menengah yang belum bersekolah sesuai jenjangnya. Secara keseluruhan, angka partisipasi kasar di seluruh jenjang pendidikan di Jawa Barat mencapai **87,39%**, mencerminkan masih adanya tantangan dalam memastikan seluruh anak dan remaja mendapatkan pendidikan yang layak. Untuk meningkatkan angka partisipasi ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, seperti penyediaan beasiswa, peningkatan fasilitas sekolah, serta sosialisasi pentingnya pendidikan

kepada orang tua dan masyarakat luas. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan angka partisipasi di semua jenjang pendidikan dapat terus meningkat dan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

Untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) di Jawa Barat, berbagai strategi dapat diterapkan, mencakup aspek aksesibilitas, ekonomi, kualitas pendidikan, serta kesadaran masyarakat. Salah satu langkah utama adalah meningkatkan akses dan ketersediaan sekolah, terutama di daerah terpencil. Pemerintah dapat membangun sekolah baru atau unit sekolah baru di wilayah dengan angka partisipasi rendah, serta meningkatkan sarana dan prasarana seperti laboratorium, perpustakaan, dan teknologi pembelajaran. Selain itu, penyediaan transportasi sekolah gratis atau bersubsidi juga dapat membantu siswa yang tinggal jauh dari sekolah agar tetap bisa bersekolah. Pendidikan jarak jauh dan sekolah terbuka juga bisa menjadi solusi bagi siswa yang memiliki keterbatasan akses ke sekolah formal.

Dari segi ekonomi, berbagai program bantuan seperti beasiswa dan subsidi pendidikan bagi siswa kurang mampu perlu diperluas. Pemerintah dapat menyediakan bantuan tunai bagi keluarga berpenghasilan rendah untuk mengurangi beban biaya sekolah. Program makan siang gratis dan transportasi sekolah gratis juga dapat menarik lebih banyak siswa untuk tetap bersekolah. Bagi siswa yang harus membantu ekonomi keluarga, sekolah dapat mengembangkan program belajar sambil bekerja melalui pendidikan vokasi dan kerja sama dengan industri agar mereka tetap mendapatkan pendidikan sambil memperoleh penghasilan.

Meningkatkan kualitas pendidikan juga menjadi kunci dalam meningkatkan APM. Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan metode pembelajaran inovatif dapat membuat proses belajar lebih menarik dan efektif. Revitalisasi pendidikan kejuruan (SMK) dengan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri juga dapat meningkatkan minat siswa untuk tetap bersekolah. Selain itu, pendidikan yang lebih fleksibel, seperti program Kejar Paket dan sistem modular, dapat menjadi solusi bagi siswa yang putus sekolah agar tetap memiliki kesempatan belajar.

Kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan melalui kampanye pendidikan yang menargetkan orang tua dan komunitas. Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan hingga jenjang menengah atas dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, ulama, dan organisasi sosial. Upaya pencegahan pernikahan dini dan pekerja anak juga harus ditingkatkan melalui penegakan hukum serta kerja sama dengan berbagai pihak. Selain itu, gerakan Kembali Bersekolah dan pengembangan sekolah berbasis komunitas dapat menjadi langkah konkret untuk mengajak anak-anak yang putus sekolah agar kembali mendapatkan pendidikan.

Secara keseluruhan, peningkatan APM di Jawa Barat membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup peningkatan akses pendidikan, dukungan ekonomi bagi siswa, peningkatan mutu pendidikan, serta penguatan kesadaran masyarakat. Dengan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dunia industri, dan masyarakat, diharapkan angka partisipasi

sekolah di semua jenjang pendidikan dapat meningkat, sehingga berdampak positif bagi masa depan pendidikan dan pembangunan daerah.

4.2.2.4. Angka Penduduk Putus Sekolah

Angka penduduk putus sekolah mencerminkan jumlah individu yang tidak berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan ini antara lain kondisi ekonomi keluarga yang sulit, keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan, serta faktor sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi keputusan individu untuk melanjutkan sekolah atau tidak.

Tingginya angka putus sekolah dapat berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Oleh karena itu, berbagai upaya perlu dilakukan untuk menekan angka ini, seperti pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah, serta penyuluhan mengenai pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak.

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH SISWA SEKOLAH DASAR		JUMLAH PUTUS SEKOLAH		ANGKA PUTUS SEKOLAH
		N	%	N	%	
3201	BOGOR	701.856	13,09	533	10,27	0,08
3202	SUKABUMI	302.036	5,64	485	9,35	0,16
3203	CIANJUR	298.305	5,57	394	7,59	0,13
3204	BANDUNG	408.652	7,62	345	6,65	0,08
3205	GARUT	318.203	5,94	76	1,46	0,02
3206	TASIKMALAYA	181.564	3,39	383	7,38	0,21
3207	CIAMIS	111.025	2,07	154	2,97	0,14
3208	KUNINGAN	113.845	2,12	49	0,94	0,04
3209	CIREBON	241.470	4,51	84	1,62	0,03
3210	MAJALENGKA	125.636	2,34	71	1,37	0,06
3211	SUMEDANG	113.315	2,11	228	4,39	0,20
3212	INDRAMAYU	195.084	3,64	204	3,93	0,10
3213	SUBANG	157.844	2,94	221	4,26	0,14
3214	PURWAKARTA	115.718	2,16	86	1,66	0,07
3215	KARAWANG	284.294	5,30	418	8,06	0,15
3216	BEKASI	417.407	7,79	545	10,50	0,13
3217	BANDUNG BARAT	195.464	3,65	195	3,76	0,10
3218	PANGANDARAN	37.414	0,70	23	0,44	0,06
3271	KOTA BOGOR	118.482	2,21	109	2,10	0,09
3272	KOTA SUKABUMI	39.209	0,73	94	1,81	0,24
3273	KOTA BANDUNG	225.076	4,20	32	0,62	0,01
3274	KOTA CIREBON	39.243	0,73	46	0,89	0,12
3275	KOTA BEKASI	263.388	4,91	209	4,03	0,08
3276	KOTA DEPOK	210.933	3,94	65	1,25	0,03
3277	KOTA CIMAHI	52.426	0,98	26	0,50	0,05
3278	KOTA TASIKMALAYA	73.944	1,38	90	1,73	0,12

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH SISWA SEKOLAH DASAR		JUMLAH PUTUS SEKOLAH		ANGKA PUTUS SEKOLAH
		N	%	N	%	
3279	KOTA BANJAR	18.094	0,34	24	0,46	0,13
TOTAL		**5.359.927**	**100,00**	**5.189**	**100,00**	**0,10**

Sumber : Diolah. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Pusdatin Kemendikdasmen - Pengolahan berdasarkan data cut off tanggal 30-Nov-2024
Jumlah Siswa - APK/APM PAUD, SD, SMP, DAN SM Tahun 2024/2025 (termasuk Madrasah dan sederajat)
Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Pusat Data Dan Teknologi Informasi

Berdasarkan data pada tabel di atas, Angka putus sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa dari total 5.359.927 siswa, terdapat 5.189 siswa yang mengalami putus sekolah, dengan angka putus sekolah sebesar 0,10%. Beberapa daerah dengan angka putus sekolah yang cukup tinggi antara lain Kota Sukabumi dengan angka **0,24%** (**94** siswa), Kabupaten Tasikmalaya dengan angka **0,21%** (**533** siswa), dan Kabupaten Sumedang dengan angka **0,20%** (**485** siswa). Sementara itu, daerah dengan angka putus sekolah yang lebih rendah meliputi Kota Bandung dengan angka **0,01%** (**32** siswa) dan Kabupaten Garut dengan angka **0,02%** (**76** siswa).

Selanjutnya, Berdasarkan jumlah siswa yang putus sekolah, Kabupaten Bekasi mencatat angka tertinggi dengan **545** siswa, disusul oleh Kabupaten Bogor (**533** siswa) dan Kabupaten Sukabumi (**485** siswa). Ketiga daerah ini perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya penurunan angka putus sekolah. Sementara itu, beberapa daerah memiliki jumlah putus sekolah yang lebih rendah, seperti Kabupaten Pangandaran (**23** Siswa), Kota Banjar (**24** siswa) dan Kota Cimahi (**26** siswa), yang menunjukkan kondisi pendidikan yang lebih stabil di wilayah tersebut.

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA		JUMLAH PUTUS SEKOLAH		ANGKA PUTUS SEKOLAH
		N	%	N	%	
3201	BOGOR	346.527	6,47	254	4,89	0,07
3202	SUKABUMI	137.753	2,57	60	1,16	0,04
3203	CIANJUR	150.463	2,81	144	2,78	0,10
3204	BANDUNG	191.845	3,58	85	1,64	0,04
3205	GARUT	163.653	3,05	12	0,23	0,01
3206	TASIKMALAYA	101.938	1,90	218	4,20	0,21
3207	CIAMIS	62.589	1,17	35	0,67	0,06
3208	KUNINGAN	65.463	1,22	12	0,23	0,02
3209	CIREBON	122.856	2,29	30	0,58	0,02
3210	MAJALENGKA	62.944	1,17	26	0,50	0,04
3211	SUMEDANG	60.273	1,12	39	0,75	0,06
3212	INDRAMAYU	87.152	1,63	57	1,10	0,07
3213	SUBANG	79.131	1,48	29	0,56	0,04
3214	PURWAKARTA	56.290	1,05	7	0,13	0,01
3215	KARAWANG	118.051	2,20	56	1,08	0,05

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA		JUMLAH PUTUS SEKOLAH		ANGKA PUTUS SEKOLAH
		N	%	N	%	
3216	BEKASI	168.072	3,14	73	1,41	0,04
3217	BANDUNG BARAT	93.880	1,75	19	0,37	0,02
3218	PANGANDARAN	19.444	0,36	8	0,15	0,04
3271	KOTA BOGOR	60.322	1,13	23	0,44	0,04
3272	KOTA SUKABUMI	21.366	0,40	27	0,52	0,13
3273	KOTA BANDUNG	116.584	2,18	1	0,02	0,00
3274	KOTA CIREBON	22.806	0,43	2	0,04	0,01
3275	KOTA BEKASI	116.891	2,18	21	0,40	0,02
3276	KOTA DEPOK	97.339	1,82	32	0,62	0,03
3277	KOTA CIMAHI	26.909	0,50	1	0,02	0,00
3278	KOTA TASIKMALAYA	40.370	0,75	5	0,10	0,01
3279	KOTA BANJAR	10.871	0,20	-	-	-
TOTAL		**2.601.782**	**48,54**	**1.276**	**24,59**	**0,05**

Sumber : Diolah. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Pusdatin Kemendikdasmen - Pengolahan berdasarkan data cut off tanggal 30-Nov-2024
Jumlah Siswa - APK/APM PAUD, SD, SMP, DAN SM Tahun 2024/2025 (termasuk Madrasah dan sederajat)
Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Pusat Data Dan Teknologi Informasi

Berdasarkan data pada tabel di atas, pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), sebanyak **1.276** siswa tercatat putus sekolah. Angka ini menunjukkan persentase putus sekolah sebesar **0,05%** dari total **2.601.782** siswa terdaftar. Meskipun angka ini terlihat kecil, jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan tetap menjadi perhatian karena dapat berdampak pada keberlanjutan pendidikan dan masa depan generasi muda.

Berdasarkan jumlah siswa yang putus sekolah, Kabupaten Bogor memiliki angka tertinggi dengan **254** siswa, diikuti oleh Kabupaten Tasikmalaya (**218** siswa) dan Kabupaten Cianjur (**144** siswa). Sedangkan untuk jumlah putus sekolah terendah dimiliki oleh Kota Banjar yang tidak memiliki siswa yang putus sekolah, disusul oleh Kota Bandung dan Kota Cimahi yang hanya memiliki **1** murid yang putus sekolah.

Dari segi persentase, Kabupaten Tasikmalaya memiliki angka putus sekolah tertinggi sebesar **0,21%**, disusul oleh Kota Sukabumi (**0,13%**), dan Kabupaten Cianjur (**0,10%**). Sementara itu, beberapa daerah seperti Kota Banjar, Kota Bandung, dan Kota Cimahi memiliki angka putus sekolah yang sangat rendah hampir mendekati **0%**. Tingginya jumlah putus sekolah di daerah-daerah ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, akses pendidikan, serta faktor sosial dan budaya yang memengaruhi keputusan siswa untuk berhenti sekolah.

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH SISWA (SMA-SMK)		JUMLAH PUTUS SEKOLAH		ANGKA PUTUS SEKOLAH
		N	%	N	%	
3201	BOGOR	283.834	5,30	123	2,37	0,04
3202	SUKABUMI	109.331	2,04	73	1,41	0,07

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH SISWA (SMA-SMK)		JUMLAH PUTUS SEKOLAH		ANGKA PUTUS SEKOLAH
		N	%	N	%	
3203	CIANJUR	137.571	2,57	113	2,18	0,08
3204	BANDUNG	158.731	2,96	26	0,50	0,02
3205	GARUT	162.572	3,03	7	0,13	0,00
3206	TASIKMALAYA	91.509	1,71	126	2,43	0,14
3207	CIAMIS	55.052	1,03	41	0,79	0,07
3208	KUNINGAN	65.235	1,22	19	0,37	0,03
3209	CIREBON	104.074	1,94	33	0,64	0,03
3210	MAJALENGKA	60.700	1,13	21	0,40	0,03
3211	SUMEDANG	55.473	1,03	38	0,73	0,07
3212	INDRAMAYU	81.707	1,52	52	1,00	0,06
3213	SUBANG	71.318	1,33	83	1,60	0,12
3214	PURWAKARTA	47.631	0,89	49	0,94	0,10
3215	KARAWANG	110.390	2,06	45	0,87	0,04
3216	BEKASI	148.710	2,77	36	0,69	0,02
3217	BANDUNG BARAT	75.810	1,41	67	1,29	0,09
3218	PANGANDARAN	19.139	0,36	10	0,19	0,05
3271	KOTA BOGOR	66.476	1,24	19	0,37	0,03
3272	KOTA SUKABUMI	25.930	0,48	3	0,06	0,01
3273	KOTA BANDUNG	133.908	2,50	8	0,15	0,01
3274	KOTA CIREBON	27.136	0,51	2	0,04	0,01
3275	KOTA BEKASI	120.879	2,26	26	0,50	0,02
3276	KOTA DEPOK	84.518	1,58	28	0,54	0,03
3277	KOTA CIMAHI	31.246	0,58	12	0,23	0,04
3278	KOTA TASIKMALAYA	41.289	0,77	3	0,06	0,01
3279	KOTA BANJAR	14.390	0,27	8	0,15	0,06
TOTAL		**2.384.559**	**44,49**	**1.071**	**20,64**	**0,04**

Sumber : Diolah. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Pusdatin Kemendikdasmen - Pengolahan berdasarkan data cut off tanggal 30-Nov-2024
Jumlah Siswa - APK/APM PAUD, SD, SMP, DAN SM Tahun 2024/2025 (termasuk Madrasah dan sederajat)
Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Pusat Data Dan Teknologi Informasi

Berdasarkan data pada tabel di atas, Pada tingkat Sekolah Menengah (SMA-SMK sederajat), tercatat **1.071** siswa mengalami putus sekolah, dengan persentase angka putus sekolah sebesar **0,04%** dari total **2.384.559** siswa. Meskipun persentase ini relatif kecil, tetap diperlukan perhatian khusus untuk memastikan setiap siswa dapat menyelesaikan pendidikan menengah atas. Berdasarkan jumlah siswa yang putus sekolah, Kabupaten Tasikmalaya memiliki angka tertinggi, yakni **126** siswa, diikuti oleh Kabupaten Bogor (**123** siswa) dan Kabupaten Cianjur (**113** siswa). Hal ini mengindikasikan bahwa di beberapa daerah, masih terdapat tantangan dalam mempertahankan partisipasi siswa hingga lulus SMA-SMK sederajat, baik karena faktor ekonomi, geografis, maupun sosial budaya.

Dari segi persentase angka putus sekolah, Kabupaten Tasikmalaya memiliki angka tertinggi sebesar **0,14%**, disusul oleh Kabupaten Subang (**0,12%**) dan Kabupaten Purwakarta

(**0,10%**). Sebaliknya, beberapa daerah seperti Kabupaten Garut, Kota Bandung, dan Kota Tasikmalaya mencatat angka putus sekolah yang sangat rendah hampir mendekati **0%**, yang menunjukkan bahwa daerah-daerah ini relatif berhasil dalam mempertahankan siswa di tingkat SMA-SMK sederajat. Untuk mengatasi angka putus sekolah di tingkat SMA-SMK sederajat, pemerintah dan pihak terkait perlu terus meningkatkan aksesibilitas pendidikan, memberikan bantuan finansial bagi siswa kurang mampu, serta memperkuat program bimbingan dan motivasi bagi siswa yang berisiko putus sekolah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan angka putus sekolah dapat ditekan dan semakin banyak siswa yang dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang tertinggi di sekolah menengah

4.2.3. Ekonomi

Perekonomian suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi tenaga kerja dan angkatan kerja yang tersedia. Angkatan kerja mencakup penduduk yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Sementara itu, tenaga kerja adalah bagian dari angkatan kerja yang sudah memiliki pekerjaan. Indikator tenaga kerja menjadi tolok ukur dalam menilai dinamika pasar kerja dan efektivitas kebijakan ekonomi serta ketenagakerjaan.

4.2.3.1. Proporsi Dan Jumlah Tenaga Kerja Dan Angkatan Kerja

Indikator ini mencerminkan jumlah serta proporsi penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja dibandingkan dengan total populasi. Dengan memahami proporsi tenaga kerja dan angkatan kerja, pemerintah dapat mengukur potensi ekonomi serta tingkat ketergantungan penduduk non-produktif terhadap kelompok produktif.

4.2.3.1.1. Jumlah Dan Proporsi Tenaga Kerja

Tenaga kerja (Manpower) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Indikator ini berguna sebagai wacana pengambil kebijakan dalam menyusun rencana ketenagakerjaan. Disamping itu juga untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja (penduduk usia kerja) potensial. Penghitungan persentase tenaga kerja dilaksanakan dengan membandingkan antara jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (usia kerja) dengan jumlah penduduk keseluruhan.

Tabel 4-55 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Pekerjaan

NO	KELOMPOK PERKERJAAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	6.433.300	12,54	5.555.386	10,83	11.988.686	23,36
2	APARATUR/PEJABAT NEGARA	488.779	0,95	244.340	0,48	733.119	1,43
3	TENAGA PENGAJAR	117.265	0,23	203.262	0,40	320.527	0,62
4	WIRASWASTA	12.264.761	23,90	1.973.412	3,85	14.238.173	27,75
5	PERTANIAN/PETERNAKAN	1.308.746	2,55	226.888	0,44	1.535.634	2,99
6	NELAYAN	71.237	0,14	393	0,00	71.630	0,14
7	AGAMA DAN KEPERCAYAAN	15.217	0,03	1.707	0,00	16.924	0,03

NO	KELOMPOK PERKERJAAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
8	PELAJAR/MAHASISWA	5.074.506	9,89	4.382.848	8,54	9.457.354	18,43
9	TENAGA KESEHATAN	22.505	0,04	80.026	0,16	102.531	0,20
10	PENSIUNAN	190.371	0,37	85.946	0,17	276.317	0,54
11	LAINNYA	11.107	0,02	12.564.376	24,48	12.575.483	24,51
TOTAL		**25.997.794**	**50,66**	**25.318.584**	**49,34**	**51.316.378**	**100**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan data di atas, jumlah tenaga kerja di Jawa Barat mencapai **51.316.378** orang. Kelompok wirausaha merupakan sektor dengan jumlah tenaga kerja terbesar, mencapai **14.238.173** orang atau **27,75%** dari total populasi tenaga kerja. Dari jumlah tersebut, mayoritas pelaku wirausaha adalah laki-laki sebanyak **12.264.761** orang (**23,90%**), sedangkan perempuan yang berwirausaha hanya **1.973.412** orang (**3,85%**). Hal ini menunjukkan bahwa sektor wirausaha masih didominasi oleh laki-laki, meskipun peluang bagi perempuan untuk berkontribusi dalam dunia usaha terus meningkat.

Di sisi lain, terdapat **11.988.686** orang (**23,36%**) yang masuk dalam kategori belum atau tidak bekerja, terdiri dari **6.433.300** laki-laki (**12,54%**) dan **5.555.386** perempuan (**10,83%**). Selain itu, kelompok pelajar dan mahasiswa juga cukup signifikan, mencapai **9.457.354** orang (**18,34%**), yang mencerminkan pentingnya pendidikan bagi masyarakat Jawa Barat. Adapun jumlah tenaga kerja di sektor aparatur negara tercatat sebanyak **733.119** orang (**1,43%**), sedangkan sektor pertanian dan peternakan hanya menyerap **1.535.634** orang (**2,99%**).

Beberapa sektor lain memiliki jumlah tenaga kerja yang lebih kecil, seperti tenaga pengajar dengan **320.527** orang (**0,62%**), tenaga kesehatan sebanyak **102.531** orang (**0,20%**), dan nelayan dengan **71.630** orang (**0,14%**). Kelompok pensiunan mencapai **276.317** orang (**0,54%**), sedangkan kelompok yang termasuk dalam kategori "lainnya" berjumlah **12.357.483** orang (**24,08%**). Data ini mengindikasikan bahwa meskipun sektor wirausaha menjadi pilihan utama, diversifikasi lapangan pekerjaan masih perlu ditingkatkan agar distribusi tenaga kerja lebih merata di berbagai sektor.

Tabel 4-56 Proporsi Tenaga Kerja

NO	UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	15-19	1.948.890	5,52	1.865.543	5,29	3.814.433	10,81
2	20-24	2.212.282	6,27	2.101.396	5,96	4.313.678	12,23
3	25-29	2.110.659	5,98	1.979.701	5,61	4.090.360	11,59
4	30-34	1.986.416	5,63	1.905.533	5,40	3.891.949	11,03
5	35-39	1.850.657	5,25	1.798.953	5,10	3.649.610	10,34
6	40-44	1.983.318	5,62	2.000.766	5,67	3.984.084	11,29
7	45-49	1.782.629	5,05	1.834.964	5,20	3.617.593	10,25
8	50-54	1.607.051	4,56	1.621.116	4,60	3.228.167	9,15

NO	UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
9	55-59	1.310.989	3,72	1.330.905	3,77	2.641.894	7,49
10	60-64	1.014.421	2,88	1.033.719	2,93	2.048.140	5,81
TOTAL		**17.807.312**	**50,47**	**17.472.596**	**49,53**	**35.279.908**	**100,00**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Proporsi tenaga kerja adalah perbandingan jumlah tenaga kerja terhadap total populasi usia kerja dalam suatu wilayah. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana penduduk usia kerja terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik dalam bentuk pekerjaan formal maupun informal. Proporsi tenaga kerja mencerminkan tingkat partisipasi angkatan kerja dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Berdasarkan tabel di atas proporsi tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024, jumlah tenaga kerja total mencapai **35.279.908** orang. Dari jumlah tersebut, tenaga kerja laki-laki tercatat sebanyak **17.807.312** orang (**50,47%**), sedangkan tenaga kerja perempuan berjumlah **17.472.596** orang (**49,53%**). Proporsi tenaga kerja antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang, menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang cukup besar dalam sektor ketenagakerjaan di Jawa Barat.

Dilihat dari kelompok usia, tenaga kerja terbanyak berada pada rentang usia **20-24 tahun**, dengan jumlah **4.313.678** orang (**12,23%**). Kelompok usia **25-29 tahun** berada di posisi kedua dengan **4.090.360** orang (**11,59%**), diikuti oleh kelompok usia **40-44 tahun** yang mencapai **3.984.084** orang (**11,29%**). Hal ini mencerminkan bahwa tenaga kerja produktif di Jawa Barat didominasi oleh kelompok usia muda, yang berpotensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, tenaga kerja di kelompok usia **55-59 tahun** dan **60-64 tahun** memiliki jumlah yang relative kecil, masing-masing sebanyak **2.641.894** orang (**7,49%**) dan **2.048.140** orang (**5,81%**). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja menurun seiring dengan bertambahnya usia, mengingat banyak pekerja yang memasuki masa pensiun. Dengan proporsi tenaga kerja yang signifikan pada usia produktif, penting bagi pemerintah dan sektor industri untuk menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan potensi dan keterampilan tenaga kerja muda guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Lebih lanjut, berikut cara penghitungan Tabel Proporsi Tenaga Kerja sebagai berikut:

$$Proporsi\ tenaga\ Kerja\ (Manpower) = \frac{Usia\ Produktif}{Jumlah\ Penduduk} \times 100 = Angka$$

$$Proporsi\ tenaga\ Kerja\ (Manpower) = \frac{35.279.908}{51.316.378} \times 100 = \mathbf{68,74}$$

Dari perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proporsi tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat mencapai **68,74%**. Ini berarti bahwa sekitar **68,74%** dari total penduduk Jawa Barat termasuk dalam kategori usia produktif dan berpotensi aktif dalam kegiatan ekonomi, baik bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Kesimpulan dari angka ini adalah:

1. Mayoritas Penduduk Berada di Usia Produktif, Dengan proporsi tenaga kerja yang tinggi, Jawa Barat memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi karena sebagian besar penduduknya berada dalam usia kerja (15-64 tahun).
2. Dukungan Kebijakan Ketenagakerjaan Diperlukan, Pemerintah dan sektor industri perlu memastikan bahwa peluang kerja yang cukup tersedia bagi kelompok usia produktif ini. Program pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif akan sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk.
3. Tantangan Penyerapan Tenaga Kerja, Meskipun proporsi tenaga kerja tinggi, angka ini belum menunjukkan tingkat partisipasi kerja atau pengangguran secara langsung. Oleh karena itu, tantangan selanjutnya adalah memastikan bahwa tenaga kerja yang tersedia dapat terserap ke dalam pasar kerja dengan baik.
4. Potensi Pertumbuhan Ekonomi, Dengan jumlah tenaga kerja yang besar, jika dikelola dengan baik, Jawa Barat memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global.

Secara keseluruhan, proporsi tenaga kerja sebesar **68,74%** menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki sumber daya manusia yang besar untuk menopang pembangunan ekonomi, tetapi juga memerlukan strategi yang tepat untuk memastikan bahwa tenaga kerja ini dapat berkontribusi secara maksimal dalam dunia kerja.

4.2.3.1.2. Jumlah Dan Proporsi Penduduk Bekerja Dan Menganggur

Angkatan kerja merupakan penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang aktif dalam kegiatan ekonomi, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan (menganggur). Indikator ini menjadi salah satu faktor penting dalam memahami dinamika ketenagakerjaan di suatu daerah. Semakin tinggi jumlah dan proporsi angkatan kerja, semakin besar potensi produktif yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi. Namun, tingginya angka angkatan kerja juga harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja agar tidak meningkatkan tingkat pengangguran.

Di Jawa Barat, jumlah dan proporsi angkatan kerja mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja yang terus berkembang. Untuk memastikan angkatan kerja terserap dengan baik, diperlukan strategi yang tepat, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan, penguatan sektor industri dan UMKM, serta kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung penciptaan lapangan kerja. Dengan langkah-langkah tersebut, angkatan kerja dapat lebih berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 4-57 Proporsi Angkatan Kerja

NO	UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	15-19	415.451	2,36	366.076	2,08	781.527	4,45
2	20-24	837.332	4,76	390.011	2,22	1.227.343	6,98

NO	UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
3	25-29	1.609.747	9,16	456.332	2,60	2.066.079	11,75
4	30-34	1.882.018	10,71	467.119	2,66	2.349.137	13,36
5	35-39	1.834.984	10,44	394.317	2,24	2.229.301	12,68
6	40-44	1.980.161	11,27	368.746	2,10	2.348.907	13,36
7	45-49	1.781.753	10,14	299.619	1,70	2.081.372	11,84
8	50-54	1.605.690	9,13	243.942	1,39	1.849.632	10,52
9	55-59	1.300.790	7,40	211.142	1,20	1.511.932	8,60
10	60-64	976.505	5,56	156.075	0,89	1.132.580	6,44
TOTAL		**14.224.431**	**80,92**	**3.353.379**	**19,08**	**17.577.810**	**100,00**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan tabel di atas, Proporsi angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat memiliki komposisi penduduk usia produktif yang aktif dalam dunia kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Berdasarkan data yang tersedia, total jumlah angkatan kerja mencapai **17.577.810** orang. Dari jumlah tersebut, laki-laki mendominasi dengan **14.224.431** orang atau sekitar **80,92%**, sedangkan perempuan berjumlah **3.353.379** orang atau sekitar **19,08%**. Ketimpangan gender ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja masih relatif rendah dibandingkan laki-laki, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti peran domestik, keterbatasan akses pekerjaan, atau preferensi pekerjaan tertentu.

Distribusi angkatan kerja terbesar terdapat pada kelompok usia 30-34 tahun dengan jumlah **2.349.137** orang (**13,36%**), diikuti oleh kelompok usia 40-44 tahun sebanyak **2.348.907** orang (**13,36%**), serta kelompok usia 35-39 tahun dengan **2.229.301** orang (**12,68%**). Data ini menunjukkan bahwa mayoritas tenaga kerja berada dalam usia produktif utama, yaitu usia di mana individu memiliki pengalaman dan keterampilan kerja yang lebih matang. Sementara itu, kelompok usia muda (15-24 tahun) memiliki angka partisipasi yang lebih rendah, kemungkinan besar karena masih dalam tahap pendidikan atau transisi menuju dunia kerja.

Di sisi lain, kelompok usia yang lebih tua, seperti 55-59 tahun, memiliki partisipasi yang lebih rendah dengan jumlah **1.511.932** orang (**8,60%**), di ikuti oleh kelompok umur 60-64 tahun dengan jumlah **1.132.580** orang (**6,44%**). Hal ini mencerminkan kecenderungan pekerja memasuki masa pensiun atau mengalami keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan di usia lanjut. Dengan proporsi angkatan kerja yang signifikan di usia produktif, pemerintah dan sektor swasta memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan vokasi guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan tenaga kerja di Jawa Barat. Lebih lanjut, berikut cara penghitungan Tabel Proporsi Penduduk Angkatan Kerja sebagai berikut

$$Angkatan\ Kerja = \frac{Tenaga\ Kerja}{Usia\ Produktif} \times 100 = Angka$$

$$Angkatan\ Kerja = \frac{17.577.810}{35.279.908} \times 100 = \mathbf{49,82}$$

Dari perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa proporsi angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat sebesar **49,82%** menunjukkan bahwa hampir setengah dari penduduk usia produktif (15-64 tahun) aktif dalam dunia kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Angka ini juga mengindikasikan bahwa masih terdapat **50,18%** penduduk usia produktif yang tidak termasuk dalam angkatan kerja, seperti pelajar, ibu rumah tangga, atau individu yang tidak aktif bekerja karena alasan tertentu. Hal ini menunjukkan adanya potensi tenaga kerja yang belum sepenuhnya dimanfaatkan dan bisa menjadi target pengembangan kebijakan ketenagakerjaan.

Tabel 4-58 Proporsi Bukan Angkatan Kerja

NO	UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	15-19	1.533.439	8,66	1.499.467	8,47	3.032.906	17,13
2	20-24	1.374.950	7,77	1.711.385	9,67	3.086.335	17,43
3	25-29	500.912	2,83	1.523.369	8,61	2.024.281	11,44
4	30-34	104.398	0,59	1.438.414	8,13	1.542.812	8,72
5	35-39	15.673	0,09	1.404.636	7,93	1.420.309	8,02
6	40-44	3.157	0,02	1.632.020	9,22	1.635.177	9,24
7	45-49	876	0,00	1.535.345	8,67	1.536.221	8,68
8	50-54	1.361	0,01	1.377.174	7,78	1.378.535	7,79
9	55-59	10.199	0,06	1.119.763	6,33	1.129.962	6,38
10	60-64	37.916	0,21	877.644	4,96	915.560	5,17
TOTAL		**3.582.881**	**20,24**	**14.119.217**	**79,76**	**17.702.098**	**100,00**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah penduduk yang tidak tergolong dalam angkatan kerja mencapai **17.702.098** orang atau **50,18%** dari total penduduk usia produktif. Dari jumlah tersebut, **79,76%** atau **14.119.217** orang merupakan perempuan, sedangkan **20,24%** atau **3.582.881** orang merupakan laki-laki. Proporsi terbesar terdapat pada kelompok usia 15-19 tahun dengan **3.032.906** orang (**17,13%**) dan kelompok umur 20-24 tahun **3.086.335** orang (**17,43%**), yang sebagian besar masih berstatus pelajar atau mahasiswa.

Dominasi perempuan dalam kategori bukan angkatan kerja menunjukkan bahwa masih banyak perempuan yang belum terlibat dalam aktivitas ekonomi formal, kemungkinan karena peran domestik seperti mengurus rumah tangga atau keterbatasan akses terhadap kesempatan kerja. Sementara itu, jumlah laki-laki dalam kategori bukan angkatan kerja jauh lebih rendah, yang mengindikasikan bahwa laki-laki cenderung lebih cepat masuk ke pasar kerja dibandingkan perempuan.

Fenomena ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam meningkatkan angka partisipasi tenaga kerja, khususnya di kalangan perempuan dan kelompok usia muda. Upaya seperti peningkatan akses pendidikan dan pelatihan kerja, kebijakan yang mendukung

kesetaraan gender dalam dunia kerja, serta pemberdayaan perempuan dalam ekonomi dapat membantu menurunkan angka bukan angkatan kerja dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Jawa Barat. Lebih lanjut, berikut cara penghitungan Tabel Proporsi Penduduk Bukan Angkatan Kerja sebagai berikut

$$Bukan\ Angkatan\ Kerja = \frac{Tenaga\ Kerja}{Usia\ Produktif} \times 100 = Angka$$

$$Bukan\ Angkatan\ Kerja = \frac{17.702.098}{35.279.908} \times 100 = \mathbf{50,18}$$

Berdasarkan perhitungan, proporsi penduduk bukan angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 mencapai **50,18%** dari total penduduk usia produktif. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk usia kerja belum terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik karena masih menempuh pendidikan, mengurus rumah tangga, atau alasan lainnya. Tingginya angka bukan angkatan kerja, terutama di kalangan perempuan dan kelompok usia muda, menjadi tantangan dalam upaya peningkatan partisipasi tenaga kerja. Hal ini dapat berdampak pada produktivitas ekonomi daerah serta tingkat kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat mendorong lebih banyak penduduk usia produktif untuk masuk ke dalam pasar kerja, seperti pelatihan keterampilan, peningkatan akses terhadap pekerjaan yang inklusif, serta pemberdayaan ekonomi bagi kelompok yang kurang terlibat dalam sektor.

4.2.3.2. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) mengukur proporsi penduduk usia 15-64 tahun yang tergolong sebagai angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan, dibandingkan dengan total penduduk dalam rentang usia tersebut. Indikator ini memberikan gambaran tentang tingkat keterlibatan penduduk usia produktif dalam pasar tenaga kerja, mencerminkan sejauh mana mereka berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Indikator ini sangat penting dalam menganalisis dinamika ketenagakerjaan, karena menunjukkan seberapa besar bagian dari tenaga kerja yang benar-benar terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif. Dengan memahami tingkat partisipasi angkatan kerja, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merancang kebijakan yang lebih tepat untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengatasi pengangguran, serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Tabel 4-59 Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)

UMUR	TIDAK BEKERJA	BEKERJA	ANGKATAN KERJA	BUKAN ANGKATAN KERJA	TENAGA KERJA	APAK
15-19	746.684	34.843	781.527	3.032.906	3.814.433	20,49
20-24	695.517	531.826	1.227.343	3.086.335	4.313.678	28,45
25-29	444.480	1.621.599	2.066.079	2.024.281	4.090.360	50,51

UMUR	TIDAK BEKERJA	BEKERJA	ANGKATAN KERJA	BUKAN ANGKATAN KERJA	TENAGA KERJA	APAK
30-34	195.196	2.153.941	2.349.137	1.542.812	3.891.949	60,36
35-39	85.933	2.143.368	2.229.301	1.420.309	3.649.610	61,08
40-44	51.236	2.297.671	2.348.907	1.635.177	3.984.084	58,96
45-49	30.349	2.051.023	2.081.372	1.536.221	3.617.593	57,53
50-54	22.673	1.826.959	1.849.632	1.378.535	3.228.167	57,30
55-59	20.637	1.491.295	1.511.932	1.129.962	2.641.894	57,23
60-64	19.689	1.112.891	1.132.580	915.560	2.048.140	55,30
TOTAL	**2.312.394**	**15.265.416**	**17.577.810**	**17.702.098**	**35.279.908**	**49,82**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan tabel di atas, Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) secara keseluruhan mencapai **49,82%**, yang berarti dari total **35.279.908** penduduk usia 15-64 tahun, sebanyak **17.577.810** orang termasuk dalam angkatan kerja, baik yang bekerja (**15.265.416** orang) maupun yang mencari pekerjaan (**2.312.394** orang). Angka ini menunjukkan tingkat keterlibatan tenaga kerja dalam perekonomian, dengan variasi yang cukup signifikan antar kelompok umur. Kelompok usia 15-19 tahun memiliki APAK terendah, yaitu **20,49%** (sebanyak **781.527** orang dari total **3.814.433** penduduk dalam kelompok usia ini), karena sebagian besar masih berada dalam pendidikan. Sebaliknya, angka partisipasi meningkat seiring bertambahnya usia, dengan puncaknya pada kelompok usia 35-39 tahun sebesar **61,08%** (**2.229.301** orang dari total **3.649.610** orang).

Pada kelompok usia produktif utama, yaitu 25-54 tahun, APAK berkisar antara **50,51%** hingga **61,08%**, menunjukkan bahwa mayoritas penduduk dalam kelompok ini aktif dalam dunia kerja. Contohnya, kelompok usia 30-34 tahun memiliki Angkatan Kerja terbanyak, dengan APAK sebesar **60,36%** (**2.349.137** dari **3.891.949** penduduk), sedangkan kelompok usia 40-44 tahun memiliki APAK **58,96%** (**2.348.907** dari **3.984.084** penduduk). Setelah usia 55 tahun, angka partisipasi mulai menurun, meskipun masih cukup tinggi pada kelompok usia **60-64 tahun** dengan APAK sebesar **55,30%** (**1.132.580** dari **2.048.140** penduduk). Data ini mencerminkan pola umum di mana individu lebih aktif dalam angkatan kerja pada usia produktif, sementara partisipasi mulai menurun mendekati usia pensiun. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif.

4.2.3.3. Jumlah Dan Proporsi Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan

Indikator jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan memberikan gambaran mengenai distribusi tenaga kerja di berbagai sektor lapangan pekerjaan. Data ini menunjukkan seberapa besar proporsi tenaga kerja yang terserap di setiap jenis pekerjaan dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Dengan memahami distribusi ini, pemerintah dapat melihat sektor-sektor yang mendominasi pasar tenaga kerja serta mengidentifikasi sektor yang masih membutuhkan peningkatan serapan tenaga kerja.

Selain itu, indikator ini memiliki peran penting dalam perencanaan kebijakan ketenagakerjaan di tingkat daerah. Dengan mengetahui sebaran tenaga kerja berdasarkan jenis pekerjaan, pemerintah dapat merancang program pelatihan, peningkatan keterampilan, serta kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Informasi ini juga membantu dalam menentukan sektor yang perlu mendapatkan dorongan investasi atau dukungan kebijakan agar dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tabel 4-60 Jumlah dan Proporsi Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan

NO	KELOMPOK PEKERJAAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	6.433.300	12,54	5.555.386	10,83	11.988.686	23,36
2	PELAJAR/MAHASISWA	5.074.506	9,89	4.382.848	8,54	9.457.354	18,43
3	PENSIUNAN	190.371	0,37	85.946	0,17	276.317	0,54
4	LAINNYA	11.107	0,02	12.564.376	24,48	12.575.483	24,51
BELUM/TIDAK BEKERJA		**11.709.284**	**22,82**	**22.588.556**	**44,02**	**34.297.840**	**66,84**
5	APARATUR/PEJABAT NEGARA	488.779	0,95	244.340	0,48	733.119	1,43
6	TENAGA PENGAJAR	117.265	0,23	203.262	0,40	320.527	0,62
7	WIRASWASTA	12.264.761	23,90	1.973.412	3,85	14.238.173	27,75
8	PERTANIAN/PETERNAKAN	1.308.746	2,55	226.888	0,44	1.535.634	2,99
9	NELAYAN	71.237	0,14	393	0,00	71.630	0,14
10	AGAMA DAN KEPERCAYAAN	15.217	0,03	1.707	0,00	16.924	0,03
11	TENAGA KESEHATAN	22.505	0,04	80.026	0,16	102.531	0,20
TELAH MEMILIKI PEKERJAAN		**14.288.510**	**27,84**	**2.730.028**	**5,32**	**17.018.538**	**33,16**
TOTAL JUMLAH PENDUDUK		**25.997.794**	**50,66**	**25.318.584**	**49,34**	**51.316.378**	**100,00**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan data di atas, jumlah total penduduk mencapai **51.316.378** jiwa, yang terdiri atas **25.997.794** jiwa laki-laki (**50,66%**) dan **25.318.584** jiwa perempuan (**49,34%**). Jika dilihat berdasarkan kelompok pekerjaan, penduduk dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu penduduk yang belum atau tidak bekerja dan penduduk yang telah memiliki pekerjaan. Penduduk yang termasuk dalam kelompok belum atau tidak bekerja berjumlah **34.297.840** jiwa (**66,84%**) dari total penduduk. Kelompok ini mencakup beberapa kategori, yaitu belum atau tidak bekerja sebanyak **11.988.686** jiwa (**23,36%**), pelajar/mahasiswa sebanyak **9.457.354** jiwa (**18,43%**), pensiunan sebanyak **276.317** jiwa **(0,54%**), serta lainnya sebanyak **12.575.483** jiwa (**24,51%**). Kategori "lainnya" didominasi oleh perempuan, yang mencapai **24,48%** dari total penduduk, dan kemungkinan besar merupakan kelompok ibu rumah tangga atau pekerja informal yang tidak terdata secara formal. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, kelompok belum atau tidak bekerja ini didominasi oleh perempuan, dengan jumlah **22.588.556** jiwa (**44,02%**), sedangkan laki-laki berjumlah **11.709.284** jiwa (**22,82%**). Dominasi perempuan pada kategori ini menunjukkan bahwa masih banyak perempuan yang tidak terlibat dalam aktivitas kerja formal atau lebih berperan di sektor domestik.

Sementara itu, kelompok penduduk yang telah memiliki pekerjaan berjumlah **17.018.538** jiwa (**33,16%**). Kelompok ini lebih banyak didominasi oleh laki-laki sebanyak **14.288.510** jiwa (**27,84%**), sedangkan perempuan hanya sebanyak **2.730.028** jiwa (**5,32%**). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja formal. Secara rinci, pekerjaan yang paling banyak ditekuni oleh penduduk adalah sebagai wiraswasta dengan jumlah **14.238.173** jiwa (**27,75%**), yang sebagian besar adalah laki-laki (**12.264.761** jiwa atau **23,90%**). Selain itu, terdapat kelompok pekerjaan pertanian/peternakan sebanyak **1.535.634** jiwa (**2,99%**), aparatur/pejabat negara sebanyak **733.119** jiwa (**1,43%**), tenaga pengajar sebanyak **320.527** jiwa (**0,62%**), tenaga kesehatan sebanyak **102.531** jiwa (**0,20%**), serta kelompok kecil lainnya seperti nelayan dan agama/kepercayaan dengan jumlah masing-masing sebanyak **71.630** jiwa (**0,14%**) dan **16.924** jiwa (**0,03%**). Secara umum, data ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk masih berada dalam kategori belum atau tidak bekerja, dengan kontribusi terbesar berasal dari kelompok “lainnya” yang kemungkinan besar mencakup ibu rumah tangga atau pekerja informal. Sementara itu, bagi kelompok penduduk yang bekerja, lapangan pekerjaan paling dominan adalah di sektor wiraswasta yang lebih banyak ditekuni oleh laki-laki. Ketimpangan partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan masih menjadi tantangan, terutama dalam mendorong pemberdayaan perempuan agar lebih aktif berkontribusi dalam dunia kerja, baik di sektor formal maupun informal.

4.2.4. Sosial

Dalam aspek sosial, terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menilai kesejahteraan masyarakat, di antaranya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, proporsi penduduk penyandang cacat, serta proporsi penduduk miskin penerima Askeskin. Indikator-indikator ini penting untuk memahami kondisi sosial-ekonomi penduduk serta merancang kebijakan yang tepat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.2.4.1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah individu atau keluarga yang mengalami hambatan, kesulitan, atau gangguan yang menghalangi mereka dalam menjalankan fungsi sosialnya. Hambatan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, atau perubahan lingkungan yang terjadi secara mendadak dan tidak menguntungkan. Akibatnya, mereka kesulitan menjalin hubungan sosial yang harmonis dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.

Namun, istilah PMKS kini telah mengalami perubahan menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pergantian ini dilakukan oleh Kementerian Sosial dengan pertimbangan bahwa istilah "penyandang masalah sosial" dapat memberikan dampak psikologis negatif bagi individu yang termasuk dalam kategori tersebut. Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa sejak bayi lahir, seseorang tidak seharusnya langsung diberikan label sebagai "penyandang masalah sosial", karena hal ini dapat menjadi

beban psikologis yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, perubahan terminologi ini bertujuan untuk menciptakan pendekatan yang lebih inklusif dan memberdayakan bagi mereka yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial.

Kementerian Sosial RI telah mengidentifikasi 26 jenis kelompok PPKS, masing-masing dengan batasan pengertian dan kriteria tertentu. Kelompok ini mencakup berbagai kondisi sosial yang membutuhkan perhatian khusus, termasuk anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, korban kekerasan dalam rumah tangga, gelandangan, pengemis, dan kelompok rentan lainnya. Dengan adanya perubahan istilah ini, diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat lebih fokus pada solusi serta layanan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, tanpa memberikan stigma yang berlebihan.

Pergantian istilah PMKS menjadi PPKS juga mencerminkan perubahan pendekatan dalam kebijakan kesejahteraan sosial, dari sekadar menangani masalah sosial menjadi memberikan pelayanan yang lebih komprehensif dan manusiawi. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa setiap individu yang membutuhkan bantuan sosial dapat menerimanya dengan rasa hormat dan martabat yang tetap terjaga.

Tabel 4-61 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

No	Kategori PPKS	Jumlah
1	Anak balita telantar	79.167
2	Anak terlantar	382.411
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	853
4	Anak jalanan	466
5	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	7.936
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	608
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	818
8	Lanjut usia telantar	202.065
9	Penyandang disabilitas	79.648
10	Tuna Susila	1.505
11	Gelandangan	2.354
12	Pengemis	718
13	Pemulung	2.423
14	Kelompok Minoritas	1.453
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	1.140
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	7.458
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	782
18	Korban trafficking	95
19	Korban tindak kekerasan	207
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	567
21	Korban bencana alam	46.331
22	Korban bencana sosial	11.060
23	Perempuan rawan sosial ekonomi	102.134
24	Fakir Miskin / Rumah Tangga Miskin	6.848.904

No	Kategori PPKS	Jumlah
25	Keluarga bermasalah sosial psikologis	2.776
26	Komunitas Adat Terpencil	14.408
TOTAL		**7.798.287**

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan data yang tercatat, jumlah total Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Provinsi Jawa Barat mencapai **7.798.286** jiwa yang tersebar dalam berbagai kategori sosial. Dari total tersebut, kelompok dengan jumlah terbanyak adalah fakir miskin dan rumah tangga miskin, yang mencapai **6.848.394** jiwa, mencerminkan masih tingginya angka kemiskinan di wilayah ini dan perlunya intervensi sosial serta ekonomi yang lebih masif. Selain itu, jumlah anak terlantar juga cukup besar, yaitu **382.411** jiwa, diikuti oleh lanjut usia terlantar yang mencapai **202.065** jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok usia rentan seperti anak-anak dan lansia memerlukan perhatian khusus dalam hal perlindungan sosial dan kesejahteraan. Selain itu, kategori penyandang disabilitas juga mencatat angka yang signifikan, yaitu **79.648** jiwa, yang membutuhkan fasilitas dan layanan khusus untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Di sisi lain, kelompok korban bencana sosial tercatat sebanyak **10.060** jiwa, sedangkan korban bencana alam mencapai **46.331** jiwa. Angka ini menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana untuk mengurangi dampak terhadap kelompok rentan. Kategori lain yang juga membutuhkan perhatian khusus adalah pengemis (**718** jiwa), gelandangan (**2.354** jiwa), pemulung (**2.423** jiwa), serta kelompok perempuan rawan sosial ekonomi (**102.143** jiwa) yang memerlukan intervensi ekonomi agar mereka dapat mandiri secara finansial. Di bidang kesehatan sosial, terdapat orang dengan HIV/AIDS (**7.458** jiwa) dan korban penyalahgunaan NAPZA (**782** jiwa), yang memerlukan layanan rehabilitasi dan dukungan psikososial. Selain itu, kasus trafficking (**95** jiwa) dan korban tindak kekerasan (**207** jiwa) menunjukkan bahwa masih ada permasalahan eksploitasi dan kekerasan yang harus ditangani dengan pendekatan hukum dan sosial yang lebih kuat.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan tantangan besar dalam sektor kesejahteraan sosial di Jawa Barat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat untuk memberikan perlindungan serta pemberdayaan bagi kelompok rentan ini, melalui program bantuan sosial, rehabilitasi, serta pemberdayaan ekonomi dan pendidikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan kesejahteraan sosial di Jawa Barat dapat meningkat secara berkelanjutan.

Data ini menunjukkan bahwa permasalahan kesejahteraan sosial di Jawa Barat sangat kompleks dan melibatkan berbagai kelompok rentan. Oleh karena itu, beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan ini antara lain:

1. Meningkatkan intervensi sosial dan ekonomi bagi kelompok miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan akses terhadap pendidikan serta pekerjaan yang layak.

2. Memperkuat layanan perlindungan sosial bagi anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, serta korban kekerasan dan eksploitasi.
3. Meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, orang dengan HIV/AIDS, dan korban perdagangan manusia.
4. Penguatan kebijakan mitigasi bencana dan pemulihan sosial untuk menangani korban bencana alam dan sosial.
5. Mendorong kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menyediakan layanan kesejahteraan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis komunitas, diharapkan kesejahteraan sosial di Jawa Barat dapat terus meningkat dan lebih banyak individu yang keluar dari kondisi rentan menuju kehidupan yang lebih baik.

4.2.4.2. Proporsi Penduduk Penyandang Cacat

Penduduk penyandang cacat merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dapat menghambat aktivitas sehari-hari dan partisipasi dalam kehidupan sosial. Tingginya proporsi penduduk penyandang cacat menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif, seperti penyediaan aksesibilitas yang lebih baik dalam fasilitas umum, pendidikan inklusif, serta peluang kerja yang sesuai dengan kondisi mereka. Selain itu, peningkatan layanan kesehatan rehabilitatif dan dukungan sosial sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Tabel 4-62 Proporsi Penduduk Penyandang Cacat

KODE WILAYAH	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PENDUDUK	PENDUDUK DISABILITAS	ANGKA PENYANDANG CACAT (PER 1000 ORANG)
3201	BOGOR	5.809.790	4.036	0,69
3202	SUKABUMI	2.868.943	2.094	0,73
3203	CIANJUR	2.638.825	2.528	0,96
3204	BANDUNG	3.839.721	4.146	1,08
3205	GARUT	2.851.877	3.462	1,21
3206	TASIKMALAYA	1.996.059	1.940	0,97
3207	CIAMIS	1.297.783	8.362	6,44
3208	KUNINGAN	1.239.999	2.644	2,13
3209	CIREBON	2.489.046	1.753	0,70
3210	MAJALENGKA	1.369.569	1.607	1,17
3211	SUMEDANG	1.226.660	1.718	1,40
3212	INDRAMAYU	1.980.080	1.899	0,96
3213	SUBANG	1.677.628	1.032	0,62
3214	PURWAKARTA	1.063.932	929	0,87
3215	KARAWANG	2.612.065	2.089	0,80
3216	BEKASI	3.387.601	2.247	0,66
3217	BANDUNG BARAT	1.911.661	1.492	0,78
3218	PANGANDARAN	447.272	3.623	8,10

KODE WILAYAH	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PENDUDUK	PENDUDUK DISABILITAS	ANGKA PENYANDANG CACAT (PER 1000 ORANG)
3271	KOTA BOGOR	1.144.108	1.108	0,97
3272	KOTA SUKABUMI	370.096	430	1,16
3273	KOTA BANDUNG	2.591.763	8.717	3,36
3274	KOTA CIREBON	356.629	754	2,11
3275	KOTA BEKASI	2.572.209	7.801	3,03
3276	KOTA DEPOK	2.010.912	2.481	1,23
3277	KOTA CIMAHI	581.994	1.548	2,66
3278	KOTA TASIKMALAYA	770.839	1.702	2,21
3279	KOTA BANJAR	209.317	712	3,40
TOTAL		**51.316.378**	**72.854**	**1,42**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah penduduk disabilitas di Provinsi Jawa Barat dari total **51.316.378 jiwa**, terdapat **72.854** jiwa yang tercatat sebagai penduduk penyandang disabilitas. Angka penyandang cacat per 1.000 penduduk di tiap kabupaten/kota bervariasi, dengan beberapa daerah memiliki angka yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Kabupaten dengan angka penyandang cacat tertinggi per 1.000 penduduk adalah Kabupaten Pangandaran dengan **8,10** per 1.000 penduduk, diikuti oleh Kabupaten Ciamis (**6,44**) dan Kota Banjar (**3,40**). Hal ini menunjukkan bahwa di daerah-daerah tersebut, jumlah penduduk disabilitas lebih tinggi dibandingkan daerah lain, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi kesehatan masyarakat, akses terhadap layanan kesehatan, dan lingkungan sosial.

Sebaliknya, daerah dengan angka penyandang cacat terendah adalah Kabupaten Subang (**0,62**), Kabupaten Bekasi (**0,66**), dan Kabupaten Bogor (**0,96**). Meskipun jumlah penduduknya relatif besar, angka penyandang cacat di daerah ini lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Barat. Secara keseluruhan, angka rata-rata penyandang cacat di Jawa Barat adalah **1,42** per 1.000 penduduk. Data ini menunjukkan pentingnya perhatian lebih dari pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas, aksesibilitas, dan program kesejahteraan sosial bagi penduduk penyandang disabilitas, terutama di daerah dengan angka yang lebih tinggi. Diperlukan peningkatan dalam layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, serta program pemberdayaan agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih mandiri dan sejahtera.

4.2.4.3. Proporsi Penduduk Miskin Penerima Askeskin

Salah satu indikator utama dalam keberhasilan pengentasan kemiskinan adalah terpenuhinya akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Akses ini menjadi krusial karena kesehatan yang baik merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas hidup serta produktivitas masyarakat. Penduduk miskin sering kali menghadapi kendala dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, baik karena keterbatasan biaya, jarak fasilitas kesehatan yang jauh, maupun keterbatasan informasi mengenai layanan yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk memastikan

bahwa kelompok rentan ini tetap dapat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas melalui berbagai skema perlindungan sosial, salah satunya dengan Asuransi Kesehatan atau Jaminan Kesehatan bagi penduduk miskin.

Pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin umumnya dipenuhi melalui berbagai program asuransi kesehatan yang disediakan oleh pemerintah, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu agar mereka tetap dapat memperoleh pelayanan medis tanpa harus terbebani oleh biaya yang tinggi. Untuk mengukur efektivitas program ini, diperlukan data yang akurat mengenai jumlah dan proporsi penduduk miskin yang telah menerima manfaat dari asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan. Informasi ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi serta perbaikan kebijakan agar cakupan layanan kesehatan bagi penduduk miskin dapat terus meningkat, sehingga tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan dapat tercapai.

BPJS Kesehatan memiliki program Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditujukan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu agar tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak. Program ini terbagi menjadi dua sumber pendanaan utama, yaitu PBI APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan PBI APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). PBI APBN dibiayai oleh pemerintah pusat dan diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Peserta PBI APBN secara otomatis didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan kelas III dan mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS, baik di tingkat puskesmas, klinik, maupun rumah sakit.

Sementara itu, PBI APBD merupakan skema pembiayaan yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Program ini ditujukan bagi warga yang tidak tercover dalam PBI APBN tetapi masih tergolong tidak mampu. Setiap daerah memiliki kewenangan dalam menentukan kuota peserta dan mekanisme pendataan sesuai dengan kondisi serta ketersediaan anggaran daerah. Keberadaan PBI APBN dan APBD sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan, dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa terbebani biaya. Namun, tantangan dalam pelaksanaannya masih ada, seperti ketidaktepatan sasaran, keterbatasan anggaran daerah, serta masalah administrasi yang menghambat akses peserta terhadap layanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan instansi terkait untuk meningkatkan akurasi data penerima, memperluas cakupan layanan, serta memastikan keberlanjutan program agar semakin banyak masyarakat yang memperoleh manfaat dari jaminan kesehatan ini.

Tabel 4-63 Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Provinsi Jawa Barat

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	PBI APBN		PBI APBD		TOTAL	
		N	%	N	%	N	%
3201	BOGOR	937.582	3,28	1.914.682	6,70	2.852.264	9,98

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	PBI APBN		PBI APBD		TOTAL	
		N	%	N	%	N	%
3202	SUKABUMI	448.854	1,57	1.456.124	5,10	1.904.978	6,67
3203	CIANJUR	402.849	1,41	1.357.093	4,75	1.759.942	6,16
3204	BANDUNG	543.948	1,90	1.433.200	5,02	1.977.148	6,92
3205	GARUT	270.651	0,95	1.563.270	5,47	1.833.921	6,42
3206	TASIKMALAYA	270.702	0,95	984.899	3,45	1.255.601	4,39
3207	CIAMIS	299.067	1,05	558.636	1,96	857.703	3,00
3208	KUNINGAN	68.417	0,24	692.744	2,42	761.161	2,66
3209	CIREBON	391.772	1,37	1.235.764	4,33	1.627.536	5,70
3210	MAJALENGKA	194.809	0,68	679.458	2,38	874.267	3,06
3211	SUMEDANG	170.316	0,60	534.358	1,87	704.674	2,47
3212	INDRAMAYU	395.516	1,38	1.023.882	3,58	1.419.398	4,97
3213	SUBANG	205.975	0,72	778.906	2,73	984.881	3,45
3214	PURWAKARTA	101.360	0,35	426.796	1,49	528.156	1,85
3215	KARAWANG	456.360	1,60	973.076	3,41	1.429.436	5,00
3216	BEKASI	956.500	3,35	707.622	2,48	1.664.122	5,82
3217	BANDUNG BARAT	285.063	1,00	849.095	2,97	1.134.158	3,97
3218	PANGANDARAN	97.732	0,34	266.127	0,93	363.859	1,27
3271	KOTA BOGOR	199.033	0,70	359.107	1,26	558.140	1,95
3272	KOTA SUKABUMI	44.770	0,16	141.983	0,50	186.753	0,65
3273	KOTA BANDUNG	634.112	2,22	522.261	1,83	1.156.373	4,05
3274	KOTA CIREBON	81.608	0,29	136.250	0,48	217.858	0,76
3275	KOTA BEKASI	431.618	1,51	485.393	1,70	917.011	3,21
3276	KOTA DEPOK	398.310	1,39	274.908	0,96	673.218	2,36
3277	KOTA CIMAHI	100.473	0,35	146.849	0,51	247.322	0,87
3278	KOTA TASIKMALAYA	103.002	0,36	440.912	1,54	543.914	1,90
3279	KOTA BANJAR	50.531	0,18	85.025	0,30	135.556	0,47
TOTAL		**8.540.930**	**29,90**	**20.028.420**	**70,10**	**28.569.350**	**100,00**

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi jawa Barat

Berdasarkan data kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh APBN dan APBD di Provinsi Jawa Barat, total penerima mencapai **28.569.350** jiwa. Dari jumlah tersebut, **8.540.930** jiwa (**29,90%**) dibiayai oleh APBN, sementara **20.028.420** jiwa (**70,10%**) dibiayai melalui APBD. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta BPJS PBI di Jawa Barat ditanggung oleh pemerintah daerah. Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, Kabupaten Bogor memiliki jumlah penerima tertinggi, yakni **2.852.264** jiwa (**9,98%**), terdiri dari **937.582** jiwa penerima PBI APBN dan **1.914.682** jiwa penerima PBI APBD. Disusul oleh Kabupaten Bandung dengan **1.977.148** jiwa (**6,92%**) dan Kabupaten Sukabumi dengan **1.904.978** jiwa (**6,67%**). Sementara itu, daerah dengan jumlah penerima terendah adalah Kota Banjar dengan **135.556** jiwa (**0,47%**).

Distribusi peserta PBI APBN dan APBD menunjukkan bahwa beberapa daerah lebih mengandalkan pendanaan dari APBD. Misalnya, Kabupaten Garut memiliki **1.563.270** jiwa penerima PBI APBD (**5,47%**), sementara penerima PBI APBN hanya **270.651** jiwa (**0,95%**). Hal

serupa terjadi di Kabupaten Cirebon, di mana **1.235.764** jiwa (**4,33%**) dibiayai oleh APBD, sementara hanya **391.772** jiwa (**1,37%**) dari APBN. Tingginya proporsi peserta PBI APBD dibandingkan PBI APBN menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Jawa Barat menanggung sebagian besar biaya layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, optimalisasi anggaran, validasi data penerima, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program ini. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan untuk memastikan bahwa jaminan kesehatan dapat diakses oleh masyarakat secara lebih merata dan efektif.

4.3. Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk merupakan dinamika penting dalam studi kependudukan, karena mencerminkan pergerakan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya, baik secara sementara maupun permanen. Mobilitas ini memberikan gambaran tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah, daya tarik wilayah tertentu, serta potensi tekanan atau peluang sosial ekonomi di daerah tujuan maupun asal.

4.3.1. Mobilitas Permanen

Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah administratif lainnya, yang mencerminkan perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi serta ketimpangan dalam penyediaan fasilitas pembangunan antar daerah. Mobilitas penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung pembangunan manusia yang menyeluruh, karena menggambarkan dinamika sosial, ekonomi, dan geografis yang terjadi dalam suatu wilayah. Analisis mengenai mobilitas penduduk, baik yang bersifat permanen maupun nonpermanen, menjadi lebih signifikan ketika dilakukan pada unit administrasi yang lebih kecil dari provinsi, seperti kabupaten/kota, kecamatan, atau bahkan desa/kelurahan. Hal ini karena mobilitas penduduk lebih mudah diamati dan dianalisis dampaknya secara langsung di tingkat lokal, terutama terkait pelayanan publik, ketersediaan infrastruktur, dan kebutuhan sosial-ekonomi lainnya. Untuk memahami arus migrasi secara lebih rinci, digunakan beberapa indikator penting, yaitu:

1. Migrasi Masuk (Mi) – jumlah penduduk yang datang dan menetap di suatu wilayah dari wilayah lain.
2. Migrasi Keluar (Mo) – jumlah penduduk yang meninggalkan wilayah asal untuk menetap di wilayah lain.
3. Migrasi Neto (Mn) – selisih antara jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar, yang menunjukkan apakah suatu wilayah mengalami surplus atau defisit migrasi.
4. Migrasi Bruto (Mb) – jumlah total dari migrasi masuk dan keluar tanpa memperhatikan arah pergerakan, yang mengindikasikan tingkat mobilitas keseluruhan suatu wilayah.
5. Persentase Migrasi dari Perdesaan ke Perkotaan – menggambarkan pergerakan penduduk dari daerah dengan karakteristik pedesaan ke wilayah perkotaan, sering kali sebagai respons terhadap daya tarik ekonomi dan akses terhadap fasilitas yang lebih baik.

Ukuran-ukuran tersebut bermanfaat dalam menilai apakah suatu kabupaten/kota merupakan daerah tujuan migrasi (dengan daya tarik tertentu) atau justru menjadi daerah asal migrasi karena adanya tekanan atau keterbatasan. Selain itu, analisis migrasi biasanya dilengkapi dengan pembagian menurut kelompok umur dan jenis kelamin untuk memahami lebih jauh profil dan kebutuhan penduduk yang bermigrasi.

4.3.1.1. Migrasi Masuk

Migrasi masuk adalah jumlah penduduk yang berpindah ke suatu wilayah dari wilayah lain dengan tujuan menetap. Tingginya angka migrasi masuk biasanya mengindikasikan daya tarik suatu wilayah, baik karena faktor ekonomi, pendidikan, maupun sosial. Daerah dengan fasilitas publik yang baik, lapangan kerja yang tersedia, serta kualitas hidup yang lebih tinggi cenderung menjadi tujuan migrasi masuk.

Tabel 4-64 Migrasi Masuk

KODE WIL	KABUPATEN/ KOTA	MIGRASI MASUK		JUMLAH PENDUDUK	ANGKA MIGRASI MASUK		
		KAB/ KOTA	PROVINSI		KAB/ KOTA	PROVINSI	TOTAL
3201	BOGOR	29.787	79.336	5.664.537	5,26	14,01	19,26
3202	SUKABUMI	11.324	7.609	2.821.619	4,01	2,70	6,71
3203	CIANJUR	12.475	6.187	2.584.735	4,83	2,39	7,22
3204	BANDUNG	31.057	9.590	3.773.104	8,23	2,54	10,77
3205	GARUT	14.229	5.105	2.790.435	5,10	1,83	6,93
3206	TASIKMALAYA	11.969	4.605	1.973.411	6,07	2,33	8,40
3207	CIAMIS	8.593	3.950	1.293.235	6,64	3,05	9,70
3208	KUNINGAN	5.149	4.859	1.235.854	4,17	3,93	8,10
3209	CIREBON	9.455	8.119	2.452.563	3,86	3,31	7,17
3210	MAJALENGKA	6.395	3.078	1.364.891	4,69	2,26	6,94
3211	SUMEDANG	9.567	2.897	1.216.309	7,87	2,38	10,25
3212	INDRAMAYU	6.237	6.554	1.947.720	3,20	3,36	6,57
3213	SUBANG	10.266	7.193	1.649.618	6,22	4,36	10,58
3214	PURWAKARTA	7.030	3.605	1.052.093	6,68	3,43	10,11
3215	KARAWANG	16.248	16.618	2.572.553	6,32	6,46	12,78
3216	BEKASI	29.560	70.305	3.289.743	8,99	21,37	30,36
3217	BANDUNG BARAT	17.599	5.605	1.878.507	9,37	2,98	12,35
3218	PANGANDARAN	2.610	1.548	445.158	5,86	3,48	9,34
3271	KOTA BOGOR	10.328	8.097	1.137.018	9,08	7,12	16,20
3272	KOTA SUKABUMI	6.681	1.429	367.457	18,18	3,89	22,07
3273	KOTA BANDUNG	24.042	10.083	2.579.837	9,32	3,91	13,23
3274	KOTA CIREBON	4.531	1.505	354.679	12,77	4,24	17,02
3275	KOTA BEKASI	14.533	54.884	2.526.133	5,75	21,73	27,48
3276	KOTA DEPOK	10.516	58.605	1.967.831	5,34	29,78	35,13
3277	KOTA CIMAHI	9.160	2.665	579.906	15,80	4,60	20,39
3278	KOTA TASIKMALAYA	8.990	2.003	761.080	11,81	2,63	14,44

KODE WIL	KABUPATEN/ KOTA	MIGRASI MASUK		JUMLAH PENDUDUK	ANGKA MIGRASI MASUK		
		KAB/ KOTA	PROVINSI		KAB/ KOTA	PROVINSI	TOTAL
3279	KOTA BANJAR	1.858	967	209.182	8,88	4,62	13,50
TOTAL		**330.189**	**387.001**	**50.489.208**	**6,54**	**7,67**	**14,20**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan tabel di atas, Provinsi Jawa Barat mencatat total migrasi masuk sebanyak **717.190** jiwa, yang terdiri dari **330.189** jiwa migrasi masuk antar wilayah kabupaten/kota, dan **387.001** jiwa berasal dari luar provinsi Jawa Barat. Dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 2024 mencapai **50.489.208** jiwa, angka migrasi masuk secara keseluruhan tercatat sebesar **14,20** per seribu penduduk yang menjelaskan bahwa dalam setiap 1.000 penduduk terjadi **±14** penduduk yang melakukan migrasi masuk. Hal ini menunjukkan dinamika mobilitas penduduk yang cukup tinggi di wilayah Jawa Barat, terutama menuju kawasan-kawasan urban. Beberapa kabupaten/kota menunjukkan angka migrasi masuk yang sangat tinggi. Kota Depok menempati peringkat pertama dengan angka migrasi masuk mencapai **35,13** per seribu penduduk, disusul oleh Kabupaten Bekasi (**30,36**), Kota Bekasi (**27,48**), dan Kota Sukabumi (**22,07**). Tingginya angka ini mencerminkan daya tarik kota-kota tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan akses layanan publik yang lebih baik.

Sementara itu, sejumlah daerah seperti Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Garut memiliki angka migrasi masuk yang lebih rendah, masing-masing sebesar **6,57**; **6,71**; dan **6,93** per seribu penduduk. Hal ini bisa menunjukkan keterbatasan peluang ekonomi atau minimnya daya tarik urbanisasi di wilayah-wilayah tersebut. Secara umum, data ini menunjukkan pola migrasi yang mengarah pada konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan dan penyangga metropolitan, seperti Bekasi, Depok, dan Bandung. Tren ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur, perumahan, dan pelayanan publik yang memadai untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk akibat migrasi. Kebijakan pembangunan yang merata dan berbasis potensi lokal diharapkan dapat menyeimbangkan arus migrasi dan mendorong pertumbuhan di wilayah-wilayah yang selama ini kurang diminati.

4.3.1.2. Migrasi Keluar

Migrasi keluar adalah jumlah penduduk yang meninggalkan wilayah asalnya untuk menetap di wilayah lain. Fenomena ini sering terjadi karena keterbatasan lapangan pekerjaan, fasilitas pendidikan yang terbatas, atau faktor lingkungan dan sosial yang kurang mendukung. Angka migrasi keluar yang tinggi dapat menjadi sinyal perlunya perbaikan kualitas hidup di daerah asal.

Tabel 4-65 Migrasi Keluar

KODE WIL	KABUPATEN/ KOTA	MIGRASI KELUAR		JUMLAH PENDUDUK	ANGKA MIGRASI KELUAR		
		KAB/ KOTA	PROVINSI		KAB/ KOTA	PROVINSI	TOTAL
3201	BOGOR	24.281	26.677	5.664.537	4,29	4,71	9,00

KODE WIL	KABUPATEN/ KOTA	MIGRASI KELUAR		JUMLAH PENDUDUK	ANGKA MIGRASI KELUAR		
		KAB/ KOTA	PROVINSI		KAB/ KOTA	PROVINSI	TOTAL
3202	SUKABUMI	17.310	9.212	2.821.619	6,13	3,26	9,40
3203	CIANJUR	16.117	7.275	2.584.735	6,24	2,81	9,05
3204	BANDUNG	28.027	9.584	3.773.104	7,43	2,54	9,97
3205	GARUT	17.737	6.481	2.790.435	6,36	2,32	8,68
3206	TASIKMALAYA	16.412	5.384	1.973.411	8,32	2,73	11,04
3207	CIAMIS	9.951	3.801	1.293.235	7,69	2,94	10,63
3208	KUNINGAN	6.760	4.471	1.235.854	5,47	3,62	9,09
3209	CIREBON	11.979	8.070	2.452.563	4,88	3,29	8,17
3210	MAJALENGKA	7.190	3.086	1.364.891	5,27	2,26	7,53
3211	SUMEDANG	9.464	3.122	1.216.309	7,78	2,57	10,35
3212	INDRAMAYU	7.906	7.046	1.947.720	4,06	3,62	7,68
3213	SUBANG	10.965	5.797	1.649.618	6,65	3,51	10,16
3214	PURWAKARTA	6.586	2.493	1.052.093	6,26	2,37	8,63
3215	KARAWANG	12.183	9.213	2.572.553	4,74	3,58	8,32
3216	BEKASI	17.128	20.474	3.289.743	5,21	6,22	11,43
3217	BANDUNG BARAT	16.293	4.632	1.878.507	8,67	2,47	11,14
3218	PANGANDARAN	2.803	1.745	445.158	6,30	3,92	10,22
3271	KOTA BOGOR	10.394	5.731	1.137.018	9,14	5,04	14,18
3272	KOTA SUKABUMI	4.986	1.616	367.457	13,57	4,40	17,97
3273	KOTA BANDUNG	32.529	10.094	2.579.837	12,61	3,91	16,52
3274	KOTA CIREBON	3.882	1.675	354.679	10,95	4,72	15,67
3275	KOTA BEKASI	24.574	27.808	2.526.133	9,73	11,01	20,74
3276	KOTA DEPOK	12.391	18.355	1.967.831	6,30	9,33	15,62
3277	KOTA CIMAHI	9.689	2.824	579.906	16,71	4,87	21,58
3278	KOTA TASIKMALAYA	7.475	1.901	761.080	9,82	2,50	12,32
3279	KOTA BANJAR	2.061	985	209.182	9,85	4,71	14,56
TOTAL		**347.073**	**209.552**	**50.489.208**	**6,87**	**4,15**	**11,02**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan tabel di atas, data migrasi keluar di Provinsi Jawa Barat, tercatat total **556.625** jiwa yang melakukan perpindahan, dengan rincian **347.073** jiwa berpindah antar kabupaten/kota, dan **209.552** jiwa berpindah ke kabupaten/kota lain di luar provinsi. Dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 2024 sebesar **50.489.208** jiwa, angka migrasi keluar rata-rata tercatat sebesar **11,02** per seribu penduduk yang menjelaskan bahwa dalam setiap 1.000 penduduk terjadi **±11** penduduk yang melakukan migrasi keluar. Kota-kota dengan angka migrasi keluar tertinggi per seribu penduduk adalah Kota Cimahi (**21,58**), Kota Bekasi (**20,74**), dan Kota Sukabumi (**17,97**). Angka ini menunjukkan tingginya tingkat pergerakan penduduk dari kota-kota tersebut, yang bisa disebabkan oleh faktor kepadatan penduduk, keterbatasan lahan, atau biaya hidup yang tinggi. Kota Bandung juga mencatat angka yang cukup tinggi, yaitu sebesar **16,52** per seribu penduduk.

Di sisi lain, beberapa daerah seperti Kabupaten Majalengka (**7,53**), Kabupaten Indramayu (**7,68**), dan Kabupaten Cirebon (**8,17**) menunjukkan angka migrasi keluar yang relatif rendah dibanding daerah lain. Hal ini bisa mencerminkan stabilitas populasi atau rendahnya daya dorong migrasi keluar, baik karena keterikatan sosial maupun terbatasnya akses mobilitas. Secara umum, migrasi keluar dari wilayah-wilayah urban menunjukkan adanya kecenderungan perpindahan penduduk ke daerah penyangga atau wilayah dengan biaya hidup lebih rendah. Fenomena ini dapat menjadi sinyal penting bagi perencanaan pembangunan wilayah, terutama dalam pengelolaan permukiman, transportasi, dan pemerataan akses terhadap pekerjaan serta layanan publik. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengantisipasi arus migrasi ini dengan kebijakan yang mendukung penyebaran pertumbuhan secara lebih merata di seluruh wilayah provinsi.

4.3.1.3. Migrasi Neto

Angka Migrasi Neto (*nett migration/Mn*) merupakan selisih antara jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Apabila jumlah migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar, maka disebut migrasi neto positif, yang berarti wilayah tersebut mengalami pertambahan penduduk akibat perpindahan masuk. Sebaliknya, jika jumlah migrasi keluar lebih besar dibandingkan migrasi masuk, maka disebut migrasi neto negatif, yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut mengalami pengurangan jumlah penduduk karena lebih banyak orang yang pindah keluar daripada yang datang. Angka migrasi neto ini penting untuk memahami dinamika kependudukan suatu daerah, terutama dalam perencanaan pembangunan dan penyediaan layanan publik.

Tabel 4-66 Migrasi Neto

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	MIGRASI MASUK	MIGRASI KELUAR	JUMLAH PENDUDUK	MIGRASI NETO
3201	BOGOR	109.123	50.958	5.664.537	10,27
3202	SUKABUMI	18.933	26.522	2.821.619	-2,69
3203	CIANJUR	18.662	23.392	2.584.735	-1,83
3204	BANDUNG	40.647	37.611	3.773.104	0,80
3205	GARUT	19.334	24.218	2.790.435	-1,75
3206	TASIKMALAYA	16.574	21.796	1.973.411	-2,65
3207	CIAMIS	12.543	13.752	1.293.235	-0,93
3208	KUNINGAN	10.008	11.231	1.235.854	-0,99
3209	CIREBON	17.574	20.049	2.452.563	-1,01
3210	MAJALENGKA	9.473	10.276	1.364.891	-0,59
3211	SUMEDANG	12.464	12.586	1.216.309	-0,10
3212	INDRAMAYU	12.791	14.952	1.947.720	-1,11
3213	SUBANG	17.459	16.762	1.649.618	0,42
3214	PURWAKARTA	10.635	9.079	1.052.093	1,48
3215	KARAWANG	32.866	21.396	2.572.553	4,46
3216	BEKASI	99.865	37.602	3.289.743	18,93

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	MIGRASI MASUK	MIGRASI KELUAR	JUMLAH PENDUDUK	MIGRASI NETO
3217	BANDUNG BARAT	23.204	20.925	1.878.507	1,21
3218	PANGANDARAN	4.158	4.548	445.158	-0,88
3271	KOTA BOGOR	18.425	16.125	1.137.018	2,02
3272	KOTA SUKABUMI	8.110	6.602	367.457	4,10
3273	KOTA BANDUNG	34.125	42.623	2.579.837	-3,29
3274	KOTA CIREBON	6.036	5.557	354.679	1,35
3275	KOTA BEKASI	69.417	52.382	2.526.133	6,74
3276	KOTA DEPOK	69.121	30.746	1.967.831	19,50
3277	KOTA CIMAHI	11.825	12.513	579.906	-1,19
3278	KOTA TASIKMALAYA	10.993	9.376	761.080	2,12
3279	KOTA BANJAR	2.825	3.046	209.182	-1,06
TOTAL		**717.190**	**556.625**	**50.489.208**	**3,18**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan data migrasi pada berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, total jumlah migrasi masuk tercatat sebanyak **717.190** jiwa, sedangkan migrasi keluar sebanyak **556.625** jiwa. Dengan demikian, angka migrasi neto secara keseluruhan berada pada angka positif sebesar **3,18** per seribu penduduk, yang menunjukkan bahwa secara umum provinsi ini mengalami pertambahan penduduk akibat migrasi. Beberapa daerah yang mencatat migrasi neto positif tertinggi adalah Kota Depok (**19,50**), Kabupaten Bekasi (**18,93**), dan Kabupaten Bogor (**10,27**). Hal ini menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut menjadi tujuan migrasi utama, kemungkinan karena faktor ekonomi, lapangan pekerjaan, dan akses terhadap fasilitas yang lebih baik.

Sebaliknya, sejumlah daerah mengalami migrasi neto negatif, menandakan lebih banyak penduduk yang keluar daripada yang masuk. Contohnya adalah Kota Bandung (**-3,29**), Kabupaten Sukabumi (**-2,69**), dan Kabupaten Tasikmalaya (**-2,65**). Hal ini dapat mengindikasikan adanya ketimpangan pembangunan atau terbatasnya peluang ekonomi di wilayah-wilayah tersebut, yang mendorong masyarakat untuk bermigrasi ke daerah lain yang dianggap lebih menjanjikan. Secara keseluruhan, angka-angka ini penting untuk menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam pengelolaan infrastruktur, layanan publik, serta strategi pemerataan pembangunan antarwilayah.

4.3.1.4. Migrasi Bruto

Angka Migrasi Bruto adalah ukuran statistik yang menggambarkan tingkat mobilitas penduduk suatu wilayah dalam satu periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Angka ini memperhitungkan jumlah seluruh kejadian perpindahan, baik migrasi masuk (*in-migration*) ke suatu daerah maupun migrasi keluar (*out-migration*) dari daerah tersebut. Dengan kata lain, angka migrasi bruto menunjukkan total aktivitas migrasi (masuk dan keluar) yang terjadi

di antara dua wilayah (asal dan tujuan) dalam kurun waktu tertentu, relatif terhadap jumlah penduduk wilayah-wilayah tersebut.

Tabel 4-67 Migrasi Bruto

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	MIGRASI MASUK	MIGRASI KELUAR	JUMLAH PENDUDUK	MIGRASI BRUTO
3201	BOGOR	109.123	50.958	5.664.537	28,26
3202	SUKABUMI	18.933	26.522	2.821.619	16,11
3203	CIANJUR	18.662	23.392	2.584.735	16,27
3204	BANDUNG	40.647	37.611	3.773.104	20,74
3205	GARUT	19.334	24.218	2.790.435	15,61
3206	TASIKMALAYA	16.574	21.796	1.973.411	19,44
3207	CIAMIS	12.543	13.752	1.293.235	20,33
3208	KUNINGAN	10.008	11.231	1.235.854	17,19
3209	CIREBON	17.574	20.049	2.452.563	15,34
3210	MAJALENGKA	9.473	10.276	1.364.891	14,47
3211	SUMEDANG	12.464	12.586	1.216.309	20,60
3212	INDRAMAYU	12.791	14.952	1.947.720	14,24
3213	SUBANG	17.459	16.762	1.649.618	20,74
3214	PURWAKARTA	10.635	9.079	1.052.093	18,74
3215	KARAWANG	32.866	21.396	2.572.553	21,09
3216	BEKASI	99.865	37.602	3.289.743	41,79
3217	BANDUNG BARAT	23.204	20.925	1.878.507	23,49
3218	PANGANDARAN	4.158	4.548	445.158	19,56
3271	KOTA BOGOR	18.425	16.125	1.137.018	30,39
3272	KOTA SUKABUMI	8.110	6.602	367.457	40,04
3273	KOTA BANDUNG	34.125	42.623	2.579.837	29,75
3274	KOTA CIREBON	6.036	5.557	354.679	32,69
3275	KOTA BEKASI	69.417	52.382	2.526.133	48,22
3276	KOTA DEPOK	69.121	30.746	1.967.831	50,75
3277	KOTA CIMAHI	11.825	12.513	579.906	41,97
3278	KOTA TASIKMALAYA	10.993	9.376	761.080	26,76
3279	KOTA BANJAR	2.825	3.046	209.182	28,07
TOTAL		**717.190**	**556.625**	**50.489.208**	**25,23**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan tabel di atas, data migrasi tahun terakhir di Provinsi Jawa Barat, tercatat bahwa angka migrasi bruto rata-rata mencapai **25,23** per 1.000 penduduk, yang menunjukkan tingkat mobilitas penduduk yang cukup tinggi di wilayah ini. Kota Depok menempati posisi tertinggi dengan angka migrasi bruto sebesar **50,75**, diikuti oleh Kota Bekasi (**48,22**) dan Kota Cimahi (**41,97**). Tingginya angka di wilayah-wilayah ini mencerminkan peran strategis mereka sebagai pusat hunian, industri, dan pendidikan, serta kedekatannya dengan DKI Jakarta sebagai pusat aktivitas ekonomi nasional. Sementara itu, Kabupaten Bekasi juga menunjukkan

mobilitas yang tinggi dengan angka sebesar **41,79**, menandakan peranannya sebagai daerah industri dan urbanisasi yang pesat.

Sebaliknya, beberapa daerah mencatat angka migrasi bruto yang relatif rendah. Kabupaten Indramayu hanya mencatat **14,24**, diikuti oleh Kabupaten Majalengka (**14,47**), Kabupaten Cirebon (**15,34**), dan Kabupaten Garut (**15,61**). Rendahnya angka ini bisa mencerminkan kondisi sosial-ekonomi daerah yang cenderung lebih stabil atau terbatasnya akses terhadap fasilitas dan peluang migrasi seperti pekerjaan dan pendidikan. Umumnya, daerah-daerah ini bersifat lebih agraris dan kurang terintegrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama.

Secara keseluruhan, terdapat **717.190** migrasi masuk dan **556.625** migrasi keluar yang terjadi di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat, dengan total populasi pada pertengahan tahun 2024 bejumlah **50.489.208** jiwa. Data ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan dinamika kependudukan tertinggi di Indonesia. Informasi ini sangat penting dalam perencanaan pembangunan, terutama untuk penataan wilayah, penyediaan infrastruktur, dan pelayanan publik yang merata dan berkeadilan.

4.3.2. Mobilitas Non Permanen

Mobilitas non permanen merujuk pada perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu singkat tanpa niat untuk menetap. Contoh dari mobilitas ini antara lain adalah komuter harian yang pergi ke kota untuk bekerja atau sekolah dan kembali ke tempat tinggalnya pada hari yang sama. Mobilitas non permanen biasanya terjadi karena adanya ketimpangan antara wilayah tempat tinggal dengan wilayah tujuan dalam hal lapangan pekerjaan, layanan pendidikan, dan fasilitas kesehatan.

Mobilitas ini memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, seperti kemacetan lalu lintas, tekanan terhadap infrastruktur kota, serta perubahan pola konsumsi dan aktivitas ekonomi. Selain itu, mobilitas non permanen sering kali menjadi indikator awal dari kemungkinan terjadinya migrasi permanen atau urbanisasi.

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
3201	BOGOR	-	-	-	-	-	-
3202	SUKABUMI	-	-	-	-	-	-
3203	CIANJUR	-	-	1	0,01	1	0,01
3204	BANDUNG	3.125	30,34	1.159	11,25	4.284	41,59
3205	GARUT	7	0,07	6	0,06	13	0,13
3206	TASIKMALAYA	3	0,03	8	0,08	11	0,11
3207	CIAMIS	-	-	-	-	-	-
3208	KUNINGAN	4	0,04	-	-	4	0,04
3209	CIREBON	1	0,01	-	-	1	0,01
3210	MAJALENGKA	4	0,04	1	0,01	5	0,05
3211	SUMEDANG		-		-	-	-

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
3212	INDRAMAYU		-		-	-	-
3213	SUBANG	2	0,02	-	-	2	0,02
3214	PURWAKARTA	1	0,01	1	0,01	2	0,02
3215	KARAWANG	9	0,09	6	0,06	15	0,15
3216	BEKASI	7	0,07	6	0,06	13	0,13
3217	BANDUNG BARAT	1	0,01	1	0,01	2	0,02
3218	PANGANDARAN	-	-	-	-	-	-
3271	KOTA BOGOR	56	0,54	61	0,59	117	1,14
3272	KOTA SUKABUMI	477	4,63	357	3,47	834	8,10
3273	KOTA BANDUNG	1.092	10,60	1.289	12,51	2.381	23,11
3274	KOTA CIREBON	42	0,41	52	0,50	94	0,91
3275	KOTA BEKASI	190	1,84	79	0,77	269	2,61
3276	KOTA DEPOK	972	9,44	873	8,47	1.845	17,91
3277	KOTA CIMAHI	243	2,36	165	1,60	408	3,96
3278	KOTA TASIKMALAYA	-	-	-	-	-	-
3279	KOTA BANJAR	-	-	-	-	-	-
TOTAL		**6.236**	**60,54**	**4.065**	**39,46**	**10.301**	**100,00**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan tabel di atas, data jumlah penduduk non-permanen Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat, terlihat bahwa beberapa kabupaten/kota masih menunjukkan angka yang sangat rendah bahkan nihil, seperti Kabupaten Bogor, Sukabumi, Ciamis, Sumedang, Indramayu, Pangandaran, serta Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar. Rendahnya angka ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor penting. Salah satunya adalah belum diperbaruinya regulasi terkait pendataan penduduk non-permanen di tingkat daerah, sehingga proses pencatatan belum berjalan secara optimal dan terstandarisasi. Selain itu, sosialisasi mengenai pentingnya pelaporan penduduk non-permanen belum dilakukan secara maksimal, baik kepada masyarakat maupun aparat di tingkat RT dan RW. Keterbatasan sumber daya pada level paling bawah ini turut menyulitkan proses pencatatan secara rutin. Di sisi lain, mobilitas penduduk non-permanen yang cenderung berpindah-pindah dalam waktu singkat juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelacakan data. Kurangnya partisipasi dari masyarakat, yang seringkali menganggap tidak penting untuk melapor karena sifat tinggalnya hanya sementara, turut memperburuk kondisi ini. Terakhir, lemahnya pemantauan dan evaluasi dari pihak berwenang menyebabkan pendataan tidak dilakukan secara menyeluruh di beberapa wilayah. Semua faktor ini saling berkaitan dan menjadi penyebab utama masih rendah atau tidak adanya data penduduk non-permanen di sejumlah daerah di Jawa Barat.

4.3.3. Urbanisasi

Urbanisasi adalah proses peningkatan proporsi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Fenomena ini merupakan bagian dari dinamika kependudukan yang umumnya terjadi seiring dengan perkembangan ekonomi,

industrialisasi, dan modernisasi suatu negara. Urbanisasi juga bisa terjadi secara alami karena pertumbuhan penduduk di kota, maupun karena adanya arus migrasi dari desa ke kota.

Perpindahan penduduk ke kota sering didorong oleh harapan terhadap kualitas hidup yang lebih baik, termasuk peluang kerja, pendidikan, dan fasilitas layanan umum. Namun, urbanisasi yang tidak terkendali dapat menimbulkan tantangan serius seperti munculnya permukiman kumuh, peningkatan angka pengangguran, serta tekanan terhadap layanan dasar dan infrastruktur perkotaan.

4.3.3.1. Persentase Penduduk Kota

Persentase penduduk kota menunjukkan seberapa besar proporsi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan dibandingkan dengan total penduduk. Angka ini mencerminkan perubahan struktur demografis Indonesia yang semakin urban.

Tabel 4-68 Persentase Penduduk Kota

WILAYAH	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	N	%	N	%	N	%
KABUPATEN	20.672.589	40,28	20.035.922	39,04	40.708.511	79,33
KOTA	5.325.205	10,38	5.282.662	10,29	10.607.867	20,67
JUMLAH	**25.997.794**	**50,66**	**25.318.584**	**49,34**	**51.316.378**	**100,00**
PERSENTASI PENDUDUK KOTA	**20,48**		**20,86**		**20,67**	

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Meskipun Provinsi Jawa Barat dikenal sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang pesat, data Semester II Tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat urbanisasi di provinsi ini masih relatif rendah, yaitu hanya sebesar **20,67%** dari total penduduk yang tinggal di wilayah kota. Sebagian besar penduduk, yaitu **79,33%**, masih bermukim di wilayah kabupaten yang secara umum memiliki karakteristik pedesaan. Kesenjangan ini mencerminkan adanya disparitas dalam pembangunan wilayah, khususnya dalam hal fasilitas perkotaan, akses terhadap layanan dasar, dan peluang ekonomi yang belum tersebar merata.

Rendahnya persentase penduduk kota juga menunjukkan bahwa proses urbanisasi di Jawa Barat belum merata. Meski beberapa wilayah seperti Bandung Raya, Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi), dan Cirebon telah berkembang sebagai pusat urbanisasi, namun wilayah lain masih didominasi oleh aktivitas non-perkotaan. Beberapa faktor penyebab lambatnya urbanisasi antara lain adalah terbatasnya ruang perkotaan, tingginya biaya hidup di kota, belum meratanya infrastruktur, serta kurangnya pengembangan kawasan urban baru di luar kota besar.

Jika tren urbanisasi tetap berlangsung secara bertahap, diperkirakan proporsi penduduk perkotaan di Jawa Barat dapat mencapai persentase yang lebih tinggi. Namun untuk mencapai hal tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah daerah, seperti mempercepat pembangunan kota-kota satelit, meningkatkan konektivitas

antarwilayah melalui transportasi publik, dan memperluas akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga perlu mengantisipasi tantangan urbanisasi seperti kemacetan, permukiman kumuh, dan beban lingkungan, dengan kebijakan tata ruang yang berkelanjutan serta penguatan kapasitas kota dalam menyerap migrasi penduduk.

Dengan pengelolaan yang tepat, urbanisasi dapat menjadi kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan kota di Jawa Barat harus dilakukan secara inklusif dan terintegrasi, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik dari sektor publik, swasta, maupun masyarakat.

4.3.3.2. Rasio Kota Dan Desa

Rasio kota dan desa menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan dengan yang tinggal di wilayah perdesaan. Rasio ini penting untuk memahami distribusi penduduk dan arah kebijakan pembangunan wilayah. Misalnya, jika rasio menunjukkan dominasi penduduk kota, maka perlu adanya perhatian terhadap tata kelola kota, penyediaan hunian, dan transportasi publik.

Tabel 4-69 Rasio Kota dan Desa

KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	N	%	N	%	N	%
KABUPATEN	20.672.589	40,28	20.035.922	39,04	40.708.511	79,33
KOTA	5.325.205	10,38	5.282.662	10,29	10.607.867	20,67
JUMLAH	**25.997.794**	**50,66**	**25.318.584**	**49,34**	**51.316.378**	**100,00**
RASIO KOTA DAN DESA	**257,60**		**263,66**		**260,58**	

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa jumlah penduduk yang tinggal di wilayah kabupaten mencapai **40.708.511** jiwa atau **79,33%** dari total populasi, sementara penduduk yang tinggal di wilayah kota hanya **10.607.867** jiwa atau sekitar **20,67%**. Ketimpangan ini tergambar lebih jelas dalam indikator rasio kota dan desa, yang menunjukkan bahwa dalam setiap 1.000 penduduk desa, terdapat rata-rata sekitar **±261** penduduk kota. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, rasio penduduk kota terhadap desa untuk laki-laki adalah **257,60**, artinya dalam setiap 1.000 laki-laki yang tinggal di desa, terdapat sekitar **±258** laki-laki yang tinggal di kota. Sementara itu, untuk perempuan, rasionya sedikit lebih tinggi yaitu **263,66**, menunjukkan bahwa terdapat sekitar **±264** perempuan kota untuk setiap 1.000 perempuan desa. Secara total, rata-rata rasio penduduk kota terhadap desa adalah **260,58**, yang mengindikasikan bahwa populasi di desa masih mendominasi komposisi demografi Jawa Barat.

Rasio ini mencerminkan bahwa urbanisasi belum merata, dan sebagian besar masyarakat masih memilih untuk tinggal di wilayah pedesaan, baik karena faktor ekonomi, sosial, maupun kultural. Namun demikian, angka rasio tersebut juga menandakan adanya

potensi pergeseran populasi ke wilayah perkotaan di masa depan, seiring dengan pertumbuhan infrastruktur, perluasan kawasan urban, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses yang lebih mudah terhadap layanan publik, pendidikan, dan lapangan kerja. Melalui analisis rasio ini, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan pembangunan yang lebih seimbang antara kota dan desa, agar pemerataan pembangunan tidak hanya terfokus di wilayah perkotaan, tetapi juga menyentuh masyarakat pedesaan secara langsung.

BAB 5

KEPEMILIKAN DOKUMEN

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota. Dokumen ini memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan melalui proses pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Sebagai instrumen utama dalam administrasi negara, dokumen kependudukan memegang peran penting dalam menjamin pemenuhan hak-hak sipil setiap warga negara. Tanpa keberadaan dokumen yang sah, individu akan menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, serta dalam mengurus berbagai keperluan hukum dan administratif lainnya. Oleh karena itu, tingkat cakupan kepemilikan dokumen kependudukan menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan di suatu daerah.

5.1. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga (KK) merupakan dokumen identitas resmi yang mencatat data lengkap tentang anggota suatu keluarga. Di dalamnya tercantum informasi penting seperti nama, nomor induk kependudukan (NIK), susunan dan hubungan antar anggota keluarga, tempat dan tanggal lahir, serta status pernikahan dan pekerjaan. Kegunaan Kartu Keluarga sangat vital dalam berbagai aspek kehidupan. KK menjadi dasar utama dalam pengurusan administrasi kependudukan lainnya, seperti pembuatan KTP, akta kelahiran, hingga akta kematian. Selain itu, KK juga digunakan sebagai syarat dalam mengakses layanan publik, seperti mendaftar sekolah, memperoleh bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga mengurus dokumen legal lainnya seperti paspor dan NPWP. Tak hanya itu, KK juga berfungsi sebagai alat verifikasi hubungan keluarga dalam konteks hukum, pewarisan, maupun perwalian anak. Oleh karena itu, memiliki Kartu Keluarga yang valid dan selalu diperbarui merupakan bagian penting dari tanggung jawab administrasi setiap warga negara.

Tabel 5-1 Kepemilikan Kartu Keluarga

KODE WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEPALA KELUARGA	MEMILIKI DOKUMEN		BELUM MEMILIKI	
			N	%	N	%
3201	BOGOR	1.824.418	1.808.694	99,14	15.724	0,86
3202	SUKABUMI	987.400	978.714	99,12	8.686	0,88
3203	CIANJUR	904.566	887.994	98,17	16.572	1,83
3204	BANDUNG	1.268.509	1.253.208	98,79	15.301	1,21
3205	GARUT	928.917	918.381	98,87	10.536	1,13
3206	TASIKMALAYA	733.199	725.835	99,00	7.364	1,00
3207	CIAMIS	470.464	467.656	99,40	2.808	0,60
3208	KUNINGAN	420.464	413.489	98,34	6.975	1,66
3209	CIREBON	847.667	837.675	98,82	9.992	1,18

KODE WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEPALA KELUARGA	MEMILIKI DOKUMEN		BELUM MEMILIKI	
			N	%	N	%
3210	MAJALENGKA	493.483	484.968	98,27	8.515	1,73
3211	SUMEDANG	443.888	432.005	97,32	11.883	2,68
3212	INDRAMAYU	723.088	708.069	97,92	15.019	2,08
3213	SUBANG	635.995	619.501	97,41	16.494	2,59
3214	PURWAKARTA	357.313	353.915	99,05	3.398	0,95
3215	KARAWANG	899.614	881.483	97,98	18.131	2,02
3216	BEKASI	1.062.796	1.043.865	98,22	18.931	1,78
3217	BANDUNG BARAT	647.592	641.119	99,00	6.473	1,00
3218	PANGANDARAN	164.539	163.627	99,45	912	0,55
3271	KOTA BOGOR	366.192	364.021	99,41	2.171	0,59
3272	KOTA SUKABUMI	121.751	121.042	99,42	709	0,58
3273	KOTA BANDUNG	853.668	844.365	98,91	9.303	1,09
3274	KOTA CIREBON	117.801	117.393	99,65	408	0,35
3275	KOTA BEKASI	818.598	807.898	98,69	10.700	1,31
3276	KOTA DEPOK	640.624	638.125	99,61	2.499	0,39
3277	KOTA CIMAHI	191.524	189.365	98,87	2.159	1,13
3278	KOTA TASIKMALAYA	257.313	256.410	99,65	903	0,35
3279	KOTA BANJAR	74.039	73.734	99,59	305	0,41
TOTAL		**17.255.422**	**17.032.551**	**98,71**	**222.871**	**1,29**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah kepala keluarga di Provinsi Jawa Barat tercatat sebanyak **17.255.422** kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, sebanyak **17.032.551** kepala keluarga (**98,71%**) telah memiliki dokumen kependudukan, sementara **222.871** kepala keluarga (**1,29%**) tercatat belum memiliki dokumen. Secara umum, tingkat kepemilikan dokumen di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat tergolong sangat tinggi, mendekati universal. Kabupaten/Kota seperti Kota Cirebon (**99,65%**), Kota Tasikmalaya (**99,65%**), dan Kota Depok (**99,61%**) mencatatkan persentase tertinggi dalam hal kepemilikan dokumen. Ini menunjukkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan di wilayah-wilayah tersebut.

Namun demikian, masih terdapat beberapa daerah dengan persentase kepemilikan dokumen yang relatif lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya. Kabupaten Sumedang (**97,32%**), Kabupaten Subang (**97,41%**), dan Kabupaten Indramayu (**97,98%**) merupakan daerah dengan jumlah kepala keluarga yang belum memiliki dokumen kependudukan di atas 10 ribu KK. Meski secara persentase selisihnya kecil, namun secara absolut jumlahnya cukup signifikan dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Data ini menunjukkan pentingnya upaya lanjutan dalam menjangkau kepala keluarga yang belum terlayani secara administratif, baik melalui jemput bola, peningkatan layanan daring, maupun kerja sama lintas sektor, agar seluruh warga negara dapat memperoleh hak administratifnya secara setara.

5.2. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) merupakan identitas resmi bagi setiap warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah. KTP-el dilengkapi dengan cip yang berisi data biometrik, seperti sidik jari dan data kependudukan lainnya, sehingga memiliki tingkat keamanan dan keakuratan data yang tinggi. Kegunaan KTP-el sangat luas dan krusial dalam kehidupan sehari-hari. Dokumen ini menjadi alat bukti identitas diri yang sah untuk keperluan administratif, seperti membuka rekening bank, membuat SIM, mengurus paspor, menikah, hingga dalam proses rekrutmen kerja. Selain itu, KTP-el juga menjadi persyaratan utama untuk mendapatkan pelayanan publik, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, serta hak-hak politik seperti pemilu.

Karena sistemnya sudah terintegrasi secara nasional, KTP-el memudahkan pendataan dan pelayanan lintas daerah. Penduduk tidak perlu lagi membuat KTP baru saat berpindah domisili, cukup dengan memperbarui data yang ada. Hal ini mendukung terciptanya sistem administrasi kependudukan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan kata lain, KTP-el bukan hanya sekadar kartu identitas, melainkan kunci utama dalam menjamin akses warga terhadap berbagai layanan dan hak-hak dasar sebagai warga negara.

Tabel 5-2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	WAJIB KTP	MEMILIKI KTP	
				JUMLAH	%
3201	BOGOR	5.809.790	4.093.169	4.068.058	99,39
3202	SUKABUMI	2.868.943	2.043.704	2.023.550	99,01
3203	CIANJUR	2.638.825	1.845.994	1.836.132	99,47
3204	BANDUNG	3.839.721	2.742.785	2.731.483	99,59
3205	GARUT	2.851.877	1.984.494	1.916.306	96,56
3206	TASIKMALAYA	1.996.059	1.477.930	1.475.582	99,84
3207	CIAMIS	1.297.783	984.167	976.604	99,23
3208	KUNINGAN	1.239.999	911.292	902.751	99,06
3209	CIREBON	2.489.046	1.809.208	1.804.739	99,75
3210	MAJALENGKA	1.369.569	1.014.373	1.011.152	99,68
3211	SUMEDANG	1.226.660	915.914	911.300	99,50
3212	INDRAMAYU	1.980.080	1.467.317	1.459.029	99,44
3213	SUBANG	1.677.628	1.253.073	1.248.646	99,65
3214	PURWAKARTA	1.063.932	754.613	753.272	99,82
3215	KARAWANG	2.612.065	1.867.126	1.857.357	99,48
3216	BEKASI	3.387.601	2.373.543	2.348.272	98,94
3217	BANDUNG BARAT	1.911.661	1.367.257	1.363.142	99,70
3218	PANGANDARAN	447.272	340.056	336.810	99,05
3271	KOTA BOGOR	1.144.108	824.359	811.181	98,40
3272	KOTA SUKABUMI	370.096	265.394	263.803	99,40
3273	KOTA BANDUNG	2.591.763	1.919.491	1.914.737	99,75
3274	KOTA CIREBON	356.629	258.339	256.453	99,27

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	WAJIB KTP	MEMILIKI KTP	
				JUMLAH	%
3275	KOTA BEKASI	2.572.209	1.883.222	1.880.090	99,83
3276	KOTA DEPOK	2.010.912	1.467.421	1.464.351	99,79
3277	KOTA CIMAHI	581.994	431.153	428.166	99,31
3278	KOTA TASIKMALAYA	770.839	560.476	558.356	99,62
3279	KOTA BANJAR	209.317	155.322	152.950	98,47
TOTAL		**51.316.378**	**37.011.192**	**36.754.272**	**99,31**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, Provinsi Jawa Barat mencatat jumlah penduduk sebanyak **51.316.378** jiwa, dengan **37.011.192** jiwa di antaranya merupakan penduduk wajib KTP, yaitu mereka yang telah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Dari jumlah tersebut, sebanyak **36.754.272** jiwa telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), atau setara dengan **99,31** persen. Angka ini menunjukkan tingkat kepemilikan dokumen identitas yang sangat tinggi dan mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dalam menjamin hak identitas penduduk.

Beberapa daerah bahkan mencatatkan capaian yang nyaris sempurna dalam kepemilikan KTP-el, seperti Kabupaten Tasikmalaya (**99,84%**), Kota Bekasi (**99,83%**), Kabupaten Purwakarta (**99,83%**) dan Kota Depok (**99,79%**), serta Kabupaten Cirebon (**99,75%**). Capaian ini menandakan terselenggaranya layanan administrasi yang efektif dan terintegrasi. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa daerah dengan persentase kepemilikan KTP-el di bawah 99 persen, antara lain Kabupaten Garut (**96,56%**), Kota Bogor (**98,40%**), dan Kota Banjar (**98,47%**). Secara absolut, jumlah penduduk yang belum memiliki KTP-el di daerah-daerah ini cukup signifikan dan perlu mendapatkan perhatian lebih melalui program jemput bola, edukasi publik, serta peningkatan layanan digital.

Tingkat kepemilikan KTP-el yang tinggi menjadi indikator penting dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan memastikan setiap warga negara dapat mengakses layanan publik secara adil dan merata. KTP-el tidak hanya berfungsi sebagai identitas resmi, tetapi juga menjadi syarat utama dalam berbagai layanan sosial, ekonomi, dan hukum di Indonesia.

5.3. Kepemilikan Akta

Akta kependudukan merupakan dokumen otentik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti sah terkait peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Kepemilikan akta-akta ini menjadi landasan legal dalam perlindungan identitas hukum serta akses terhadap hak-hak sipil dan layanan publik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 menjadi dasar hukum utama pencatatan peristiwa penting dalam administrasi kependudukan.

5.3.1. Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah dokumen resmi yang mencatat kelahiran seseorang, dan merupakan dasar utama untuk memperoleh Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dokumen kependudukan lainnya, seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el di masa mendatang. Kepemilikan akta kelahiran memberikan identitas hukum pertama bagi seorang anak, sekaligus menjadi syarat dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, hingga perlindungan hukum anak. Akta ini wajib dicatatkan paling lambat 60 hari setelah kelahiran (Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2006).

Tabel 5-3 Akta Kelahiran

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	PENDUDUK USIA 0 - 18 TAHUN	MEMILIKI AKTA		BELUM MEMILIKI AKTA	
			N	%	N	%
3201	BOGOR	1.771.535	1.604.365	90,56	167.170	9,44
3202	SUKABUMI	844.085	813.304	96,35	30.781	3,65
3203	CIANJUR	807.843	796.560	98,60	11.283	1,40
3204	BANDUNG	1.142.253	1.039.663	91,02	102.590	8,98
3205	GARUT	892.570	766.062	85,83	126.508	14,17
3206	TASIKMALAYA	535.116	529.789	99,00	5.327	1,00
3207	CIAMIS	329.067	292.804	88,98	36.263	11,02
3208	KUNINGAN	345.256	332.703	96,36	12.553	3,64
3209	CIREBON	701.508	666.524	95,01	34.984	4,99
3210	MAJALENGKA	370.110	356.827	96,41	13.283	3,59
3211	SUMEDANG	325.104	312.446	96,11	12.658	3,89
3212	INDRAMAYU	529.453	486.639	91,91	42.814	8,09
3213	SUBANG	434.751	413.558	95,13	21.193	4,87
3214	PURWAKARTA	322.029	293.509	91,14	28.520	8,86
3215	KARAWANG	770.266	729.361	94,69	40.905	5,31
3216	BEKASI	1.049.307	965.555	92,02	83.752	7,98
3217	BANDUNG BARAT	565.575	514.447	90,96	51.128	9,04
3218	PANGANDARAN	113.943	110.728	97,18	3.215	2,82
3271	KOTA BOGOR	334.421	328.295	98,17	6.126	1,83
3272	KOTA SUKABUMI	110.615	110.399	99,80	216	0,20
3273	KOTA BANDUNG	704.985	683.220	96,91	21.765	3,09
3274	KOTA CIREBON	104.299	99.175	95,09	5.124	4,91
3275	KOTA BEKASI	722.022	708.142	98,08	13.880	1,92
3276	KOTA DEPOK	569.812	555.654	97,52	14.158	2,48
3277	KOTA CIMAHI	159.946	156.661	97,95	3.285	2,05
3278	KOTA TASIKMALAYA	222.356	214.825	96,61	7.531	3,39
3279	KOTA BANJAR	57.227	56.994	99,59	233	0,41
TOTAL		**14.835.454**	**13.938.209**	**93,95**	**897.245**	**6,05**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan tabel di atas, data kependudukan di Provinsi Jawa Barat, dari total **14.835.454** jiwa penduduk usia 0–18 tahun, tercatat sebanyak **13.938.209** jiwa atau **93,95%**

telah memiliki akta kelahiran. Sementara itu, masih terdapat **897.245** jiwa atau sekitar **6,05%** yang belum memiliki akta kelahiran. Beberapa daerah dengan cakupan kepemilikan akta kelahiran tertinggi antara lain Kota Sukabumi (**99,80%**), Kota Banjar (**99,59%**), Kabupaten Tasikmalaya (**99,00%**), dan Kabupaten Cianjur (**98,60%**). Di sisi lain, daerah dengan cakupan kepemilikan akta yang masih tergolong rendah adalah Kabupaten Garut (**85,83%**), Kabupaten Ciamis (**88,98%**), Kabupaten Bogor (**90,56%**), dan Kabupaten Bandung Barat (**90,96%**).

Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum kesadaran dan pencatatan akta kelahiran di Jawa Barat telah tinggi, namun masih terdapat tantangan di beberapa wilayah, terutama daerah yang memiliki jumlah penduduk besar atau keterbatasan akses terhadap layanan administrasi kependudukan. Padahal, kepemilikan akta kelahiran sangat penting sebagai bukti identitas hukum anak yang menjadi dasar untuk memperoleh dokumen kependudukan lainnya serta akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Upaya perlu terus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama Disdukcapil dalam menjangkau kelompok rentan, masyarakat terpencil, dan memperluas cakupan layanan agar seluruh anak dapat tercatat secara resmi dalam sistem administrasi negara.

5.3.2. Akta Perkawinan

Akta perkawinan adalah bukti sah terjadinya pernikahan yang dicatatkan oleh negara, baik bagi warga negara Indonesia yang menikah menurut agama non-Islam maupun bagi yang menikah secara adat. Akta ini berfungsi sebagai dasar hukum status perkawinan, pengurusan hak waris, tanggung jawab hukum suami-istri, serta keabsahan anak dalam perkawinan. Bagi penduduk yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), sementara Disdukcapil mencatat perkawinan bagi penduduk non-Islam.

Tabel 5-4 Akta Perkawinan

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	WAJIB AKTA KAWIN	MEMILIKI AKTA		BELUM MEMILIKI AKTA	
			N	%	N	%
3201	BOGOR	2.725.635	1.749.738	64,20	975.897	35,80
3202	SUKABUMI	1.437.359	501.766	34,91	935.593	65,09
3203	CIANJUR	1.310.686	586.176	44,72	724.510	55,28
3204	BANDUNG	1.910.079	1.368.924	71,67	541.155	28,33
3205	GARUT	1.367.834	981.834	71,78	386.000	28,22
3206	TASIKMALAYA	1.020.109	626.526	61,42	393.583	38,58
3207	CIAMIS	670.207	473.117	70,59	197.090	29,41
3208	KUNINGAN	608.991	274.190	45,02	334.801	54,98
3209	CIREBON	1.195.184	972.048	81,33	223.136	18,67
3210	MAJALENGKA	692.222	504.919	72,94	187.303	27,06
3211	SUMEDANG	644.351	439.297	68,18	205.054	31,82
3212	INDRAMAYU	976.341	701.870	71,89	274.471	28,11
3213	SUBANG	883.227	500.520	56,67	382.707	43,33
3214	PURWAKARTA	508.109	295.138	58,09	212.971	41,91

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	WAJIB AKTA KAWIN	MEMILIKI AKTA		BELUM MEMILIKI AKTA	
			N	%	N	%
3215	KARAWANG	1.284.504	849.384	66,13	435.120	33,87
3216	BEKASI	1.676.251	945.313	56,39	730.938	43,61
3217	BANDUNG BARAT	956.847	488.790	51,08	468.057	48,92
3218	PANGANDARAN	237.684	165.503	69,63	72.181	30,37
3271	KOTA BOGOR	518.914	336.916	64,93	181.998	35,07
3272	KOTA SUKABUMI	166.610	119.931	71,98	46.679	28,02
3273	KOTA BANDUNG	1.216.851	974.392	80,07	242.459	19,93
3274	KOTA CIREBON	154.902	125.964	81,32	28.938	18,68
3275	KOTA BEKASI	1.213.240	842.219	69,42	371.021	30,58
3276	KOTA DEPOK	925.782	691.365	74,68	234.417	25,32
3277	KOTA CIMAHI	275.047	221.855	80,66	53.192	19,34
3278	KOTA TASIKMALAYA	359.786	311.725	86,64	48.061	13,36
3279	KOTA BANJAR	98.522	87.593	88,91	10.929	11,09
TOTAL		**25.035.274**	**16.137.013**	**64,46**	**8.898.261**	**35,54**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024
Keterangan : Wajib Akta Kawin : Penduduk Status Perkawinan "Kawin" Berusia Diatas 19 Tahun

Berdasarkan tabel di atas, data kepemilikan akta perkawinan di Provinsi Jawa Barat, dari total **25.035.274** penduduk yang berstatus kawin dan berusia di atas 19 tahun (kategori "Wajib Akta Kawin"), baru **16.137.013** jiwa atau **64,46%** yang telah memiliki akta perkawinan. Sementara itu, sebanyak **8.898.261** jiwa atau **35,54%** lainnya belum memiliki dokumen tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat lebih dari sepertiga pasangan yang belum tercatat secara resmi dalam sistem administrasi kependudukan negara terkait status pernikahan mereka. Beberapa wilayah menunjukkan capaian kepemilikan akta perkawinan yang tergolong tinggi, seperti Kota Banjar (**88,91%**), Kota Tasikmalaya (**86,64%**), Kabupaten Cirebon (81,33%), Kota Cirebon (**81,32%**), dan Kota Cimahi (**80,66%**). Sebaliknya, beberapa daerah memiliki tingkat kepemilikan yang masih sangat rendah, antara lain Kabupaten Sukabumi (**34,91%**), Kabupaten Cianjur (**44,72%**), Kabupaten Kuningan (**45,02%**), dan Kabupaten Bandung Barat (**51,08%**).

Tingginya angka penduduk berstatus kawin namun belum memiliki akta perkawinan menjadi perhatian penting, mengingat akta perkawinan merupakan dokumen legal yang tidak hanya membuktikan status pernikahan, tetapi juga berdampak pada perlindungan hukum terhadap hak-hak keluarga, terutama perempuan dan anak. Ketidaklengkapan dokumen ini dapat berimplikasi pada kesulitan mengakses layanan publik seperti jaminan sosial, warisan, dan pencatatan administrasi kependudukan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan instansi terkait perlu meningkatkan edukasi serta mempermudah akses layanan pencatatan pernikahan, terutama di wilayah dengan capaian rendah, agar seluruh penduduk berstatus kawin tercatat resmi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

5.3.3. Akta Perceraian

Kepemilikan akta cerai adalah status hukum seseorang yang secara sah memiliki dokumen resmi berupa akta cerai yang diterbitkan oleh lembaga berwenang, seperti pengadilan agama atau pengadilan negeri, setelah perceraian diputuskan secara hukum. Akta cerai berfungsi sebagai bukti otentik bahwa ikatan pernikahan telah berakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kepemilikan akta cerai penting untuk berbagai keperluan administrasi, seperti pengurusan perubahan status pada kartu identitas, kartu keluarga, atau dokumen perjalanan, serta menjadi dasar dalam pengaturan hak asuh anak, pembagian harta bersama, hak waris, dan pernikahan kembali. Dengan demikian, akta cerai tidak hanya berperan sebagai bukti formal, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak-hak hukum bagi pihak-pihak yang bercerai.

Tabel 5-5 Akta Perceraian

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	WAJIB AKTA CERAI	MEMILIKI AKTA		BELUM MEMILIKI AKTA	
			N	%	N	%
3201	BOGOR	79.308	37.303	47,04	42.005	52,96
3202	SUKABUMI	66.447	10.071	15,16	56.376	84,84
3203	CIANJUR	52.792	14.809	28,05	37.983	71,95
3204	BANDUNG	69.204	40.058	57,88	29.146	42,12
3205	GARUT	54.562	23.774	43,57	30.788	56,43
3206	TASIKMALAYA	51.489	19.827	38,51	31.662	61,49
3207	CIAMIS	31.302	21.905	69,98	9.397	30,02
3208	KUNINGAN	26.016	14.372	55,24	11.644	44,76
3209	CIREBON	65.323	47.299	72,41	18.024	27,59
3210	MAJALENGKA	43.731	27.584	63,08	16.147	36,92
3211	SUMEDANG	33.721	19.314	57,28	14.407	42,72
3212	INDRAMAYU	60.933	47.333	77,68	13.600	22,32
3213	SUBANG	41.220	17.129	41,56	24.091	58,44
3214	PURWAKARTA	24.021	10.072	41,93	13.949	58,07
3215	KARAWANG	62.031	17.237	27,79	44.794	72,21
3216	BEKASI	40.308	15.447	38,32	24.861	61,68
3217	BANDUNG BARAT	47.213	17.048	36,11	30.165	63,89
3218	PANGANDARAN	11.929	8.714	73,05	3.215	26,95
3271	KOTA BOGOR	21.714	11.130	51,26	10.584	48,74
3272	KOTA SUKABUMI	9.712	4.955	51,02	4.757	48,98
3273	KOTA BANDUNG	67.080	50.832	75,78	16.248	24,22
3274	KOTA CIREBON	12.255	9.214	75,19	3.041	24,81
3275	KOTA BEKASI	36.383	26.353	72,43	10.030	27,57
3276	KOTA DEPOK	34.671	26.762	77,19	7.909	22,81
3277	KOTA CIMAHI	15.101	9.817	65,01	5.284	34,99
3278	KOTA TASIKMALAYA	23.081	15.555	67,39	7.526	32,61
3279	KOTA BANJAR	8.907	7.542	84,67	1.365	15,33
TOTAL		**1.090.454**	**571.456**	**52,41**	**518.998**	**47,59**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024
Keterangan : Wajib Akta Cerai : Penduduk Status Perkawinan "Cerai" Berusia Diatas 19 Tahun

Berdasarkan data tabel di atas, kepemilikan akta cerai di wilayah Jawa Barat tercatat bahwa dari total **1.090.454** orang yang wajib memiliki akta cerai, sebanyak **571.456** orang atau **52,41%** telah memiliki akta cerai, sementara sisanya, yaitu **518.998** orang atau **47,59%,** belum memiliki akta tersebut. Adapun yang dimaksud dengan wajib akta cerai adalah penduduk dengan status perkawinan "cerai" dan berusia di atas 19 tahun. Dengan kata lain, mereka yang telah bercerai secara hukum dan telah mencapai usia dewasa menurut ketentuan perundang-undangan, wajib memiliki akta cerai sebagai bukti sah perceraian.

Beberapa daerah menunjukkan capaian kepemilikan akta cerai yang cukup tinggi, seperti Kota Banjar dengan persentase **84,67%**, diikuti oleh Kabupaten Indramayu (**77,68%**), Kota Depok (**77,19%**), Kota Bandung (**75,78%**), dan Kota Cirebon (**75,19%**). Sementara itu, daerah dengan tingkat kepemilikan akta cerai terendah antara lain Kabupaten Sukabumi (**15,16%**), Kabupaten Karawang (**27,79%**), dan Kabupaten Cianjur (**28,05%**), menunjukkan masih banyaknya penduduk yang belum memiliki dokumen resmi perceraian.

Ketimpangan antara yang telah memiliki dan belum memiliki akta cerai ini menunjukkan pentingnya upaya percepatan pelayanan administrasi, sosialisasi manfaat kepemilikan akta cerai, serta penyederhanaan prosedur untuk memperoleh dokumen tersebut di seluruh wilayah, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kepemilikan yang masih rendah.

5.3.4. Akta Kematian

Akta kematian adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah sebagai bukti sah terjadinya kematian seseorang, yang memuat data penting seperti nama, tanggal, dan penyebab kematian. Fungsi utama akta kematian adalah sebagai bukti legal untuk mengurus administrasi kependudukan, menghapus nama almarhum dari daftar penduduk, serta menjadi syarat penting dalam pengurusan hak warisan, klaim asuransi, santunan kematian, dan berbagai keperluan hukum lainnya yang terkait dengan status kematian seseorang.

Tabel 5-6 Akta Kematian

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEMATIAN	PENERBITAN AKTA	PEMBATALAN AKTA
3201	BOGOR	97.302	97.363	61
3202	SUKABUMI	58.965	59.228	263
3203	CIANJUR	44.331	44.454	123
3204	BANDUNG	65.478	65.607	129
3205	GARUT	56.082	56.261	179
3206	TASIKMALAYA	44.840	45.003	163
3207	CIAMIS	50.496	50.664	168
3208	KUNINGAN	54.871	55.119	248

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEMATIAN	PENERBITAN AKTA	PEMBATALAN AKTA
3209	CIREBON	51.429	51.501	72
3210	MAJALENGKA	105.308	106.641	1.333
3211	SUMEDANG	27.304	27.387	83
3212	INDRAMAYU	20.174	20.270	96
3213	SUBANG	50.300	50.501	201
3214	PURWAKARTA	35.604	35.720	116
3215	KARAWANG	75.239	75.432	193
3216	BEKASI	43.980	44.052	72
3217	BANDUNG BARAT	31.717	31.825	108
3218	PANGANDARAN	34.678	34.729	51
3271	KOTA BOGOR	40.977	41.013	36
3272	KOTA SUKABUMI	21.889	21.935	46
3273	KOTA BANDUNG	130.498	130.707	209
3274	KOTA CIREBON	29.187	29.199	12
3275	KOTA BEKASI	102.034	102.116	82
3276	KOTA DEPOK	113.300	113.489	189
3277	KOTA CIMAHI	28.883	28.902	19
3278	KOTA TASIKMALAYA	40.303	40.358	55
3279	KOTA BANJAR	18.391	18.404	13
TOTAL		**1.473.560**	**1.477.880**	**4.320**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Kepemilikan akta kematian di wilayah yang tercakup dalam data ini menunjukkan kinerja administrasi yang sangat baik. Berdasarkan data, tercatat **1.473.560** kasus kematian, sementara jumlah penerbitan akta kematian mencapai **1.477.880**. Menariknya, jumlah akta yang diterbitkan sedikit lebih tinggi dibandingkan jumlah kematian yang tercatat. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya penerbitan akta untuk kasus-kasus kematian yang sebelumnya belum tercatat secara resmi (backlog), atau perbaikan administrasi di mana akta baru diterbitkan menggantikan akta lama yang kurang lengkap atau salah.

Jumlah kematian yang tercatat mencerminkan upaya pemerintah dalam membangun basis data kependudukan yang akurat dan akuntabel. Sementara itu, tingginya penerbitan akta menunjukkan kesadaran masyarakat yang semakin baik terhadap pentingnya dokumen akta kematian sebagai syarat utama untuk pengurusan hak waris, klaim asuransi, santunan, serta keperluan hukum lainnya.

Tercatat juga adanya **4.320** kasus pembatalan akta kematian. Pembatalan ini umumnya terjadi karena berbagai faktor seperti kesalahan pencatatan data (misalnya salah penulisan identitas), penerbitan ganda atas satu kasus kematian, adanya permohonan koreksi dari keluarga karena perubahan atau pembaruan informasi, hingga penyesuaian atas putusan pengadilan terkait status hukum seseorang.

5.3.5. Akta Pengakuan Anak

Pengesahan anak adalah tindakan hukum yang dilakukan untuk mengesahkan status seorang anak yang lahir di luar perkawinan sah, sehingga setelah orang tuanya menikah secara sah, anak tersebut diakui sebagai anak sah berdasarkan akta pengesahan dari catatan sipil. Sementara itu, pengangkatan anak adalah proses hukum di mana seseorang atau pasangan suami istri mengangkat seorang anak yang bukan anak kandungnya untuk diperlakukan sebagai anak sendiri dengan hak dan kewajiban yang diakui secara hukum, biasanya melalui keputusan pengadilan. Berbeda dengan itu, pengakuan anak adalah tindakan sepihak, baik oleh ayah atau ibu biologis, untuk mengakui anak yang lahir di luar perkawinan sebagai anaknya sendiri, yang kemudian dicatat secara resmi dalam akta pengakuan anak.

Tabel 5-7 Perbedaan Pengesahan, Pengangkatan dan Pengakuan Anak

ASPEK	PENGESAHAN ANAK	PENGANGKATAN ANAK	PENGAKUAN ANAK
Definisi	Mengakui anak lahir di luar perkawinan setelah orang tua menikah	Mengangkat anak yang bukan anak kandung menjadi anak sah secara hukum	Mengakui anak lahir di luar nikah sebagai anak sendiri
Pihak yang Terlibat	Kedua orang tua kandung	Orang tua angkat dan anak	Salah satu orang tua biologis (ayah atau ibu)
Dasar Hukum	Pasal 272 KUH Perdata	PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak	Pasal 280 KUH Perdata
Tujuan	Menjadikan anak sah karena pernikahan	Memberikan status anak kepada anak angkat	Memberikan pengakuan hukum atas hubungan darah
Proses Administrasi	Dicatat di catatan sipil setelah pernikahan	Proses adopsi di pengadilan dan pencatatan	Dicatatkan dalam akta pengakuan anak di catatan sipil
Hak Anak	Sama dengan anak sah dalam pernikahan	Sama dengan anak kandung dalam keluarga angkat	Hak pengakuan, pemeliharaan, dan perlindungan

Sumber : KUH Perdata dan PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Ketiga proses ini memiliki dasar hukum, prosedur, serta konsekuensi hukum yang berbeda, meskipun sama-sama bertujuan melindungi hak-hak anak.

Tabel 5-8 Data Pengesahan, Pengangkatan dan Pengakuan Anak

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	PENGESAHAN ANAK	PENGANGKATAN ANAK	PENGAKUAN ANAK
3201	BOGOR	252	8	8
3202	SUKABUMI	-	2	1
3203	CIANJUR	6	1	3
3204	BANDUNG	114	4	15
3205	GARUT	4	1	-
3206	TASIKMALAYA	-	-	-

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	PENGESAHAN ANAK	PENGANGKATAN ANAK	PENGAKUAN ANAK
3207	CIAMIS	4	2	2
3208	KUNINGAN	3	3	9
3209	CIREBON	41	6	7
3210	MAJALENGKA	3	2	1
3211	SUMEDANG	21	2	-
3212	INDRAMAYU	10	4	1
3213	SUBANG	3	1	1
3214	PURWAKARTA	129	3	66
3215	KARAWANG	162	11	-
3216	BEKASI	196	9	-
3217	BANDUNG BARAT	20	1	-
3218	PANGANDARAN	9	2	-
3271	KOTA BOGOR	18	4	1
3272	KOTA SUKABUMI	13	-	-
3273	KOTA BANDUNG	192	10	-
3274	KOTA CIREBON	233	1	-
3275	KOTA BEKASI	290	12	3
3276	KOTA DEPOK	77	8	58
3277	KOTA CIMAHI	8	3	2
3278	KOTA TASIKMALAYA	22	3	-
3279	KOTA BANJAR	9	-	10
TOTAL		**1.839**	**103**	**188**

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi Bersih per 31 Desember 2024

Berdasarkan data di atas dari 27 kabupaten/kota, tercatat total 1.839 kasus pengesahan anak, 103 kasus pengangkatan anak, dan 188 kasus pengakuan anak. Pengesahan anak terbanyak tercatat di Kota Bekasi sebanyak 290 kasus, diikuti Kota Cirebon sebanyak 233 kasus, dan Kota Bandung sebanyak 192 kasus. Untuk kasus pengangkatan anak, jumlah tertinggi juga terdapat di Kota Bekasi dengan 12 kasus, disusul Kota Bandung dengan 10 kasus, dan Kota Depok dengan 8 kasus. Sementara itu, pengakuan anak paling banyak tercatat di Kota Depok sebanyak 58 kasus, Kabupaten Purwakarta sebanyak 66 kasus, dan Kabupaten Kuningan sebanyak 9 kasus.

Tingginya angka pengesahan anak menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang mengurus keabsahan status hukum anak melalui pernikahan sah orang tua atau melalui prosedur hukum yang berlaku. Sedangkan pengangkatan anak, meskipun jumlahnya lebih sedikit, menunjukkan adanya kebutuhan keluarga untuk memberikan status hukum kepada anak angkat secara resmi melalui keputusan pengadilan. Di sisi lain, kasus pengakuan anak, yang biasanya berkaitan dengan pengakuan anak luar kawin oleh salah satu orang tua, juga menjadi perhatian penting dalam perlindungan hak-hak sipil anak. Data ini mencerminkan kesadaran hukum masyarakat yang semakin baik terkait pentingnya status hukum anak dalam keluarga, meskipun distribusi kasus masih bervariasi antar daerah.

5.4. Kepemilikan Surat Keterangan Orang Terlantar

Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, yang menyatakan bahwa seseorang atau sekelompok orang masuk dalam kategori orang terlantar. Orang terlantar didefinisikan sebagai individu yang berada dalam kondisi sangat memerlukan bantuan, seperti tidak memiliki tempat tinggal tetap, penghasilan, atau terlantar secara sosial dan ekonomi sehingga membutuhkan perlindungan dan intervensi dari pemerintah atau lembaga terkait.

Kepemilikan SKOT menjadi bukti administratif bahwa individu tersebut berhak menerima bantuan sosial dan perlindungan dari pemerintah. Namun demikian, saat ini kami belum memiliki data kepemilikan SKOT di Provinsi Jawa Barat. Hal ini disebabkan karena data tersebut belum tersedia atau belum tercatat dalam sistem administrasi kami. Ketiadaan data ini kemungkinan disebabkan oleh belum terintegrasinya data dari tingkat kelurahan atau desa, keterbatasan dalam proses pendataan, atau verifikasi yang masih berlangsung di instansi terkait.

Sebagai gantinya, yang tersedia saat ini adalah data anak terlantar di Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Data ini merupakan hasil rujukan dari instansi sosial terhadap anak-anak yang memenuhi kriteria terlantar, berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan keluarga yang tidak mendukung tumbuh kembang anak secara layak.

Tabel 5-9 Data Existing Anak Asuh di SATPEL GRA Balita

NO	NAMA KLIEN	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	INSTANSI YANG MERUJUK	TANGGAL MASUK
1	Mawar	Bandung, 10 Agustus 2013	Perempuan	Dinas Sosial Kota Bandung	04 September 2013
2	Seli Ramadani	Kota Bandung, 12 Mei 2020	Perempuan	Dinas Sosial Kota Bandung	14 Mei 2020
3	Kamil Nufail Zhafran	Bandung, 08 September 2020	Laki-laki	Dinas Sosial Kota Bandung	18 September 2020
4	Selly	Cianjur, 19 Januari 2021	Perempuan	Dinas Sosial Kabupaten Subang	02 November 2021
5	Muhammad Zaky Rizky Nugraha	Kota Cimahi, 13 September 2022	Laki-laki	UPTD PPSGBK	19 September 2022
6	Putra Bumi	Indramayu, 08 Maret 2020	Laki-laki	Sentra Handayani Kemensos RI	13 Desember 2022
7	Azka Karimah Ramadhani	Cirebon, 10 April 2023	Perempuan	Dinas Sosial Kabupaten Cirebon	11 April 2023

NO	NAMA KLIEN	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	INSTANSI YANG MERUJUK	TANGGAL MASUK
8	Mutiarawati	Cirebon, 13 Oktober 2023	Perempuan	Dinas Sosial Kab. Cirebon	25 Oktober 2023
9	Amara	Kab. Bandung, 10 Desember 2019	Perempuan	Dinas Sosial Kab. Bandung	16 Februari 2024
10	Nabila Salsabila	Bogor, 04 April 2024	Perempuan	Dinas Sosial Kab. Bogor	24 April 2024
11	Muhammad Arsyad Abdurahman	Karawang, 17 Mei 2024	Laki-laki	Dinas Sosial Kabupaten Karawang	27 Mei 2024
12	Muhammad Ibrahim Azis	Garut, 07 Juli 2024	Laki-laki	Dinas Sosial Kabupaten Garut	19 Juli 2024
13	Ulfah Mutmainnah	Bekasi, 25 Juli 2024	Perempuan	Dinas Sosial Kota Depok	30 Juli 2024
14	Muhammad Al Faiz	Cilegon, 25 Juli 2024	Laki-laki	Dinas Sosial Kota Depok	08 Agustus 2024
15	Clemira Siti Azalia	Kota Bandung, 19 Agustus 2024	Perempuan	Dinas Sosial Kota Bandung	21 Agustus 2024
16	Wangi Zahrah Jamilah	Kota Depok, 04 Mei 2022	Perempuan	Dinas Sosial Kota Depok	30 Agustus 2024
17	Agam Alfarezel Abiyan	Kota Depok, 27 Agustus 2024	Laki-laki	Dinas Sosial Kota Depok	20 September 2024
18	Fahira Anjani	Kota Bekasi, 05 September 2024	Perempuan	Dinas Sosial Kota Bekasi	24 September 2024
19	Rafif Syamil Rafandra	Kota Bekasi, 25 September 2024	Laki-laki	Dinas Sosial Kota Bekasi	15 Oktober 2024
20	Muhammad Fatih Jagatnata Suhartanto	KBB, 13 Oktober 2024	Laki-laki	Dinas Sosial KBB	17 Oktober 2024
21	Khanza Humaira	Garut, 24 September 2024	Perempuan	Dinas Sosial Kabupaten Garut	25 Oktober 2024
22	Dian Anik	Indramayu, 07 Agustus 2018	Perempuan	Dinas Sosial Kabupaten Indramayu	14 November 2024
23	Angga Lutfhian Pratama	Depok, 09 November 2024	Laki-laki	Dinas Sosial Kota Depok	18 November 2024

NO	NAMA KLIEN	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	INSTANSI YANG MERUJUK	TANGGAL MASUK
24	Muhamad Rayyan Arsyad	Kota Bandung, 25 November 2024	Laki-laki	Dinas Sosial Kota Bandung	03 Desember 2024
25	Sultan	Kab. Bekasi, 29 November 2024	Laki-laki	Dinas Sosial Kabupaten Bekasi	17 Desember 2024

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

Pada bulan Desember 2024, jumlah anak asuh yang berada dalam penanganan SATPEL GRA Balita tercatat sebanyak 25 anak. Anak-anak ini dirujuk dari berbagai instansi sosial yang tersebar di wilayah Jawa Barat, seperti Dinas Sosial tingkat kota/kabupaten (Kota Bandung, Kota Depok, Kabupaten Garut, dan lainnya) serta lembaga nasional seperti Sentra Handayani Kemensos RI dan UPTD PPSGBK. Dari sisi jenis kelamin, terdapat 13 anak laki-laki dan 12 anak perempuan, menunjukkan distribusi yang hampir seimbang. Usia anak bervariasi, mulai dari bayi yang baru lahir hingga usia 11 tahun. Anak tertua adalah Mawar (lahir Agustus 2013), sementara anak termuda adalah Sultan, lahir pada 29 November 2024, yang langsung dirujuk ke dalam sistem pada bulan yang sama.

Mayoritas anak masuk pada tahun 2024, yaitu sebanyak 16 anak (64%), mencerminkan meningkatnya kebutuhan layanan perlindungan anak di tahun berjalan. Selebihnya masuk antara tahun 2020 hingga 2023. Beberapa anak bahkan dirujuk hanya dalam hitungan hari setelah kelahirannya, menunjukkan bahwa sistem deteksi dini dari instansi rujukan sudah mulai berfungsi dengan baik. Instansi rujukan terbanyak berasal dari Dinas Sosial Kota Bandung dan Dinas Sosial Kota Depok, masing-masing merujuk 5 anak. Kota Bekasi, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Cirebon juga tercatat cukup aktif dalam merujuk anak-anak ke SATPEL GRA Balita. Fakta ini menggambarkan bahwa persoalan anak terlantar masih cukup tinggi di wilayah perkotaan dan penyangga kota besar di Jawa Barat.

Tabel 5-10 Data Anak yang sedang melakukan masa percobaan pengasuhan dengan Calon Orang Tua Angkat di SATPEL GRA Balita

NO	NAMA KLIEN	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	INSTANSI YANG MERUJUK	TANGGAL MASUK
1	Mawar	Bandung, 10 Agustus 2013	Laki – Laki	Dinas Sosial Kota Bandung	04/09/2014
2	Seli Ramadani	Kota Bandung, 12 Mei 2020	Perempuan	Dinas Sosial Kota Bandung	14/05/2020
3	Kamil Nufail Zhafran	Bandung, 08 September 2020	Laki – Laki	Dinas Sosial Kota Bandung	18/09/2021
4	Selly	Cianjur, 19 Januari 2021	Perempuan	Dinas Sosial Kabupaten Subang	02/11/2022
5	Muhammad Zaky Rizky Nugraha	Kota Cimahi, 13 September 2022	Laki – Laki	UPTD PPSGBK	19/09/2023

NO	NAMA KLIEN	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	INSTANSI YANG MERUJUK	TANGGAL MASUK
6	Putra Bumi	Indramayu, 08 Maret 2020	Laki – Laki	Sentra Handayani Kemensos RI	13/12/2022
7	Bella Arsyta	Kuningan, 18 Desember 2022	Perempuan	Dinas Sosial Kabupaten Kuningan	27/12/2022
8	Selma Alivia Kirani	Sukabumi, 11 Maret 2023	Perempuan	Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi	14/03/2023
9	Azka Karimah Ramadhani	Cirebon, 10 April 2023	Perempuan	Dinas Sosial Kabupaten Cirebon	11/04/2024
10	Caleb Fahmi Aulia Zufaro	Sukabumi, 31 Mei 2023	Laki – Laki	Dinas Sosial Kota Sukabumi	20/06/2023
11	Ikram Nabil Naufal	Bogor, 23 Juni 2023	Laki – Laki	Dinas Sosial Kabupaten Bogor	04/07/2023
12	Humaira Zea Shaqueena Annisa	Kab. Bandung, 04 Juli 2023	Perempuan	Dinas Sosial Kabupaten Bandung	10/07/2023
13	Gaishan Raffasya Hafis	Depok, 11 Agustus 2023	Laki – Laki	Dinas Sosial Kota Depok	16/08/2023
14	Khodijah Husna Kamilah	Bogor, 28 Agustus 2023	Perempuan	Dinas Sosial Kabupaten Bogor	12/09/2024
15	Tedi Firmansyah	Subang, 08 Agustus 2023	Laki – Laki	Dinas Sosial Kabupaten Subang	21/09/2024
16	Intan Mutmainnah	Garut, 23 September 2023	Perempuan	Dinas Sosial Kabupaten Garut	25/09/2024
17	Mutiarawati	Cirebon, 13 Oktober 2023	Perempuan	Dinas Sosial Kabupaten Cirebon	25/10/2023
18	Mutiara	Cirebon, 10 Mei 2016	Perempuan	Dinas Sosial Kabupaten Cirebon	25/10/2023
19	Faqih Ihsan	Karawang, 06 November 2023	Laki – Laki	Dinas Sosial Kabupaten Karawang	08/11/2024
20	Arisha Lashira	Sukabumi, 17 November 2023	Perempuan	Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi	21/11/2024
21	Hani Annisa	Bogor, 11 Oktober 2023	Perempuan	Dinas Sosial Kabupaten Bogor	28/11/2024
22	Fathan Rizky Al Jabbar	Kota Bandung, 12 Desember 2023	Laki – Laki	Dinas Sosial Kota Bandung	12/12/2023
23	Syauqi Abdurrahman	Kab. Bandung, 22 Desember 2023	Laki – Laki	Dinas Sosial Kabupaten Bandung	03/01/2024

NO	NAMA KLIEN	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	INSTANSI YANG MERUJUK	TANGGAL MASUK
24	Putri Amelia	Sukabumi, 29 Desember 2023	Perempuan	Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi	02/02/2024
25	Aurel Aisyah	Bekasi, 31 Desember 2023	Perempuan	Dinas Sosial Kota Bekasi	05/02/2024
26	Syakira Zahra Aulia	Cianjur, 12 Desember 2023	Perempuan	Dinas Sosial Kabupaten Cianjur	16/02/2024
27	Muhamad Alfatih	Depok, 30 Desember 2023	Laki – Laki	Dinas Sosial Kota Depok	19/03/2024
28	Azzam Alfatih	Bogor, 02 Januari 2024	Laki – Laki	Dinas Sosial Kabupaten Bogor	25/03/2024
29	Naurah Faiha Qurrataaini	Depok, 28 Desember 2023	Perempuan	Dinas Sosial Kota Depok	01/04/2025
30	Rayandra Hafizh	Bogor, 31 Desember 2023	Laki – Laki	Dinas Sosial Kabupaten Bogor	24/04/2025
31	Muhammad Zaki	Depok, 26 Desember 2023	Laki – Laki	Dinas Sosial Kota Depok	29/04/2025
32	Fahira Sabrina	Bandung, 27 Desember 2023	Perempuan	Dinas Sosial Kota Bandung	27/05/2024
33	Raffa Zayyan	Bandung, 06 Januari 2024	Laki – Laki	Dinas Sosial Kota Bandung	03/06/2024
34	Elya Rizky Maulidya	Depok, 30 Desember 2023	Perempuan	Dinas Sosial Kota Depok	06/06/2024
35	Yasmin Khalila	Depok, 31 Desember 2023	Perempuan	Dinas Sosial Kota Depok	12/06/2024
36	Zaki Alfathan	Bandung, 27 Desember 2023	Laki – Laki	Dinas Sosial Kota Bandung	08/07/2024
37	Raihan Ariq	Sukabumi, 31 Desember 2023	Laki – Laki	Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi	19/07/2024
38	Dafa Zahran Maulana	Depok, 24 Desember 2023	Laki – Laki	Dinas Sosial Kota Depok	30/07/2024
39	Hafiza Nurjannah	Bekasi, 25 Desember 2023	Perempuan	Dinas Sosial Kota Bekasi	08/08/2024
40	Salwa Zahira	Bandung, 21 Desember 2023	Perempuan	Dinas Sosial Kota Bandung	21/08/2024
41	Zhafira Aulia	Cianjur, 31 Desember 2023	Perempuan	Dinas Sosial Kabupaten Cianjur	30/08/2024
42	Arkan Faizal Ramadhan	Bogor, 30 Desember 2023	Laki – Laki	Dinas Sosial Kabupaten Bogor	20/09/2025
43	Rania Khairunnisa	Depok, 29 Desember 2023	Perempuan	Dinas Sosial Kota Depok	24/09/2025
44	Aqila Kamila	Cianjur, 28 Desember 2023	Perempuan	Dinas Sosial Kabupaten Cianjur	15/10/2024
45	Raffa Dwiandika	Sukabumi, 26 Desember 2023	Laki – Laki	Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi	17/10/2024

NO	NAMA KLIEN	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	INSTANSI YANG MERUJUK	TANGGAL MASUK
46	Marwah Nabila	Bekasi, 25 Desember 2023	Perempuan	Dinas Sosial Kota Bekasi	17/10/2024
47	Hanif Zikri	Bandung, 24 Desember 2023	Laki – Laki	Dinas Sosial Kota Bandung	17/10/2024
48	Farhan Zaky	Depok, 31 Desember 2023	Laki – Laki	Dinas Sosial Kota Depok	17/10/2024
49	Nadhifa Zahrani	Bogor, 30 Desember 2023	Perempuan	Dinas Sosial Kabupaten Bogor	25/10/2024
50	Rizky Maulana	Sukabumi, 27 Desember 2023	Laki – Laki	Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi	14/11/2025
51	Zahra Salma	Bandung, 29 Desember 2023	Perempuan	Dinas Sosial Kota Bandung	18/11/2025
52	Naila Khansa	Bekasi, 28 Desember 2023	Perempuan	Dinas Sosial Kota Bekasi	03/12/2024
53	Dava Alfahreza	Depok, 30 Desember 2023	Laki – Laki	Dinas Sosial Kota Depok	17/12/2024

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

Data di atas merupakan hasil rekapitulasi anak-anak yang sedang menjalani masa percobaan pengasuhan dengan calon orang tua angkat di Satuan Pelaksana (Satpel) Gra Balita dalam rangka proses pengangkatan anak, khususnya untuk bulan Desember tahun 2024. Masa percobaan ini adalah fase penting yang wajib dilalui sebelum penetapan pengangkatan secara resmi dilakukan. Dalam masa ini, anak akan ditempatkan pada calon keluarga angkat untuk dinilai dari sisi keterikatan emosional, kesesuaian pengasuhan, serta kesiapan psikososial baik dari anak maupun calon orang tua angkat. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 53 anak yang sedang menjalani masa percobaan tersebut. Dari jumlah ini, komposisi jenis kelamin anak cukup seimbang, yaitu 27 anak perempuan dan 26 anak laki-laki. Mayoritas anak merupakan bayi dan balita, dengan rentang usia dominan antara 0 hingga 3 tahun, meskipun terdapat beberapa anak yang berusia lebih dari itu. Hal ini mencerminkan bahwa mayoritas anak yang dirujuk untuk proses pengangkatan adalah mereka yang masih dalam tahap awal pertumbuhan dan membutuhkan perhatian serta kasih sayang maksimal.

Dilihat dari asal instansi yang merujuk, sebagian besar anak berasal dari wilayah Jawa Barat, seperti Dinas Sosial Kota Bandung, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi. Beberapa anak juga dirujuk oleh instansi pusat seperti Sentra Handayani Kemensos RI dan UPTD PPSGBK. Data juga menunjukkan bahwa tahun 2024 merupakan tahun dengan jumlah anak terbanyak yang menjalani masa percobaan, yakni sebanyak 30 anak, menunjukkan peningkatan penanganan kasus anak terlantar atau tidak mampu diasuh oleh orang tua kandung. Proses rujukan kebanyakan dilakukan oleh dinas sosial dari wilayah tempat lahir atau domisili anak, menandakan adanya upaya aktif dari pemerintah daerah dalam mengurus hak anak untuk mendapatkan keluarga baru yang layak. Selain itu, terdapat kecenderungan anak-anak yang lahir di akhir tahun 2023 hingga awal 2024 yang secara bersamaan memulai masa percobaan di pertengahan dan akhir tahun 2024, menandakan lonjakan kasus atau pelaporan anak-anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif.

Melalui proses ini, diharapkan setiap anak mendapatkan lingkungan pengasuhan yang aman, stabil, dan penuh kasih sayang. Namun demikian, tantangan yang dihadapi meliputi kebutuhan akan pendampingan sosial yang intensif, kesiapan administratif keluarga angkat, serta perlunya edukasi menyeluruh bagi pihak yang terlibat. Oleh karena itu, Satpel Gra Balita bersama instansi terkait perlu terus melakukan pemantauan berkala, pembinaan keluarga angkat, dan evaluasi menyeluruh agar proses pengangkatan anak berjalan sesuai prinsip perlindungan terbaik bagi anak.

Tabel 5-11 Data Anak yang sudah diadopsi di SATPEL GRA Balita

NO	NAMA KLIEN	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	JK	INSTANSI YANG MERUJUK	TANGGAL MASUK	TANGGAL KELUAR	KET
1	Humaira Zea Shaqueena Annisa	Kab. Bandung, 04 Juli 2023	P	Dinas Sosial Kabupaten Bandung	10/07/2023	03/01/2024	PA melalui LPA (SGRAB)
2	Ikram Nabil Naufal	Bogor, 23 Juni 2023	L	Dinas Sosial Kabupaten Bogor	04/07/2023	02/02/2024	PA melalui LPA (SGRAB)
3	Gaishan Raffasya Hafis	Depok, 11 Agustus 2023	L	Dinas Sosial Kota Depok	16/08/2023	13/03/2024	PA melalui LPA (SGRAB)
4	Intan Mutmainnah	Garut, 23 September 2023	P	Dinas Sosial Kab. Garut	25/09/2023	13/03/2024	PA melalui LPA (SGRAB)
5	Selma Alivia Kirani	Sukabumi, 11 Maret 2023	P	Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi	14/03/2023	26/03/2024	PA melalui LPA (SGRAB)
6	Caleb Fahmi Aulia Zufaro	Sukabumi, 31 Mei 2023	L	Dinas Sosial Kota Sukabumi	20/06/2023	22/04/2024	PA melalui LPA (SGRAB)
7	Tedi Firmansyah	Subang, 08 Agustus 2023	L	Dinas Sosial Kab. Subang	21/09/2023	23/04/2024	PA melalui LPA (SGRAB)
8	Bella Arsyta	Kuningan, 18 Desember 2022	P	Dinas Sosial Kabupaten Kuningan	27/12/2022	24/04/2024	PA melalui LPA (SGRAB)
9	Arisha Lashira	Sukabumi, 17 November 2023	P	Dinas Sosial Kab. Sukabumi	21/11/2023	08/05/2024	Postercare melalui LPA (SGRAB)
10	Fathan Rizky Al Jabbar	Kota Bandung, 12 Desember 2023	L	Dinas Sosial Kota Bandung	12/12/2023	03/06/2024	PA melalui LPA (SGRAB)
11	Arezka Haidar Naufal	Jakarta, 04 November 2023	L	Dinas Sosial Kab. Garut	05/02/2024	03/06/2024	PA melalui LPA (SGRAB)

NO	NAMA KLIEN	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	JK	INSTANSI YANG MERUJUK	TANGGAL MASUK	TANGGAL KELUAR	KET
12	Hani Annisa	Bogor, 11 Oktober 2023	P	Dinas Sosial Kab. Bogor	28/11/2023	08/07/2024	PA melalui LPA (SGRAB)
13	Faqih Ihsan	Karawang, 06 November 2023	L	Dinas Sosial Kab. Karawang	08/11/2023	19/07/2024	PA melalui LPA (SGRAB)
14	Fathimah Nurul Jannah	Kota Bekasi, 14 Januari 2024	P	Dinas Sosial Kota Bekasi	02/02/2024	19/07/2024	PA melalui LPA (SGRAB)
15	Khodijah Husna Kamilah	Bogor, 28 Agustus 2023	P	Dinas Sosial Kab. Bogor	12/09/2023	08/08/2024	PA melalui LPA (SGRAB)
16	Syauqi Abdurrahman	Kab. Bandung, 22 Desember 2023	L	Dinas Sosial Kab. Bandung	03/01/2024	08/08/2024	PA melalui LPA (SGRAB)
17	Aisyah Mustaqimah	Garut, 16 Maret 2024	P	Dinas Sosial Kab. Garut	25/03/2024	08/08/2024	PA melalui LPA (SGRAB)
18	Muhammad Al Fatih	Kab. Bandung, 22 Maret 2024	L	Dinas Sosial Kab. Bandung	01/04/2024	20/09/2024	PA melalui LPA (SGRAB)
19	Ishana Jihan Aura	Depok, 18 Januari 2024	P	Dinas Sosial Kota Depok	29/04/2024	14/10/2024	PA melalui LPA (SGRAB)
20	Azzahra Putri Ramadhani	Bogor, 08 Maret 2024	P	Dinas Sosial Kab. Bogor	19/03/2024	14/10/2024	PA melalui LPA (SGRAB)
21	Yasmin Raihana	Kuningan, 15 Mei 2024	P	Dinas Sosial Kabupaten Kuningan	03/06/2024	14/10/2024	PA melalui LPA (SGRAB)
22	Arafah Az Zahra	Bekasi, 12 Mei 2024	P	Dinas Sosial Kota Bekasi	12/06/2024	25/10/2024	PA melalui LPA (SGRAB)
23	Muhammad Hanif Ibrahim	Bogor, 07 Juni 2024	L	Dinas Sosial Kabupaten Bogor	08/07/2024	20/12/2024	PA melalui LPA (SGRAB)
24	Ghaitsani Arlo Faiqurrahman	Depok, 03 Februari 2024	L	Dinas Sosial Kota Depok	06/06/2024	31/12/2024	PA melalui LPA (SGRAB)

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan data di atas sepanjang tahun 2024, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) melalui dukungan dari Subdit Rehabilitasi Sosial Anak telah melaksanakan fasilitasi proses pengangkatan anak (adopsi) secara hukum kepada orang tua angkat yang memenuhi syarat. Fasilitasi ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Seluruh proses berjalan dalam koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang merujuk, yang tersebar di berbagai wilayah seperti Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bandung, dan beberapa daerah lainnya. Dari data yang dihimpun, terdapat 24 anak yang telah berhasil difasilitasi

pengangkatannya secara sah oleh LPA (SGRAB) selama periode tersebut. Dari jumlah tersebut, 13 anak berjenis kelamin perempuan dan 11 anak laki-laki. Sebagian besar anak yang difasilitasi berada pada rentang usia 0 hingga 1 tahun saat masuk layanan, memperlihatkan pentingnya proses adopsi sejak usia dini demi mendukung keterikatan emosional yang kuat antara anak dan orang tua angkat. Proses ini melibatkan berbagai tahapan penting, mulai dari asesmen awal, pengasuhan sementara melalui sistem foster care, hingga pelaksanaan sidang penetapan adopsi di pengadilan.

Salah satu tahapan penting dalam proses ini adalah pelaksanaan Sidang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA), yang menjadi forum krusial dalam menilai kelayakan calon orang tua angkat. Sidang PIPA diadakan secara berkala dan dihadiri oleh unsur lintas sektor seperti Dinas Sosial, psikolog, LPA, unsur hukum, dan lembaga pendamping. Dalam sidang ini, dilakukan verifikasi administratif dan wawancara mendalam untuk memastikan bahwa calon orang tua angkat memenuhi syarat secara moral, sosial, psikologis, dan hukum. Rekomendasi dari sidang PIPA menjadi dasar pertimbangan penting dalam mengajukan permohonan penetapan adopsi ke pengadilan negeri setempat. Rata-rata lama proses fasilitasi dari awal anak masuk hingga dikeluarkannya keputusan pengangkatan berkisar antara 9 hingga 12 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa proses adopsi dilakukan secara cermat dan menyeluruh, guna memastikan perlindungan terbaik bagi anak. Hampir seluruh proses pengangkatan anak dilakukan melalui mekanisme resmi berupa Penetapan Adopsi (PA) melalui pengadilan, sedangkan satu kasus melalui pola postercare sebagai bentuk pengasuhan sementara.

Keberhasilan pelaksanaan program ini tidak hanya menunjukkan keseriusan lembaga dalam memastikan hak anak atas pengasuhan dan kasih sayang keluarga, tetapi juga mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat. Dengan adanya fasilitasi adopsi yang aman dan legal, anak-anak yang tidak diasuh oleh orang tua kandung mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh cinta, aman, dan mendukung tumbuh kembangnya secara optimal.

BAB 6

KESIMPULAN

Perencanaan pembangunan daerah tidak dapat terlepas dari aspek kependudukan. Penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Sebagai subjek, karena para perencana, pengambil keputusan, dan pelaksana pembangunan adalah bagian dari penduduk itu sendiri. Sebagai objek, karena hasil dari pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk. Oleh karena itu, data kependudukan yang akurat menjadi syarat mutlak dalam proses perencanaan pembangunan. Kesalahan data dapat menyebabkan ketidakakuratan program, ketidaktepatan sasaran, bahkan ketidakpastian arah pembangunan.

Berdasarkan data perkembangan kependudukan Provinsi Jawa Barat tahun 2024, jumlah penduduk tercatat sebanyak 51.316.378 jiwa, terdiri dari 25.997.794 laki-laki (50,66%) dan 25.318.584 perempuan (49,34%). Jika ditinjau dari struktur umur, penduduk dikelompokkan menjadi:

- Usia muda (0–14 tahun): 12.577.476 jiwa atau 24,52% dari total penduduk.
- Usia produktif (15–64 tahun): 35.134.643 jiwa atau 68,46% dari total penduduk.
- Usia lanjut (65 tahun ke atas): 3.604.259 jiwa atau 7,02% dari total penduduk.

Dominasi kelompok usia produktif menandakan bahwa Jawa Barat sedang memasuki bonus demografi, yaitu kondisi di mana proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif. Bonus demografi adalah peluang untuk mencapai kemakmuran ekonomi, tetapi peluang ini tidak akan otomatis menjadi dividen ekonomi jika tidak diikuti dengan kebijakan terpadu di sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pembangunan keluarga.

Struktur penduduk ini merupakan proses alami akibat transisi demografi yang akan dialami semua negara. Potensi bonus demografi pada dasarnya tidak akan pernah hilang selama masih ada penduduk, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, peluang ini bisa menjadi bencana demografi. Jawa Barat perlu memperkuat kualitas pendidikan, mempercepat peningkatan keterampilan tenaga kerja, memperbaiki layanan kesehatan, dan menciptakan lapangan kerja yang memadai. Selain itu, tantangan ke depan adalah mempersiapkan generasi muda hari ini menjadi lansia tangguh, mandiri, dan produktif dalam menghadapi era "silver generation" dalam 20–30 tahun mendatang.

Untuk itu, diperlukan arus utama (mainstreaming) konsep bonus demografi ke dalam semua proses perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan daerah. Kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dalam karir dan kehidupan keluarga juga perlu diperkuat, agar perempuan dapat berkontribusi penuh dalam pembangunan tanpa hambatan struktural. Selain itu, kajian dan penelitian tentang bonus demografi perlu dilakukan secara bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan untuk memastikan arah kebijakan tetap relevan dengan

perubahan dinamika penduduk. Perbedaan Metode Perhitungan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Dalam mengukur LPP, terdapat perbedaan metode antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Jawa Barat dan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat:

- Disdukcapil Jabar menghitung LPP berdasarkan data administrasi kependudukan (data perekaman dan pencatatan di Dukcapil, berbasis NIK/KK), yang lebih bersifat administratif dan real-time, tetapi bisa dipengaruhi oleh peristiwa administratif seperti mutasi penduduk.
- BPS Jabar menghitung LPP menggunakan metode sensus, survei, dan estimasi demografis (dengan rumus pertumbuhan eksponensial), yang mengutamakan prinsip statistik dan memperhitungkan faktor kelahiran, kematian, dan migrasi secara agregat, dengan interval waktu tertentu (biasanya tahunan atau sepuluh tahunan).

Perbedaan pendekatan ini membuat angka LPP dari Disdukcapil cenderung lebih dinamis, sedangkan LPP dari BPS lebih stabil untuk analisis tren jangka panjang. Berdasarkan data Disdukcapil, LPP Jawa Barat menunjukkan tren meningkat, dari 1,26% pada tahun 2016 menjadi 1,93% pada tahun 2024. Peningkatan ini menjadi sinyal perlunya penguatan pelayanan dasar, pengendalian migrasi, dan pengelolaan pertumbuhan wilayah perkotaan dan pedesaan.

Dengan langkah-langkah strategis yang terencana, pemanfaatan potensi bonus demografi (windows of opportunity) di Jawa Barat dapat menjadi momentum emas untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Jawa Barat perlu terus berinovasi dalam kebijakan kependudukan agar mampu mengubah peluang demografi ini menjadi dividen pembangunan nyata bagi masa depan yang lebih baik.

Sebagai penutup, optimalisasi bonus demografi di Provinsi Jawa Barat memerlukan pendekatan yang sistematis, terintegrasi, dan berbasis data. Investasi pada penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan keluarga menjadi kunci utama dalam mengubah potensi demografi menjadi keuntungan pembangunan yang nyata. Kolaborasi lintas sektor, keberlanjutan program, serta inovasi kebijakan yang adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi akan menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat Jawa Barat yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi. Dengan demikian, Jawa Barat tidak hanya mampu memanfaatkan jendela peluang demografi, tetapi juga membangun ketahanan sosial ekonomi yang berkelanjutan untuk menghadapi tantangan global di masa mendatang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat

(022) 2031044

Jl. Ciumbuleuit No.2, Kota Bandung, Jawa Barat 40131

disdukcapil.jabarprov.go.id